



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 441, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 239);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 244);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;

- b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - f. Laporan perubahan ekuitas;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 902.175.682.605,43
b. Belanja	<u>Rp. 987.618.609.570,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (85.442.926.964,57)
c. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 116.353.065.754,87
b. Pengeluaran	<u>Rp. 1.476.308.222,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 114.876.757.532,87

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 12.077.874.335,57
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 914.253.556.941,00
b. Realisasi	<u>Rp. 902.175.682.605,43</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. 12.077.874.335,57
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 46.649.939.364,00
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.034.268.548.934,00
---------------------------------------	--------------------------

b. Realisasi	Rp. <u>987.618.609.570,00</u>	
Selisih lebih/kurang	Rp. 46.649.939.364,00	
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah		Rp.
34.572.065.028,43 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.(120.014.991.993,00)	
b. Realisasi	Rp. <u>(85.442.926.964,57)</u>	
Selisih lebih/kurang	Rp. 34.572.065.028,43	
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah		Rp.
5.138.234.460,13 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran penerimaan setelah perubahan	Rp. 121.491.300.215,00	
b. Realisasi	Rp. <u>116.353.065.754,87</u>	
Selisih lebih/kurang	Rp. 5.138.234.460,13	
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah		Rp.
0,00, dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pengeluaran setelah perubahan	Rp 1.476.308.222,00	
b. Realisasi	<u>Rp.1.476.308.222,00</u>	
Selisih lebih/kurang	Rp. 0,00	
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah		Rp.
(5.138.234.460,13) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pembiayaan netto		
setelah perubahan	Rp. 120.014.991.993,00	
b. Realisasi	Rp. <u>114.876.757.532,87</u>	
Selisih lebih/kurang	Rp. 5.138.234.460,13	

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah asset	Rp. 1.470.066.352.160,26
b. Jumlah kewajiban	Rp. 160.750.421.071,95
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 1.309.315.931.088,31

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2022	Rp.	75.803.454.785,92
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp.	100.829.013.250,43
c. Arus Kas dari aktivitas investasi	Rp.	(186.271.940.215,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	39.216.174.319,00
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris	Rp.	(55.617.638,05)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2022	Rp.	29.521.084.502,30

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO	Rp.	856.948.229.835,91
b. Beban	Rp.	885.395.856.935,05
c. Surplus/defisit dari operasi	Rp.	(28.447.627.099,14)
d. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp.	259.769.333,01
e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp.	(28.187.857.766,13)
f. Surplus/defisit dari pos luar biasa	Rp.	(2.310.621.929,00)
g. Surplus/defisit - LO	Rp.	(30.498.479.695,13)

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	75.660.583.213,87
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp.	75.660.583.213,87
c. sub total	Rp.	0,00
d. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Rp.	29.433.830.568,30
e. sub total	Rp.	29.433.830.568,30
f. koreksi kesalahan, pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	0,00

g. lain-lain	Rp.	0,00
h. saldo anggaran lebih akhir	Rp.	29.433.830.568,30

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp.	1.344.619.410.796,12
b. surplus/defisit – LO	Rp.	(30.498.479.695,13)
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	0,00
d. Koreksi ekuitas lainnya	Rp.	(4.805.000.012,68)
e. ekuitas akhir	Rp.	1.309.315.931.088,31

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;

- 2) Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Lampiran III : Laporan Operasional;
- 4) Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- 5) Lampiran V : Neraca;
- 6) Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- 7) Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- 8) Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- 9) Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- 10) Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- 11) Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- 12) Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 13) Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- 14) Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- 15) Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- 16) Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- 17) Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- 18) Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- 19) Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- 20) Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 28 Juli 2023

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO (4/10/2023)



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref.	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
a	b	c	d	e = (d / c) x 100	f
PENDAPATAN - LRA	5.1.4	914.253.556.941,00	902.175.682.605,43	98,68	898.490.260.677,79
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.4.1	75.662.553.685,00	65.049.926.012,43	85,97	71.987.067.694,19
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.4.1.1	14.596.737.492,00	13.369.109.447,00	91,59	11.488.765.524,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.4.1.2	8.701.719.400,00	5.342.733.160,00	61,40	4.908.487.715,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	5.1.4.1.3	3.800.000.000,00	2.187.716.093,00	57,57	2.533.990.978,00
Lain-Lain PAD yang Sah - LRA	5.1.4.1.4	48.564.096.793,00	44.150.367.312,43	90,91	53.055.823.477,19
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.4.2	821.560.420.000,00	823.124.340.181,00	100,19	804.350.112.053,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA	5.1.4.2.1	688.189.961.000,00	674.354.965.234,00	97,99	641.578.017.274,00
Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.4.2.1.1	8.797.309.000,00	10.839.678.800,00	123,22	11.930.995.048,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.1.4.2.1.2	2.496.419.000,00	3.056.208.249,00	122,42	1.997.106.047,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.4.2.1.3	481.613.630.000,00	481.613.630.000,00	100,00	480.667.451.199,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	5.1.4.2.1.4	195.282.603.000,00	178.845.450.185,00	91,58	146.982.464.980,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	5.1.4.2.2	98.370.459.000,00	121.098.269.368,00	123,10	132.407.777.000,00
Dana Penyesuaian - LRA	5.1.4.2.2.1	98.370.459.000,00	121.098.269.368,00	123,10	132.407.777.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.4.2.3	35.000.000.000,00	27.671.105.579,00	79,06	30.364.317.779,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.4.2.3.1	35.000.000.000,00	27.671.105.579,00	79,06	30.364.317.779,00
Bantuan Keuangan - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.1.4.3	17.030.583.256,00	14.001.416.412,00	82,21	22.153.080.930,60
Pendapatan Hibah - LRA	5.1.4.3.1	8.172.770.500,00	7.446.360.000,00	91,11	22.153.080.930,60
Pendapatan Lainnya - LRA	5.1.4.3.2	8.857.812.756,00	6.555.056.412,00	74,00	0,00
BELANJA	5.1.5	897.851.056.985,00	852.373.208.844,00	94,93	796.311.863.390,07
BELANJA OPERASI	5.1.5.1	695.643.369.308,00	664.637.687.600,00	95,54	626.463.475.903,00
Belanja Pegawai	5.1.5.1.1	342.680.688.283,00	335.295.778.425,00	97,84	324.149.115.918,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.5.1.2	316.506.413.235,00	295.216.672.900,00	93,27	280.276.842.141,00
Belanja Bunga	5.1.5.1.3	8.803.650.011,00	8.657.232.105,00	98,34	0,00
Belanja Hibah	5.1.5.1.4	24.126.101.779,00	22.075.065.344,00	91,50	22.037.517.844,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.5.1.5	3.526.516.000,00	3.392.938.826,00	96,21	0,00
BELANJA MODAL	5.1.5.2	199.945.644.297,00	186.544.899.315,00	93,30	168.702.375.987,07
Belanja Tanah	5.1.5.2.1	515.000.000,00	463.206.040,00	89,94	1.794.239.480,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.5.2.2	19.082.821.438,00	16.835.630.223,00	88,22	33.956.246.346,00
Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.5.2.3	16.183.370.982,00	15.219.635.271,00	94,04	38.810.503.312,07
Belanja Jalan, Ingasi dan Jaringan	5.1.5.2.4	161.637.257.401,00	151.716.799.542,00	93,86	92.114.814.951,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.5.2.5	2.462.194.476,00	2.244.915.239,00	91,18	2.026.571.898,00
Belanja Aset Lainnya	5.1.5.2.6	65.000.000,00	64.713.000,00	99,56	0,00
BELANJA TAK TERDUGA		2.262.043.380,00	1.190.621.929,00	52,63	1.146.011.500,00
Belanja Tak Terduga	5.1.5.3	2.262.043.380,00	1.190.621.929,00	52,63	1.146.011.500,00
TRANSFER	5.1.6	136.417.491.949,00	135.245.400.726,00	99,14	145.017.506.853,00
TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.6.1	2.306.446.449,00	2.306.446.442,00	100,00	145.017.506.853,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		1.459.673.749,00	1.459.673.742,00	100,00	1.058.629.825,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		846.772.700,00	846.772.700,00	100,00	713.500.646,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.6.2	134.111.045.500,00	132.938.954.284,00	99,13	143.245.376.382,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		134.111.045.500,00	132.938.954.284,00	99,13	143.245.376.382,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(120.014.991.993,00)	(85.442.926.964,57)	71,19	(42.839.109.565,28)
PEMBIAYAAN	5.1.7	120.014.991.993,00	114.876.757.532,87	95,72	118.499.692.779,15
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.7.1	121.491.300.215,00	116.353.065.754,87	95,77	118.782.315.534,15
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)		75.660.583.213,00	75.660.583.213,87	100,00	11.843.975.866,15
Penerimaan Pinjaman Daerah		45.830.717.002,00	40.692.482.541,00	88,79	106.938.339.668,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.7.2	1.476.308.222,00	1.476.308.222,00	100,00	282.622.755,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		1.476.308.222,00	1.476.308.222,00	100,00	282.622.755,00
PEMBIAYAAN NETTO		120.014.991.993,00	114.876.757.532,87	95,72	118.499.692.779,15
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.8	0,00	29.433.830.568,30		75.660.583.213,87

BUPATI POHUWATO



SAIPUL A. MBUINGA



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	914.253.556.941,00	902.175.682.605,43	(12.077.874.335,57)	98,68
4.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	43.822.115.393,00	42.436.115.032,00	(1.386.000.361,00)	96,84
4.1.01	PENDIDIKAN	0,00	361.886.250,00	361.886.250,00	0
4.1.01.1-01.0-00.0-00.01	Dinas Pendidikan	0,00	361.886.250,00	361.886.250,00	0
4.1.02	KESEHATAN	42.207.155.393,00	41.108.626.220,00	(1.098.529.173,00)	97,40
4.1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	1.500.000.000,00	1.899.307.437,00	399.307.437,00	126,62
4.1.02.1-02.0-00.0-00.02	Rumah Sakit Umum Daerah	40.707.155.393,00	39.209.318.783,00	(1.497.836.610,00)	96,32
4.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.350.000.000,00	724.192.462,00	(625.807.538,00)	53,64
4.1.03.1-03.0-00.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.350.000.000,00	724.192.462,00	(625.807.538,00)	53,64
4.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	264.960.000,00	241.410.100,00	(23.549.900,00)	91,11
4.1.04.1-04.2-10.0-00.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	264.960.000,00	241.410.100,00	(23.549.900,00)	91,11
4.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.107.000.000,00	1.021.020.283,00	(85.979.717,00)	92,23
4.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000,00	52.500.000,00	2.500.000,00	105,00
4.2.11.2-11.3-28.0-00.01	Dinas Lingkungan Hidup	50.000.000,00	52.500.000,00	2.500.000,00	105,00
4.2.15	PERHUBUNGAN	825.000.000,00	756.420.500,00	(68.579.500,00)	91,69
4.2.15.2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan	825.000.000,00	756.420.500,00	(68.579.500,00)	91,69
4.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	82.000.000,00	79.902.783,00	(2.097.217,00)	97,44
4.2.16.2-16.2-21.2-20.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	82.000.000,00	79.902.783,00	(2.097.217,00)	97,44
4.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	150.000.000,00	132.197.000,00	(17.803.000,00)	88,13
4.2.19.2-19.3-26.2-22.01	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	150.000.000,00	132.197.000,00	(17.803.000,00)	88,13
4.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4.744.719.400,00	1.709.945.715,00	(3.034.773.685,00)	36,04
4.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.750.000.000,00	754.206.500,00	(1.995.793.500,00)	27,43
4.3.25.3-25.0-00.0-00.01	Dinas Perikanan	2.750.000.000,00	754.206.500,00	(1.995.793.500,00)	27,43
4.3.27	PERTANIAN	1.252.959.400,00	229.690.000,00	(1.023.269.400,00)	18,33
4.3.27.3-27.0-00.0-00.01	Dinas Pertanian	1.252.959.400,00	229.690.000,00	(1.023.269.400,00)	18,33
4.3.31	PERINDUSTRIAN	741.760.000,00	726.049.215,00	(15.710.785,00)	97,88
4.3.31.3-31.2-17.3-30.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	741.760.000,00	726.049.215,00	(15.710.785,00)	97,88
4.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	864.579.722.148,00	857.008.601.575,43	(7.571.120.572,57)	99,12
4.5.02	KEUANGAN	864.579.722.148,00	857.008.601.575,43	(7.571.120.572,57)	99,12
4.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Keuangan Daerah	864.579.722.148,00	857.008.601.575,43	(7.571.120.572,57)	99,12
5	BELANJA DAERAH	1.034.268.548.934,00	987.618.609.570,00	(46.649.939.364,00)	95,49



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	588.804.839.984,00	556.896.138.953,00	(31.908.701.031,00)	94,58
5.1.01	PENDIDIKAN	207.531.414.744,00	197.719.774.556,00	(9.811.640.188,00)	95,27
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01	Dinas Pendidikan	207.531.414.744,00	197.719.774.556,00	(9.811.640.188,00)	95,27
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	187.624.893.890,00	179.527.048.519,00	(8.097.845.371,00)	95,68
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	149.041.488.192,00	144.736.994.407,00	(4.304.493.785,00)	97,11
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.647.705.698,00	26.731.034.746,00	(1.916.670.952,00)	93,31
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	9.635.700.000,00	7.759.363.100,00	(1.876.336.900,00)	80,53
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	300.000.000,00	299.656.266,00	(343.734,00)	99,89
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	19.906.520.854,00	18.192.726.037,00	(1.713.794.817,00)	91,39
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.753.926.315,00	6.819.369.274,00	(934.557.041,00)	87,95
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.690.400.063,00	9.128.441.524,00	(561.958.539,00)	94,20
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.462.194.476,00	2.244.915.239,00	(217.279.237,00)	91,18
5.1.02	KESEHATAN	169.980.407.036,00	160.516.405.300,00	(9.464.001.736,00)	94,43
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	96.682.692.023,00	85.573.937.700,00	(11.108.754.323,00)	88,51
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	92.675.155.760,00	81.882.860.599,00	(10.792.295.161,00)	88,35
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	34.112.580.287,00	33.779.952.796,00	(332.627.491,00)	99,02
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.012.575.473,00	47.552.907.803,00	(10.459.667.670,00)	81,97
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	4.007.536.263,00	3.691.077.101,00	(316.459.162,00)	92,10
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah	465.000.000,00	462.500.000,00	(2.500.000,00)	99,46
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.573.583.430,00	2.284.055.699,00	(289.527.731,00)	88,75
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	915.761.013,00	912.207.402,00	(3.553.611,00)	99,61
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.191.820,00	32.314.000,00	(20.877.820,00)	60,75
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02	Rumah Sakit Umum Daerah	77.995.250.001,00	74.942.467.600,00	(3.052.782.401,00)	96,09
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	75.832.797.201,00	73.686.784.219,00	(2.146.012.982,00)	97,17
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	12.532.525.205,00	12.445.731.674,00	(86.793.531,00)	99,31
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.300.271.996,00	61.241.052.545,00	(2.059.219.451,00)	96,75
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	2.162.452.800,00	1.255.683.381,00	(906.769.419,00)	58,07
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.918.082.900,00	1.011.313.481,00	(906.769.419,00)	52,73
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.914.704,00	166.914.704,00	0,00	100,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.455.196,00	77.455.196,00	0,00	100,00
5.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	179.050.332.731,00	168.565.360.638,00	(10.484.972.093,00)	94,14
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	179.050.332.731,00	168.565.360.638,00	(10.484.972.093,00)	94,14
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	17.028.594.779,00	16.370.993.409,00	(657.601.370,00)	96,14
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.084.717.410,00	4.026.623.378,00	(58.094.032,00)	98,58
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.929.177.834,00	12.344.370.031,00	(584.807.803,00)	95,48
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	14.699.535,00	0,00	(14.699.535,00)	0
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	162.021.737.952,00	152.194.367.229,00	(9.827.370.723,00)	93,93
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	891.665.000,00	859.949.200,00	(31.715.800,00)	96,44
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.589.761.836,00	1.490.483.917,00	(99.277.919,00)	93,76



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	159.540.311.116,00	149.843.934.112,00	(9.696.377.004,00)	93,92
5.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.936.130.148,00	11.931.027.530,00	(2.005.102.618,00)	85,61
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	13.936.130.148,00	11.931.027.530,00	(2.005.102.618,00)	85,61
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	13.886.130.148,00	11.930.321.490,00	(1.955.808.658,00)	85,92
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.065.755.475,00	2.996.228.092,00	(69.527.383,00)	97,73
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.820.374.673,00	8.934.093.398,00	(1.886.281.275,00)	82,57
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	706.040,00	(49.293.960,00)	1,41
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah	50.000.000,00	706.040,00	(49.293.960,00)	1,41
5.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.038.956.213,00	9.960.386.532,00	(78.569.681,00)	99,22
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01	Satuan Polisi Pamong Praja	6.322.163.462,00	6.278.035.617,00	(44.127.845,00)	99,30
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.322.163.462,00	6.278.035.617,00	(44.127.845,00)	99,30
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.786.163.448,00	2.777.374.742,00	(8.788.706,00)	99,68
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.536.000.014,00	3.500.660.875,00	(35.339.139,00)	99,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.716.792.751,00	3.682.350.915,00	(34.441.836,00)	99,07
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	3.716.792.751,00	3.682.350.915,00	(34.441.836,00)	99,07
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	2.657.233.381,00	2.636.750.616,00	(20.482.765,00)	99,23
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.059.559.370,00	1.045.600.299,00	(13.959.071,00)	98,68
5.1.06	SOSIAL	8.267.599.112,00	8.203.184.397,00	(64.414.715,00)	99,22
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01	Dinas Sosial	8.267.599.112,00	8.203.184.397,00	(64.414.715,00)	99,22
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	8.267.599.112,00	8.203.184.397,00	(64.414.715,00)	99,22
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.344.947.416,00	3.336.177.922,00	(8.769.494,00)	99,74
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.322.651.696,00	4.267.006.475,00	(55.645.221,00)	98,71
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	73.708.087.601,00	71.885.097.154,00	(1.822.990.447,00)	97,53
5.2.07	TENAGA KERJA	4.062.285.543,00	4.034.914.240,00	(27.371.303,00)	99,33
5.2.07.2-07.3-32.0-00.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.062.285.543,00	4.034.914.240,00	(27.371.303,00)	99,33
5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.037.480.343,00	4.010.161.240,00	(27.319.103,00)	99,32
5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.851.646.294,00	2.844.524.063,00	(7.122.231,00)	99,75
5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.185.834.049,00	1.165.637.177,00	(20.196.872,00)	98,30
5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.2	BELANJA MODAL	24.805.200,00	24.753.000,00	(52.200,00)	99,79
5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.805.200,00	24.753.000,00	(52.200,00)	99,79
5.2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.776.786.230,00	10.065.098.907,00	(711.687.323,00)	93,40
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.776.786.230,00	10.065.098.907,00	(711.687.323,00)	93,40
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	10.142.230.893,00	9.455.500.907,00	(686.729.986,00)	93,23
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.865.583.809,00	2.839.225.473,00	(26.358.336,00)	99,08
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.576.647.084,00	5.916.275.434,00	(660.371.650,00)	89,96
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	100,00
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2	BELANJA MODAL	634.555.337,00	609.598.000,00	(24.957.337,00)	96,07
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	545.483.500,00	520.528.000,00	(24.955.500,00)	95,43



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89.071.837,00	89.070.000,00	(1.837,00)	100,00
5.2.09	PANGAN	6.624.590.811,00	6.443.453.145,00	(181.137.666,00)	97,27
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01	Dinas Pangan	6.624.590.811,00	6.443.453.145,00	(181.137.666,00)	97,27
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.624.590.811,00	6.443.453.145,00	(181.137.666,00)	97,27
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.140.815.145,00	3.113.100.959,00	(27.714.186,00)	99,12
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.111.275.666,00	2.006.602.186,00	(104.673.480,00)	95,04
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.372.500.000,00	1.323.750.000,00	(48.750.000,00)	96,45
5.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	8.172.548.132,00	8.098.657.726,00	(73.890.406,00)	99,10
5.2.11.2-11.3-28.0-00.01	Dinas Lingkungan Hidup	8.172.548.132,00	8.098.657.726,00	(73.890.406,00)	99,10
5.2.11.2-11.3-28.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	8.172.548.132,00	8.098.657.726,00	(73.890.406,00)	99,10
5.2.11.2-11.3-28.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.718.756.454,00	2.726.579.080,00	7.822.626,00	100,29
5.2.11.2-11.3-28.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.403.791.678,00	5.322.078.646,00	(81.713.032,00)	98,49
5.2.11.2-11.3-28.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
5.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.644.091.741,00	4.607.924.474,00	(36.167.267,00)	99,22
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.644.091.741,00	4.607.924.474,00	(36.167.267,00)	99,22
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.637.091.741,00	4.600.931.474,00	(36.160.267,00)	99,22
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.046.811.588,00	3.021.472.254,00	(25.339.334,00)	99,17
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.590.280.153,00	1.579.459.220,00	(10.820.933,00)	99,32
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	7.000.000,00	6.993.000,00	(7.000,00)	99,90
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	6.993.000,00	(7.000,00)	99,90
5.2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.714.707.045,00	6.662.430.902,00	(52.276.143,00)	99,22
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.714.707.045,00	6.662.430.902,00	(52.276.143,00)	99,22
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.714.707.045,00	6.662.430.902,00	(52.276.143,00)	99,22
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.680.207.156,00	2.695.055.404,00	14.848.248,00	100,55
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.034.499.889,00	3.967.375.498,00	(67.124.391,00)	98,34
5.2.15	PERHUBUNGAN	6.542.229.001,00	6.373.653.166,00	(168.575.835,00)	97,42
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan	6.542.229.001,00	6.373.653.166,00	(168.575.835,00)	97,42
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	5.883.466.626,00	5.725.458.917,00	(158.007.709,00)	97,31
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.115.372.783,00	3.075.332.133,00	(40.040.650,00)	98,71
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.768.093.843,00	2.650.126.784,00	(117.967.059,00)	95,74
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	658.762.375,00	648.194.249,00	(10.568.126,00)	98,40
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.564.260,00	147.641.491,00	(9.922.769,00)	93,70
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	322.300.000,00	321.654.643,00	(645.357,00)	99,80
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	178.898.115,00	178.898.115,00	0,00	100,00
5.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	7.928.227.447,00	7.825.040.112,00	(103.187.335,00)	98,70
5.2.16.2-16.2-21.2-20.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7.928.227.447,00	7.825.040.112,00	(103.187.335,00)	98,70
5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.1	BELANJA OPERASI	7.728.227.447,00	7.625.445.112,00	(102.782.335,00)	98,67
5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.1.01	Belanja Pegawai	2.541.552.791,00	2.512.600.599,00	(28.952.192,00)	98,86
5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.011.674.656,00	4.937.844.513,00	(73.830.143,00)	98,53
5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.1.05	Belanja Hibah	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	100,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.595.000,00	(405.000,00)	99,80
5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	199.595.000,00	(405.000,00)	99,80
5.2.18	PENANAMAN MODAL	4.121.275.952,00	4.021.631.467,00	(99.644.485,00)	97,58
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01	Dinas Penanaman Modal	4.121.275.952,00	4.021.631.467,00	(99.644.485,00)	97,58
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.007.675.952,00	3.911.007.967,00	(96.667.985,00)	97,59
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.569.829.853,00	2.528.590.621,00	(41.239.232,00)	98,40
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.437.846.099,00	1.382.417.346,00	(55.428.753,00)	96,15
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	113.600.000,00	110.623.500,00	(2.976.500,00)	97,38
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.600.000,00	45.910.500,00	(2.689.500,00)	94,47
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	65.000.000,00	64.713.000,00	(287.000,00)	99,56
5.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.509.349.925,00	9.197.740.353,00	(311.609.572,00)	96,72
5.2.19.2-19.3-26.2-22.01	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	9.509.349.925,00	9.197.740.353,00	(311.609.572,00)	96,72
5.2.19.2-19.3-26.2-22.01.1	BELANJA OPERASI	9.503.264.925,00	9.191.655.353,00	(311.609.572,00)	96,72
5.2.19.2-19.3-26.2-22.01.1.01	Belanja Pegawai	3.294.295.349,00	3.187.298.921,00	(106.996.428,00)	96,75
5.2.19.2-19.3-26.2-22.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.258.969.576,00	3.199.356.432,00	(59.613.144,00)	98,17
5.2.19.2-19.3-26.2-22.01.1.05	Belanja Hibah	2.950.000.000,00	2.805.000.000,00	(145.000.000,00)	95,08
5.2.19.2-19.3-26.2-22.01.2	BELANJA MODAL	6.085.000,00	6.085.000,00	0,00	100,00
5.2.19.2-19.3-26.2-22.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.085.000,00	6.085.000,00	0,00	100,00
5.2.23	PERPUSTAKAAN	4.611.995.774,00	4.554.552.662,00	(57.443.112,00)	98,75
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.611.995.774,00	4.554.552.662,00	(57.443.112,00)	98,75
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.885.768.692,00	3.829.028.130,00	(56.740.562,00)	98,54
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.987.190.922,00	2.938.539.239,00	(48.651.683,00)	98,37
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	898.577.770,00	890.488.891,00	(8.088.879,00)	99,10
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2	BELANJA MODAL	726.227.082,00	725.524.532,00	(702.550,00)	99,90
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	507.691.000,00	506.988.450,00	(702.550,00)	99,86
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	218.536.082,00	218.536.082,00	0,00	100,00
5.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	56.254.306.878,00	54.820.721.080,00	(1.433.585.798,00)	97,45
5.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.465.481.824,00	11.186.859.674,00	(278.622.150,00)	97,57
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01	Dinas Perikanan	11.465.481.824,00	11.186.859.674,00	(278.622.150,00)	97,57
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	11.090.223.224,00	10.811.978.674,00	(278.244.550,00)	97,49
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.329.846.978,00	3.318.752.782,00	(11.094.196,00)	99,67
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.690.376.246,00	7.423.225.932,00	(267.150.314,00)	96,53
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	70.000.000,00	69.999.960,00	(40,00)	100,00
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	375.258.600,00	374.881.000,00	(377.600,00)	99,90
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.758.600,00	136.517.000,00	(241.600,00)	99,82
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	238.500.000,00	238.364.000,00	(136.000,00)	99,94
5.3.27	PERTANIAN	37.713.959.301,00	36.642.811.331,00	(1.071.147.970,00)	97,16
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01	Dinas Pertanian	37.713.959.301,00	36.642.811.331,00	(1.071.147.970,00)	97,16
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	32.022.746.019,00	31.256.639.971,00	(766.106.048,00)	97,61
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	14.215.487.997,00	14.118.412.990,00	(97.075.007,00)	99,32



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.457.258.022,00	16.788.226.981,00	(669.031.041,00)	96,17
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	5.691.213.282,00	5.386.171.360,00	(305.041.922,00)	94,64
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.777.722.128,00	1.772.570.878,00	(5.151.250,00)	99,71
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.691.090.000,00	2.393.448.975,00	(297.641.025,00)	88,94
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.222.401.154,00	1.220.151.507,00	(2.249.647,00)	99,82
5.3.31	PERINDUSTRIAN	7.074.865.753,00	6.991.050.075,00	(83.815.678,00)	98,82
5.3.31.3-31.2-17.3-30.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.074.865.753,00	6.991.050.075,00	(83.815.678,00)	98,82
5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.1	BELANJA OPERASI	7.051.074.956,00	6.967.259.278,00	(83.815.678,00)	98,81
5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.1.01	Belanja Pegawai	3.080.010.793,00	3.034.950.743,00	(45.060.050,00)	98,54
5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.961.064.163,00	3.922.308.535,00	(38.755.628,00)	99,02
5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.1.05	Belanja Hibah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.2	BELANJA MODAL	23.790.797,00	23.790.797,00	0,00	100,00
5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.790.797,00	23.790.797,00	0,00	100,00
5.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	76.678.911.231,00	75.887.225.056,00	(791.686.175,00)	98,97
5.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	40.832.795.367,00	40.081.055.109,00	(751.740.258,00)	98,16
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01	Sekretariat Daerah	40.832.795.367,00	40.081.055.109,00	(751.740.258,00)	98,16
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	38.849.789.762,00	38.121.439.609,00	(728.350.153,00)	98,13
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	11.346.439.929,00	11.254.127.171,00	(92.312.758,00)	99,19
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.126.563.833,00	19.590.009.838,00	(536.553.995,00)	97,33
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	6.123.520.000,00	6.108.520.000,00	(15.000.000,00)	99,76
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.253.266.000,00	1.168.782.600,00	(84.483.400,00)	93,26
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.983.005.605,00	1.959.615.500,00	(23.390.105,00)	98,82
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.983.005.605,00	1.959.615.500,00	(23.390.105,00)	98,82
5.4.02	SEKRETARIAT DPRD	35.846.115.864,00	35.806.169.947,00	(39.945.917,00)	99,89
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01	Sekretariat DPRD	35.846.115.864,00	35.806.169.947,00	(39.945.917,00)	99,89
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	35.782.798.864,00	35.744.169.947,00	(38.628.917,00)	99,89
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	15.231.669.995,00	15.207.597.711,00	(24.072.284,00)	99,84
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.551.128.869,00	20.536.572.236,00	(14.556.633,00)	99,93
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	63.317.000,00	62.000.000,00	(1.317.000,00)	97,92
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.317.000,00	62.000.000,00	(1.317.000,00)	97,92
5.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	179.013.111.860,00	174.567.314.459,00	(4.445.797.401,00)	97,52
5.5.01	PERENCANAAN	5.003.270.920,00	4.872.637.599,00	(130.633.321,00)	97,39
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	5.003.270.920,00	4.872.637.599,00	(130.633.321,00)	97,39
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.989.653.620,00	4.859.137.599,00	(130.516.021,00)	97,38
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.860.314.420,00	2.838.487.132,00	(21.827.288,00)	99,24
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.129.339.200,00	2.020.650.467,00	(108.688.733,00)	94,90
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2	BELANJA MODAL	13.617.300,00	13.500.000,00	(117.300,00)	99,14
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.617.300,00	13.500.000,00	(117.300,00)	99,14
5.5.02	KEUANGAN	168.204.037.781,00	164.012.576.382,00	(4.191.461.399,00)	97,51



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Keuangan Daerah	168.204.037.781,00	164.012.576.382,00	(4.191.461.399,00)	97,51
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	28.774.780.452,00	27.489.193.727,00	(1.285.586.725,00)	95,53
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	9.825.644.334,00	8.989.901.029,00	(835.743.305,00)	91,49
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.145.486.107,00	9.842.060.593,00	(303.425.514,00)	97,01
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.03	Belanja Bunga	8.803.650.011,00	8.657.232.105,00	(146.417.906,00)	98,34
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	99.722.000,00	87.360.000,00	(12.362.000,00)	87,60
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.722.000,00	87.360.000,00	(12.362.000,00)	87,60
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.912.043.380,00	1.190.621.929,00	(1.721.421.451,00)	40,89
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.912.043.380,00	1.190.621.929,00	(1.721.421.451,00)	40,89
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4	BELANJA TRANSFER	136.417.491.949,00	135.245.400.726,00	(1.172.091.223,00)	99,14
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.306.446.449,00	2.306.446.442,00	(7,00)	100,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	134.111.045.500,00	132.938.954.284,00	(1.172.091.216,00)	99,13
5.5.03	KEPEGAWAIAN	5.805.803.159,00	5.682.100.478,00	(123.702.681,00)	97,87
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5.805.803.159,00	5.682.100.478,00	(123.702.681,00)	97,87
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	5.779.903.159,00	5.656.200.478,00	(123.702.681,00)	97,86
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.224.445.159,00	3.166.334.609,00	(58.110.550,00)	98,20
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.255.458.000,00	2.189.865.869,00	(65.592.131,00)	97,09
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2	BELANJA MODAL	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	100,00
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	100,00
5.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10.005.144.835,00	8.930.332.085,00	(1.074.812.750,00)	89,26
5.6.01	INSPEKTORAT	10.005.144.835,00	8.930.332.085,00	(1.074.812.750,00)	89,26
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01	Inspektorat Daerah	10.005.144.835,00	8.930.332.085,00	(1.074.812.750,00)	89,26
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	9.871.712.985,00	8.799.159.435,00	(1.072.553.550,00)	89,14
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.338.503.066,00	5.522.655.082,00	(815.847.984,00)	87,13
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.533.209.919,00	3.276.504.353,00	(256.705.566,00)	92,73
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	133.431.850,00	131.172.650,00	(2.259.200,00)	98,31
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.499.200,00	121.240.000,00	(2.259.200,00)	98,17
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.932.650,00	9.932.650,00	0,00	100,00
5.7	UNSUR KEWILAYAHAN	36.808.695.966,00	36.370.184.626,00	(438.511.340,00)	98,81
5.7.01	KECAMATAN	36.808.695.966,00	36.370.184.626,00	(438.511.340,00)	98,81
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01	Kecamatan Paguat	7.821.550.261,00	7.600.248.704,00	(221.301.557,00)	97,17
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	7.086.562.761,00	6.866.867.015,00	(219.695.746,00)	96,90
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.894.768.415,00	3.866.349.864,00	(28.418.551,00)	99,27
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.661.044.346,00	2.469.767.151,00	(191.277.195,00)	92,81
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	530.750.000,00	530.750.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	734.987.500,00	733.381.689,00	(1.605.811,00)	99,78
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.675.500,00	142.544.500,00	(131.000,00)	99,91
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	227.312.000,00	226.790.577,00	(521.423,00)	99,77
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	365.000.000,00	364.046.612,00	(953.388,00)	99,74



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	Kecamatan Dengilo	2.633.708.877,00	2.623.210.357,00	(10.498.520,00)	99,60
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	2.625.138.877,00	2.615.171.357,00	(9.967.520,00)	99,62
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	2.200.918.665,00	2.199.778.126,00	(1.140.539,00)	99,95
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.220.212,00	415.393.231,00	(8.826.981,00)	97,92
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	8.570.000,00	8.039.000,00	(531.000,00)	93,80
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.570.000,00	8.039.000,00	(531.000,00)	93,80
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	Kecamatan Marisa	2.403.869.729,00	2.368.851.270,00	(35.018.459,00)	98,54
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	2.396.806.729,00	2.361.801.270,00	(35.005.459,00)	98,54
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	1.873.462.435,00	1.860.637.157,00	(12.825.278,00)	99,32
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	523.344.294,00	501.164.113,00	(22.180.181,00)	95,76
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2	BELANJA MODAL	7.063.000,00	7.050.000,00	(13.000,00)	99,82
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.063.000,00	7.050.000,00	(13.000,00)	99,82
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	Kecamatan Duhiaadaa	2.244.151.267,00	2.237.221.753,00	(6.929.514,00)	99,69
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1	BELANJA OPERASI	2.244.151.267,00	2.237.221.753,00	(6.929.514,00)	99,69
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	1.714.791.786,00	1.711.563.614,00	(3.228.172,00)	99,81
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.359.481,00	525.658.139,00	(3.701.342,00)	99,30
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05	Kecamatan Buntulia	2.619.980.883,00	2.592.244.953,00	(27.735.930,00)	98,94
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1	BELANJA OPERASI	2.619.980.883,00	2.592.244.953,00	(27.735.930,00)	98,94
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01	Belanja Pegawai	2.030.151.191,00	2.012.661.245,00	(17.489.946,00)	99,14
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	589.829.692,00	579.583.708,00	(10.245.984,00)	98,26
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06	Kecamatan Patilanggio	2.172.803.350,00	2.114.536.854,00	(58.266.496,00)	97,32
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1	BELANJA OPERASI	2.172.803.350,00	2.114.536.854,00	(58.266.496,00)	97,32
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.01	Belanja Pegawai	1.694.176.746,00	1.642.699.022,00	(51.477.724,00)	96,96
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.626.604,00	471.837.832,00	(6.788.772,00)	98,58
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07	Kecamatan Randangan	2.591.141.301,00	2.577.785.802,00	(13.355.499,00)	99,48
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1	BELANJA OPERASI	2.537.156.801,00	2.523.801.302,00	(13.355.499,00)	99,47
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.01	Belanja Pegawai	2.049.805.981,00	2.040.381.193,00	(9.424.788,00)	99,54
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.350.820,00	483.420.109,00	(3.930.711,00)	99,19
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2	BELANJA MODAL	53.984.500,00	53.984.500,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.984.500,00	53.984.500,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08	Kecamatan Taluditi	2.015.596.957,00	2.001.704.679,00	(13.892.278,00)	99,31
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1	BELANJA OPERASI	2.015.596.957,00	2.001.704.679,00	(13.892.278,00)	99,31
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.01	Belanja Pegawai	1.534.131.315,00	1.528.659.215,00	(5.472.100,00)	99,64
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.02	Belanja Barang dan Jasa	481.465.642,00	473.045.464,00	(8.420.178,00)	98,25
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09	Kecamatan Wanggarasi	2.194.180.697,00	2.187.565.126,00	(6.615.571,00)	99,70
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1	BELANJA OPERASI	2.194.180.697,00	2.187.565.126,00	(6.615.571,00)	99,70
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.01	Belanja Pegawai	1.751.996.605,00	1.746.916.742,00	(5.079.863,00)	99,71
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.184.092,00	440.648.384,00	(1.535.708,00)	99,65
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10	Kecamatan Lemito	2.547.364.468,00	2.534.967.215,00	(12.397.253,00)	99,51
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1	BELANJA OPERASI	2.547.364.468,00	2.534.967.215,00	(12.397.253,00)	99,51



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.01	Belanja Pegawai	2.039.079.887,00	2.031.652.516,00	(7.427.371,00)	99,64
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.02	Belanja Barang dan Jasa	508.284.581,00	503.314.699,00	(4.969.882,00)	99,02
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11	Kecamatan Popayato	2.746.581.960,00	2.736.742.484,00	(9.839.476,00)	99,64
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1	BELANJA OPERASI	2.734.081.960,00	2.724.615.734,00	(9.466.226,00)	99,65
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.01	Belanja Pegawai	2.193.257.752,00	2.188.600.098,00	(4.657.654,00)	99,79
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.824.208,00	536.015.636,00	(4.808.572,00)	99,11
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.2	BELANJA MODAL	12.500.000,00	12.126.750,00	(373.250,00)	97,01
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.500.000,00	12.126.750,00	(373.250,00)	97,01
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12	Kecamatan Popayato Timur	2.618.759.562,00	2.619.723.950,00	964.388,00	100,04
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1	BELANJA OPERASI	2.618.759.562,00	2.619.723.950,00	964.388,00	100,04
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1.01	Belanja Pegawai	2.136.535.817,00	2.138.122.178,00	1.586.361,00	100,07
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.223.745,00	481.601.772,00	(621.973,00)	99,87
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13	Kecamatan Popayato Barat	2.199.006.654,00	2.175.381.479,00	(23.625.175,00)	98,93
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.1	BELANJA OPERASI	2.199.006.654,00	2.175.381.479,00	(23.625.175,00)	98,93
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.1.01	Belanja Pegawai	1.720.852.712,00	1.700.949.935,00	(19.902.777,00)	98,84
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.153.942,00	474.431.544,00	(3.722.398,00)	99,22
5.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.297.915.591,00	8.261.596.157,00	(36.319.434,00)	99,56
5.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.297.915.591,00	8.261.596.157,00	(36.319.434,00)	99,56
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.297.915.591,00	8.261.596.157,00	(36.319.434,00)	99,56
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	8.297.915.591,00	8.261.596.157,00	(36.319.434,00)	99,56
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.956.923.347,00	2.957.435.898,00	512.551,00	100,02
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.673.810.000,00	2.636.978.015,00	(36.831.985,00)	98,62
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	2.667.182.244,00	2.667.182.244,00	0,00	100,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	122.967.608.437,00	117.829.373.976,87	(5.138.234.460,13)	95,82
6.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	122.967.608.437,00	117.829.373.976,87	(5.138.234.460,13)	95,82
6.5.02	KEUANGAN	122.967.608.437,00	117.829.373.976,87	(5.138.234.460,13)	95,82
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Keuangan Daerah	122.967.608.437,00	117.829.373.976,87	(5.138.234.460,13)	95,82
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121.491.300.215,00	116.353.065.754,87	(5.138.234.460,13)	95,77
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.660.583.213,00	75.660.583.213,87	0,87	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	45.830.717.002,00	40.692.482.541,00	(5.138.234.461,00)	88,79
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.476.308.222,00	1.476.308.222,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.476.308.222,00	1.476.308.222,00	0,00	100,00

Mansa, 28 Juli 2023
BUPATI

SAIPULA A. MBUINGA






PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	914.253.556.941,00	902.175.682.605,43	98,68	898.490.260.677,79
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.662.553.685,00	65.049.926.012,43	85,97	71.987.067.694,19
4.1.01	Pajak Daerah	14.596.737.492,00	13.369.109.447,00	91,59	11.488.765.524,00
4.1.02	Retribusi Daerah	8.701.719.400,00	5.342.733.160,00	61,40	4.908.487.715,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.800.000.000,00	2.187.716.093,00	57,57	2.533.990.978,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48.564.096.793,00	44.150.367.312,43	90,91	53.055.823.477,19
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	821.560.420.000,00	823.124.340.181,00	100,19	804.350.112.053,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	786.560.420.000,00	795.453.234.602,00	101,13	773.985.794.274,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	688.189.961.000,00	674.354.965.234,00	97,99	641.578.017.274,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	20.357.016.000,00	43.213.353.000,00	212,28	42.082.902.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	78.013.443.000,00	77.884.916.368,00	99,84	90.324.875.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.000.000.000,00	27.671.105.579,00	79,06	30.364.317.779,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	35.000.000.000,00	27.671.105.579,00	79,06	30.364.317.779,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.030.583.256,00	14.001.416.412,00	82,21	22.153.080.930,60
4.3.01	Pendapatan Hibah	8.172.770.500,00	7.446.360.000,00	91,11	2.091.294.359,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.857.812.756,00	6.555.056.412,00	74,00	20.061.786.571,60
5	BELANJA DAERAH	1.034.268.548.934,00	987.618.609.570,00	95,49	941.329.370.243,07
5.1	BELANJA OPERASI	695.643.369.308,00	664.637.687.600,00	95,54	626.463.475.903,00
5.1.01	Belanja Pegawai	342.680.688.283,00	335.295.778.425,00	97,84	324.149.115.918,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.506.413.235,00	295.216.672.900,00	93,27	280.276.842.141,00
5.1.03	Belanja Bunga	8.803.650.011,00	8.657.232.105,00	98,34	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	24.126.101.779,00	22.075.065.344,00	91,50	22.037.517.844,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.526.516.000,00	3.392.938.826,00	96,21	0,00
5.2	BELANJA MODAL	199.945.644.297,00	186.544.899.315,00	93,30	168.702.375.987,07
5.2.01	Belanja Modal Tanah	515.000.000,00	463.206.040,00	89,94	1.794.239.480,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.082.821.438,00	16.835.630.223,00	88,22	33.956.246.346,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.183.370.982,00	15.219.635.271,00	94,04	38.810.503.312,07
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	161.637.257.401,00	151.716.799.542,00	93,86	92.114.814.951,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.527.194.476,00	2.309.628.239,00	91,39	2.026.571.898,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.262.043.380,00	1.190.621.929,00	52,63	1.146.011.500,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.262.043.380,00	1.190.621.929,00	52,63	1.146.011.500,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.4	BELANJA TRANSFER	136.417.491.949,00	135.245.400.726,00	99,14	145.017.506.853,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.306.446.449,00	2.306.446.442,00	100,00	1.772.130.471,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	134.111.045.500,00	132.938.954.284,00	99,13	143.245.376.382,00
	SURPLUS / DEFISIT	(120.014.991.993,00)	(85.442.926.964,57)	0	(42.839.109.565,28)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121.491.300.215,00	116.353.065.754,87	95,77	118.782.315.534,15
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.660.583.213,00	75.660.583.213,87	100,00	11.843.975.866,15
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	45.830.717.002,00	40.692.482.541,00	88,79	106.938.339.668,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.476.308.222,00	1.476.308.222,00	100,00	282.622.755,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.476.308.222,00	1.476.308.222,00	100,00	282.622.755,00
	PEMBIAYAAN NETTO	120.014.991.993,00	114.876.757.532,87	95,72	118.499.692.779,15
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	29.433.830.568,30	0	75.660.583.213,87

Marisa, 28 Juli 2023

BUPATI



 SAIPUL A. MBUINGA





PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	914.253.556.941,00	902.175.682.605,43	(12.077.874.335,57)	98,68	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.662.553.685,00	65.049.926.012,43	(10.612.627.672,57)	85,97	
00.0.00.00.4.1.01	Pajak Daerah	14.596.737.492,00	13.369.109.447,00	(1.227.628.045,00)	91,59	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	8.701.719.400,00	5.342.733.160,00	(3.358.986.240,00)	61,40	
00.0.00.00.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.800.000.000,00	2.187.716.093,00	(1.612.283.907,00)	57,57	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48.564.096.793,00	44.150.367.312,43	(4.413.729.480,57)	90,91	
00.0.00.00.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	821.560.420.000,00	823.124.340.181,00	1.563.920.181,00	100,19	
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	786.560.420.000,00	795.453.234.602,00	8.892.814.602,00	101,13	
00.0.00.00.4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.000.000.000,00	27.671.105.579,00	(7.328.894.421,00)	79,06	
00.0.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.030.583.256,00	14.001.416.412,00	(3.029.166.844,00)	82,21	
00.0.00.00.4.3.01	Pendapatan Hibah	8.172.770.500,00	7.446.360.000,00	(726.410.500,00)	91,11	
00.0.00.00.4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.857.812.756,00	6.555.056.412,00	(2.302.756.344,00)	74,00	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	1.034.268.548.934,00	987.618.609.570,00	(46.649.939.364,00)	95,49	
00	Non Program	0,00	92.178.769.385,00	92.178.769.385,00	0	
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	92.178.769.385,00	92.178.769.385,00	0	
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	92.178.769.385,00	92.178.769.385,00	0	
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	14.299.110.817,00	14.299.110.817,00	0	
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	374.595.733,00	374.595.733,00	0	
00.0.00.00.5.1.03	Belanja Bunga	0,00	8.384.115.084,00	8.384.115.084,00	0	
00.0.00.00.5.1.05	Belanja Hibah	0,00	5.540.400.000,00	5.540.400.000,00	0	
00.0.00.00.5.2	BELANJA MODAL	0,00	-5.257.800,00	(5.257.800,00)	0	
00.0.00.00.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	-5.257.800,00	(5.257.800,00)	0	
00.0.00.00.5.4	BELANJA TRANSFER	0,00	77.884.916.368,00	77.884.916.368,00	0	
00.0.00.00.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	77.884.916.368,00	77.884.916.368,00	0	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	447.329.355.889,00	440.423.339.814,00	(6.906.016.075,00)	98,46	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.645.840.137,00	3.550.925.444,00	(94.914.693,00)	97,40	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.114.598.530,00	2.041.217.118,00	(73.381.412,00)	96,53	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.114.598.530,00	2.041.217.118,00	(73.381.412,00)	96,53	
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	4.080.000,00	(4.080.000,00)	50,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.106.438.530,00	2.037.137.118,00	(69.301.412,00)	96,71	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.332.051.187,00	1.315.383.337,00	(16.667.850,00)	98,75	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.332.051.187,00	1.315.383.337,00	(16.667.850,00)	98,75	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.332.051.187,00	1.315.383.337,00	(16.667.850,00)	98,75	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.190.420,00	194.324.989,00	(4.865.431,00)	97,56	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	199.190.420,00	194.324.989,00	(4.865.431,00)	97,56	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.190.420,00	194.324.989,00	(4.865.431,00)	97,56	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	330.267.278.630,00	323.131.085.067,00	(7.136.193.563,00)	97,84	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	329.624.069.422,00	322.499.923.524,00	(7.124.145.898,00)	97,84	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	329.624.069.422,00	322.499.923.524,00	(7.124.145.898,00)	97,84	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	329.624.069.422,00	322.499.923.524,00	(7.124.145.898,00)	97,84	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	423.982.603,00	416.003.135,00	(7.979.468,00)	98,12	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	423.982.603,00	416.003.135,00	(7.979.468,00)	98,12	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.982.603,00	416.003.135,00	(7.979.468,00)	98,12	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	219.226.605,00	215.158.408,00	(4.068.197,00)	98,14	
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	219.226.605,00	215.158.408,00	(4.068.197,00)	98,14	
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.226.605,00	215.158.408,00	(4.068.197,00)	98,14	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	362.169.807,00	341.248.436,00	(20.921.371,00)	94,22	
01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.883.025,00	2.793.825,00	(89.200,00)	96,91	
01.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.883.025,00	2.793.825,00	(89.200,00)	96,91	
01.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.883.025,00	2.793.825,00	(89.200,00)	96,91	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	82.100.000,00	81.700.000,00	(400.000,00)	99,51	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	82.100.000,00	81.700.000,00	(400.000,00)	99,51	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.100.000,00	81.700.000,00	(400.000,00)	99,51	
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	135.803.785,00	135.177.785,00	(626.000,00)	99,54	
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	135.803.785,00	135.177.785,00	(626.000,00)	99,54	
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.803.785,00	135.177.785,00	(626.000,00)	99,54	
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	132.282.997,00	112.607.626,00	(19.675.371,00)	85,13	
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	132.282.997,00	112.607.626,00	(19.675.371,00)	85,13	
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.282.997,00	112.607.626,00	(19.675.371,00)	85,13	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.100.000,00	8.969.200,00	(130.800,00)	98,56	
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	9.100.000,00	8.969.200,00	(130.800,00)	98,56	
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	8.969.200,00	(130.800,00)	98,56	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.610.201.303,00	19.363.301.873,00	(246.899.430,00)	98,74	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	490.307.242,00	472.060.558,00	(18.246.684,00)	96,28	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	436.820.242,00	418.796.558,00	(18.023.684,00)	95,87	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.820.242,00	418.796.558,00	(18.023.684,00)	95,87	
01.2.06.01.5.2	BELANJA MODAL	53.487.000,00	53.264.000,00	(223.000,00)	99,58	
01.2.06.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.487.000,00	53.264.000,00	(223.000,00)	99,58	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.411.555,00	19.213.950,00	(197.605,00)	98,98	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.911.555,00	6.763.950,00	(147.605,00)	97,86	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.911.555,00	6.763.950,00	(147.605,00)	97,86	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	12.500.000,00	12.450.000,00	(50.000,00)	99,60	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.500.000,00	12.450.000,00	(50.000,00)	99,60	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.329.566,00	27.929.000,00	(15.400.566,00)	64,46	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	27.929.566,00	27.929.000,00	(566,00)	100,00	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.929.566,00	27.929.000,00	(566,00)	100,00	
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	15.400.000,00	0,00	(15.400.000,00)	0	
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.400.000,00	0,00	(15.400.000,00)	0	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.326.237.821,00	1.303.541.298,00	(22.696.523,00)	98,29	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.326.237.821,00	1.303.541.298,00	(22.696.523,00)	98,29	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.326.237.821,00	1.303.541.298,00	(22.696.523,00)	98,29	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	803.666.397,00	755.668.310,00	(47.998.087,00)	94,03	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	803.666.397,00	755.668.310,00	(47.998.087,00)	94,03	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	803.666.397,00	755.668.310,00	(47.998.087,00)	94,03	
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	14.070.250,00	10.216.500,00	(3.853.750,00)	72,61	
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	14.070.250,00	10.216.500,00	(3.853.750,00)	72,61	
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.070.250,00	10.216.500,00	(3.853.750,00)	72,61	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.627.260.108,00	5.593.948.790,00	(33.311.318,00)	99,41	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	5.627.260.108,00	5.593.948.790,00	(33.311.318,00)	99,41	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.627.260.108,00	5.593.948.790,00	(33.311.318,00)	99,41	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.272.284.759,00	11.168.904.367,00	(103.380.392,00)	99,08	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	11.272.284.759,00	11.168.904.367,00	(103.380.392,00)	99,08	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.272.284.759,00	11.168.904.367,00	(103.380.392,00)	99,08	
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.633.605,00	11.819.100,00	(1.814.505,00)	86,69	
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	13.633.605,00	11.819.100,00	(1.814.505,00)	86,69	
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.633.605,00	11.819.100,00	(1.814.505,00)	86,69	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.999.173.402,00	4.912.602.200,00	(86.571.202,00)	98,27	
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.404.300.000,00	1.400.700.000,00	(3.600.000,00)	99,74	
01.2.07.01.5.2	BELANJA MODAL	1.404.300.000,00	1.400.700.000,00	(3.600.000,00)	99,74	
01.2.07.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.404.300.000,00	1.400.700.000,00	(3.600.000,00)	99,74	
01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	800.000.000,00	769.307.000,00	(30.693.000,00)	96,16	
01.2.07.03.5.2	BELANJA MODAL	800.000.000,00	769.307.000,00	(30.693.000,00)	96,16	
01.2.07.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	800.000.000,00	769.307.000,00	(30.693.000,00)	96,16	
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.023.750.300,00	1.017.236.000,00	(6.514.300,00)	99,36	
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	1.023.750.300,00	1.017.236.000,00	(6.514.300,00)	99,36	
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.023.750.300,00	1.017.236.000,00	(6.514.300,00)	99,36	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.499.025.660,00	1.454.230.700,00	(44.794.960,00)	97,01	
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.592.000,00	1.950.000,00	(3.642.000,00)	34,87	
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.592.000,00	1.950.000,00	(3.642.000,00)	34,87	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	1.493.433.660,00	1.452.280.700,00	(41.152.960,00)	97,24	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.493.433.660,00	1.452.280.700,00	(41.152.960,00)	97,24	
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.071.837,00	118.929.000,00	(142.837,00)	99,88	
01.2.07.09.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.859.000,00	(141.000,00)	99,53	
01.2.07.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.859.000,00	(141.000,00)	99,53	
01.2.07.09.5.2	BELANJA MODAL	89.071.837,00	89.070.000,00	(1.837,00)	100,00	
01.2.07.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89.071.837,00	89.070.000,00	(1.837,00)	100,00	
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.570.000,00	23.024.000,00	(546.000,00)	97,68	
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	23.570.000,00	23.024.000,00	(546.000,00)	97,68	
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.570.000,00	23.024.000,00	(546.000,00)	97,68	
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129.455.605,00	129.175.500,00	(280.105,00)	99,78	
01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	129.455.605,00	129.175.500,00	(280.105,00)	99,78	
01.2.07.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.455.605,00	129.175.500,00	(280.105,00)	99,78	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.948.674.584,00	16.253.358.221,00	(695.316.363,00)	95,90	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.350.000,00	25.008.000,00	(342.000,00)	98,65	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.350.000,00	25.008.000,00	(342.000,00)	98,65	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.350.000,00	25.008.000,00	(342.000,00)	98,65	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.790.519.728,00	5.535.741.190,00	(254.778.538,00)	95,60	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.790.519.728,00	5.535.741.190,00	(254.778.538,00)	95,60	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.790.519.728,00	5.535.741.190,00	(254.778.538,00)	95,60	
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	12.840.000,00	(2.160.000,00)	85,60	
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	12.840.000,00	(2.160.000,00)	85,60	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	12.840.000,00	(2.160.000,00)	85,60	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.117.804.856,00	10.679.769.031,00	(438.035.825,00)	96,06	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	11.117.635.356,00	10.679.599.531,00	(438.035.825,00)	96,06	
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	160.690.000,00	153.680.000,00	(7.010.000,00)	95,64	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.737.945.356,00	8.306.919.531,00	(431.025.825,00)	95,07	
01.2.08.04.5.1.05	Belanja Hibah	2.219.000.000,00	2.219.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.2	BELANJA MODAL	169.500,00	169.500,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.500,00	169.500,00	0,00	100,00	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.321.672.636,00	8.554.476.090,00	(767.196.546,00)	91,77	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.653.772.976,00	1.413.214.796,00	(240.558.180,00)	85,45	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.653.772.976,00	1.413.214.796,00	(240.558.180,00)	85,45	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.653.772.976,00	1.413.214.796,00	(240.558.180,00)	85,45	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.061.443.960,00	4.638.414.505,00	(423.029.455,00)	91,64	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.061.443.960,00	4.638.414.505,00	(423.029.455,00)	91,64	
01.2.09.02.5.1.01	Belanja Pegawai	16.320.000,00	14.280.000,00	(2.040.000,00)	87,50	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.045.123.960,00	4.624.134.505,00	(420.989.455,00)	91,66	
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147.814.300,00	139.236.300,00	(8.578.000,00)	94,20	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	147.814.300,00	139.236.300,00	(8.578.000,00)	94,20	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.814.300,00	139.236.300,00	(8.578.000,00)	94,20	
01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	288.526.335,00	283.820.965,00	(4.705.370,00)	98,37	
01.2.09.07.5.1	BELANJA OPERASI	288.526.335,00	283.820.965,00	(4.705.370,00)	98,37	
01.2.09.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.526.335,00	283.820.965,00	(4.705.370,00)	98,37	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	758.713.570,00	754.673.822,00	(4.039.748,00)	99,47	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	758.713.570,00	754.673.822,00	(4.039.748,00)	99,47	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	758.713.570,00	754.673.822,00	(4.039.748,00)	99,47	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	771.513.439,00	718.420.492,00	(53.092.947,00)	93,12	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	756.495.789,00	708.487.842,00	(48.007.947,00)	93,65	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	756.495.789,00	708.487.842,00	(48.007.947,00)	93,65	
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	15.017.650,00	9.932.650,00	(5.085.000,00)	66,14	
01.2.09.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.085.000,00	0,00	(5.085.000,00)	0	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.932.650,00	9.932.650,00	0,00	100,00	
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	631.888.056,00	598.695.210,00	(33.192.846,00)	94,75	
01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	631.888.056,00	598.695.210,00	(33.192.846,00)	94,75	
01.2.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	631.888.056,00	598.695.210,00	(33.192.846,00)	94,75	
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	52.027.596.296,00	49.503.481.832,00	(2.524.114.464,00)	95,15	
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	52.027.596.296,00	49.503.481.832,00	(2.524.114.464,00)	95,15	
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.109.513.396,00	48.492.168.351,00	(1.617.345.045,00)	96,77	
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.109.513.396,00	48.492.168.351,00	(1.617.345.045,00)	96,77	
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	1.918.082.900,00	1.011.313.481,00	(906.769.419,00)	52,73	
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.918.082.900,00	1.011.313.481,00	(906.769.419,00)	52,73	
01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	733.779.362,00	726.761.033,00	(7.018.329,00)	99,04	
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	176.279.362,00	170.472.233,00	(5.807.129,00)	96,71	
01.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI	176.279.362,00	170.472.233,00	(5.807.129,00)	96,71	
01.2.11.01.5.1.01	Belanja Pegawai	176.279.362,00	170.472.233,00	(5.807.129,00)	96,71	
01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	157.500.000,00	156.300.000,00	(1.200.000,00)	99,24	
01.2.11.02.5.1	BELANJA OPERASI	157.500.000,00	156.300.000,00	(1.200.000,00)	99,24	
01.2.11.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.500.000,00	156.300.000,00	(1.200.000,00)	99,24	
01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	399.988.800,00	(11.200,00)	100,00	
01.2.11.04.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	399.988.800,00	(11.200,00)	100,00	
01.2.11.04.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000.000,00	399.988.800,00	(11.200,00)	100,00	
01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.032.862.676,00	1.030.723.500,00	(2.139.176,00)	99,79	
01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	516.069.786,00	515.409.500,00	(660.286,00)	99,87	
01.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	516.069.786,00	515.409.500,00	(660.286,00)	99,87	
01.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	516.069.786,00	515.409.500,00	(660.286,00)	99,87	
01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	393.792.890,00	392.314.000,00	(1.478.890,00)	99,62	
01.2.12.02.5.1	BELANJA OPERASI	393.792.890,00	392.314.000,00	(1.478.890,00)	99,62	
01.2.12.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.792.890,00	392.314.000,00	(1.478.890,00)	99,62	
01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.03.5.1	BELANJA OPERASI	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.13	Penataan Organisasi	411.229.925,00	407.781.844,00	(3.448.081,00)	99,16	
01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	114.974.700,00	114.774.418,00	(200.282,00)	99,83	
01.2.13.01.5.1	BELANJA OPERASI	114.974.700,00	114.774.418,00	(200.282,00)	99,83	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.13.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.974.700,00	114.774.418,00	(200.282,00)	99,83	
01.2.13.02	Fasilitas Pelayan Publik dan Tata Laksana	87.883.825,00	87.406.172,00	(477.653,00)	99,46	
01.2.13.02.5.1	BELANJA OPERASI	87.883.825,00	87.406.172,00	(477.653,00)	99,46	
01.2.13.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.883.825,00	87.406.172,00	(477.653,00)	99,46	
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	38.231.000,00	37.358.200,00	(872.800,00)	97,72	
01.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	38.231.000,00	37.358.200,00	(872.800,00)	97,72	
01.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.231.000,00	37.358.200,00	(872.800,00)	97,72	
01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayan Publik dan Tata Laksana	86.743.400,00	85.200.858,00	(1.542.542,00)	98,22	
01.2.13.04.5.1	BELANJA OPERASI	86.743.400,00	85.200.858,00	(1.542.542,00)	98,22	
01.2.13.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.743.400,00	85.200.858,00	(1.542.542,00)	98,22	
01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	83.397.000,00	83.042.196,00	(354.804,00)	99,57	
01.2.13.05.5.1	BELANJA OPERASI	83.397.000,00	83.042.196,00	(354.804,00)	99,57	
01.2.13.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.397.000,00	83.042.196,00	(354.804,00)	99,57	
01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	601.896.810,00	583.136.286,00	(18.760.524,00)	96,88	
01.2.14.01	Fasilitas Keprotokolan	232.103.000,00	217.936.372,00	(14.166.628,00)	93,90	
01.2.14.01.5.1	BELANJA OPERASI	232.103.000,00	217.936.372,00	(14.166.628,00)	93,90	
01.2.14.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.103.000,00	217.936.372,00	(14.166.628,00)	93,90	
01.2.14.02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	99.987.800,00	99.987.800,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1	BELANJA OPERASI	99.987.800,00	99.987.800,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.987.800,00	99.987.800,00	0,00	100,00	
01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	269.806.010,00	265.212.114,00	(4.593.896,00)	98,30	
01.2.14.03.5.1	BELANJA OPERASI	269.806.010,00	265.212.114,00	(4.593.896,00)	98,30	
01.2.14.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.806.010,00	265.212.114,00	(4.593.896,00)	98,30	
01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.504.233.599,00	11.504.256.368,00	22.769,00	100,00	
01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.416.733.599,00	11.416.756.368,00	22.769,00	100,00	
01.2.15.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.416.733.599,00	11.416.756.368,00	22.769,00	100,00	
01.2.15.01.5.1.01	Belanja Pegawai	11.416.733.599,00	11.416.756.368,00	22.769,00	100,00	
01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.15.02.5.1	BELANJA OPERASI	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.15.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	556.581.710,00	556.501.620,00	(80.090,00)	99,99	
01.2.16.03	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	66.005.460,00	65.985.950,00	(19.510,00)	99,97	
01.2.16.03.5.1	BELANJA OPERASI	66.005.460,00	65.985.950,00	(19.510,00)	99,97	
01.2.16.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.005.460,00	65.985.950,00	(19.510,00)	99,97	
01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	490.576.250,00	490.515.670,00	(60.580,00)	99,99	
01.2.16.04.5.1	BELANJA OPERASI	490.576.250,00	490.515.670,00	(60.580,00)	99,99	
01.2.16.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.576.250,00	490.515.670,00	(60.580,00)	99,99	
02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	54.674.233.763,00	43.521.453.922,00	(11.152.779.841,00)	79,60	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	27.611.039.572,00	25.523.768.999,00	(2.087.270.573,00)	92,44	
02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	628.694.025,00	623.949.000,00	(4.745.025,00)	99,25	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	67.394.025,00	63.400.000,00	(3.994.025,00)	94,07	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.394.025,00	63.400.000,00	(3.994.025,00)	94,07	
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	561.300.000,00	560.549.000,00	(751.000,00)	99,87	
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	561.300.000,00	560.549.000,00	(751.000,00)	99,87	
02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.269.451.426,00	3.040.042.880,00	(229.408.546,00)	92,98	
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	3.269.451.426,00	3.040.042.880,00	(229.408.546,00)	92,98	
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.269.451.426,00	3.040.042.880,00	(229.408.546,00)	92,98	
02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	789.455.502,00	739.524.202,00	(49.931.300,00)	93,68	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	379.444.000,00	329.881.700,00	(49.562.300,00)	86,94	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.444.000,00	329.881.700,00	(49.562.300,00)	86,94	
02.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	410.011.502,00	409.642.502,00	(369.000,00)	99,91	
02.2.01.07.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	410.011.502,00	409.642.502,00	(369.000,00)	99,91	
02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	105.800.000,00	105.323.830,00	(476.170,00)	99,55	
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	10.800.000,00	10.401.830,00	(398.170,00)	96,31	
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.401.830,00	(398.170,00)	96,31	
02.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	95.000.000,00	94.922.000,00	(78.000,00)	99,92	
02.2.01.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.000.000,00	94.922.000,00	(78.000,00)	99,92	
02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	323.565.000,00	295.318.140,00	(28.246.860,00)	91,27	
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	323.565.000,00	295.318.140,00	(28.246.860,00)	91,27	
02.2.01.13.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	323.565.000,00	295.318.140,00	(28.246.860,00)	91,27	
02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	281.650.000,00	277.561.998,00	(4.088.002,00)	98,55	
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	281.650.000,00	277.561.998,00	(4.088.002,00)	98,55	
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	281.650.000,00	277.561.998,00	(4.088.002,00)	98,55	
02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	198.400.000,00	198.283.296,00	(116.704,00)	99,94	
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	198.400.000,00	198.283.296,00	(116.704,00)	99,94	
02.2.01.17.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	198.400.000,00	198.283.296,00	(116.704,00)	99,94	
02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	550.000.000,00	549.500.000,00	(500.000,00)	99,91	
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	550.000.000,00	549.500.000,00	(500.000,00)	99,91	
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	549.500.000,00	(500.000,00)	99,91	
02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.240.000.000,00	3.092.520.000,00	(147.480.000,00)	95,45	
02.2.01.22.5.2	BELANJA MODAL	3.240.000.000,00	3.092.520.000,00	(147.480.000,00)	95,45	
02.2.01.22.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.240.000.000,00	3.092.520.000,00	(147.480.000,00)	95,45	
02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	76.769.485,00	75.186.050,00	(1.583.435,00)	97,94	
02.2.01.23.5.1	BELANJA OPERASI	76.769.485,00	75.186.050,00	(1.583.435,00)	97,94	
02.2.01.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.769.485,00	75.186.050,00	(1.583.435,00)	97,94	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	213.605.440,00	204.930.233,00	(8.675.207,00)	95,94	
02.2.01.25.5.1	BELANJA OPERASI	213.605.440,00	204.930.233,00	(8.675.207,00)	95,94	
02.2.01.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.605.440,00	204.930.233,00	(8.675.207,00)	95,94	
02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.992.300.000,00	1.863.300.000,00	(129.000.000,00)	93,53	
02.2.01.26.5.1	BELANJA OPERASI	1.992.300.000,00	1.863.300.000,00	(129.000.000,00)	93,53	
02.2.01.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.300.000,00	1.863.300.000,00	(129.000.000,00)	93,53	
02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	51.956.250,00	49.388.400,00	(2.567.850,00)	95,06	
02.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	51.956.250,00	49.388.400,00	(2.567.850,00)	95,06	
02.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.956.250,00	49.388.400,00	(2.567.850,00)	95,06	
02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.889.392.444,00	14.408.940.970,00	(1.480.451.474,00)	90,68	
02.2.01.29.5.1	BELANJA OPERASI	11.574.142.152,00	10.689.654.976,00	(884.487.176,00)	92,36	
02.2.01.29.5.1.01	Belanja Pegawai	514.460.900,00	367.760.000,00	(146.700.900,00)	71,48	
02.2.01.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.059.681.252,00	10.321.894.976,00	(737.786.276,00)	93,33	
02.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	4.315.250.292,00	3.719.285.994,00	(595.964.298,00)	86,19	
02.2.01.29.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.427.532.580,00	1.915.977.764,00	(511.554.816,00)	78,93	
02.2.01.29.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.887.717.712,00	1.803.308.230,00	(84.409.482,00)	95,53	
02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	13.467.101.146,00	11.919.034.149,00	(1.548.066.997,00)	88,50	
02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	198.253.250,00	197.983.000,00	(270.250,00)	99,86	
02.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	198.253.250,00	197.983.000,00	(270.250,00)	99,86	
02.2.02.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.253.250,00	197.983.000,00	(270.250,00)	99,86	
02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	181.000.000,00	180.824.000,00	(176.000,00)	99,90	
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	181.000.000,00	180.824.000,00	(176.000,00)	99,90	
02.2.02.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	181.000.000,00	180.824.000,00	(176.000,00)	99,90	
02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	668.390.000,00	575.276.580,00	(93.113.420,00)	86,07	
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	153.390.000,00	135.880.680,00	(17.509.320,00)	88,59	
02.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	16.800.000,00	0,00	(16.800.000,00)	0	
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.590.000,00	135.880.680,00	(709.320,00)	99,48	
02.2.02.05.5.2	BELANJA MODAL	515.000.000,00	439.395.900,00	(75.604.100,00)	85,32	
02.2.02.05.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	515.000.000,00	439.395.900,00	(75.604.100,00)	85,32	
02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	1.161.671.750,00	981.495.200,00	(180.176.550,00)	84,49	
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	101.671.750,00	101.400.000,00	(271.750,00)	99,73	
02.2.02.06.5.1.01	Belanja Pegawai	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.771.750,00	89.500.000,00	(271.750,00)	99,70	
02.2.02.06.5.2	BELANJA MODAL	1.060.000.000,00	880.095.200,00	(179.904.800,00)	83,03	
02.2.02.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.060.000.000,00	880.095.200,00	(179.904.800,00)	83,03	
02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	219.000.000,00	199.977.000,00	(19.023.000,00)	91,31	
02.2.02.09.5.2	BELANJA MODAL	219.000.000,00	199.977.000,00	(19.023.000,00)	91,31	
02.2.02.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219.000.000,00	199.977.000,00	(19.023.000,00)	91,31	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	571.000.000,00	550.620.000,00	(20.380.000,00)	96,43	
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.605.000,00	(395.000,00)	99,34	
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.605.000,00	(395.000,00)	99,34	
02.2.02.12.5.2	BELANJA MODAL	511.000.000,00	491.015.000,00	(19.985.000,00)	96,09	
02.2.02.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	511.000.000,00	491.015.000,00	(19.985.000,00)	96,09	
02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	52.340.150,00	52.340.150,00	0,00	100,00	
02.2.02.14.5.2	BELANJA MODAL	52.340.150,00	52.340.150,00	0,00	100,00	
02.2.02.14.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.340.150,00	52.340.150,00	0,00	100,00	
02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	43.250.135,00	43.250.135,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.2	BELANJA MODAL	43.250.135,00	43.250.135,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.250.135,00	43.250.135,00	0,00	100,00	
02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	21.295.600,00	21.295.600,00	0,00	100,00	
02.2.02.24.5.2	BELANJA MODAL	21.295.600,00	21.295.600,00	0,00	100,00	
02.2.02.24.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.295.600,00	21.295.600,00	0,00	100,00	
02.2.02.25	Pengadaan Mebeluer Sekolah	84.750.000,00	84.100.500,00	(649.500,00)	99,23	
02.2.02.25.5.2	BELANJA MODAL	84.750.000,00	84.100.500,00	(649.500,00)	99,23	
02.2.02.25.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.750.000,00	84.100.500,00	(649.500,00)	99,23	
02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	85.500.000,00	85.314.600,00	(185.400,00)	99,78	
02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	85.500.000,00	85.314.600,00	(185.400,00)	99,78	
02.2.02.28.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	85.500.000,00	85.314.600,00	(185.400,00)	99,78	
02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	51.310.000,00	50.300.000,00	(1.010.000,00)	98,03	
02.2.02.35.5.2	BELANJA MODAL	51.310.000,00	50.300.000,00	(1.010.000,00)	98,03	
02.2.02.35.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.310.000,00	50.300.000,00	(1.010.000,00)	98,03	
02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	47.921.000,00	33.823.000,00	(14.098.000,00)	70,58	
02.2.02.38.5.1	BELANJA OPERASI	47.921.000,00	33.823.000,00	(14.098.000,00)	70,58	
02.2.02.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.921.000,00	33.823.000,00	(14.098.000,00)	70,58	
02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.821.516.800,00	1.744.416.970,00	(77.099.830,00)	95,77	
02.2.02.39.5.1	BELANJA OPERASI	1.821.516.800,00	1.744.416.970,00	(77.099.830,00)	95,77	
02.2.02.39.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.821.516.800,00	1.744.416.970,00	(77.099.830,00)	95,77	
02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	255.751.275,00	217.150.480,00	(38.600.795,00)	84,91	
02.2.02.40.5.1	BELANJA OPERASI	255.751.275,00	217.150.480,00	(38.600.795,00)	84,91	
02.2.02.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.751.275,00	217.150.480,00	(38.600.795,00)	84,91	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	282.601.512,00	203.539.590,00	(79.061.922,00)	72,02	
02.2.02.41.5.1	BELANJA OPERASI	282.601.512,00	203.539.590,00	(79.061.922,00)	72,02	
02.2.02.41.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.601.512,00	203.539.590,00	(79.061.922,00)	72,02	
02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.121.549.674,00	6.097.327.344,00	(1.024.222.330,00)	85,62	
02.2.02.43.5.1	BELANJA OPERASI	5.555.891.575,00	4.932.569.323,00	(623.322.252,00)	88,78	
02.2.02.43.5.1.01	Belanja Pegawai	267.915.000,00	189.577.500,00	(78.337.500,00)	70,76	
02.2.02.43.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.287.976.575,00	4.742.991.823,00	(544.984.752,00)	89,69	
02.2.02.43.5.2	BELANJA MODAL	1.565.658.099,00	1.164.758.021,00	(400.900.078,00)	74,39	
02.2.02.43.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	991.181.335,00	723.151.012,00	(268.030.323,00)	72,96	
02.2.02.43.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	574.476.764,00	441.607.009,00	(132.869.755,00)	76,87	
02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.154.931.645,00	3.863.821.574,00	(6.291.110.071,00)	38,05	
02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.241.127.000,00	2.231.789.517,00	(9.337.483,00)	99,58	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	107.104.000,00	105.764.500,00	(1.339.500,00)	98,75	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.104.000,00	105.764.500,00	(1.339.500,00)	98,75	
02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	2.134.023.000,00	2.126.025.017,00	(7.997.983,00)	99,63	
02.2.03.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.134.023.000,00	2.126.025.017,00	(7.997.983,00)	99,63	
02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	105.210.000,00	104.816.000,00	(394.000,00)	99,63	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.300.000,00	9.050.000,00	(250.000,00)	97,31	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	9.050.000,00	(250.000,00)	97,31	
02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	95.910.000,00	95.766.000,00	(144.000,00)	99,85	
02.2.03.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.910.000,00	95.766.000,00	(144.000,00)	99,85	
02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	16.100.000,00	16.058.370,00	(41.630,00)	99,74	
02.2.03.10.5.1	BELANJA OPERASI	16.100.000,00	16.058.370,00	(41.630,00)	99,74	
02.2.03.10.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.100.000,00	16.058.370,00	(41.630,00)	99,74	
02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	580.720.000,00	574.338.640,00	(6.381.360,00)	98,90	
02.2.03.12.5.1	BELANJA OPERASI	80.720.000,00	74.838.640,00	(5.881.360,00)	92,71	
02.2.03.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.720.000,00	74.838.640,00	(5.881.360,00)	92,71	
02.2.03.12.5.2	BELANJA MODAL	500.000.000,00	499.500.000,00	(500.000,00)	99,90	
02.2.03.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000.000,00	499.500.000,00	(500.000,00)	99,90	
02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	237.025.345,00	217.260.715,00	(19.764.630,00)	91,66	
02.2.03.13.5.1	BELANJA OPERASI	237.025.345,00	217.260.715,00	(19.764.630,00)	91,66	
02.2.03.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.025.345,00	217.260.715,00	(19.764.630,00)	91,66	
02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	65.284.000,00	65.196.000,00	(88.000,00)	99,87	
02.2.03.14.5.1	BELANJA OPERASI	65.284.000,00	65.196.000,00	(88.000,00)	99,87	
02.2.03.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.284.000,00	65.196.000,00	(88.000,00)	99,87	
02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	489.600.000,00	489.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.15.5.1	BELANJA OPERASI	489.600.000,00	489.600.000,00	0,00	100,00	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.600.000,00	489.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	172.665.300,00	164.799.232,00	(7.866.068,00)	95,44	
02.2.03.17.5.1	BELANJA OPERASI	172.665.300,00	164.799.232,00	(7.866.068,00)	95,44	
02.2.03.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.665.300,00	164.799.232,00	(7.866.068,00)	95,44	
02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.247.200.000,00	-36.900,00	(6.247.236.900,00)	0	
02.2.03.18.5.1	BELANJA OPERASI	6.247.200.000,00	-36.900,00	(6.247.236.900,00)	0	
02.2.03.18.5.1.05	Belanja Hibah	6.247.200.000,00	-36.900,00	(6.247.236.900,00)	0	
02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.441.161.400,00	2.214.829.200,00	(1.226.332.200,00)	64,36	
02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	2.250.000.000,00	2.193.750.000,00	(56.250.000,00)	97,50	
02.2.04.12.5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000.000,00	2.193.750.000,00	(56.250.000,00)	97,50	
02.2.04.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000.000,00	2.193.750.000,00	(56.250.000,00)	97,50	
02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	21.661.400,00	21.079.200,00	(582.200,00)	97,31	
02.2.04.15.5.1	BELANJA OPERASI	21.661.400,00	21.079.200,00	(582.200,00)	97,31	
02.2.04.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.661.400,00	21.079.200,00	(582.200,00)	97,31	
02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.169.500.000,00	0,00	(1.169.500.000,00)	0	
02.2.04.17.5.1	BELANJA OPERASI	1.169.500.000,00	0,00	(1.169.500.000,00)	0	
02.2.04.17.5.1.05	Belanja Hibah	1.169.500.000,00	0,00	(1.169.500.000,00)	0	
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	64.081.688.552,00	53.494.339.972,00	(10.587.348.580,00)	83,48	
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	11.875.206.511,00	9.734.697.222,00	(2.140.509.289,00)	81,97	
02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	1.257.881.207,00	1.251.827.596,00	(6.053.611,00)	99,52	
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	1.257.881.207,00	1.251.827.596,00	(6.053.611,00)	99,52	
02.2.01.02.5.2.01	Belanja Modal Tanah	465.000.000,00	462.500.000,00	(2.500.000,00)	99,46	
02.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	792.881.207,00	789.327.596,00	(3.553.611,00)	99,55	
02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	1.685.464.788,00	1.312.650.520,00	(372.814.268,00)	77,88	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.528.143.968,00	1.155.530.700,00	(372.613.268,00)	75,62	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.528.143.968,00	1.155.530.700,00	(372.613.268,00)	75,62	
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	157.320.820,00	157.119.820,00	(201.000,00)	99,87	
02.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.750.000,00	112.549.000,00	(201.000,00)	99,82	
02.2.01.05.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.570.820,00	44.570.820,00	0,00	100,00	
02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.166.558.739,00	1.077.125.559,00	(89.433.180,00)	92,33	
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	1.166.558.739,00	1.077.125.559,00	(89.433.180,00)	92,33	
02.2.01.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.143.500.930,00	1.054.067.750,00	(89.433.180,00)	92,18	
02.2.01.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.057.809,00	23.057.809,00	0,00	100,00	
02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	468.360.177,00	467.384.600,00	(975.577,00)	99,79	
02.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.505.000,00	(495.000,00)	99,51	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.505.000,00	(495.000,00)	99,51	
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	368.360.177,00	367.879.600,00	(480.577,00)	99,87	
02.2.01.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	313.109.000,00	312.628.423,00	(480.577,00)	99,85	
02.2.01.13.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.251.177,00	55.251.177,00	0,00	100,00	
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	4.005.317.571,00	2.497.054.924,00	(1.508.262.647,00)	62,34	
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	4.005.317.571,00	2.497.054.924,00	(1.508.262.647,00)	62,34	
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.005.317.571,00	2.497.054.924,00	(1.508.262.647,00)	62,34	
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.069.999.429,00	1.068.528.862,00	(1.470.567,00)	99,86	
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	1.069.999.429,00	1.068.528.862,00	(1.470.567,00)	99,86	
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.069.999.429,00	1.068.528.862,00	(1.470.567,00)	99,86	
02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	342.104.000,00	341.562.000,00	(542.000,00)	99,84	
02.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	342.104.000,00	341.562.000,00	(542.000,00)	99,84	
02.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.104.000,00	341.562.000,00	(542.000,00)	99,84	
02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.685.857.600,00	1.528.833.161,00	(157.024.439,00)	90,69	
02.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	1.685.857.600,00	1.528.833.161,00	(157.024.439,00)	90,69	
02.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.685.857.600,00	1.528.833.161,00	(157.024.439,00)	90,69	
02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	193.663.000,00	189.730.000,00	(3.933.000,00)	97,97	
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	193.663.000,00	189.730.000,00	(3.933.000,00)	97,97	
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.663.000,00	189.730.000,00	(3.933.000,00)	97,97	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.068.752.141,00	30.939.405.684,00	(8.129.346.457,00)	79,19	
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	108.796.450,00	104.367.100,00	(4.429.350,00)	95,93	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	108.796.450,00	104.367.100,00	(4.429.350,00)	95,93	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.796.450,00	104.367.100,00	(4.429.350,00)	95,93	
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	787.166.260,00	656.901.400,00	(130.264.860,00)	83,45	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	787.166.260,00	656.901.400,00	(130.264.860,00)	83,45	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	787.166.260,00	656.901.400,00	(130.264.860,00)	83,45	
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	246.648.235,00	201.551.435,00	(45.096.800,00)	81,72	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	246.648.235,00	201.551.435,00	(45.096.800,00)	81,72	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.648.235,00	201.551.435,00	(45.096.800,00)	81,72	
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	399.151.000,00	318.398.655,00	(80.752.345,00)	79,77	
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	399.151.000,00	318.398.655,00	(80.752.345,00)	79,77	
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.151.000,00	318.398.655,00	(80.752.345,00)	79,77	
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.900.000,00	9.675.000,00	(225.000,00)	97,73	
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.900.000,00	9.675.000,00	(225.000,00)	97,73	
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.675.000,00	(225.000,00)	97,73	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	17.775.000,00	17.725.000,00	(50.000,00)	99,72	
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	17.775.000,00	17.725.000,00	(50.000,00)	99,72	
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.775.000,00	17.725.000,00	(50.000,00)	99,72	
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	30.816.840,00	29.516.800,00	(1.300.040,00)	95,78	
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	30.816.840,00	29.516.800,00	(1.300.040,00)	95,78	
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.816.840,00	29.516.800,00	(1.300.040,00)	95,78	
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	9.900.000,00	6.476.800,00	(3.423.200,00)	65,42	
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	9.900.000,00	6.476.800,00	(3.423.200,00)	65,42	
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	6.476.800,00	(3.423.200,00)	65,42	
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	79.960.000,00	49.260.200,00	(30.699.800,00)	61,61	
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	79.960.000,00	49.260.200,00	(30.699.800,00)	61,61	
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.960.000,00	49.260.200,00	(30.699.800,00)	61,61	
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	117.209.200,00	96.664.100,00	(20.545.100,00)	82,47	
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	117.209.200,00	96.664.100,00	(20.545.100,00)	82,47	
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.209.200,00	96.664.100,00	(20.545.100,00)	82,47	
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	52.040.270,00	29.519.983,00	(22.520.287,00)	56,73	
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	52.040.270,00	29.519.983,00	(22.520.287,00)	56,73	
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.040.270,00	29.519.983,00	(22.520.287,00)	56,73	
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	210.250.400,00	204.857.600,00	(5.392.800,00)	97,44	
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	210.250.400,00	204.857.600,00	(5.392.800,00)	97,44	
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.250.400,00	4.857.600,00	(5.392.800,00)	47,39	
02.2.02.12.5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	622.211.425,00	546.005.046,00	(76.206.379,00)	87,75	
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	622.211.425,00	546.005.046,00	(76.206.379,00)	87,75	
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	622.211.425,00	546.005.046,00	(76.206.379,00)	87,75	
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	73.650.000,00	37.101.400,00	(36.548.600,00)	50,38	
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	73.650.000,00	37.101.400,00	(36.548.600,00)	50,38	
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.650.000,00	37.101.400,00	(36.548.600,00)	50,38	
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	119.065.000,00	91.928.200,00	(27.136.800,00)	77,21	
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	119.065.000,00	91.928.200,00	(27.136.800,00)	77,21	
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.065.000,00	91.928.200,00	(27.136.800,00)	77,21	
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	393.120.336,00	383.060.330,00	(10.060.006,00)	97,44	
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	382.620.336,00	372.565.330,00	(10.055.006,00)	97,37	
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.620.336,00	372.565.330,00	(10.055.006,00)	97,37	
02.2.02.18.5.2	BELANJA MODAL	10.500.000,00	10.495.000,00	(5.000,00)	99,95	
02.2.02.18.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	10.495.000,00	(5.000,00)	99,95	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	105.000.000,00	103.300.000,00	(1.700.000,00)	98,38	
02.2.02.19.5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	103.300.000,00	(1.700.000,00)	98,38	
02.2.02.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	103.300.000,00	(1.700.000,00)	98,38	
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	443.139.870,00	311.702.842,00	(131.437.028,00)	70,34	
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	443.139.870,00	311.702.842,00	(131.437.028,00)	70,34	
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	443.139.870,00	311.702.842,00	(131.437.028,00)	70,34	
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	574.921.087,00	511.238.004,00	(63.683.083,00)	88,92	
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	574.921.087,00	511.238.004,00	(63.683.083,00)	88,92	
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.921.087,00	261.238.004,00	(63.683.083,00)	80,40	
02.2.02.25.5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21.462.514.461,00	16.303.984.188,00	(5.158.530.273,00)	75,96	
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	20.910.879.141,00	15.950.243.662,00	(4.960.635.479,00)	76,28	
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.910.879.141,00	15.950.243.662,00	(4.960.635.479,00)	76,28	
02.2.02.26.5.2	BELANJA MODAL	551.635.320,00	353.740.526,00	(197.894.794,00)	64,13	
02.2.02.26.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	530.943.500,00	353.740.526,00	(177.202.974,00)	66,62	
02.2.02.26.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.691.820,00	0,00	(20.691.820,00)	0	
02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.29.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.29.5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	11.308.168.000,00	9.623.224.391,00	(1.684.943.609,00)	85,10	
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	11.308.168.000,00	9.623.224.391,00	(1.684.943.609,00)	85,10	
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.308.168.000,00	9.623.224.391,00	(1.684.943.609,00)	85,10	
02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	551.180.000,00	32.956.900,00	(518.223.100,00)	5,98	
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	551.180.000,00	32.956.900,00	(518.223.100,00)	5,98	
02.2.02.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.180.000,00	32.956.900,00	(518.223.100,00)	5,98	
02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.246.168.307,00	1.169.990.310,00	(76.177.997,00)	93,89	
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	1.246.168.307,00	1.169.990.310,00	(76.177.997,00)	93,89	
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.246.168.307,00	1.169.990.310,00	(76.177.997,00)	93,89	
02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	13.137.729.900,00	12.820.237.066,00	(317.492.834,00)	97,58	
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	13.137.729.900,00	12.820.237.066,00	(317.492.834,00)	97,58	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.893.360.000,00	12.575.867.166,00	(317.492.834,00)	97,54	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.893.360.000,00	12.575.867.166,00	(317.492.834,00)	97,54	
02.2.04.03.5.2	BELANJA MODAL	244.369.900,00	244.369.900,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.914.704,00	166.914.704,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.455.196,00	77.455.196,00	0,00	100,00	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.117.303.764,00	7.165.470.972,00	(951.832.792,00)	88,27	
02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.703.401.653,00	1.764.375.837,00	60.974.184,00	103,58	
02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	399.707.350,00	569.133.934,00	169.426.584,00	142,39	
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	392.215.450,00	369.483.934,00	(22.731.516,00)	94,20	
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.215.450,00	369.483.934,00	(22.731.516,00)	94,20	
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	7.491.900,00	199.650.000,00	192.158.100,00	2.664,88	
02.2.01.09.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.491.900,00	199.650.000,00	192.158.100,00	2.664,88	
02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	200.000.000,00	199.860.000,00	(140.000,00)	99,93	
02.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.860.000,00	(140.000,00)	99,93	
02.2.01.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.860.000,00	(140.000,00)	99,93	
02.2.01.12	Pembangunan Kanal Banjir	290.000.000,00	289.666.000,00	(334.000,00)	99,88	
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	290.000.000,00	289.666.000,00	(334.000,00)	99,88	
02.2.01.12.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	290.000.000,00	289.666.000,00	(334.000,00)	99,88	
02.2.01.27	Rehabilitasi Kanal Banjir	73.694.303,00	68.710.903,00	(4.983.400,00)	93,24	
02.2.01.27.5.1	BELANJA OPERASI	14.917.110,00	9.933.710,00	(4.983.400,00)	66,59	
02.2.01.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.917.110,00	9.933.710,00	(4.983.400,00)	66,59	
02.2.01.27.5.2	BELANJA MODAL	58.777.193,00	58.777.193,00	0,00	100,00	
02.2.01.27.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.777.193,00	58.777.193,00	0,00	100,00	
02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0	
02.2.01.53.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0	
02.2.01.53.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0	
02.2.01.59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	340.000.000,00	339.723.000,00	(277.000,00)	99,92	
02.2.01.59.5.1	BELANJA OPERASI	340.000.000,00	339.723.000,00	(277.000,00)	99,92	
02.2.01.59.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.000.000,00	339.723.000,00	(277.000,00)	99,92	
02.2.01.65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	300.000.000,00	297.282.000,00	(2.718.000,00)	99,09	
02.2.01.65.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	297.282.000,00	(2.718.000,00)	99,09	
02.2.01.65.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	297.282.000,00	(2.718.000,00)	99,09	
02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.413.902.111,00	5.401.095.135,00	(1.012.806.976,00)	84,21	
02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	100.000.000,00	99.275.000,00	(725.000,00)	99,28	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.275.000,00	(725.000,00)	99,28	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.275.000,00	(725.000,00)	99,28	
02.2.02.09	Peningkatan Bendung Irigasi	5.824.262.000,00	4.915.389.256,00	(908.872.744,00)	84,40	
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	190.000.000,00	189.937.800,00	(62.200,00)	99,97	
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	189.937.800,00	(62.200,00)	99,97	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.09.5.2	BELANJA MODAL	5.634.262.000,00	4.725.451.456,00	(908.810.544,00)	83,87	
02.2.02.09.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.634.262.000,00	4.725.451.456,00	(908.810.544,00)	83,87	
02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	220.640.111,00	131.330.879,00	(89.309.232,00)	59,52	
02.2.02.14.5.2	BELANJA MODAL	220.640.111,00	131.330.879,00	(89.309.232,00)	59,52	
02.2.02.14.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	220.640.111,00	131.330.879,00	(89.309.232,00)	59,52	
02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	200.000.000,00	199.900.000,00	(100.000,00)	99,95	
02.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.900.000,00	(100.000,00)	99,95	
02.2.02.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.900.000,00	(100.000,00)	99,95	
02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	69.000.000,00	55.200.000,00	(13.800.000,00)	80,00	
02.2.02.22.5.1	BELANJA OPERASI	69.000.000,00	55.200.000,00	(13.800.000,00)	80,00	
02.2.02.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00	55.200.000,00	(13.800.000,00)	80,00	
02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	9.267.758.521,00	7.487.700.136,00	(1.780.058.385,00)	80,79	
02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	9.175.737.716,00	7.401.996.670,00	(1.773.741.046,00)	80,67	
02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	8.435.000.000,00	6.685.000.000,00	(1.750.000.000,00)	79,25	
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.435.000.000,00	6.685.000.000,00	(1.750.000.000,00)	79,25	
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.435.000.000,00	6.685.000.000,00	(1.750.000.000,00)	79,25	
02.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	440.737.716,00	416.996.670,00	(23.741.046,00)	94,61	
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	440.737.716,00	416.996.670,00	(23.741.046,00)	94,61	
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.737.716,00	416.996.670,00	(23.741.046,00)	94,61	
02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	92.020.805,00	85.703.466,00	(6.317.339,00)	93,13	
02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	92.020.805,00	85.703.466,00	(6.317.339,00)	93,13	
02.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	92.020.805,00	85.703.466,00	(6.317.339,00)	93,13	
02.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.020.805,00	85.703.466,00	(6.317.339,00)	93,13	
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.354.715.400,00	2.326.485.650,00	(28.229.750,00)	98,80	
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.348.415.400,00	2.320.185.650,00	(28.229.750,00)	98,80	
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.175.750.000,00	2.156.068.500,00	(19.681.500,00)	99,10	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.175.750.000,00	2.156.068.500,00	(19.681.500,00)	99,10	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.175.750.000,00	2.156.068.500,00	(19.681.500,00)	99,10	
02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	55.546.000,00	55.203.400,00	(342.600,00)	99,38	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	55.546.000,00	55.203.400,00	(342.600,00)	99,38	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.546.000,00	55.203.400,00	(342.600,00)	99,38	
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	40.255.000,00	34.499.000,00	(5.756.000,00)	85,70	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	40.255.000,00	34.499.000,00	(5.756.000,00)	85,70	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.255.000,00	34.499.000,00	(5.756.000,00)	85,70	
02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.410.000,00	3.324.750,00	(85.250,00)	97,50	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.410.000,00	3.324.750,00	(85.250,00)	97,50	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.410.000,00	3.324.750,00	(85.250,00)	97,50	
02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	73.454.400,00	71.090.000,00	(2.364.400,00)	96,78	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	73.454.400,00	71.090.000,00	(2.364.400,00)	96,78	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.454.400,00	71.090.000,00	(2.364.400,00)	96,78	
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	767.327.400,00	766.856.700,00	(470.700,00)	99,94	
02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	13.092.500,00	12.887.700,00	(204.800,00)	98,44	
02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	13.092.500,00	12.887.700,00	(204.800,00)	98,44	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.092.500,00	12.887.700,00	(204.800,00)	98,44	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.092.500,00	12.887.700,00	(204.800,00)	98,44	
02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	754.234.900,00	753.969.000,00	(265.900,00)	99,96	
02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	273.050.100,00	272.994.000,00	(56.100,00)	99,98	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	273.050.100,00	272.994.000,00	(56.100,00)	99,98	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.050.100,00	272.994.000,00	(56.100,00)	99,98	
02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	308.025.850,00	307.972.000,00	(53.850,00)	99,98	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	308.025.850,00	307.972.000,00	(53.850,00)	99,98	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.025.850,00	7.972.000,00	(53.850,00)	99,33	
02.2.03.03.5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4.108.850,00	3.976.300,00	(132.550,00)	96,77	
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.108.850,00	3.976.300,00	(132.550,00)	96,77	
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.108.850,00	3.976.300,00	(132.550,00)	96,77	
02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	169.050.100,00	169.026.700,00	(23.400,00)	99,99	
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	169.050.100,00	169.026.700,00	(23.400,00)	99,99	
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.050.100,00	169.026.700,00	(23.400,00)	99,99	
02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	132.596.800,00	131.079.800,00	(1.517.000,00)	98,86	
02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	132.596.800,00	131.079.800,00	(1.517.000,00)	98,86	
02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	132.596.800,00	131.079.800,00	(1.517.000,00)	98,86	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	132.596.800,00	131.079.800,00	(1.517.000,00)	98,86	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.596.800,00	131.079.800,00	(1.517.000,00)	98,86	
02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	956.056.400,00	954.572.800,00	(1.483.600,00)	99,84	
02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	40.702.500,00	40.662.600,00	(39.900,00)	99,90	
02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	40.702.500,00	40.662.600,00	(39.900,00)	99,90	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	40.702.500,00	40.662.600,00	(39.900,00)	99,90	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.702.500,00	40.662.600,00	(39.900,00)	99,90	
02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	265.353.900,00	263.910.200,00	(1.443.700,00)	99,46	
02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	265.353.900,00	263.910.200,00	(1.443.700,00)	99,46	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	265.353.900,00	263.910.200,00	(1.443.700,00)	99,46	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.353.900,00	263.910.200,00	(1.443.700,00)	99,46	
02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	115.555.211,00	111.271.050,00	(4.284.161,00)	96,29	
02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	115.555.211,00	111.271.050,00	(4.284.161,00)	96,29	
02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	115.555.211,00	111.271.050,00	(4.284.161,00)	96,29	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	115.555.211,00	111.271.050,00	(4.284.161,00)	96,29	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.555.211,00	111.271.050,00	(4.284.161,00)	96,29	
02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	374.132.175,00	373.298.425,00	(833.750,00)	99,78	
02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	196.073.075,00	195.239.325,00	(833.750,00)	99,57	
02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	196.073.075,00	195.239.325,00	(833.750,00)	99,57	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	196.073.075,00	195.239.325,00	(833.750,00)	99,57	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.073.075,00	195.239.325,00	(833.750,00)	99,57	
02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	178.059.100,00	178.059.100,00	0,00	100,00	
02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	178.059.100,00	178.059.100,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	178.059.100,00	178.059.100,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.059.100,00	178.059.100,00	0,00	100,00	
02	PROGRAM PENATAAN DESA	1.606.264.087,00	1.591.707.634,00	(14.556.453,00)	99,09	
02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	1.606.264.087,00	1.591.707.634,00	(14.556.453,00)	99,09	
02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	17.698.300,00	17.681.200,00	(17.100,00)	99,90	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.698.300,00	17.681.200,00	(17.100,00)	99,90	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.698.300,00	17.681.200,00	(17.100,00)	99,90	
02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	1.588.565.787,00	1.574.026.434,00	(14.539.353,00)	99,08	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.588.565.787,00	1.574.026.434,00	(14.539.353,00)	99,08	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.588.565.787,00	1.574.026.434,00	(14.539.353,00)	99,08	
02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	137.000.000,00	135.837.630,00	(1.162.370,00)	99,15	
02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	99.840.600,00	99.302.930,00	(537.670,00)	99,46	
02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	49.840.600,00	49.302.930,00	(537.670,00)	98,92	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	49.840.600,00	49.302.930,00	(537.670,00)	98,92	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.840.600,00	49.302.930,00	(537.670,00)	98,92	
02.2.01.11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.11.5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	37.159.400,00	36.534.700,00	(624.700,00)	98,32	
02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	37.159.400,00	36.534.700,00	(624.700,00)	98,32	
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	37.159.400,00	36.534.700,00	(624.700,00)	98,32	
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.159.400,00	36.534.700,00	(624.700,00)	98,32	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.008.484.984,00	1.921.473.649,00	(87.011.335,00)	95,67	
02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	49.500.000,00	47.995.691,00	(1.504.309,00)	96,96	
02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	49.500.000,00	47.995.691,00	(1.504.309,00)	96,96	
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.01.5.2	BELANJA MODAL	37.000.000,00	35.495.691,00	(1.504.309,00)	95,93	
02.2.05.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.000.000,00	35.495.691,00	(1.504.309,00)	95,93	
02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	637.912.615,00	776.589.558,00	138.676.943,00	121,74	
02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	424.243.000,00	562.994.143,00	138.751.143,00	132,71	
02.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	55.443.000,00	197.427.500,00	141.984.500,00	356,09	
02.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.443.000,00	197.427.500,00	141.984.500,00	356,09	
02.2.06.01.5.2	BELANJA MODAL	368.800.000,00	365.566.643,00	(3.233.357,00)	99,12	
02.2.06.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.000.000,00	36.412.000,00	(2.588.000,00)	93,36	
02.2.06.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	322.300.000,00	321.654.643,00	(645.357,00)	99,80	
02.2.06.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	213.669.615,00	213.595.415,00	(74.200,00)	99,97	
02.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	42.271.500,00	42.197.300,00	(74.200,00)	99,82	
02.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.271.500,00	42.197.300,00	(74.200,00)	99,82	
02.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	171.398.115,00	171.398.115,00	0,00	100,00	
02.2.06.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	171.398.115,00	171.398.115,00	0,00	100,00	
02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.321.072.369,00	1.096.888.400,00	(224.183.969,00)	83,03	
02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	618.072.369,00	398.888.400,00	(219.183.969,00)	64,54	
02.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	618.072.369,00	398.888.400,00	(219.183.969,00)	64,54	
02.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	618.072.369,00	398.888.400,00	(219.183.969,00)	64,54	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	703.000.000,00	698.000.000,00	(5.000.000,00)	99,29	
02.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	703.000.000,00	698.000.000,00	(5.000.000,00)	99,29	
02.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	703.000.000,00	698.000.000,00	(5.000.000,00)	99,29	
02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.701.500.232,00	1.694.999.332,00	(6.500.900,00)	99,62	
02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.701.500.232,00	1.694.999.332,00	(6.500.900,00)	99,62	
02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.526.500.232,00	1.519.999.332,00	(6.500.900,00)	99,57	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.526.500.232,00	1.519.999.332,00	(6.500.900,00)	99,57	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.526.500.232,00	1.519.999.332,00	(6.500.900,00)	99,57	
02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.12.5.1.05	Belanja Hibah	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	100,00	
02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	159.410.935,00	158.183.310,00	(1.227.625,00)	99,23	
02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	83.440.135,00	83.326.610,00	(113.525,00)	99,86	
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	35.938.090,00	35.826.965,00	(111.125,00)	99,69	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.938.090,00	35.826.965,00	(111.125,00)	99,69	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.938.090,00	35.826.965,00	(111.125,00)	99,69	
02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	47.502.045,00	47.499.645,00	(2.400,00)	99,99	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	47.502.045,00	47.499.645,00	(2.400,00)	99,99	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.502.045,00	47.499.645,00	(2.400,00)	99,99	
02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	75.970.800,00	74.856.700,00	(1.114.100,00)	98,53	
02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	54.500.000,00	53.914.500,00	(585.500,00)	98,93	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	54.500.000,00	53.914.500,00	(585.500,00)	98,93	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.500.000,00	53.914.500,00	(585.500,00)	98,93	
02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	21.470.800,00	20.942.200,00	(528.600,00)	97,54	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.470.800,00	20.942.200,00	(528.600,00)	97,54	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.470.800,00	20.942.200,00	(528.600,00)	97,54	
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.294.800.712,00	3.136.731.051,00	(158.069.661,00)	95,20	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.389.559.137,00	1.377.266.676,00	(12.292.461,00)	99,12	
02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	3.416.800,00	3.100.000,00	(316.800,00)	90,73	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.416.800,00	3.100.000,00	(316.800,00)	90,73	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.416.800,00	3.100.000,00	(316.800,00)	90,73	
02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.386.142.337,00	1.374.166.676,00	(11.975.661,00)	99,14	
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.386.142.337,00	1.374.166.676,00	(11.975.661,00)	99,14	
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.286.142.337,00	1.274.166.676,00	(11.975.661,00)	99,07	
02.2.01.09.5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.905.241.575,00	1.759.464.375,00	(145.777.200,00)	92,35	
02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1.905.241.575,00	1.759.464.375,00	(145.777.200,00)	92,35	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.905.241.575,00	1.759.464.375,00	(145.777.200,00)	92,35	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.241.575,00	59.464.375,00	(777.200,00)	98,71	
02.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	1.845.000.000,00	1.700.000.000,00	(145.000.000,00)	92,14	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	56.595.210,00	55.712.560,00	(882.650,00)	98,44	
02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	56.595.210,00	55.712.560,00	(882.650,00)	98,44	
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	56.595.210,00	55.712.560,00	(882.650,00)	98,44	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	56.595.210,00	55.712.560,00	(882.650,00)	98,44	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.595.210,00	55.712.560,00	(882.650,00)	98,44	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	41.650.210,00	36.608.150,00	(5.042.060,00)	87,89	
02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	41.650.210,00	36.608.150,00	(5.042.060,00)	87,89	
02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41.650.210,00	36.608.150,00	(5.042.060,00)	87,89	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	41.650.210,00	36.608.150,00	(5.042.060,00)	87,89	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.650.210,00	36.608.150,00	(5.042.060,00)	87,89	
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	185.682.990,00	185.229.890,00	(453.100,00)	99,76	
02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.058.600,00	47.038.400,00	(20.200,00)	99,96	
02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	7.058.600,00	7.038.400,00	(20.200,00)	99,71	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.058.600,00	7.038.400,00	(20.200,00)	99,71	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.058.600,00	7.038.400,00	(20.200,00)	99,71	
02.2.02	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	88.624.390,00	88.191.490,00	(432.900,00)	99,51	
02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	74.031.390,00	73.680.490,00	(350.900,00)	99,53	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	74.031.390,00	73.680.490,00	(350.900,00)	99,53	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.031.390,00	73.680.490,00	(350.900,00)	99,53	
02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	14.593.000,00	14.511.000,00	(82.000,00)	99,44	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.593.000,00	14.511.000,00	(82.000,00)	99,44	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.593.000,00	14.511.000,00	(82.000,00)	99,44	
02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	493.045.251,00	492.234.399,00	(810.852,00)	99,84	
02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	124.826.604,00	124.656.122,00	(170.482,00)	99,86	
02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.910.430,00	28.866.430,00	(44.000,00)	99,85	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.910.430,00	28.866.430,00	(44.000,00)	99,85	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.910.430,00	28.866.430,00	(44.000,00)	99,85	
02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	48.703.372,00	48.654.090,00	(49.282,00)	99,90	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	48.703.372,00	48.654.090,00	(49.282,00)	99,90	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.703.372,00	48.654.090,00	(49.282,00)	99,90	
02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.332.500,00	25.280.800,00	(51.700,00)	99,80	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	25.332.500,00	25.280.800,00	(51.700,00)	99,80	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.332.500,00	25.280.800,00	(51.700,00)	99,80	
02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.880.302,00	21.854.802,00	(25.500,00)	99,88	
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	21.880.302,00	21.854.802,00	(25.500,00)	99,88	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.880.302,00	21.854.802,00	(25.500,00)	99,88	
02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	368.218.647,00	367.578.277,00	(640.370,00)	99,83	
02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	116.110.093,00	116.016.023,00	(94.070,00)	99,92	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	116.110.093,00	116.016.023,00	(94.070,00)	99,92	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.110.093,00	116.016.023,00	(94.070,00)	99,92	
02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	218.536.082,00	218.536.082,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	218.536.082,00	218.536.082,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	218.536.082,00	218.536.082,00	0,00	100,00	
02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	12.226.650,00	11.680.350,00	(546.300,00)	95,53	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.226.650,00	11.680.350,00	(546.300,00)	95,53	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.226.650,00	11.680.350,00	(546.300,00)	95,53	
02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	21.345.822,00	21.345.822,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	21.345.822,00	21.345.822,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.345.822,00	21.345.822,00	0,00	100,00	
02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	13.399.678,00	13.399.678,00	0,00	100,00	
02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	13.399.678,00	13.399.678,00	0,00	100,00	
02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	13.399.678,00	13.399.678,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.399.678,00	13.399.678,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.399.678,00	13.399.678,00	0,00	100,00	
02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	150.128.104,00	149.681.354,00	(446.750,00)	99,70	
02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	150.128.104,00	149.681.354,00	(446.750,00)	99,70	
02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	40.692.800,00	40.541.800,00	(151.000,00)	99,63	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	40.692.800,00	40.541.800,00	(151.000,00)	99,63	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.692.800,00	40.541.800,00	(151.000,00)	99,63	
02.2.03.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	105.977.804,00	105.757.054,00	(220.750,00)	99,79	
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	105.977.804,00	105.757.054,00	(220.750,00)	99,79	
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.977.804,00	105.757.054,00	(220.750,00)	99,79	
02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.457.500,00	3.382.500,00	(75.000,00)	97,83	
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.457.500,00	3.382.500,00	(75.000,00)	97,83	
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.457.500,00	3.382.500,00	(75.000,00)	97,83	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.408.267.535,00	5.370.741.417,00	(37.526.118,00)	99,31	
02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.956.897.975,00	3.939.016.762,00	(17.881.213,00)	99,55	
02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	559.024.800,00	558.229.180,00	(795.620,00)	99,86	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	559.024.800,00	558.229.180,00	(795.620,00)	99,86	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.024.800,00	558.229.180,00	(795.620,00)	99,86	
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.397.873.175,00	3.380.787.582,00	(17.085.593,00)	99,50	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.397.873.175,00	3.380.787.582,00	(17.085.593,00)	99,50	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.397.873.175,00	3.380.787.582,00	(17.085.593,00)	99,50	
02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	223.850.000,00	221.956.000,00	(1.894.000,00)	99,15	
02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	223.850.000,00	221.956.000,00	(1.894.000,00)	99,15	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	190.500.000,00	188.956.000,00	(1.544.000,00)	99,19	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.500.000,00	188.956.000,00	(1.544.000,00)	99,19	
02.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	33.350.000,00	33.000.000,00	(350.000,00)	98,95	
02.2.03.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.350.000,00	8.300.000,00	(50.000,00)	99,40	
02.2.03.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	24.700.000,00	(300.000,00)	98,80	
02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	420.050.275,00	419.351.300,00	(698.975,00)	99,83	
02.2.05.04	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	420.050.275,00	419.351.300,00	(698.975,00)	99,83	
02.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	420.050.275,00	419.351.300,00	(698.975,00)	99,83	
02.2.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.050.275,00	69.351.300,00	(698.975,00)	99,00	
02.2.05.04.5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	807.469.285,00	790.417.355,00	(17.051.930,00)	97,89	
02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	771.469.285,00	754.417.355,00	(17.051.930,00)	97,79	
02.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	771.469.285,00	754.417.355,00	(17.051.930,00)	97,79	
02.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	771.469.285,00	754.417.355,00	(17.051.930,00)	97,79	
02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.050.515.301,00	1.049.009.345,00	(1.505.956,00)	99,86	
02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.050.515.301,00	1.049.009.345,00	(1.505.956,00)	99,86	
02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	93.119.300,00	92.754.200,00	(365.100,00)	99,61	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	93.119.300,00	92.754.200,00	(365.100,00)	99,61	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.119.300,00	92.754.200,00	(365.100,00)	99,61	
02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	822.214.779,00	821.073.923,00	(1.140.856,00)	99,86	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	822.214.779,00	821.073.923,00	(1.140.856,00)	99,86	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	822.214.779,00	821.073.923,00	(1.140.856,00)	99,86	
02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	57.661.997,00	57.661.997,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	33.871.200,00	33.871.200,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.871.200,00	33.871.200,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	23.790.797,00	23.790.797,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.790.797,00	23.790.797,00	0,00	100,00	
02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	77.519.225,00	77.519.225,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	77.519.225,00	77.519.225,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.519.225,00	77.519.225,00	0,00	100,00	
02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	76.721.200,00	74.690.224,00	(2.030.976,00)	97,35	
02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	76.721.200,00	74.690.224,00	(2.030.976,00)	97,35	
02.2.01.02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	76.721.200,00	74.690.224,00	(2.030.976,00)	97,35	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	76.721.200,00	74.690.224,00	(2.030.976,00)	97,35	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.721.200,00	74.690.224,00	(2.030.976,00)	97,35	
02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.656.589.805,00	10.498.435.935,00	(158.153.870,00)	98,52	
02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	349.336.430,00	348.182.579,00	(1.153.851,00)	99,67	
02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	80.200.430,00	80.042.670,00	(157.760,00)	99,80	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	80.200.430,00	80.042.670,00	(157.760,00)	99,80	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.200.430,00	80.042.670,00	(157.760,00)	99,80	
02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	269.136.000,00	268.139.909,00	(996.091,00)	99,63	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	269.136.000,00	268.139.909,00	(996.091,00)	99,63	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.136.000,00	268.139.909,00	(996.091,00)	99,63	
02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	9.086.493.410,00	8.948.448.300,00	(138.045.110,00)	98,48	
02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	780.788.040,00	757.852.400,00	(22.935.640,00)	97,06	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	780.788.040,00	757.852.400,00	(22.935.640,00)	97,06	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.788.040,00	757.852.400,00	(22.935.640,00)	97,06	
02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	6.008.520.000,00	5.993.520.000,00	(15.000.000,00)	99,75	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.008.520.000,00	5.993.520.000,00	(15.000.000,00)	99,75	
02.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	6.008.520.000,00	5.993.520.000,00	(15.000.000,00)	99,75	
02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	2.297.185.370,00	2.197.075.900,00	(100.109.470,00)	95,64	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.297.185.370,00	2.197.075.900,00	(100.109.470,00)	95,64	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.009.509.370,00	1.919.539.300,00	(89.970.070,00)	95,52	
02.2.02.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	287.676.000,00	277.536.600,00	(10.139.400,00)	96,48	
02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.067.800.965,00	1.049.262.428,00	(18.538.537,00)	98,26	
02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	255.844.938,00	243.431.535,00	(12.413.403,00)	95,15	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	255.844.938,00	243.431.535,00	(12.413.403,00)	95,15	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.844.938,00	243.431.535,00	(12.413.403,00)	95,15	
02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	764.480.678,00	759.049.333,00	(5.431.345,00)	99,29	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	764.480.678,00	759.049.333,00	(5.431.345,00)	99,29	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	674.480.678,00	669.049.333,00	(5.431.345,00)	99,19	
02.2.03.02.5.1.05	Belanja Hibah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	47.475.349,00	46.781.560,00	(693.789,00)	98,54	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	47.475.349,00	46.781.560,00	(693.789,00)	98,54	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.475.349,00	46.781.560,00	(693.789,00)	98,54	
02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	152.959.000,00	152.542.628,00	(416.372,00)	99,73	
02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	152.959.000,00	152.542.628,00	(416.372,00)	99,73	
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	152.959.000,00	152.542.628,00	(416.372,00)	99,73	
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.959.000,00	152.542.628,00	(416.372,00)	99,73	
02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.861.518.039,00	15.871.674.174,00	10.156.135,00	100,06	
02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	232.354.830,00	232.256.725,00	(98.105,00)	99,96	
02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	38.090.830,00	38.088.525,00	(2.305,00)	99,99	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	38.090.830,00	38.088.525,00	(2.305,00)	99,99	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.090.830,00	38.088.525,00	(2.305,00)	99,99	
02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	194.264.000,00	194.168.200,00	(95.800,00)	99,95	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	194.264.000,00	194.168.200,00	(95.800,00)	99,95	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.264.000,00	194.168.200,00	(95.800,00)	99,95	
02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	84.362.000,00	84.110.000,00	(252.000,00)	99,70	
02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	25.032.000,00	24.948.000,00	(84.000,00)	99,66	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.032.000,00	24.948.000,00	(84.000,00)	99,66	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.032.000,00	24.948.000,00	(84.000,00)	99,66	
02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	25.032.000,00	24.948.000,00	(84.000,00)	99,66	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.032.000,00	24.948.000,00	(84.000,00)	99,66	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.032.000,00	24.948.000,00	(84.000,00)	99,66	
02.2.02.03	Pembahasan APBD	17.149.000,00	17.107.000,00	(42.000,00)	99,76	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	17.149.000,00	17.107.000,00	(42.000,00)	99,76	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.149.000,00	17.107.000,00	(42.000,00)	99,76	
02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	17.149.000,00	17.107.000,00	(42.000,00)	99,76	
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	17.149.000,00	17.107.000,00	(42.000,00)	99,76	
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.149.000,00	17.107.000,00	(42.000,00)	99,76	
02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.230.510.000,00	1.230.183.200,00	(326.800,00)	99,97	
02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	96.500.000,00	96.250.000,00	(250.000,00)	99,74	
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	96.500.000,00	96.250.000,00	(250.000,00)	99,74	
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.500.000,00	96.250.000,00	(250.000,00)	99,74	
02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	663.000.000,00	663.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	663.000.000,00	663.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	663.000.000,00	663.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	41.010.000,00	40.933.200,00	(76.800,00)	99,81	
02.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	41.010.000,00	40.933.200,00	(76.800,00)	99,81	
02.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.010.000,00	40.933.200,00	(76.800,00)	99,81	
02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.125.350.000,00	1.140.180.000,00	14.830.000,00	101,32	
02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.125.350.000,00	1.140.180.000,00	14.830.000,00	101,32	
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.125.350.000,00	1.140.180.000,00	14.830.000,00	101,32	
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.350.000,00	1.140.180.000,00	14.830.000,00	101,32	
02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1.066.714.960,00	1.064.100.000,00	(2.614.960,00)	99,75	
02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1.066.714.960,00	1.064.100.000,00	(2.614.960,00)	99,75	
02.2.07.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.066.714.960,00	1.064.100.000,00	(2.614.960,00)	99,75	
02.2.07.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.066.714.960,00	1.064.100.000,00	(2.614.960,00)	99,75	
02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	12.122.226.249,00	12.120.844.249,00	(1.382.000,00)	99,99	
02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.877.999.999,00	11.877.999.999,00	0,00	100,00	
02.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.877.999.999,00	11.877.999.999,00	0,00	100,00	
02.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.877.999.999,00	11.877.999.999,00	0,00	100,00	
02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	244.226.250,00	242.844.250,00	(1.382.000,00)	99,43	
02.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	244.226.250,00	242.844.250,00	(1.382.000,00)	99,43	
02.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.226.250,00	242.844.250,00	(1.382.000,00)	99,43	
02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	498.889.239,00	466.112.829,00	(32.776.410,00)	93,43	
02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	360.754.294,00	352.222.634,00	(8.531.660,00)	97,64	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	12.331.620,00	12.331.620,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.331.620,00	12.331.620,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.331.620,00	12.331.620,00	0,00	100,00	
02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	25.751.739,00	25.614.429,00	(137.310,00)	99,47	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	25.751.739,00	25.614.429,00	(137.310,00)	99,47	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.751.739,00	25.614.429,00	(137.310,00)	99,47	
02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	140.679.665,00	140.615.415,00	(64.250,00)	99,95	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	140.679.665,00	140.615.415,00	(64.250,00)	99,95	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.679.665,00	140.615.415,00	(64.250,00)	99,95	
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	181.991.270,00	173.661.170,00	(8.330.100,00)	95,42	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	181.991.270,00	173.661.170,00	(8.330.100,00)	95,42	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.991.270,00	173.661.170,00	(8.330.100,00)	95,42	
02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	67.644.200,00	48.399.200,00	(19.245.000,00)	71,55	
02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	21.294.200,00	2.064.200,00	(19.230.000,00)	9,69	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.294.200,00	2.064.200,00	(19.230.000,00)	9,69	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.294.200,00	2.064.200,00	(19.230.000,00)	9,69	
02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	46.350.000,00	46.335.000,00	(15.000,00)	99,97	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	46.350.000,00	46.335.000,00	(15.000,00)	99,97	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.350.000,00	46.335.000,00	(15.000,00)	99,97	
02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	70.490.745,00	65.490.995,00	(4.999.750,00)	92,91	
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	70.490.745,00	65.490.995,00	(4.999.750,00)	92,91	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	70.490.745,00	65.490.995,00	(4.999.750,00)	92,91	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.490.745,00	65.490.995,00	(4.999.750,00)	92,91	
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	153.209.409.776,00	63.560.039.159,00	(89.649.370.617,00)	41,49	
02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.040.610.909,00	2.023.007.040,00	(17.603.869,00)	99,14	
02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	146.277.235,00	145.718.818,00	(558.417,00)	99,62	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	146.277.235,00	145.718.818,00	(558.417,00)	99,62	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.277.235,00	145.718.818,00	(558.417,00)	99,62	
02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	96.176.860,00	95.349.277,00	(827.583,00)	99,14	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	96.176.860,00	95.349.277,00	(827.583,00)	99,14	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.176.860,00	95.349.277,00	(827.583,00)	99,14	
02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	153.729.900,00	153.161.162,00	(568.738,00)	99,63	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	153.729.900,00	153.161.162,00	(568.738,00)	99,63	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.729.900,00	153.161.162,00	(568.738,00)	99,63	
02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	23.641.590,00	22.121.615,00	(1.519.975,00)	93,57	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	23.641.590,00	22.121.615,00	(1.519.975,00)	93,57	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.641.590,00	22.121.615,00	(1.519.975,00)	93,57	
02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	5.880.000,00	5.566.000,00	(314.000,00)	94,66	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.880.000,00	5.566.000,00	(314.000,00)	94,66	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	5.566.000,00	(314.000,00)	94,66	
02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	5.880.000,00	5.566.000,00	(314.000,00)	94,66	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.880.000,00	5.566.000,00	(314.000,00)	94,66	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	5.566.000,00	(314.000,00)	94,66	
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.039.919.230,00	1.030.715.740,00	(9.203.490,00)	99,11	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.039.919.230,00	1.030.715.740,00	(9.203.490,00)	99,11	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.039.919.230,00	1.030.715.740,00	(9.203.490,00)	99,11	
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	294.763.094,00	293.938.030,00	(825.064,00)	99,72	
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	294.763.094,00	293.938.030,00	(825.064,00)	99,72	
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.763.094,00	293.938.030,00	(825.064,00)	99,72	
02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	177.244.900,00	176.003.500,00	(1.241.400,00)	99,30	
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	177.244.900,00	176.003.500,00	(1.241.400,00)	99,30	
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.244.900,00	176.003.500,00	(1.241.400,00)	99,30	
02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	13.776.000,00	13.164.800,00	(611.200,00)	95,56	
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	13.776.000,00	13.164.800,00	(611.200,00)	95,56	
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.776.000,00	13.164.800,00	(611.200,00)	95,56	
02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	63.190.400,00	62.413.598,00	(776.802,00)	98,77	
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	63.190.400,00	62.413.598,00	(776.802,00)	98,77	
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.190.400,00	62.413.598,00	(776.802,00)	98,77	
02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	20.131.700,00	19.288.500,00	(843.200,00)	95,81	
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	20.131.700,00	19.288.500,00	(843.200,00)	95,81	
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.131.700,00	19.288.500,00	(843.200,00)	95,81	
02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	793.084.737,00	791.497.873,00	(1.586.864,00)	99,80	
02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	356.405.162,00	355.615.470,00	(789.692,00)	99,78	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	356.255.162,00	355.465.470,00	(789.692,00)	99,77	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.255.162,00	355.465.470,00	(789.692,00)	99,77	
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	100,00	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.951.936,00	5.750.000,00	(201.936,00)	96,61	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.951.936,00	5.750.000,00	(201.936,00)	96,61	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.951.936,00	5.750.000,00	(201.936,00)	96,61	
02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	25.749.449,00	25.664.800,00	(84.649,00)	99,67	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.749.449,00	25.664.800,00	(84.649,00)	99,67	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.749.449,00	25.664.800,00	(84.649,00)	99,67	
02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	9.999.935,00	9.925.600,00	(74.335,00)	99,26	
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	9.999.935,00	9.925.600,00	(74.335,00)	99,26	
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.935,00	9.925.600,00	(74.335,00)	99,26	
02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	394.978.255,00	394.542.003,00	(436.252,00)	99,89	
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	394.978.255,00	394.542.003,00	(436.252,00)	99,89	
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.978.255,00	394.542.003,00	(436.252,00)	99,89	
02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.000.528.575,00	971.480.070,00	(29.048.505,00)	97,10	
02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	216.207.779,00	215.510.940,00	(696.839,00)	99,68	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	216.207.779,00	215.510.940,00	(696.839,00)	99,68	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.207.779,00	215.510.940,00	(696.839,00)	99,68	
02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	30.957.144,00	26.766.100,00	(4.191.044,00)	86,46	
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	30.957.144,00	26.766.100,00	(4.191.044,00)	86,46	
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.957.144,00	26.766.100,00	(4.191.044,00)	86,46	
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	574.595.281,00	566.338.100,00	(8.257.181,00)	98,56	
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	574.595.281,00	566.338.100,00	(8.257.181,00)	98,56	
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	574.595.281,00	566.338.100,00	(8.257.181,00)	98,56	
02.2.03.05.5.2	BELANJA MODAL	23.436.000,00	23.436.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.436.000,00	23.436.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	73.792.565,00	68.953.530,00	(4.839.035,00)	93,44	
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	73.792.565,00	68.953.530,00	(4.839.035,00)	93,44	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.792.565,00	68.953.530,00	(4.839.035,00)	93,44	
02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	54.976.275,00	49.455.100,00	(5.521.175,00)	89,96	
02.2.03.10.5.1	BELANJA OPERASI	54.976.275,00	49.455.100,00	(5.521.175,00)	89,96	
02.2.03.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.976.275,00	49.455.100,00	(5.521.175,00)	89,96	
02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	49.999.531,00	44.456.300,00	(5.543.231,00)	88,91	
02.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	49.999.531,00	44.456.300,00	(5.543.231,00)	88,91	
02.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.531,00	44.456.300,00	(5.543.231,00)	88,91	
02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	148.589.345.755,00	58.997.753.138,00	(89.591.592.617,00)	39,71	
02.2.04.03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	9.086.272.766,00	273.117.021,00	(8.813.155.745,00)	3,01	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.086.272.766,00	273.117.021,00	(8.813.155.745,00)	3,01	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.622.755,00	0,00	(282.622.755,00)	0	
02.2.04.03.5.1.03	Belanja Bunga	8.803.650.011,00	273.117.021,00	(8.530.532.990,00)	3,10	
02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	134.284.583.160,00	55.227.567.746,00	(79.057.015.414,00)	41,13	
02.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	158.387.660,00	158.379.830,00	(7.830,00)	100,00	
02.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.387.660,00	158.379.830,00	(7.830,00)	100,00	
02.2.04.08.5.2	BELANJA MODAL	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.08.5.4	BELANJA TRANSFER	134.111.045.500,00	55.054.037.916,00	(79.057.007.584,00)	41,05	
02.2.04.08.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	134.111.045.500,00	55.054.037.916,00	(79.057.007.584,00)	41,05	
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.912.043.380,00	1.190.621.929,00	(1.721.421.451,00)	40,89	
02.2.04.09.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.912.043.380,00	1.190.621.929,00	(1.721.421.451,00)	40,89	
02.2.04.09.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.912.043.380,00	1.190.621.929,00	(1.721.421.451,00)	40,89	
02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.306.446.449,00	2.306.446.442,00	(7,00)	100,00	
02.2.04.10.5.4	BELANJA TRANSFER	2.306.446.449,00	2.306.446.442,00	(7,00)	100,00	
02.2.04.10.5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.306.446.449,00	2.306.446.442,00	(7,00)	100,00	
02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	785.839.800,00	776.301.038,00	(9.538.762,00)	98,79	
02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	133.778.000,00	133.638.464,00	(139.536,00)	99,90	
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	133.778.000,00	133.638.464,00	(139.536,00)	99,90	
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.778.000,00	133.638.464,00	(139.536,00)	99,90	
02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	396.087.200,00	386.982.174,00	(9.105.026,00)	97,70	
02.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	385.463.200,00	376.358.174,00	(9.105.026,00)	97,64	
02.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.463.200,00	376.358.174,00	(9.105.026,00)	97,64	
02.2.05.02.5.2	BELANJA MODAL	10.624.000,00	10.624.000,00	0,00	100,00	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.05.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.624.000,00	10.624.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	255.974.600,00	255.680.400,00	(294.200,00)	99,89	
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	255.974.600,00	255.680.400,00	(294.200,00)	99,89	
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.974.600,00	255.680.400,00	(294.200,00)	99,89	
02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.192.878.790,00	1.138.054.312,00	(54.824.478,00)	95,40	
02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	613.405.600,00	606.604.661,00	(6.800.939,00)	98,89	
02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	60.000.000,00	57.246.000,00	(2.754.000,00)	95,41	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	57.246.000,00	(2.754.000,00)	95,41	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	57.246.000,00	(2.754.000,00)	95,41	
02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	17.515.600,00	15.500.600,00	(2.015.000,00)	88,50	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	17.515.600,00	15.500.600,00	(2.015.000,00)	88,50	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.515.600,00	15.500.600,00	(2.015.000,00)	88,50	
02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	179.764.000,00	178.407.978,00	(1.356.022,00)	99,25	
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	179.764.000,00	178.407.978,00	(1.356.022,00)	99,25	
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.764.000,00	178.407.978,00	(1.356.022,00)	99,25	
02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	56.126.000,00	55.450.083,00	(675.917,00)	98,80	
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	56.126.000,00	55.450.083,00	(675.917,00)	98,80	
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.126.000,00	55.450.083,00	(675.917,00)	98,80	
02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	353.592.000,00	306.084.921,00	(47.507.079,00)	86,56	
02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	160.457.500,00	127.763.000,00	(32.694.500,00)	79,62	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	160.457.500,00	127.763.000,00	(32.694.500,00)	79,62	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.457.500,00	127.763.000,00	(32.694.500,00)	79,62	
02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	47.696.500,00	45.217.417,00	(2.479.083,00)	94,80	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	47.696.500,00	45.217.417,00	(2.479.083,00)	94,80	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.696.500,00	45.217.417,00	(2.479.083,00)	94,80	
02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	145.438.000,00	133.104.504,00	(12.333.496,00)	91,52	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	145.438.000,00	133.104.504,00	(12.333.496,00)	91,52	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.438.000,00	133.104.504,00	(12.333.496,00)	91,52	
02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	68.381.190,00	67.864.730,00	(516.460,00)	99,24	
02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	68.381.190,00	67.864.730,00	(516.460,00)	99,24	
02.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	68.381.190,00	67.864.730,00	(516.460,00)	99,24	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.381.190,00	67.864.730,00	(516.460,00)	99,24	
02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	491.971.605,00	489.770.755,00	(2.200.850,00)	99,55	
02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	491.971.605,00	489.770.755,00	(2.200.850,00)	99,55	
02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	491.971.605,00	489.770.755,00	(2.200.850,00)	99,55	
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	491.971.605,00	489.770.755,00	(2.200.850,00)	99,55	
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	491.971.605,00	489.770.755,00	(2.200.850,00)	99,55	
02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	263.846.354,00	253.812.535,00	(10.033.819,00)	96,20	
02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	109.612.570,00	109.586.693,00	(25.877,00)	99,98	
02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	109.612.570,00	109.586.693,00	(25.877,00)	99,98	
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	109.612.570,00	109.586.693,00	(25.877,00)	99,98	
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.612.570,00	109.586.693,00	(25.877,00)	99,98	
02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	154.233.784,00	144.225.842,00	(10.007.942,00)	93,51	
02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	154.233.784,00	144.225.842,00	(10.007.942,00)	93,51	
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	154.233.784,00	144.225.842,00	(10.007.942,00)	93,51	
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.233.784,00	144.225.842,00	(10.007.942,00)	93,51	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.727.674.287,00	1.608.673.173,00	(119.001.114,00)	93,11	
02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.561.083.000,00	1.484.996.173,00	(76.086.827,00)	95,13	
02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	914.460.000,00	853.641.699,00	(60.818.301,00)	93,35	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	914.460.000,00	853.641.699,00	(60.818.301,00)	93,35	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	914.460.000,00	853.641.699,00	(60.818.301,00)	93,35	
02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	146.700.000,00	144.710.300,00	(1.989.700,00)	98,64	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	146.700.000,00	144.710.300,00	(1.989.700,00)	98,64	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.700.000,00	144.710.300,00	(1.989.700,00)	98,64	
02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	122.800.000,00	120.872.900,00	(1.927.100,00)	98,43	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	122.800.000,00	120.872.900,00	(1.927.100,00)	98,43	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.800.000,00	120.872.900,00	(1.927.100,00)	98,43	
02.2.01.05	Pengawasan Desa	202.600.000,00	198.150.000,00	(4.450.000,00)	97,80	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	202.600.000,00	198.150.000,00	(4.450.000,00)	97,80	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.600.000,00	198.150.000,00	(4.450.000,00)	97,80	
02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	174.523.000,00	167.621.274,00	(6.901.726,00)	96,05	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	174.523.000,00	167.621.274,00	(6.901.726,00)	96,05	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.523.000,00	167.621.274,00	(6.901.726,00)	96,05	
02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	166.591.287,00	123.677.000,00	(42.914.287,00)	74,24	
02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	57.591.287,00	19.902.000,00	(37.689.287,00)	34,56	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	57.591.287,00	19.902.000,00	(37.689.287,00)	34,56	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.591.287,00	19.902.000,00	(37.689.287,00)	34,56	
02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	109.000.000,00	103.775.000,00	(5.225.000,00)	95,21	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	109.000.000,00	103.775.000,00	(5.225.000,00)	95,21	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.000.000,00	103.775.000,00	(5.225.000,00)	95,21	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	189.845.166,00	186.489.090,00	(3.356.076,00)	98,23	
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	168.515.866,00	167.427.200,00	(1.088.666,00)	99,35	
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	168.515.866,00	167.427.200,00	(1.088.666,00)	99,35	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	168.515.866,00	167.427.200,00	(1.088.666,00)	99,35	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.515.866,00	167.427.200,00	(1.088.666,00)	99,35	
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	21.329.300,00	19.061.890,00	(2.267.410,00)	89,37	
02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	21.329.300,00	19.061.890,00	(2.267.410,00)	89,37	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.329.300,00	19.061.890,00	(2.267.410,00)	89,37	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.329.300,00	19.061.890,00	(2.267.410,00)	89,37	
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.436.376.500,00	8.183.470.515,00	(252.905.985,00)	97,00	
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	8.129.900.000,00	7.901.487.500,00	(228.412.500,00)	97,19	
03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.129.900.000,00	7.901.487.500,00	(228.412.500,00)	97,19	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.129.900.000,00	7.901.487.500,00	(228.412.500,00)	97,19	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.129.900.000,00	7.901.487.500,00	(228.412.500,00)	97,19	
03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	306.476.500,00	281.983.015,00	(24.493.485,00)	92,01	
03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	306.476.500,00	281.983.015,00	(24.493.485,00)	92,01	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	306.476.500,00	281.983.015,00	(24.493.485,00)	92,01	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.476.500,00	281.983.015,00	(24.493.485,00)	92,01	
03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.447.307.908,00	6.279.596.792,00	(1.167.711.116,00)	84,32	
03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7.447.307.908,00	6.279.596.792,00	(1.167.711.116,00)	84,32	
03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6.381.307.908,00	5.463.033.508,00	(918.274.400,00)	85,61	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	701.955.665,00	684.153.345,00	(17.802.320,00)	97,46	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	701.955.665,00	684.153.345,00	(17.802.320,00)	97,46	
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	5.679.352.243,00	4.778.880.163,00	(900.472.080,00)	84,14	
03.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.679.352.243,00	4.778.880.163,00	(900.472.080,00)	84,14	
03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.066.000.000,00	816.563.284,00	(249.436.716,00)	76,60	
03.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	1.066.000.000,00	816.563.284,00	(249.436.716,00)	76,60	
03.2.01.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.066.000.000,00	816.563.284,00	(249.436.716,00)	76,60	
03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	442.246.588,00	395.194.198,00	(47.052.390,00)	89,36	
03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	199.000.000,00	198.031.438,00	(968.562,00)	99,51	
03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	199.000.000,00	198.031.438,00	(968.562,00)	99,51	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	199.000.000,00	198.031.438,00	(968.562,00)	99,51	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.640.000,00	196.671.438,00	(968.562,00)	99,51	
03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	243.246.588,00	197.162.760,00	(46.083.828,00)	81,05	
03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	68.040.400,00	66.244.500,00	(1.795.900,00)	97,36	
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	68.040.400,00	66.244.500,00	(1.795.900,00)	97,36	
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.040.400,00	66.244.500,00	(1.795.900,00)	97,36	
03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	175.206.188,00	130.918.260,00	(44.287.928,00)	74,72	
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	175.206.188,00	130.918.260,00	(44.287.928,00)	74,72	
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.206.188,00	130.918.260,00	(44.287.928,00)	74,72	
03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	230.682.650,00	227.514.600,00	(3.168.050,00)	98,63	
03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	67.584.800,00	67.284.800,00	(300.000,00)	99,56	
03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	25.447.000,00	25.330.800,00	(116.200,00)	99,54	
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	25.447.000,00	25.330.800,00	(116.200,00)	99,54	
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.447.000,00	25.330.800,00	(116.200,00)	99,54	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	42.137.800,00	41.954.000,00	(183.800,00)	99,56	
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	42.137.800,00	41.954.000,00	(183.800,00)	99,56	
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.137.800,00	41.954.000,00	(183.800,00)	99,56	
03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	163.097.850,00	160.229.800,00	(2.868.050,00)	98,24	
03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	99.269.350,00	96.674.500,00	(2.594.850,00)	97,39	
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	99.269.350,00	96.674.500,00	(2.594.850,00)	97,39	
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.269.350,00	96.674.500,00	(2.594.850,00)	97,39	
03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12.300.000,00	12.046.500,00	(253.500,00)	97,94	
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.300.000,00	12.046.500,00	(253.500,00)	97,94	
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	12.046.500,00	(253.500,00)	97,94	
03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	51.528.500,00	51.508.800,00	(19.700,00)	99,96	
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	51.528.500,00	51.508.800,00	(19.700,00)	99,96	
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.528.500,00	51.508.800,00	(19.700,00)	99,96	
03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	161.658.000,00	161.643.162,00	(14.838,00)	99,99	
03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	161.658.000,00	161.643.162,00	(14.838,00)	99,99	
03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	161.658.000,00	161.643.162,00	(14.838,00)	99,99	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	161.658.000,00	161.643.162,00	(14.838,00)	99,99	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.658.000,00	161.643.162,00	(14.838,00)	99,99	
03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	123.237.600,00	119.914.200,00	(3.323.400,00)	97,30	
03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.237.600,00	119.914.200,00	(3.323.400,00)	97,30	
03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	123.237.600,00	119.914.200,00	(3.323.400,00)	97,30	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	123.237.600,00	119.914.200,00	(3.323.400,00)	97,30	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.237.600,00	119.914.200,00	(3.323.400,00)	97,30	
03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.206.931.478,00	1.167.055.970,00	(39.875.508,00)	96,70	
03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	25.184.025,00	25.184.025,00	0,00	100,00	
03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	25.184.025,00	25.184.025,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	25.184.025,00	25.184.025,00	0,00	100,00	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.184.025,00	25.184.025,00	0,00	100,00	
03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	984.204.238,00	944.423.730,00	(39.780.508,00)	95,96	
03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	984.204.238,00	944.423.730,00	(39.780.508,00)	95,96	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	984.204.238,00	944.423.730,00	(39.780.508,00)	95,96	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	984.204.238,00	944.423.730,00	(39.780.508,00)	95,96	
03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	197.543.215,00	197.448.215,00	(95.000,00)	99,95	
03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	197.543.215,00	197.448.215,00	(95.000,00)	99,95	
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	197.543.215,00	197.448.215,00	(95.000,00)	99,95	
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.543.215,00	197.448.215,00	(95.000,00)	99,95	
03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	189.126.800,00	180.749.320,00	(8.377.480,00)	95,57	
03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	111.790.500,00	111.789.610,00	(890,00)	100,00	
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	111.790.500,00	111.789.610,00	(890,00)	100,00	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	111.790.500,00	111.789.610,00	(890,00)	100,00	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.790.500,00	111.789.610,00	(890,00)	100,00	
03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	77.336.300,00	68.959.710,00	(8.376.590,00)	89,17	
03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	5.257.800,00	5.257.800,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.257.800,00	5.257.800,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.257.800,00	5.257.800,00	0,00	100,00	
03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1.449.300,00	1.449.300,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.449.300,00	1.449.300,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.449.300,00	1.449.300,00	0,00	100,00	
03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	70.629.200,00	62.252.610,00	(8.376.590,00)	88,14	
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	70.629.200,00	62.252.610,00	(8.376.590,00)	88,14	
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.629.200,00	62.252.610,00	(8.376.590,00)	88,14	
03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	150.002.868,00	149.105.700,00	(897.168,00)	99,40	
03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	150.002.868,00	149.105.700,00	(897.168,00)	99,40	
03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	150.002.868,00	149.105.700,00	(897.168,00)	99,40	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	150.002.868,00	149.105.700,00	(897.168,00)	99,40	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.002.868,00	149.105.700,00	(897.168,00)	99,40	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.538.698.200,00	3.873.400.764,00	(665.297.436,00)	85,34	
03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	3.019.527.000,00	2.381.312.064,00	(638.214.936,00)	78,86	
03.2.01.07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	3.019.527.000,00	2.381.312.064,00	(638.214.936,00)	78,86	
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.019.527.000,00	2.381.312.064,00	(638.214.936,00)	78,86	
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.019.527.000,00	2.381.312.064,00	(638.214.936,00)	78,86	
03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.472.362.000,00	1.445.279.500,00	(27.082.500,00)	98,16	
03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1.472.362.000,00	1.445.279.500,00	(27.082.500,00)	98,16	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	965.362.000,00	963.026.500,00	(2.335.500,00)	99,76	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	965.362.000,00	963.026.500,00	(2.335.500,00)	99,76	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	507.000.000,00	482.253.000,00	(24.747.000,00)	95,12	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	507.000.000,00	482.253.000,00	(24.747.000,00)	95,12	
03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	46.809.200,00	46.809.200,00	0,00	100,00	
03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	46.809.200,00	46.809.200,00	0,00	100,00	
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	46.809.200,00	46.809.200,00	0,00	100,00	
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.809.200,00	46.809.200,00	0,00	100,00	
03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	250.495.174,00	235.037.080,00	(15.458.094,00)	93,83	
03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	50.495.174,00	50.125.885,00	(369.289,00)	99,27	
03.2.12.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	41.257.000,00	40.887.711,00	(369.289,00)	99,10	
03.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	41.257.000,00	40.887.711,00	(369.289,00)	99,10	
03.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.257.000,00	40.887.711,00	(369.289,00)	99,10	
03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	9.238.174,00	9.238.174,00	0,00	100,00	
03.2.12.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.238.174,00	9.238.174,00	0,00	100,00	
03.2.12.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.238.174,00	9.238.174,00	0,00	100,00	
03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	200.000.000,00	184.911.195,00	(15.088.805,00)	92,46	
03.2.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	200.000.000,00	184.911.195,00	(15.088.805,00)	92,46	
03.2.13.01.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	184.911.195,00	(15.088.805,00)	92,46	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.13.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	184.911.195,00	(15.088.805,00)	92,46	
03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.842.761.136,00	2.821.877.401,00	(20.883.735,00)	99,27	
03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.488.465.572,00	1.468.823.331,00	(19.642.241,00)	98,68	
03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.488.465.572,00	1.468.823.331,00	(19.642.241,00)	98,68	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.488.465.572,00	1.468.823.331,00	(19.642.241,00)	98,68	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.488.465.572,00	1.468.823.331,00	(19.642.241,00)	98,68	
03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.354.295.564,00	1.353.054.070,00	(1.241.494,00)	99,91	
03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.354.295.564,00	1.353.054.070,00	(1.241.494,00)	99,91	
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.354.295.564,00	1.353.054.070,00	(1.241.494,00)	99,91	
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.354.295.564,00	1.353.054.070,00	(1.241.494,00)	99,91	
03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	40.619.200,00	36.119.200,00	(4.500.000,00)	88,92	
03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Kean;taannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.619.200,00	36.119.200,00	(4.500.000,00)	88,92	
03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40.619.200,00	36.119.200,00	(4.500.000,00)	88,92	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.619.200,00	36.119.200,00	(4.500.000,00)	88,92	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.619.200,00	36.119.200,00	(4.500.000,00)	88,92	
03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	33.733.000,00	33.063.300,00	(669.700,00)	98,01	
03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	33.733.000,00	33.063.300,00	(669.700,00)	98,01	
03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	10.552.200,00	10.477.000,00	(75.200,00)	99,29	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.552.200,00	10.477.000,00	(75.200,00)	99,29	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.552.200,00	10.477.000,00	(75.200,00)	99,29	
03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	23.180.800,00	22.586.300,00	(594.500,00)	97,44	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.180.800,00	22.586.300,00	(594.500,00)	97,44	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.180.800,00	22.586.300,00	(594.500,00)	97,44	
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.081.628.800,00	1.074.310.130,00	(7.318.670,00)	99,32	
03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.050.152.700,00	1.043.209.530,00	(6.943.170,00)	99,34	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	955.000.000,00	955.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	955.000.000,00	955.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	955.000.000,00	955.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	47.470.200,00	47.074.530,00	(395.670,00)	99,17	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	47.470.200,00	47.074.530,00	(395.670,00)	99,17	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.470.200,00	47.074.530,00	(395.670,00)	99,17	
03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	47.682.500,00	41.135.000,00	(6.547.500,00)	86,27	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	41.597.500,00	35.050.000,00	(6.547.500,00)	84,26	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.597.500,00	35.050.000,00	(6.547.500,00)	84,26	
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	6.085.000,00	6.085.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.085.000,00	6.085.000,00	0,00	100,00	
03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	25.276.100,00	24.900.600,00	(375.500,00)	98,51	
03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	25.276.100,00	24.900.600,00	(375.500,00)	98,51	
03.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.276.100,00	24.900.600,00	(375.500,00)	98,51	
03.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.276.100,00	24.900.600,00	(375.500,00)	98,51	
03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	19.636.200,00	19.564.600,00	(71.600,00)	99,64	
03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	19.636.200,00	19.564.600,00	(71.600,00)	99,64	
03.2.01.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	19.636.200,00	19.564.600,00	(71.600,00)	99,64	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.636.200,00	19.564.600,00	(71.600,00)	99,64	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.636.200,00	19.564.600,00	(71.600,00)	99,64	
03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	28.694.300,00	28.384.418,00	(309.882,00)	98,92	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	10.604.645,00	10.393.395,00	(211.250,00)	98,01	
03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	10.604.645,00	10.393.395,00	(211.250,00)	98,01	
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.604.645,00	10.393.395,00	(211.250,00)	98,01	
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.604.645,00	10.393.395,00	(211.250,00)	98,01	
03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	18.089.655,00	17.991.023,00	(98.632,00)	99,45	
03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	18.089.655,00	17.991.023,00	(98.632,00)	99,45	
03.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.089.655,00	17.991.023,00	(98.632,00)	99,45	
03.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.089.655,00	17.991.023,00	(98.632,00)	99,45	
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.017.314.000,00	3.194.589.060,00	177.275.060,00	105,88	
03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	8.000.000,00	7.993.000,00	(7.000,00)	99,91	
03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	8.000.000,00	7.993.000,00	(7.000,00)	99,91	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.993.000,00	(7.000,00)	99,91	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.993.000,00	(7.000,00)	99,91	
03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.518.814.000,00	2.696.232.060,00	177.418.060,00	107,04	
03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	145.050.000,00	145.028.100,00	(21.900,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	145.050.000,00	145.028.100,00	(21.900,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.050.000,00	145.028.100,00	(21.900,00)	99,98	
03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	2.373.764.000,00	2.551.203.960,00	177.439.960,00	107,48	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.373.764.000,00	2.551.203.960,00	177.439.960,00	107,48	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.333.764.000,00	2.511.204.000,00	177.440.000,00	107,60	
03.2.02.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	40.000.000,00	39.999.960,00	(40,00)	100,00	
03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	490.500.000,00	490.364.000,00	(136.000,00)	99,97	
03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	490.500.000,00	490.364.000,00	(136.000,00)	99,97	
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	238.500.000,00	238.364.000,00	(136.000,00)	99,94	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	238.500.000,00	238.364.000,00	(136.000,00)	99,94	
03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	133.397.500,00	132.172.635,00	(1.224.865,00)	99,08	
03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	133.397.500,00	132.172.635,00	(1.224.865,00)	99,08	
03.2.01.02	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	121.503.400,00	120.435.635,00	(1.067.765,00)	99,12	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	121.503.400,00	120.435.635,00	(1.067.765,00)	99,12	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.503.400,00	120.435.635,00	(1.067.765,00)	99,12	
03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	11.894.100,00	11.737.000,00	(157.100,00)	98,68	
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	11.894.100,00	11.737.000,00	(157.100,00)	98,68	
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.894.100,00	11.737.000,00	(157.100,00)	98,68	
03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.949.448.489,00	5.697.699.473,00	(251.749.016,00)	95,77	
03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	242.031.600,00	241.895.700,00	(135.900,00)	99,94	
03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	242.031.600,00	241.895.700,00	(135.900,00)	99,94	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	242.031.600,00	241.895.700,00	(135.900,00)	99,94	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.031.600,00	241.895.700,00	(135.900,00)	99,94	
03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	5.491.576.339,00	5.241.260.473,00	(250.315.866,00)	95,44	
03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.544.500.000,00	1.544.435.000,00	(65.000,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.444.500.000,00	1.444.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.444.500.000,00	1.444.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.935.000,00	(65.000,00)	99,94	
03.2.02.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	99.935.000,00	(65.000,00)	99,94	
03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.309.027.539,00	1.306.829.888,00	(2.197.651,00)	99,83	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	207.613.385,00	207.563.381,00	(50.004,00)	99,98	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.613.385,00	207.563.381,00	(50.004,00)	99,98	
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	1.101.414.154,00	1.099.266.507,00	(2.147.647,00)	99,81	
03.2.02.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.101.414.154,00	1.099.266.507,00	(2.147.647,00)	99,81	
03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	1.920.850.000,00	1.674.813.225,00	(246.036.775,00)	87,19	
03.2.02.08.5.2	BELANJA MODAL	1.920.850.000,00	1.674.813.225,00	(246.036.775,00)	87,19	
03.2.02.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	435.660.000,00	433.350.000,00	(2.310.000,00)	99,47	
03.2.02.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.485.190.000,00	1.241.463.225,00	(243.726.775,00)	83,59	
03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	717.198.800,00	715.182.360,00	(2.016.440,00)	99,72	
03.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	717.198.800,00	715.182.360,00	(2.016.440,00)	99,72	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	717.198.800,00	715.182.360,00	(2.016.440,00)	99,72	
03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	215.840.550,00	214.543.300,00	(1.297.250,00)	99,40	
03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	215.840.550,00	214.543.300,00	(1.297.250,00)	99,40	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	215.840.550,00	214.543.300,00	(1.297.250,00)	99,40	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.840.550,00	214.543.300,00	(1.297.250,00)	99,40	
03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	615.615.061,00	619.618.861,00	4.003.800,00	100,65	
03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	24.015.061,00	29.268.861,00	5.253.800,00	121,88	
03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	0,00	11.715.061,00	11.715.061,00	0	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	11.715.061,00	11.715.061,00	0	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.715.061,00	11.715.061,00	0	
03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	24.015.061,00	17.553.800,00	(6.461.261,00)	73,09	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.015.061,00	17.553.800,00	(6.461.261,00)	73,09	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.015.061,00	17.553.800,00	(6.461.261,00)	73,09	
03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	591.600.000,00	590.350.000,00	(1.250.000,00)	99,79	
03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	591.600.000,00	590.350.000,00	(1.250.000,00)	99,79	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	591.600.000,00	590.350.000,00	(1.250.000,00)	99,79	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	591.600.000,00	590.350.000,00	(1.250.000,00)	99,79	
03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.220.827.678,00	3.081.693.317,00	(139.134.361,00)	95,68	
03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	291.420.031,00	245.600.740,00	(45.819.291,00)	84,28	
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	79.980.747,00	56.385.689,00	(23.595.058,00)	70,50	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	79.980.747,00	56.385.689,00	(23.595.058,00)	70,50	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.980.747,00	56.385.689,00	(23.595.058,00)	70,50	
03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	111.604.546,00	94.191.847,00	(17.412.699,00)	84,40	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	111.604.546,00	94.191.847,00	(17.412.699,00)	84,40	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.604.546,00	94.191.847,00	(17.412.699,00)	84,40	
03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	99.834.738,00	95.023.204,00	(4.811.534,00)	95,18	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	99.834.738,00	95.023.204,00	(4.811.534,00)	95,18	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.834.738,00	95.023.204,00	(4.811.534,00)	95,18	
03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.103.943.705,00	1.098.206.891,00	(5.736.814,00)	99,48	
03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	74.967.000,00	74.576.200,00	(390.800,00)	99,48	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	74.967.000,00	74.576.200,00	(390.800,00)	99,48	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.967.000,00	49.576.200,00	(390.800,00)	99,22	
03.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	842.974.200,00	842.828.211,00	(145.989,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	842.974.200,00	842.828.211,00	(145.989,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	842.974.200,00	842.828.211,00	(145.989,00)	99,98	
03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	186.002.505,00	180.802.480,00	(5.200.025,00)	97,20	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	186.002.505,00	180.802.480,00	(5.200.025,00)	97,20	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.002.505,00	180.802.480,00	(5.200.025,00)	97,20	
03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250.320.255,00	246.284.315,00	(4.035.940,00)	98,39	
03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	126.666.405,00	123.928.115,00	(2.738.290,00)	97,84	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	126.666.405,00	123.928.115,00	(2.738.290,00)	97,84	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.666.405,00	123.928.115,00	(2.738.290,00)	97,84	
03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	72.977.050,00	72.329.900,00	(647.150,00)	99,11	
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	72.977.050,00	72.329.900,00	(647.150,00)	99,11	
03.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.977.050,00	6.329.900,00	(647.150,00)	90,72	
03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50.676.800,00	50.026.300,00	(650.500,00)	98,72	
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	50.676.800,00	50.026.300,00	(650.500,00)	98,72	
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.676.800,00	50.026.300,00	(650.500,00)	98,72	
03.2.04	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	1.575.143.687,00	1.491.601.371,00	(83.542.316,00)	94,70	
03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	56.371.000,00	51.079.863,00	(5.291.137,00)	90,61	
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	56.371.000,00	51.079.863,00	(5.291.137,00)	90,61	
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.371.000,00	51.079.863,00	(5.291.137,00)	90,61	
03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	78.512.687,00	74.605.508,00	(3.907.179,00)	95,02	
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	78.512.687,00	74.605.508,00	(3.907.179,00)	95,02	
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.512.687,00	74.605.508,00	(3.907.179,00)	95,02	
03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1.440.260.000,00	1.365.916.000,00	(74.344.000,00)	94,84	
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.440.260.000,00	1.365.916.000,00	(74.344.000,00)	94,84	
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.670.000,00	474.670.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	965.590.000,00	891.246.000,00	(74.344.000,00)	92,30	
03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	521.096.851,00	467.028.553,00	(54.068.298,00)	89,62	
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	201.469.935,00	165.954.627,00	(35.515.308,00)	82,37	
03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	8.225.000,00	8.225.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	8.225.000,00	8.225.000,00	0,00	100,00	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.225.000,00	8.225.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	37.636.780,00	31.276.680,00	(6.360.100,00)	83,10	
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	37.636.780,00	31.276.680,00	(6.360.100,00)	83,10	
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.636.780,00	31.276.680,00	(6.360.100,00)	83,10	
03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	155.608.155,00	126.452.947,00	(29.155.208,00)	81,26	
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	155.608.155,00	126.452.947,00	(29.155.208,00)	81,26	
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.608.155,00	126.452.947,00	(29.155.208,00)	81,26	
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	151.902.980,00	134.569.525,00	(17.333.455,00)	88,59	
03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	23.145.320,00	22.226.978,00	(918.342,00)	96,03	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.145.320,00	22.226.978,00	(918.342,00)	96,03	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.145.320,00	22.226.978,00	(918.342,00)	96,03	
03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	128.757.660,00	112.342.547,00	(16.415.113,00)	87,25	
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	128.757.660,00	112.342.547,00	(16.415.113,00)	87,25	
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.757.660,00	112.342.547,00	(16.415.113,00)	87,25	
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	167.723.936,00	166.504.401,00	(1.219.535,00)	99,27	
03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	41.986.388,00	41.955.670,00	(30.718,00)	99,93	
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	41.986.388,00	41.955.670,00	(30.718,00)	99,93	
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.986.388,00	41.955.670,00	(30.718,00)	99,93	
03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	71.228.251,00	71.208.451,00	(19.800,00)	99,97	
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	71.228.251,00	71.208.451,00	(19.800,00)	99,97	
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.228.251,00	71.208.451,00	(19.800,00)	99,97	
03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	23.161.687,00	22.902.570,00	(259.117,00)	98,88	
03.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	23.161.687,00	22.902.570,00	(259.117,00)	98,88	
03.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.161.687,00	22.902.570,00	(259.117,00)	98,88	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	31.347.610,00	30.437.710,00	(909.900,00)	97,10	
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	31.347.610,00	30.437.710,00	(909.900,00)	97,10	
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.347.610,00	30.437.710,00	(909.900,00)	97,10	
03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.816.840.318,00	1.769.239.336,00	(47.600.982,00)	97,38	
03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.816.840.318,00	1.769.239.336,00	(47.600.982,00)	97,38	
03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	264.144.250,00	263.574.639,00	(569.611,00)	99,78	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	246.144.250,00	245.574.639,00	(569.611,00)	99,77	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.144.250,00	245.574.639,00	(569.611,00)	99,77	
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	60.344.570,00	58.789.290,00	(1.555.280,00)	97,42	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	60.344.570,00	58.789.290,00	(1.555.280,00)	97,42	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.344.570,00	58.789.290,00	(1.555.280,00)	97,42	
03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	543.953.695,00	527.822.051,00	(16.131.644,00)	97,03	
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	543.953.695,00	527.822.051,00	(16.131.644,00)	97,03	
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.953.695,00	527.822.051,00	(16.131.644,00)	97,03	
03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	536.607.326,00	507.608.484,00	(28.998.842,00)	94,60	
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	536.607.326,00	507.608.484,00	(28.998.842,00)	94,60	
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	536.607.326,00	507.608.484,00	(28.998.842,00)	94,60	
03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	411.790.477,00	411.444.872,00	(345.605,00)	99,92	
03.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	411.790.477,00	411.444.872,00	(345.605,00)	99,92	
03.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.790.477,00	411.444.872,00	(345.605,00)	99,92	
03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	977.177.478,00	911.801.811,00	(65.375.667,00)	93,31	
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	674.112.500,00	662.300.911,00	(11.811.589,00)	98,25	
03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	642.212.500,00	635.800.911,00	(6.411.589,00)	99,00	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	642.212.500,00	635.800.911,00	(6.411.589,00)	99,00	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	642.212.500,00	635.800.911,00	(6.411.589,00)	99,00	
03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	31.900.000,00	26.500.000,00	(5.400.000,00)	83,07	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.900.000,00	26.500.000,00	(5.400.000,00)	83,07	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.900.000,00	26.500.000,00	(5.400.000,00)	83,07	
03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	303.064.978,00	249.500.900,00	(53.564.078,00)	82,33	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	11.750.000,00	10.838.600,00	(911.400,00)	92,24	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.750.000,00	10.838.600,00	(911.400,00)	92,24	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.750.000,00	10.838.600,00	(911.400,00)	92,24	
03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	266.514.978,00	219.012.300,00	(47.502.678,00)	82,18	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	266.514.978,00	219.012.300,00	(47.502.678,00)	82,18	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.514.978,00	219.012.300,00	(47.502.678,00)	82,18	
03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	24.800.000,00	19.650.000,00	(5.150.000,00)	79,23	
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	24.800.000,00	19.650.000,00	(5.150.000,00)	79,23	
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	19.650.000,00	(5.150.000,00)	79,23	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.232.310.000,00	2.060.419.654,00	(171.890.346,00)	92,30	
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.000.000,00	5.988.400,00	(11.600,00)	99,81	
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.000.000,00	5.988.400,00	(11.600,00)	99,81	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.988.400,00	(11.600,00)	99,81	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.988.400,00	(11.600,00)	99,81	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.223.210.000,00	2.051.362.254,00	(171.847.746,00)	92,27	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.223.210.000,00	2.051.362.254,00	(171.847.746,00)	92,27	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.488.392.000,00	1.318.150.065,00	(170.241.935,00)	88,56	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	957.642.000,00	787.400.065,00	(170.241.935,00)	82,22	
03.2.02.02.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	530.750.000,00	530.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	734.818.000,00	733.212.189,00	(1.605.811,00)	99,78	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.506.000,00	142.375.000,00	(131.000,00)	99,91	
03.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	227.312.000,00	226.790.577,00	(521.423,00)	99,77	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	365.000.000,00	364.046.612,00	(953.388,00)	99,74	
03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.100.000,00	3.069.000,00	(31.000,00)	99,00	
03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.100.000,00	3.069.000,00	(31.000,00)	99,00	
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.100.000,00	3.069.000,00	(31.000,00)	99,00	
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	3.069.000,00	(31.000,00)	99,00	
03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	897.313.244,00	897.308.406,00	(4.838,00)	100,00	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	897.313.244,00	897.308.406,00	(4.838,00)	100,00	
03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	897.313.244,00	897.308.406,00	(4.838,00)	100,00	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	897.313.244,00	897.308.406,00	(4.838,00)	100,00	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.131.000,00	105.126.162,00	(4.838,00)	100,00	
03.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	792.182.244,00	792.182.244,00	0,00	100,00	
04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	73.712.870,00	68.907.500,00	(4.805.370,00)	93,48	
04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	73.712.870,00	68.907.500,00	(4.805.370,00)	93,48	
04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	73.712.870,00	68.907.500,00	(4.805.370,00)	93,48	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	73.712.870,00	68.907.500,00	(4.805.370,00)	93,48	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.712.870,00	68.907.500,00	(4.805.370,00)	93,48	
04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	214.537.675,00	162.796.300,00	(51.741.375,00)	75,88	
04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	91.776.175,00	88.945.000,00	(2.831.175,00)	96,92	
04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	91.776.175,00	88.945.000,00	(2.831.175,00)	96,92	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	91.776.175,00	88.945.000,00	(2.831.175,00)	96,92	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.776.175,00	88.945.000,00	(2.831.175,00)	96,92	
04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	95.761.500,00	47.201.300,00	(48.560.200,00)	49,29	
04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	95.761.500,00	47.201.300,00	(48.560.200,00)	49,29	
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	95.761.500,00	47.201.300,00	(48.560.200,00)	49,29	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.761.500,00	47.201.300,00	(48.560.200,00)	49,29	
04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	27.000.000,00	26.650.000,00	(350.000,00)	98,70	
04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	27.000.000,00	26.650.000,00	(350.000,00)	98,70	
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	26.650.000,00	(350.000,00)	98,70	
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	26.650.000,00	(350.000,00)	98,70	
04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	695.430.000,00	694.585.700,00	(844.300,00)	99,88	
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	695.430.000,00	694.585.700,00	(844.300,00)	99,88	
04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.950.000,00	13.890.000,00	(60.000,00)	99,57	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.950.000,00	13.890.000,00	(60.000,00)	99,57	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	13.890.000,00	(60.000,00)	99,57	
04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	35.448.000,00	34.786.700,00	(661.300,00)	98,13	
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	35.448.000,00	34.786.700,00	(661.300,00)	98,13	
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.448.000,00	34.786.700,00	(661.300,00)	98,13	
04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	646.032.000,00	645.909.000,00	(123.000,00)	99,98	
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	646.032.000,00	645.909.000,00	(123.000,00)	99,98	
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.032.000,00	645.909.000,00	(123.000,00)	99,98	
04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	280.205.150,00	278.498.980,00	(1.706.170,00)	99,39	
04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	158.749.700,00	157.815.980,00	(933.720,00)	99,41	
04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	73.032.850,00	72.305.100,00	(727.750,00)	99,00	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	73.032.850,00	72.305.100,00	(727.750,00)	99,00	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.032.850,00	72.305.100,00	(727.750,00)	99,00	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	42.168.600,00	42.065.400,00	(103.200,00)	99,76	
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	42.168.600,00	42.065.400,00	(103.200,00)	99,76	
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.168.600,00	42.065.400,00	(103.200,00)	99,76	
04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	43.548.250,00	43.445.480,00	(102.770,00)	99,76	
04.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	43.548.250,00	43.445.480,00	(102.770,00)	99,76	
04.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.548.250,00	43.445.480,00	(102.770,00)	99,76	
04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	121.455.450,00	120.683.000,00	(772.450,00)	99,36	
04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	19.270.850,00	18.769.600,00	(501.250,00)	97,40	
04.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	19.270.850,00	18.769.600,00	(501.250,00)	97,40	
04.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.270.850,00	18.769.600,00	(501.250,00)	97,40	
04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	33.568.350,00	33.461.500,00	(106.850,00)	99,68	
04.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	33.568.350,00	33.461.500,00	(106.850,00)	99,68	
04.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.568.350,00	33.461.500,00	(106.850,00)	99,68	
04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	68.616.250,00	68.451.900,00	(164.350,00)	99,76	
04.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	68.616.250,00	68.451.900,00	(164.350,00)	99,76	
04.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.616.250,00	68.451.900,00	(164.350,00)	99,76	
04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	71.244.000,00	70.951.750,00	(292.250,00)	99,59	
04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	71.244.000,00	70.951.750,00	(292.250,00)	99,59	
04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	71.244.000,00	70.951.750,00	(292.250,00)	99,59	
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	71.244.000,00	70.951.750,00	(292.250,00)	99,59	
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.244.000,00	70.951.750,00	(292.250,00)	99,59	
04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	321.888.272,00	317.238.672,00	(4.649.600,00)	98,56	
04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	321.888.272,00	317.238.672,00	(4.649.600,00)	98,56	
04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	321.888.272,00	317.238.672,00	(4.649.600,00)	98,56	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	321.888.272,00	317.238.672,00	(4.649.600,00)	98,56	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.888.272,00	317.238.672,00	(4.649.600,00)	98,56	
04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.632.919.590,00	1.525.449.790,00	(107.469.800,00)	93,42	
04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.632.919.590,00	1.525.449.790,00	(107.469.800,00)	93,42	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1.632.919.590,00	1.525.449.790,00	(107.469.800,00)	93,42	
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.632.919.590,00	1.525.449.790,00	(107.469.800,00)	93,42	
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.419.590,00	201.699.790,00	(58.719.800,00)	77,45	
04.2.02.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.372.500.000,00	1.323.750.000,00	(48.750.000,00)	96,45	
04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	462.269.427,00	462.269.427,00	0,00	100,00	
04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	462.269.427,00	462.269.427,00	0,00	100,00	
04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	462.269.427,00	462.269.427,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	462.269.427,00	462.269.427,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.269.427,00	462.269.427,00	0,00	100,00	
04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	146.567.375,00	145.562.100,00	(1.005.275,00)	99,31	
04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	146.567.375,00	145.562.100,00	(1.005.275,00)	99,31	
04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	101.867.375,00	100.917.800,00	(949.575,00)	99,07	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	101.867.375,00	100.917.800,00	(949.575,00)	99,07	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.867.375,00	100.917.800,00	(949.575,00)	99,07	
04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	44.700.000,00	44.644.300,00	(55.700,00)	99,88	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	44.700.000,00	44.644.300,00	(55.700,00)	99,88	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.700.000,00	44.644.300,00	(55.700,00)	99,88	
04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.204.557.241,00	1.161.443.430,00	(43.113.811,00)	96,42	
04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.204.557.241,00	1.161.443.430,00	(43.113.811,00)	96,42	
04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	71.024.780,00	71.022.780,00	(2.000,00)	100,00	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	71.024.780,00	71.022.780,00	(2.000,00)	100,00	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.024.780,00	71.022.780,00	(2.000,00)	100,00	
04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	137.290.192,00	137.073.050,00	(217.142,00)	99,84	
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	137.290.192,00	137.073.050,00	(217.142,00)	99,84	
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.290.192,00	137.073.050,00	(217.142,00)	99,84	
04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	881.865.323,00	839.180.100,00	(42.685.223,00)	95,16	
04.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	881.865.323,00	839.180.100,00	(42.685.223,00)	95,16	
04.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	881.865.323,00	839.180.100,00	(42.685.223,00)	95,16	
04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	43.959.666,00	43.768.300,00	(191.366,00)	99,56	
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	43.959.666,00	43.768.300,00	(191.366,00)	99,56	
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.959.666,00	43.768.300,00	(191.366,00)	99,56	
04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	70.417.280,00	70.399.200,00	(18.080,00)	99,97	
04.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	70.417.280,00	70.399.200,00	(18.080,00)	99,97	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.417.280,00	70.399.200,00	(18.080,00)	99,97	
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	215.208.800,00	214.545.980,00	(662.820,00)	99,69	
04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	65.376.800,00	64.713.980,00	(662.820,00)	98,99	
04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	65.376.800,00	64.713.980,00	(662.820,00)	98,99	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	65.376.800,00	64.713.980,00	(662.820,00)	98,99	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.376.800,00	64.713.980,00	(662.820,00)	98,99	
04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	149.832.000,00	149.832.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	149.832.000,00	149.832.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	149.832.000,00	149.832.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.832.000,00	149.832.000,00	0,00	100,00	
04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	499.514.310,00	496.129.730,00	(3.384.580,00)	99,32	
04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	499.514.310,00	496.129.730,00	(3.384.580,00)	99,32	
04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	253.274.310,00	249.995.532,00	(3.278.778,00)	98,71	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	139.674.310,00	139.372.032,00	(302.278,00)	99,78	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.674.310,00	139.372.032,00	(302.278,00)	99,78	
04.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	113.600.000,00	110.623.500,00	(2.976.500,00)	97,38	
04.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.600.000,00	45.910.500,00	(2.689.500,00)	94,47	
04.2.01.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	65.000.000,00	64.713.000,00	(287.000,00)	99,56	
04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	62.500.000,00	62.461.700,00	(38.300,00)	99,94	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	62.500.000,00	62.461.700,00	(38.300,00)	99,94	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	62.461.700,00	(38.300,00)	99,94	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	13.830.000,00	13.830.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.830.000,00	13.830.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.830.000,00	13.830.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	169.910.000,00	169.842.498,00	(67.502,00)	99,96	
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	169.910.000,00	169.842.498,00	(67.502,00)	99,96	
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.910.000,00	169.842.498,00	(67.502,00)	99,96	
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.967.982.008,00	2.542.539.095,00	(425.442.913,00)	85,67	
04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	2.302.400.716,00	1.895.703.101,00	(406.697.615,00)	82,34	
04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	14.750.000,00	14.359.500,00	(390.500,00)	97,35	
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.750.000,00	14.359.500,00	(390.500,00)	97,35	
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.750.000,00	14.359.500,00	(390.500,00)	97,35	
04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1.850.752.716,00	1.445.459.366,00	(405.293.350,00)	78,10	
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.850.752.716,00	1.445.459.366,00	(405.293.350,00)	78,10	
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.850.752.716,00	1.445.459.366,00	(405.293.350,00)	78,10	
04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	406.898.000,00	405.884.235,00	(1.013.765,00)	99,75	
04.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	406.898.000,00	405.884.235,00	(1.013.765,00)	99,75	
04.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.898.000,00	405.884.235,00	(1.013.765,00)	99,75	
04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	665.581.292,00	646.835.994,00	(18.745.298,00)	97,18	
04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	665.581.292,00	646.835.994,00	(18.745.298,00)	97,18	
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	665.581.292,00	646.835.994,00	(18.745.298,00)	97,18	
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	665.581.292,00	646.835.994,00	(18.745.298,00)	97,18	
04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.431.107.100,00	2.353.688.660,00	(77.418.440,00)	96,82	
04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.186.281.800,00	2.121.378.810,00	(64.902.990,00)	97,03	
04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2.186.281.800,00	2.121.378.810,00	(64.902.990,00)	97,03	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	317.381.800,00	308.463.060,00	(8.918.740,00)	97,19	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.381.800,00	308.463.060,00	(8.918.740,00)	97,19	
04.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	1.868.900.000,00	1.812.915.750,00	(55.984.250,00)	97,00	
04.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	688.000.000,00	685.630.000,00	(2.370.000,00)	99,66	
04.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.180.900.000,00	1.127.285.750,00	(53.614.250,00)	95,46	
04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	90.026.000,00	(9.974.000,00)	90,03	
04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	100.000.000,00	90.026.000,00	(9.974.000,00)	90,03	
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	90.026.000,00	(9.974.000,00)	90,03	
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	90.026.000,00	(9.974.000,00)	90,03	
04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	144.825.300,00	142.283.850,00	(2.541.450,00)	98,25	
04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	115.775.300,00	113.249.100,00	(2.526.200,00)	97,82	
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	115.775.300,00	113.249.100,00	(2.526.200,00)	97,82	
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.775.300,00	113.249.100,00	(2.526.200,00)	97,82	
04.2.04.03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	29.050.000,00	29.034.750,00	(15.250,00)	99,95	
04.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.03.5.2	BELANJA MODAL	15.250.000,00	15.234.750,00	(15.250,00)	99,90	
04.2.04.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.250.000,00	15.234.750,00	(15.250,00)	99,90	
04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	300.232.000,00	294.638.900,00	(5.593.100,00)	98,14	
04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	300.232.000,00	294.638.900,00	(5.593.100,00)	98,14	
04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	300.232.000,00	294.638.900,00	(5.593.100,00)	98,14	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	300.232.000,00	294.638.900,00	(5.593.100,00)	98,14	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.232.000,00	294.638.900,00	(5.593.100,00)	98,14	
04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.609.390.151,00	1.607.475.327,00	(1.914.824,00)	99,88	
04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.609.390.151,00	1.607.475.327,00	(1.914.824,00)	99,88	
04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	205.342.059,00	204.060.644,00	(1.281.415,00)	99,38	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	205.342.059,00	204.060.644,00	(1.281.415,00)	99,38	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.342.059,00	204.060.644,00	(1.281.415,00)	99,38	
04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	547.283.631,00	549.169.699,00	1.886.068,00	100,34	
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	547.283.631,00	549.169.699,00	1.886.068,00	100,34	
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	547.283.631,00	549.169.699,00	1.886.068,00	100,34	
04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	252.496.508,00	252.099.200,00	(397.308,00)	99,84	
04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	252.496.508,00	252.099.200,00	(397.308,00)	99,84	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.496.508,00	252.099.200,00	(397.308,00)	99,84	
04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	604.267.953,00	602.145.784,00	(2.122.169,00)	99,65	
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	604.267.953,00	602.145.784,00	(2.122.169,00)	99,65	
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	604.267.953,00	602.145.784,00	(2.122.169,00)	99,65	
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	314.298.125,00	313.418.670,00	(879.455,00)	99,72	
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	291.048.125,00	290.196.570,00	(851.555,00)	99,71	
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	46.185.625,00	45.640.050,00	(545.575,00)	98,82	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	46.185.625,00	45.640.050,00	(545.575,00)	98,82	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.185.625,00	45.640.050,00	(545.575,00)	98,82	
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	244.862.500,00	244.556.520,00	(305.980,00)	99,88	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	244.862.500,00	244.556.520,00	(305.980,00)	99,88	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.862.500,00	244.556.520,00	(305.980,00)	99,88	
04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*****)	23.250.000,00	23.222.100,00	(27.900,00)	99,88	
04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****)	23.250.000,00	23.222.100,00	(27.900,00)	99,88	
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.250.000,00	23.222.100,00	(27.900,00)	99,88	
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.250.000,00	23.222.100,00	(27.900,00)	99,88	
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.894.395.050,00	1.894.200.000,00	(195.050,00)	99,99	
04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.894.395.050,00	1.894.200.000,00	(195.050,00)	99,99	
04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	19.395.050,00	19.200.000,00	(195.050,00)	98,99	
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	19.395.050,00	19.200.000,00	(195.050,00)	98,99	
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.395.050,00	19.200.000,00	(195.050,00)	98,99	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	603.455.535,00	593.896.210,00	(9.559.325,00)	98,42	
05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	224.472.700,00	216.952.900,00	(7.519.800,00)	96,65	
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	224.472.700,00	216.952.900,00	(7.519.800,00)	96,65	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	224.472.700,00	216.952.900,00	(7.519.800,00)	96,65	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.472.700,00	216.952.900,00	(7.519.800,00)	96,65	
05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	211.944.145,00	211.058.150,00	(885.995,00)	99,58	
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	211.944.145,00	211.058.150,00	(885.995,00)	99,58	
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	211.944.145,00	211.058.150,00	(885.995,00)	99,58	
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.944.145,00	211.058.150,00	(885.995,00)	99,58	
05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	167.038.690,00	165.885.160,00	(1.153.530,00)	99,31	
05.2.03.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	167.038.690,00	165.885.160,00	(1.153.530,00)	99,31	
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	167.038.690,00	165.885.160,00	(1.153.530,00)	99,31	
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.038.690,00	165.885.160,00	(1.153.530,00)	99,31	
05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.672.185.000,00	6.482.780.000,00	(189.405.000,00)	97,16	
05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.672.185.000,00	6.482.780.000,00	(189.405.000,00)	97,16	
05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90	
05.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90	
05.2.01.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90	
05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	6.622.185.000,00	6.432.830.000,00	(189.355.000,00)	97,14	
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.622.185.000,00	6.432.830.000,00	(189.355.000,00)	97,14	
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.622.185.000,00	6.432.830.000,00	(189.355.000,00)	97,14	
05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	445.568.150,00	444.237.077,00	(1.331.073,00)	99,70	
05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	323.966.700,00	323.387.000,00	(579.700,00)	99,82	
05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	14.792.850,00	14.465.300,00	(327.550,00)	97,79	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.792.850,00	14.465.300,00	(327.550,00)	97,79	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.792.850,00	14.465.300,00	(327.550,00)	97,79	
05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	309.173.850,00	308.921.700,00	(252.150,00)	99,92	
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	309.173.850,00	308.921.700,00	(252.150,00)	99,92	
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.173.850,00	8.921.700,00	(252.150,00)	97,25	
05.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	121.601.450,00	120.850.077,00	(751.373,00)	99,38	
05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	109.466.350,00	108.949.877,00	(516.473,00)	99,53	
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	109.466.350,00	108.949.877,00	(516.473,00)	99,53	
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.466.350,00	108.949.877,00	(516.473,00)	99,53	
05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12.135.100,00	11.900.200,00	(234.900,00)	98,06	
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.135.100,00	11.900.200,00	(234.900,00)	98,06	
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.135.100,00	11.900.200,00	(234.900,00)	98,06	
05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	77.789.620,00	77.539.324,00	(250.296,00)	99,68	
05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	77.789.620,00	77.539.324,00	(250.296,00)	99,68	
05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	51.463.020,00	51.283.200,00	(179.820,00)	99,65	
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	51.463.020,00	51.283.200,00	(179.820,00)	99,65	
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.463.020,00	51.283.200,00	(179.820,00)	99,65	
05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.326.600,00	26.256.124,00	(70.476,00)	99,73	
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	26.326.600,00	26.256.124,00	(70.476,00)	99,73	
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.326.600,00	26.256.124,00	(70.476,00)	99,73	
05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	94.300.395,00	94.180.745,00	(119.650,00)	99,87	
05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	94.300.395,00	94.180.745,00	(119.650,00)	99,87	
05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	94.300.395,00	94.180.745,00	(119.650,00)	99,87	
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	94.300.395,00	94.180.745,00	(119.650,00)	99,87	
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.300.395,00	94.180.745,00	(119.650,00)	99,87	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	201.091.684,00	151.372.424,00	(49.719.260,00)	75,28	
05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	201.091.684,00	151.372.424,00	(49.719.260,00)	75,28	
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	201.091.684,00	151.372.424,00	(49.719.260,00)	75,28	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	151.091.684,00	150.666.384,00	(425.300,00)	99,72	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.091.684,00	150.666.384,00	(425.300,00)	99,72	
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	706.040,00	(49.293.960,00)	1,41	
05.2.01.02.5.2.01	Belanja Modal Tanah	50.000.000,00	706.040,00	(49.293.960,00)	1,41	
05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	25.298.870,00	25.188.320,00	(110.550,00)	99,56	
05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	4.512.262,00	4.458.750,00	(53.512,00)	98,81	
05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.362.262,00	1.333.750,00	(28.512,00)	97,91	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.362.262,00	1.333.750,00	(28.512,00)	97,91	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.362.262,00	1.333.750,00	(28.512,00)	97,91	
05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	3.150.000,00	3.125.000,00	(25.000,00)	99,21	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.150.000,00	3.125.000,00	(25.000,00)	99,21	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	3.125.000,00	(25.000,00)	99,21	
05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.786.608,00	20.729.570,00	(57.038,00)	99,73	
05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	20.786.608,00	20.729.570,00	(57.038,00)	99,73	
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.786.608,00	20.729.570,00	(57.038,00)	99,73	
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.786.608,00	20.729.570,00	(57.038,00)	99,73	
05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	698.326.073,00	694.334.312,00	(3.991.761,00)	99,43	
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	698.326.073,00	694.334.312,00	(3.991.761,00)	99,43	
05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	241.846.804,00	241.322.612,00	(524.192,00)	99,78	
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	241.846.804,00	241.322.612,00	(524.192,00)	99,78	
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.846.804,00	241.322.612,00	(524.192,00)	99,78	
05.2.01.04	Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	202.692.697,00	202.557.300,00	(135.397,00)	99,93	
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	202.692.697,00	202.557.300,00	(135.397,00)	99,93	
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.692.697,00	202.557.300,00	(135.397,00)	99,93	
05.2.01.05	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	38.434.023,00	38.206.700,00	(227.323,00)	99,41	
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	38.434.023,00	38.206.700,00	(227.323,00)	99,41	
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.434.023,00	38.206.700,00	(227.323,00)	99,41	
05.2.01.06	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	43.102.913,00	42.835.900,00	(267.013,00)	99,38	
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	43.102.913,00	42.835.900,00	(267.013,00)	99,38	
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.102.913,00	42.835.900,00	(267.013,00)	99,38	
05.2.01.07	Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	15.750.000,00	15.667.900,00	(82.100,00)	99,48	
05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	15.750.000,00	15.667.900,00	(82.100,00)	99,48	
05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	15.667.900,00	(82.100,00)	99,48	
05.2.01.08	Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	33.225.831,00	32.879.500,00	(346.331,00)	98,96	
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	33.225.831,00	32.879.500,00	(346.331,00)	98,96	
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.225.831,00	32.879.500,00	(346.331,00)	98,96	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	123.273.805,00	120.864.400,00	(2.409.405,00)	98,05	
05.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	123.273.805,00	120.864.400,00	(2.409.405,00)	98,05	
05.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.273.805,00	120.864.400,00	(2.409.405,00)	98,05	
05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	435.614.020,00	395.879.000,00	(39.735.020,00)	90,88	
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	435.614.020,00	395.879.000,00	(39.735.020,00)	90,88	
05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	87.670.000,00	62.205.000,00	(25.465.000,00)	70,95	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	87.670.000,00	62.205.000,00	(25.465.000,00)	70,95	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.670.000,00	62.205.000,00	(25.465.000,00)	70,95	
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	246.486.082,00	233.992.000,00	(12.494.082,00)	94,93	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	246.486.082,00	233.992.000,00	(12.494.082,00)	94,93	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.486.082,00	233.992.000,00	(12.494.082,00)	94,93	
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	101.457.938,00	99.682.000,00	(1.775.938,00)	98,25	
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	101.457.938,00	99.682.000,00	(1.775.938,00)	98,25	
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.457.938,00	99.682.000,00	(1.775.938,00)	98,25	
05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	27.585.370,00	27.355.800,00	(229.570,00)	99,17	
05.2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.585.370,00	27.355.800,00	(229.570,00)	99,17	
05.2.03.02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.585.370,00	27.355.800,00	(229.570,00)	99,17	
05.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	27.585.370,00	27.355.800,00	(229.570,00)	99,17	
05.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.585.370,00	27.355.800,00	(229.570,00)	99,17	
05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	103.870.000,00	103.149.000,00	(721.000,00)	99,31	
05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	103.870.000,00	103.149.000,00	(721.000,00)	99,31	
05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	103.870.000,00	103.149.000,00	(721.000,00)	99,31	
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	103.870.000,00	103.149.000,00	(721.000,00)	99,31	
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.870.000,00	103.149.000,00	(721.000,00)	99,31	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	58.086.600,00	55.594.942,00	(2.491.658,00)	95,71	
05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	58.086.600,00	55.594.942,00	(2.491.658,00)	95,71	
05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	58.086.600,00	55.594.942,00	(2.491.658,00)	95,71	
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	58.086.600,00	55.594.942,00	(2.491.658,00)	95,71	
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.086.600,00	55.594.942,00	(2.491.658,00)	95,71	
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.796.872.300,00	4.627.022.513,00	(169.849.787,00)	96,46	
06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.796.872.300,00	4.627.022.513,00	(169.849.787,00)	96,46	
06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	628.873.400,00	530.919.803,00	(97.953.597,00)	84,42	
06.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	628.873.400,00	530.919.803,00	(97.953.597,00)	84,42	
06.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	628.873.400,00	530.919.803,00	(97.953.597,00)	84,42	
06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	3.807.998.900,00	3.736.586.411,00	(71.412.489,00)	98,12	
06.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	3.807.998.900,00	3.736.586.411,00	(71.412.489,00)	98,12	
06.2.01.07.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.807.998.900,00	3.736.586.411,00	(71.412.489,00)	98,12	
06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	360.000.000,00	359.516.299,00	(483.701,00)	99,87	
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	360.000.000,00	359.516.299,00	(483.701,00)	99,87	
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	359.516.299,00	(483.701,00)	99,87	
06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.447.051.330,00	2.411.230.922,00	(35.820.408,00)	98,54	
06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	2.356.413.830,00	2.330.924.522,00	(25.489.308,00)	98,92	
06.2.01.01	Penyediaan Makanan	213.474.700,00	213.452.222,00	(22.478,00)	99,99	
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	213.474.700,00	213.452.222,00	(22.478,00)	99,99	
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.474.700,00	213.452.222,00	(22.478,00)	99,99	
06.2.01.04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	2.142.939.130,00	2.117.472.300,00	(25.466.830,00)	98,81	
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.142.939.130,00	2.117.472.300,00	(25.466.830,00)	98,81	
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.142.939.130,00	2.117.472.300,00	(25.466.830,00)	98,81	
06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	90.637.500,00	80.306.400,00	(10.331.100,00)	88,60	
06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	90.637.500,00	80.306.400,00	(10.331.100,00)	88,60	
06.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	90.637.500,00	80.306.400,00	(10.331.100,00)	88,60	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.637.500,00	80.306.400,00	(10.331.100,00)	88,60	
06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	32.262.400,00	32.115.667,00	(146.733,00)	99,55	
06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	32.262.400,00	32.115.667,00	(146.733,00)	99,55	
06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	32.262.400,00	32.115.667,00	(146.733,00)	99,55	
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	32.262.400,00	32.115.667,00	(146.733,00)	99,55	
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.262.400,00	32.115.667,00	(146.733,00)	99,55	
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	134.174.055,00	132.574.825,00	(1.599.230,00)	98,81	
06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	134.174.055,00	132.574.825,00	(1.599.230,00)	98,81	
06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	3.323.450,00	3.323.450,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.323.450,00	3.323.450,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.323.450,00	3.323.450,00	0,00	100,00	
06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	130.850.605,00	129.251.375,00	(1.599.230,00)	98,78	
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	130.850.605,00	129.251.375,00	(1.599.230,00)	98,78	
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.850.605,00	129.251.375,00	(1.599.230,00)	98,78	
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.115.567.185,00	1.113.639.594,00	(1.927.591,00)	99,83	
06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	74.845.000,00	74.020.000,00	(825.000,00)	98,90	
06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.845.000,00	74.020.000,00	(825.000,00)	98,90	
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	31.025.000,00	30.200.000,00	(825.000,00)	97,34	
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.025.000,00	30.200.000,00	(825.000,00)	97,34	
06.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	43.820.000,00	43.820.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.820.000,00	43.820.000,00	0,00	100,00	
06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	638.517.188,00	638.043.597,00	(473.591,00)	99,93	
06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	638.517.188,00	638.043.597,00	(473.591,00)	99,93	
06.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	638.517.188,00	638.043.597,00	(473.591,00)	99,93	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	638.517.188,00	638.043.597,00	(473.591,00)	99,93	
06.2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri	402.204.997,00	401.575.997,00	(629.000,00)	99,84	
06.2.03.01	Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	194.400.000,00	193.771.000,00	(629.000,00)	99,68	
06.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	194.400.000,00	193.771.000,00	(629.000,00)	99,68	
06.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.400.000,00	193.771.000,00	(629.000,00)	99,68	
06.2.03.02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	207.804.997,00	207.804.997,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	207.804.997,00	207.804.997,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.804.997,00	207.804.997,00	0,00	100,00	
06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	167.552.074,00	165.370.857,00	(2.181.217,00)	98,70	
06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	167.552.074,00	165.370.857,00	(2.181.217,00)	98,70	
06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	167.552.074,00	165.370.857,00	(2.181.217,00)	98,70	
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	167.552.074,00	165.370.857,00	(2.181.217,00)	98,70	
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.552.074,00	165.370.857,00	(2.181.217,00)	98,70	
06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	132.040.125,00	130.752.874,00	(1.287.251,00)	99,03	
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	132.040.125,00	130.752.874,00	(1.287.251,00)	99,03	
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.428.510,00	10.192.674,00	(235.836,00)	97,74	
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.428.510,00	10.192.674,00	(235.836,00)	97,74	
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.428.510,00	10.192.674,00	(235.836,00)	97,74	
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	115.511.615,00	114.545.400,00	(966.215,00)	99,16	
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	115.511.615,00	114.545.400,00	(966.215,00)	99,16	
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.511.615,00	114.545.400,00	(966.215,00)	99,16	
06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	6.100.000,00	6.014.800,00	(85.200,00)	98,60	
06.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	6.100.000,00	6.014.800,00	(85.200,00)	98,60	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	6.014.800,00	(85.200,00)	98,60	
06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.061.331.773,00	2.058.247.243,00	(3.084.530,00)	99,85	
06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.061.331.773,00	2.058.247.243,00	(3.084.530,00)	99,85	
06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	42.514.316,00	41.417.742,00	(1.096.574,00)	97,42	
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	42.514.316,00	41.417.742,00	(1.096.574,00)	97,42	
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.514.316,00	41.417.742,00	(1.096.574,00)	97,42	
06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2.018.817.457,00	2.016.829.501,00	(1.987.956,00)	99,90	
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.018.817.457,00	2.016.829.501,00	(1.987.956,00)	99,90	
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.018.817.457,00	2.016.829.501,00	(1.987.956,00)	99,90	
07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	302.250.125,00	297.344.025,00	(4.906.100,00)	98,38	
07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	302.250.125,00	297.344.025,00	(4.906.100,00)	98,38	
07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	287.150.125,00	282.519.025,00	(4.631.100,00)	98,39	
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	287.150.125,00	282.519.025,00	(4.631.100,00)	98,39	
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.150.125,00	282.519.025,00	(4.631.100,00)	98,39	
07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	15.100.000,00	14.825.000,00	(275.000,00)	98,18	
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.100.000,00	14.825.000,00	(275.000,00)	98,18	
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.100.000,00	14.825.000,00	(275.000,00)	98,18	
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	7.962.304.708,00	7.408.552.314,00	(553.752.394,00)	93,05	
07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	7.962.304.708,00	7.408.552.314,00	(553.752.394,00)	93,05	
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	501.846.350,00	486.124.914,00	(15.721.436,00)	96,87	
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	501.846.350,00	486.124.914,00	(15.721.436,00)	96,87	
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.846.350,00	486.124.914,00	(15.721.436,00)	96,87	
07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	7.273.388.958,00	6.736.305.400,00	(537.083.558,00)	92,62	
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.786.172.830,00	6.249.089.272,00	(537.083.558,00)	92,09	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.786.172.830,00	6.249.089.272,00	(537.083.558,00)	92,09	
07.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	487.216.128,00	487.216.128,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	487.216.128,00	487.216.128,00	0,00	100,00	
07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	46.695.400,00	46.153.000,00	(542.400,00)	98,84	
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	22.695.400,00	22.213.000,00	(482.400,00)	97,87	
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.695.400,00	22.213.000,00	(482.400,00)	97,87	
07.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	24.000.000,00	23.940.000,00	(60.000,00)	99,75	
07.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	23.940.000,00	(60.000,00)	99,75	
07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	140.374.000,00	139.969.000,00	(405.000,00)	99,71	
07.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	140.374.000,00	139.969.000,00	(405.000,00)	99,71	
07.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.374.000,00	139.969.000,00	(405.000,00)	99,71	
07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.602.061.671,00	1.470.158.917,00	(131.902.754,00)	91,77	
08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.602.061.671,00	1.470.158.917,00	(131.902.754,00)	91,77	
08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.539.061.671,00	1.407.158.917,00	(131.902.754,00)	91,43	
08.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.699.535,00	0,00	(14.699.535,00)	0	
08.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	14.699.535,00	0,00	(14.699.535,00)	0	
08.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	1.524.362.136,00	1.407.158.917,00	(117.203.219,00)	92,31	
08.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.504.761.836,00	1.407.158.917,00	(97.602.919,00)	93,51	
08.2.01.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.600.300,00	0,00	(19.600.300,00)	0	
08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.193.529.651,00	1.181.335.590,00	(12.194.061,00)	98,98	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.193.529.651,00	1.181.335.590,00	(12.194.061,00)	98,98	
08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.193.529.651,00	1.181.335.590,00	(12.194.061,00)	98,98	
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.193.529.651,00	1.181.335.590,00	(12.194.061,00)	98,98	
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.193.529.651,00	1.181.335.590,00	(12.194.061,00)	98,98	
09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	285.000.000,00	278.576.626,00	(6.423.374,00)	97,75	
09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	285.000.000,00	278.576.626,00	(6.423.374,00)	97,75	
09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	85.000.000,00	83.325.000,00	(1.675.000,00)	98,03	
09.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	85.000.000,00	83.325.000,00	(1.675.000,00)	98,03	
09.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.000.000,00	83.325.000,00	(1.675.000,00)	98,03	
09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	200.000.000,00	195.251.626,00	(4.748.374,00)	97,63	
09.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	195.251.626,00	(4.748.374,00)	97,63	
09.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	195.251.626,00	(4.748.374,00)	97,63	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	142.648.155.265,00	135.080.961.352,00	(7.567.193.913,00)	94,70	
10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	142.648.155.265,00	135.080.961.352,00	(7.567.193.913,00)	94,70	
10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	150.000.000,00	149.850.000,00	(150.000,00)	99,90	
10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.850.000,00	(150.000,00)	99,90	
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.850.000,00	(150.000,00)	99,90	
10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	79.773.148.147,00	78.086.342.886,00	(1.686.805.261,00)	97,89	
10.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	620.840.196,00	599.554.629,00	(21.285.567,00)	96,57	
10.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	620.840.196,00	599.554.629,00	(21.285.567,00)	96,57	
10.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	79.152.307.951,00	77.486.788.257,00	(1.665.519.694,00)	97,90	
10.2.01.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.152.307.951,00	77.486.788.257,00	(1.665.519.694,00)	97,90	
10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	42.549.306.889,00	41.257.114.751,00	(1.292.192.138,00)	96,96	
10.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	42.549.306.889,00	41.257.114.751,00	(1.292.192.138,00)	96,96	
10.2.01.09.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.549.306.889,00	41.257.114.751,00	(1.292.192.138,00)	96,96	
10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	160.000.000,00	158.977.358,00	(1.022.642,00)	99,36	
10.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	160.000.000,00	158.977.358,00	(1.022.642,00)	99,36	
10.2.01.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	160.000.000,00	158.977.358,00	(1.022.642,00)	99,36	
10.2.01.16	Penggantian Jembatan	17.771.301.150,00	13.363.502.300,00	(4.407.798.850,00)	75,20	
10.2.01.16.5.2	BELANJA MODAL	17.771.301.150,00	13.363.502.300,00	(4.407.798.850,00)	75,20	
10.2.01.16.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.771.301.150,00	13.363.502.300,00	(4.407.798.850,00)	75,20	
10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	39.684.429,00	29.711.210,00	(9.973.219,00)	74,87	
10.2.01.18.5.2	BELANJA MODAL	39.684.429,00	29.711.210,00	(9.973.219,00)	74,87	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
10.2.01.18.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.684.429,00	29.711.210,00	(9.973.219,00)	74,87	
10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	50.000.000,00	49.864.744,00	(135.256,00)	99,73	
10.2.01.19.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.864.744,00	(135.256,00)	99,73	
10.2.01.19.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	49.864.744,00	(135.256,00)	99,73	
10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2.154.714.650,00	1.985.598.103,00	(169.116.547,00)	92,15	
10.2.01.23.5.2	BELANJA MODAL	2.154.714.650,00	1.985.598.103,00	(169.116.547,00)	92,15	
10.2.01.23.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.154.714.650,00	1.985.598.103,00	(169.116.547,00)	92,15	
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	178.687.270,00	171.925.150,00	(6.762.120,00)	96,22	
10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	178.687.270,00	171.925.150,00	(6.762.120,00)	96,22	
10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	128.687.270,00	121.925.150,00	(6.762.120,00)	94,75	
10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	128.687.270,00	121.925.150,00	(6.762.120,00)	94,75	
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.687.270,00	121.925.150,00	(6.762.120,00)	94,75	
10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	88.663.721,00	58.041.775,00	(30.621.946,00)	65,46	
11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	84.446.521,00	53.828.375,00	(30.618.146,00)	63,74	
11.2.01.03	Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	35.478.821,00	35.468.375,00	(10.446,00)	99,97	
11.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	35.478.821,00	35.468.375,00	(10.446,00)	99,97	
11.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.478.821,00	35.468.375,00	(10.446,00)	99,97	
11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	38.617.700,00	8.010.000,00	(30.607.700,00)	20,74	
11.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	38.617.700,00	8.010.000,00	(30.607.700,00)	20,74	
11.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.617.700,00	8.010.000,00	(30.607.700,00)	20,74	
11.2.01.05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	100,00	
11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.217.200,00	4.213.400,00	(3.800,00)	99,91	
11.2.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	4.217.200,00	4.213.400,00	(3.800,00)	99,91	
11.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.217.200,00	4.213.400,00	(3.800,00)	99,91	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
11.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.217.200,00	4.213.400,00	(3.800,00)	99,91	
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.688.845.906,00	3.660.359.630,00	(28.486.276,00)	99,23	
11.2.01	Pengelolaan Sampah	3.688.845.906,00	3.660.359.630,00	(28.486.276,00)	99,23	
11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	8.600.000,00	3.740.000,00	(4.860.000,00)	43,49	
11.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.600.000,00	3.740.000,00	(4.860.000,00)	43,49	
11.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	3.740.000,00	(4.860.000,00)	43,49	
11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.838.600.000,00	2.824.900.000,00	(13.700.000,00)	99,52	
11.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.838.600.000,00	2.824.900.000,00	(13.700.000,00)	99,52	
11.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.838.600.000,00	2.824.900.000,00	(13.700.000,00)	99,52	
11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	144.823.205,00	141.124.929,00	(3.698.276,00)	97,45	
11.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	144.823.205,00	141.124.929,00	(3.698.276,00)	97,45	
11.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.823.205,00	141.124.929,00	(3.698.276,00)	97,45	
11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	696.822.701,00	690.594.701,00	(6.228.000,00)	99,11	
11.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	696.822.701,00	690.594.701,00	(6.228.000,00)	99,11	
11.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	696.822.701,00	690.594.701,00	(6.228.000,00)	99,11	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	661.043.540,00	656.039.864,00	(5.003.676,00)	99,24	
12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	235.387.600,00	235.329.924,00	(57.676,00)	99,98	
12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	235.387.600,00	235.329.924,00	(57.676,00)	99,98	
12.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	235.387.600,00	235.329.924,00	(57.676,00)	99,98	
12.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.387.600,00	235.329.924,00	(57.676,00)	99,98	
12.2.02	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	158.055.940,00	158.009.940,00	(46.000,00)	99,97	
12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	150.000.000,00	149.985.000,00	(15.000,00)	99,99	
12.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.985.000,00	(15.000,00)	99,99	
12.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.985.000,00	(15.000,00)	99,99	
12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	8.055.940,00	8.024.940,00	(31.000,00)	99,62	
12.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.055.940,00	8.024.940,00	(31.000,00)	99,62	
12.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.055.940,00	8.024.940,00	(31.000,00)	99,62	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	240.600.000,00	236.100.000,00	(4.500.000,00)	98,13	
12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	240.600.000,00	236.100.000,00	(4.500.000,00)	98,13	
12.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	240.600.000,00	236.100.000,00	(4.500.000,00)	98,13	
12.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.600.000,00	236.100.000,00	(4.500.000,00)	98,13	
12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	27.000.000,00	26.600.000,00	(400.000,00)	98,52	
12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	27.000.000,00	26.600.000,00	(400.000,00)	98,52	
12.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	26.600.000,00	(400.000,00)	98,52	
12.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	26.600.000,00	(400.000,00)	98,52	
	SURPLUS / DEFISIT	(120.014.991.993,00)	(85.442.926.964,57)	34.572.065.028,43	0	
	PEMBIAYAAN					
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121.491.300.215,00	116.353.065.754,87	(5.138.234.460,13)	95,77	
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.660.583.213,00	75.660.583.213,87	0,87	100,00	
00.0.00.00.6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	45.830.717.002,00	40.692.482.541,00	(5.138.234.461,00)	88,79	
00.0.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.476.308.222,00	1.476.308.222,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.476.308.222,00	1.476.308.222,00	0,00	100,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	120.014.991.993,00	114.876.757.532,87	(5.138.234.460,13)	95,72	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	29.433.830.568,30	29.433.830.568,30	0	

Marisa, 28 Juli 2023

BUPATI



SAIPUL A. MBUNGA





PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN

Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	399.491.390.081,00	189.112.358.219,00	0,00	0,00
		381.410.912.781,00	175.333.853.748,00	0,00	0,00
1.01	PENDIDIKAN	187.624.893.890,00	19.906.520.854,00	0,00	0,00
		179.527.048.519,00	18.192.726.037,00	0,00	0,00
1.01.00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.636.620.912,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.636.620.912,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.636.620.912,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	152.605.965.711,00	177.502.400,00	0,00	0,00
		148.316.534.222,00	176.258.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.424.000,00	0,00	0,00	0,00
		169.335.209,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	172.424.000,00	0,00	0,00	0,00
		169.335.209,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148.214.092.292,00	0,00	0,00	0,00
		144.153.476.907,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	148.214.092.292,00	0,00	0,00	0,00
		144.153.476.907,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	132.282.997,00	0,00	0,00	0,00
		112.607.626,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	132.282.997,00	0,00	0,00	0,00
		112.607.626,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	412.641.819,00	0,00	0,00	0,00
		388.048.960,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.106.680,00	0,00	0,00	0,00
		26.749.370,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.103.139,00	0,00	0,00	0,00
		21.548.400,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	52.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.640.100,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	294.132.000,00	0,00	0,00	0,00
		294.111.090,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	177.502.400,00	0,00	0,00
		0,00	176.258.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	64.731.600,00	0,00	0,00
		0,00	64.713.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	112.770.800,00	0,00	0,00
		0,00	111.545.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.366.600.168,00	0,00	0,00	0,00
		3.220.165.816,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.485.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.320.168,00	0,00	0,00	0,00
		96.427.839,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.219.795.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.110.587.977,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.924.435,00	0,00	0,00	0,00
		272.899.704,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	167.826.000,00	0,00	0,00	0,00
		136.642.971,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.098.435,00	0,00	0,00	0,00
		128.756.733,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	34.945.215.309,00	19.729.018.454,00	0,00	0,00
		25.504.985.885,00	18.016.468.037,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	15.114.811.352,00	12.496.228.220,00	0,00	0,00
		14.033.926.485,00	11.489.842.514,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	67.394.025,00	561.300.000,00	0,00	0,00
		63.400.000,00	560.549.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	3.269.451.426,00	0,00	0,00
		0,00	3.040.042.880,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	379.444.000,00	410.011.502,00	0,00	0,00
		329.881.700,00	409.642.502,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	10.800.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00
		10.401.830,00	94.922.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0,00	323.565.000,00	0,00	0,00
		0,00	295.318.140,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	0,00	281.650.000,00	0,00	0,00
		0,00	277.561.998,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	198.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		198.283.296,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		549.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	3.240.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	3.092.520.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	76.769.485,00	0,00	0,00	0,00
		75.186.050,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	213.605.440,00	0,00	0,00	0,00
		204.930.233,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.992.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.863.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	51.956.250,00	0,00	0,00	0,00
		49.388.400,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	11.574.142.152,00	4.315.250.292,00	0,00	0,00
		10.689.654.976,00	3.719.285.994,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8.964.243.912,00	4.502.857.234,00	0,00	0,00
		8.113.699.643,00	3.805.334.506,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	198.253.250,00	0,00	0,00
		0,00	197.983.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	181.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	180.824.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	153.390.000,00	515.000.000,00	0,00	0,00
		135.880.680,00	439.395.900,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	101.671.750,00	1.060.000.000,00	0,00	0,00
		101.400.000,00	880.095.200,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0,00	219.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	199.977.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	60.000.000,00	511.000.000,00	0,00	0,00
		59.605.000,00	491.015.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	52.340.150,00	0,00	0,00
		0,00	52.340.150,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0,00	43.250.135,00	0,00	0,00
		0,00	43.250.135,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	21.295.600,00	0,00	0,00
		0,00	21.295.600,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebeluer Sekolah	0,00	84.750.000,00	0,00	0,00
		0,00	84.100.500,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	85.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.314.600,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.35	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	51.310.000,00	0,00	0,00
		0,00	50.300.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	47.921.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.823.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.821.516.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.744.416.970,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	255.751.275,00	0,00	0,00	0,00
		217.150.480,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	282.601.512,00	0,00	0,00	0,00
		203.539.590,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5.555.891.575,00	1.565.658.099,00	0,00	0,00
		4.932.569.323,00	1.164.758.021,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.424.998.645,00	2.729.933.000,00	0,00	0,00
		1.142.530.557,00	2.721.291.017,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	107.104.000,00	2.134.023.000,00	0,00	0,00
		105.764.500,00	2.126.025.017,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	9.300.000,00	95.910.000,00	0,00	0,00
		9.050.000,00	95.766.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.058.370,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.12	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	80.720.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
		74.838.640,00	499.500.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	237.025.345,00	0,00	0,00	0,00
		217.260.715,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	65.284.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.196.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	489.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		489.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	172.665.300,00	0,00	0,00	0,00
		164.799.232,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.247.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		-36.900,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.441.161.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.214.829.200,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	2.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.193.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	21.661.400,00	0,00	0,00	0,00
		21.079.200,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.169.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	73.712.870,00	0,00	0,00	0,00
		68.907.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	73.712.870,00	0,00	0,00	0,00
		68.907.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	73.712.870,00	0,00	0,00	0,00
		68.907.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02	KESEHATAN	162.796.307.623,00	7.184.099.413,00	0,00	0,00
		155.569.644.818,00	4.946.760.482,00	0,00	0,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	93.216.875.524,00	3.427.473.250,00	0,00	0,00
		96.597.699.822,00	1.484.202.481,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	304.075.300,00	0,00	0,00	0,00
		251.936.790,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	138.881.150,00	0,00	0,00	0,00
		95.195.340,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.496.050,00	0,00	0,00	0,00
		5.495.950,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.698.100,00	0,00	0,00	0,00
		151.245.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.634.487.792,00	0,00	0,00	0,00
		46.209.364.470,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.628.785.492,00	0,00	0,00	0,00
		46.209.364.470,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.702.300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	605.159.057,00	32.500.000,00	0,00	0,00
		545.352.567,00	32.314.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.506.740,00	32.500.000,00	0,00	0,00
		10.407.500,00	32.314.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.839.465,00	0,00	0,00	0,00
		54.755.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.309.052,00	0,00	0,00	0,00
		50.134.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.253.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	474.503.800,00	0,00	0,00	0,00
		415.801.367,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	462.780.000,00	0,00	0,00
		0,00	440.575.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	447.780.000,00	0,00	0,00
		0,00	425.590.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	14.985.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644.340.317,00	0,00	0,00	0,00
		620.173.373,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	265.038.854,00	0,00	0,00	0,00
		260.545.707,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	379.301.463,00	0,00	0,00	0,00
		359.627.666,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	630.945.000,00	0,00	0,00	0,00
		478.704.271,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	191.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		120.706.410,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	351.825.000,00	0,00	0,00	0,00
		270.732.561,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.340.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.337.700,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.180.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.962.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.965.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	50.109.513.396,00	1.918.082.900,00	0,00	0,00
		48.492.168.351,00	1.011.313.481,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	50.109.513.396,00	1.918.082.900,00	0,00	0,00
		48.492.168.351,00	1.011.313.481,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	60.325.062.389,00	3.756.626.163,00	0,00	0,00
		50.031.781.971,00	3.462.558.001,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	8.925.085.568,00	2.950.120.943,00	0,00	0,00
		6.880.744.647,00	2.853.952.575,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	0,00	1.257.881.207,00	0,00	0,00
		0,00	1.251.827.596,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	1.528.143.968,00	157.320.820,00	0,00	0,00
		1.155.530.700,00	157.119.820,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	1.166.558.739,00	0,00	0,00
		0,00	1.077.125.559,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	368.360.177,00	0,00	0,00
		99.505.000,00	367.879.600,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	4.005.317.571,00	0,00	0,00	0,00
		2.497.054.924,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.069.999.429,00	0,00	0,00	0,00
		1.068.528.862,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	342.104.000,00	0,00	0,00	0,00
		341.562.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.685.857.600,00	0,00	0,00	0,00
		1.528.833.161,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	193.663.000,00	0,00	0,00	0,00
		189.730.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.506.616.821,00	562.135.320,00	0,00	0,00
		30.575.170.158,00	364.235.526,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	108.796.450,00	0,00	0,00	0,00
		104.367.100,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	787.166.260,00	0,00	0,00	0,00
		656.901.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	246.648.235,00	0,00	0,00	0,00
		201.551.435,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	399.151.000,00	0,00	0,00	0,00
		318.398.655,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.675.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	17.775.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.725.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	30.816.840,00	0,00	0,00	0,00
		29.516.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.476.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	79.960.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.260.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	117.209.200,00	0,00	0,00	0,00
		96.664.100,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	52.040.270,00	0,00	0,00	0,00
		29.519.983,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	210.250.400,00	0,00	0,00	0,00
		204.857.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	622.211.425,00	0,00	0,00	0,00
		546.005.046,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	73.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.101.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	119.065.000,00	0,00	0,00	0,00
		91.928.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	382.620.336,00	10.500.000,00	0,00	0,00
		372.565.330,00	10.495.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	443.139.870,00	0,00	0,00	0,00
		311.702.842,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	574.921.087,00	0,00	0,00	0,00
		511.238.004,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20.910.879.141,00	551.635.320,00	0,00	0,00
		15.950.243.662,00	353.740.526,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	11.308.168.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.623.224.391,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	551.180.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.956.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.246.168.307,00	0,00	0,00	0,00
		1.169.990.310,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	12.893.360.000,00	244.369.900,00	0,00	0,00
		12.575.867.166,00	244.369.900,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	12.893.360.000,00	244.369.900,00	0,00	0,00
		12.575.867.166,00	244.369.900,00	0,00	0,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.436.376.500,00	0,00	0,00	0,00
		8.183.470.515,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	8.129.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.901.487.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.129.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.901.487.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	306.476.500,00	0,00	0,00	0,00
		281.983.015,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	306.476.500,00	0,00	0,00	0,00
		281.983.015,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	214.537.675,00	0,00	0,00	0,00
		162.796.300,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	91.776.175,00	0,00	0,00	0,00
		88.945.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	91.776.175,00	0,00	0,00	0,00
		88.945.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	95.761.500,00	0,00	0,00	0,00
		47.201.300,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	95.761.500,00	0,00	0,00	0,00
		47.201.300,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.650.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.650.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	603.455.535,00	0,00	0,00	0,00
		593.896.210,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	224.472.700,00	0,00	0,00	0,00
		216.952.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	224.472.700,00	0,00	0,00	0,00
		216.952.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	211.944.145,00	0,00	0,00	0,00
		211.058.150,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	211.944.145,00	0,00	0,00	0,00
		211.058.150,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	167.038.690,00	0,00	0,00	0,00
		165.885.160,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	167.038.690,00	0,00	0,00	0,00
		165.885.160,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.028.594.779,00	162.021.737.952,00	0,00	0,00
		16.370.993.409,00	152.194.367.229,00	0,00	0,00
1.03.00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.257.800,00	-5.257.800,00	0,00	0,00
1.03.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.257.800,00	-5.257.800,00	0,00	0,00
1.03.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.257.800,00	-5.257.800,00	0,00	0,00
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.840.074.562,00	891.665.000,00	0,00	0,00
		5.606.762.627,00	859.949.200,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.781.990,00	0,00	0,00	0,00
		174.758.710,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	169.001.990,00	0,00	0,00	0,00
		168.060.310,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.780.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.698.400,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.073.529.520,00	0,00	0,00	0,00
		4.015.435.488,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.068.397.410,00	0,00	0,00	0,00
		4.010.303.378,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.566.055,00	0,00	0,00	0,00
		2.566.055,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.566.055,00	0,00	0,00	0,00
		2.566.055,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.969.200,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.969.200,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	406.795.165,00	0,00	0,00	0,00
		406.701.992,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.537.460,00	0,00	0,00	0,00
		7.537.460,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.810.905,00	0,00	0,00	0,00
		34.810.905,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.090.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.089.682,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	22.021.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.982.400,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	319.335.800,00	0,00	0,00	0,00
		319.281.545,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	891.665.000,00	0,00	0,00
		0,00	859.949.200,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	769.307.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	91.665.000,00	0,00	0,00
		0,00	90.642.200,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	706.745.000,00	0,00	0,00	0,00
		590.340.722,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		161.423.029,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	508.745.000,00	0,00	0,00	0,00
		428.917.693,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.122.887,00	0,00	0,00	0,00
		410.556.515,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	340.088.177,00	0,00	0,00	0,00
		285.816.805,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.075.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.990.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.890.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.784.710,00	0,00	0,00	0,00
		6.784.710,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.706.132.560,00	6.411.171.204,00	0,00	0,00
		1.560.735.444,00	5.604.735.528,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.147.132.560,00	556.269.093,00	0,00	0,00
		1.016.422.644,00	747.953.193,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	392.215.450,00	7.491.900,00	0,00	0,00
		369.483.934,00	199.650.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	199.860.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.12	Pembangunan Kanal Banjir	0,00	290.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	289.666.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.27	Rehabilitasi Kanal Banjir	14.917.110,00	58.777.193,00	0,00	0,00
		9.933.710,00	58.777.193,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	340.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		339.723.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.02.2.01.65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		297.282.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	559.000.000,00	5.854.902.111,00	0,00	0,00
		544.312.800,00	4.856.782.335,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.275.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.09	Peningkatan Bendung Irigasi	190.000.000,00	5.634.262.000,00	0,00	0,00
		189.937.800,00	4.725.451.456,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	220.640.111,00	0,00	0,00
		0,00	131.330.879,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		199.900.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	69.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	701.955.665,00	6.745.352.243,00	0,00	0,00
		684.153.345,00	5.595.443.447,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	701.955.665,00	6.745.352.243,00	0,00	0,00
		684.153.345,00	5.595.443.447,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	701.955.665,00	5.679.352.243,00	0,00	0,00
		684.153.345,00	4.778.880.163,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	0,00	1.066.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	816.563.284,00	0,00	0,00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.622.185.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		6.432.830.000,00	49.950.000,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.622.185.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		6.432.830.000,00	49.950.000,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	49.950.000,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	6.622.185.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.432.830.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	360.000.000,00	4.436.872.300,00	0,00	0,00
		359.516.299,00	4.267.506.214,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	360.000.000,00	4.436.872.300,00	0,00	0,00
		359.516.299,00	4.267.506.214,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	0,00	628.873.400,00	0,00	0,00
		0,00	530.919.803,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	0,00	3.807.998.900,00	0,00	0,00
		0,00	3.736.586.411,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		359.516.299,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	77.699.535,00	1.524.362.136,00	0,00	0,00
		63.000.000,00	1.407.158.917,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	77.699.535,00	1.524.362.136,00	0,00	0,00
		63.000.000,00	1.407.158.917,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	14.699.535,00	1.524.362.136,00	0,00	0,00
		0,00	1.407.158.917,00	0,00	0,00
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	200.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
		195.251.626,00	83.325.000,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
		195.251.626,00	83.325.000,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	0,00	85.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	83.325.000,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		195.251.626,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	770.840.196,00	141.877.315.069,00	0,00	0,00
		749.404.629,00	134.331.556.723,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	770.840.196,00	141.877.315.069,00	0,00	0,00
		749.404.629,00	134.331.556.723,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.850.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	620.840.196,00	79.152.307.951,00	0,00	0,00
		599.554.629,00	77.486.788.257,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	0,00	42.549.306.889,00	0,00	0,00
		0,00	41.257.114.751,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	0,00	160.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	158.977.358,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	0,00	17.771.301.150,00	0,00	0,00
		0,00	13.363.502.300,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	0,00	39.684.429,00	0,00	0,00
		0,00	29.711.210,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	49.864.744,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	0,00	2.154.714.650,00	0,00	0,00
		0,00	1.985.598.103,00	0,00	0,00
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	88.663.721,00	0,00	0,00	0,00
		58.041.775,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	84.446.521,00	0,00	0,00	0,00
		53.828.375,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01.03	Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	35.478.821,00	0,00	0,00	0,00
		35.468.375,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	38.617.700,00	0,00	0,00	0,00
		8.010.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01.05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	10.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.350.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.217.200,00	0,00	0,00	0,00
		4.213.400,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	4.217.200,00	0,00	0,00	0,00
		4.213.400,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	661.043.540,00	0,00	0,00	0,00
		656.039.864,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	235.387.600,00	0,00	0,00	0,00
		235.329.924,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	235.387.600,00	0,00	0,00	0,00
		235.329.924,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	158.055.940,00	0,00	0,00	0,00
		158.009.940,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.985.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	8.055.940,00	0,00	0,00	0,00
		8.024.940,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	240.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		236.100.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	240.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		236.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.735.038.464,00	0,00	0,00	0,00
		11.779.655.106,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.025.033.355,00	0,00	0,00	0,00
		3.896.760.772,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.481.091,00	0,00	0,00	0,00
		108.801.150,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	116.481.091,00	0,00	0,00	0,00
		108.801.150,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.063.715.475,00	0,00	0,00	0,00
		2.994.188.092,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.063.715.475,00	0,00	0,00	0,00
		2.994.188.092,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	500.427.501,00	0,00	0,00	0,00
		493.743.325,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.898.800,00	0,00	0,00	0,00
		9.702.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.993.415,00	0,00	0,00	0,00
		29.993.294,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.964.286,00	0,00	0,00	0,00
		16.051.621,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	24.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.940.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	414.601.000,00	0,00	0,00	0,00
		413.055.910,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.053.288,00	0,00	0,00	0,00
		182.169.802,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.671.733,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.853.288,00	0,00	0,00	0,00
		130.498.069,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.356.000,00	0,00	0,00	0,00
		117.858.403,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.356.000,00	0,00	0,00	0,00
		106.458.403,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	9.267.758.521,00	0,00	0,00	0,00
		7.487.700.136,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	9.175.737.716,00	0,00	0,00	0,00
		7.401.996.670,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	8.435.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.685.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	440.737.716,00	0,00	0,00	0,00
		416.996.670,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	92.020.805,00	0,00	0,00	0,00
		85.703.466,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	92.020.805,00	0,00	0,00	0,00
		85.703.466,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	442.246.588,00	0,00	0,00	0,00
		395.194.198,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	199.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		198.031.438,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	199.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		198.031.438,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	243.246.588,00	0,00	0,00	0,00
		197.162.760,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	68.040.400,00	0,00	0,00	0,00
		66.244.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	175.206.188,00	0,00	0,00	0,00
		130.918.260,00	0,00	0,00	0,00
1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.038.956.213,00	0,00	0,00	0,00
		9.960.386.532,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.758.128.163,00	0,00	0,00	0,00
		6.711.800.582,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171.138.851,00	0,00	0,00	0,00
		170.683.916,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.136.761,00	0,00	0,00	0,00
		121.755.100,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.002.090,00	0,00	0,00	0,00
		48.928.816,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.462.486.329,00	0,00	0,00	0,00
		5.432.851.082,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.441.356.829,00	0,00	0,00	0,00
		5.412.085.358,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.109.950,00	0,00	0,00	0,00
		17.747.724,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.019.550,00	0,00	0,00	0,00
		3.018.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	612.625.416,00	0,00	0,00	0,00
		611.504.213,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.045.583,00	0,00	0,00	0,00
		16.037.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.929.566,00	0,00	0,00	0,00
		27.929.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.379.825,00	0,00	0,00	0,00
		53.152.221,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.353.842,00	0,00	0,00	0,00
		36.288.300,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.848.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.474.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	449.068.600,00	0,00	0,00	0,00
		448.623.192,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.811.800,00	0,00	0,00	0,00
		237.469.321,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.833.508,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	193.411.800,00	0,00	0,00	0,00
		186.635.813,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.065.767,00	0,00	0,00	0,00
		259.292.050,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	191.237.200,00	0,00	0,00	0,00
		191.147.800,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.777.700,00	0,00	0,00	0,00
		34.259.250,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.098.537,00	0,00	0,00	0,00
		15.998.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.952.330,00	0,00	0,00	0,00
		17.886.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.354.715.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.326.485.650,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.348.415.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.320.185.650,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.175.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.156.068.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	55.546.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.203.400,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	40.255.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.499.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.324.750,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	73.454.400,00	0,00	0,00	0,00
		71.090.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	230.682.650,00	0,00	0,00	0,00
		227.514.600,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	67.584.800,00	0,00	0,00	0,00
		67.284.800,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	25.447.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.330.800,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	42.137.800,00	0,00	0,00	0,00
		41.954.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	163.097.850,00	0,00	0,00	0,00
		160.229.800,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	99.269.350,00	0,00	0,00	0,00
		96.674.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.046.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	51.528.500,00	0,00	0,00	0,00
		51.508.800,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	695.430.000,00	0,00	0,00	0,00
		694.585.700,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	695.430.000,00	0,00	0,00	0,00
		694.585.700,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.890.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	35.448.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.786.700,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	646.032.000,00	0,00	0,00	0,00
		645.909.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	SOSIAL	8.267.599.112,00	0,00	0,00	0,00
		8.203.184.397,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.327.447.082,00	0,00	0,00	0,00
		4.302.360.718,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.253.810,00	0,00	0,00	0,00
		92.144.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.253.810,00	0,00	0,00	0,00
		92.144.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.385.339.266,00	0,00	0,00	0,00
		3.376.251.522,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.343.587.416,00	0,00	0,00	0,00
		3.334.817.922,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	41.751.850,00	0,00	0,00	0,00
		41.433.600,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	428.926.123,00	0,00	0,00	0,00
		426.581.432,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.409.360,00	0,00	0,00	0,00
		6.401.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.986.825,00	0,00	0,00	0,00
		29.829.845,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.102.733,00	0,00	0,00	0,00
		22.102.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	17.760.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.724.300,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	339.033.600,00	0,00	0,00	0,00
		338.704.687,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.633.605,00	0,00	0,00	0,00
		11.819.100,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.913.000,00	0,00	0,00	0,00
		253.624.124,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		98.126.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.913.000,00	0,00	0,00	0,00
		155.497.624,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.014.883,00	0,00	0,00	0,00
		153.759.140,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.816.000,00	0,00	0,00	0,00
		137.582.640,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.948.883,00	0,00	0,00	0,00
		10.926.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	767.327.400,00	0,00	0,00	0,00
		766.856.700,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	13.092.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.887.700,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	13.092.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.887.700,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	754.234.900,00	0,00	0,00	0,00
		753.969.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	273.050.100,00	0,00	0,00	0,00
		272.994.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	308.025.850,00	0,00	0,00	0,00
		307.972.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4.108.850,00	0,00	0,00	0,00
		3.976.300,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	169.050.100,00	0,00	0,00	0,00
		169.026.700,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	280.205.150,00	0,00	0,00	0,00
		278.498.980,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	158.749.700,00	0,00	0,00	0,00
		157.815.980,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	73.032.850,00	0,00	0,00	0,00
		72.305.100,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	42.168.600,00	0,00	0,00	0,00
		42.065.400,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	43.548.250,00	0,00	0,00	0,00
		43.445.480,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	121.455.450,00	0,00	0,00	0,00
		120.683.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	19.270.850,00	0,00	0,00	0,00
		18.769.600,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	33.568.350,00	0,00	0,00	0,00
		33.461.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	68.616.250,00	0,00	0,00	0,00
		68.451.900,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	445.568.150,00	0,00	0,00	0,00
		444.237.077,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	323.966.700,00	0,00	0,00	0,00
		323.387.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	14.792.850,00	0,00	0,00	0,00
		14.465.300,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	309.173.850,00	0,00	0,00	0,00
		308.921.700,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	121.601.450,00	0,00	0,00	0,00
		120.850.077,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	109.466.350,00	0,00	0,00	0,00
		108.949.877,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12.135.100,00	0,00	0,00	0,00
		11.900.200,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.447.051.330,00	0,00	0,00	0,00
		2.411.230.922,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	2.356.413.830,00	0,00	0,00	0,00
		2.330.924.522,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	213.474.700,00	0,00	0,00	0,00
		213.452.222,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	2.142.939.130,00	0,00	0,00	0,00
		2.117.472.300,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	90.637.500,00	0,00	0,00	0,00
		80.306.400,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	90.637.500,00	0,00	0,00	0,00
		80.306.400,00	0,00	0,00	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	72.664.296.463,00	2.421.034.994,00	0,00	0,00
		70.862.651.859,00	2.332.072.321,00	0,00	0,00
2.07	TENAGA KERJA	3.960.759.143,00	24.805.200,00	0,00	0,00
		3.935.471.016,00	24.753.000,00	0,00	0,00
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.517.470.723,00	24.805.200,00	0,00	0,00
		3.494.256.980,00	24.753.000,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.494.348,00	0,00	0,00	0,00
		75.819.577,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.999.748,00	0,00	0,00	0,00
		3.990.450,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.494.600,00	0,00	0,00	0,00
		71.829.127,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.859.386.294,00	0,00	0,00	0,00
		2.852.187.544,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.850.286.294,00	0,00	0,00	0,00
		2.843.164.063,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.023.481,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.569.727,00	0,00	0,00	0,00
		332.762.869,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.473.170,00	0,00	0,00	0,00
		3.558.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.999.910,00	0,00	0,00	0,00
		28.878.600,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.919.600,00	0,00	0,00	0,00
		22.760.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	17.015.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.706.030,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	261.162.047,00	0,00	0,00	0,00
		260.859.739,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	24.805.200,00	0,00	0,00
		0,00	24.753.000,00	0,00	0,00
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	24.805.200,00	0,00	0,00
		0,00	24.753.000,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.257.082,00	0,00	0,00	0,00
		158.873.340,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.287.082,00	0,00	0,00	0,00
		51.257.474,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		107.615.866,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.063.272,00	0,00	0,00	0,00
		70.913.650,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.609.400,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.563.272,00	0,00	0,00	0,00
		11.554.250,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	132.596.800,00	0,00	0,00	0,00
		131.079.800,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	132.596.800,00	0,00	0,00	0,00
		131.079.800,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	132.596.800,00	0,00	0,00	0,00
		131.079.800,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	161.658.000,00	0,00	0,00	0,00
		161.643.162,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	161.658.000,00	0,00	0,00	0,00
		161.643.162,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	161.658.000,00	0,00	0,00	0,00
		161.643.162,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	71.244.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.951.750,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	71.244.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.951.750,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	71.244.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.951.750,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	77.789.620,00	0,00	0,00	0,00
		77.539.324,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	77.789.620,00	0,00	0,00	0,00
		77.539.324,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	51.463.020,00	0,00	0,00	0,00
		51.283.200,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.326.600,00	0,00	0,00	0,00
		26.256.124,00	0,00	0,00	0,00
2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.758.323.893,00	127.555.337,00	0,00	0,00
		5.713.969.533,00	127.345.000,00	0,00	0,00
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.324.879.221,00	127.555.337,00	0,00	0,00
		4.290.128.194,00	127.345.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.645.250,00	0,00	0,00	0,00
		220.545.250,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	116.029.650,00	0,00	0,00	0,00
		116.029.650,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	104.615.600,00	0,00	0,00	0,00
		104.515.600,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.095.513.209,00	0,00	0,00	0,00
		3.068.952.143,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.861.503.809,00	0,00	0,00	0,00
		2.835.145.473,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	156.858.200,00	0,00	0,00	0,00
		156.655.470,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	77.151.200,00	0,00	0,00	0,00
		77.151.200,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	134.122.800,00	0,00	0,00	0,00
		133.496.800,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	134.122.800,00	0,00	0,00	0,00
		133.496.800,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.536.952,00	12.500.000,00	0,00	0,00
		386.297.828,00	12.450.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.524.370,00	0,00	0,00	0,00
		13.519.030,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00
		0,00	12.450.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.688.782,00	0,00	0,00	0,00
		29.676.053,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.173.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.117.975,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.981.500,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	289.150.800,00	0,00	0,00	0,00
		289.003.270,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000,00	115.055.337,00	0,00	0,00
		29.859.000,00	114.895.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	8.983.500,00	0,00	0,00
		0,00	8.900.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	16.925.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	89.071.837,00	0,00	0,00
		29.859.000,00	89.070.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.044.210,00	0,00	0,00	0,00
		149.435.445,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.185.900,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.644.210,00	0,00	0,00	0,00
		85.249.545,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.016.800,00	0,00	0,00	0,00
		301.541.728,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.609.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.595.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.107.800,00	0,00	0,00	0,00
		177.696.728,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	956.056.400,00	0,00	0,00	0,00
		954.572.800,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	40.702.500,00	0,00	0,00	0,00
		40.662.600,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	40.702.500,00	0,00	0,00	0,00
		40.662.600,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		650.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		650.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	265.353.900,00	0,00	0,00	0,00
		263.910.200,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	265.353.900,00	0,00	0,00	0,00
		263.910.200,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	123.237.600,00	0,00	0,00	0,00
		119.914.200,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.237.600,00	0,00	0,00	0,00
		119.914.200,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	123.237.600,00	0,00	0,00	0,00
		119.914.200,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	321.888.272,00	0,00	0,00	0,00
		317.238.672,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	321.888.272,00	0,00	0,00	0,00
		317.238.672,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	321.888.272,00	0,00	0,00	0,00
		317.238.672,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	32.262.400,00	0,00	0,00	0,00
		32.115.667,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	32.262.400,00	0,00	0,00	0,00
		32.115.667,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	32.262.400,00	0,00	0,00	0,00
		32.115.667,00	0,00	0,00	0,00
2.09	PANGAN	6.624.590.811,00	0,00	0,00	0,00
		6.443.453.145,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.690.439.348,00	0,00	0,00	0,00
		3.656.766.640,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.714.600,00	0,00	0,00	0,00
		86.671.200,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.419.600,00	0,00	0,00	0,00
		84.376.200,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.295.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.295.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.138.790.145,00	0,00	0,00	0,00
		3.111.075.959,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.136.735.145,00	0,00	0,00	0,00
		3.109.020.959,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.055.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.055.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.598.439,00	0,00	0,00	0,00
		280.351.125,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.575.975,00	0,00	0,00	0,00
		27.575.975,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.645.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.645.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	23.422.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.389.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.955.464,00	0,00	0,00	0,00
		210.741.150,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.680.164,00	0,00	0,00	0,00
		105.684.106,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.412.034,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.380.164,00	0,00	0,00	0,00
		58.272.072,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.656.000,00	0,00	0,00	0,00
		72.984.250,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.883.250,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.106.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.101.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.206.931.478,00	0,00	0,00	0,00
		1.167.055.970,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	25.184.025,00	0,00	0,00	0,00
		25.184.025,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	25.184.025,00	0,00	0,00	0,00
		25.184.025,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	984.204.238,00	0,00	0,00	0,00
		944.423.730,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	984.204.238,00	0,00	0,00	0,00
		944.423.730,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	197.543.215,00	0,00	0,00	0,00
		197.448.215,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	197.543.215,00	0,00	0,00	0,00
		197.448.215,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.632.919.590,00	0,00	0,00	0,00
		1.525.449.790,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.632.919.590,00	0,00	0,00	0,00
		1.525.449.790,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1.632.919.590,00	0,00	0,00	0,00
		1.525.449.790,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	94.300.395,00	0,00	0,00	0,00
		94.180.745,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	94.300.395,00	0,00	0,00	0,00
		94.180.745,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	94.300.395,00	0,00	0,00	0,00
		94.180.745,00	0,00	0,00	0,00
2.10	PERTANAHAN	151.091.684,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		150.666.384,00	706.040,00	0,00	0,00
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	151.091.684,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		150.666.384,00	706.040,00	0,00	0,00
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	151.091.684,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		150.666.384,00	706.040,00	0,00	0,00
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	151.091.684,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		150.666.384,00	706.040,00	0,00	0,00
2.11	LINGKUNGAN HIDUP	8.172.548.132,00	0,00	0,00	0,00
		8.098.657.726,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.378.590.593,00	0,00	0,00	0,00
		3.354.320.004,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.006.895,00	0,00	0,00	0,00
		12.006.895,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.322.475,00	0,00	0,00	0,00
		10.872.475,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.684.420,00	0,00	0,00	0,00
		1.134.420,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.726.007.819,00	0,00	0,00	0,00
		2.733.741.126,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.716.716.454,00	0,00	0,00	0,00
		2.724.539.080,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.399.420,00	0,00	0,00	0,00
		5.399.301,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.891.945,00	0,00	0,00	0,00
		3.802.745,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.564.010,00	0,00	0,00	0,00
		4.474.810,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.883.025,00	0,00	0,00	0,00
		2.793.825,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.680.985,00	0,00	0,00	0,00
		1.680.985,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	234.222.211,00	0,00	0,00	0,00
		233.241.045,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.117.431,00	0,00	0,00	0,00
		6.117.431,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.531.570,00	0,00	0,00	0,00
		12.531.570,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.810.610,00	0,00	0,00	0,00
		13.809.790,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.741.800,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.012.600,00	0,00	0,00	0,00
		193.040.454,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		219.466.210,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.082.100,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		190.384.110,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.109.658,00	0,00	0,00	0,00
		151.389.918,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.744.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.274.260,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.465.658,00	0,00	0,00	0,00
		14.215.658,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	115.555.211,00	0,00	0,00	0,00
		111.271.050,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	115.555.211,00	0,00	0,00	0,00
		111.271.050,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	115.555.211,00	0,00	0,00	0,00
		111.271.050,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	189.126.800,00	0,00	0,00	0,00
		180.749.320,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	111.790.500,00	0,00	0,00	0,00
		111.789.610,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	111.790.500,00	0,00	0,00	0,00
		111.789.610,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	77.336.300,00	0,00	0,00	0,00
		68.959.710,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	5.257.800,00	0,00	0,00	0,00
		5.257.800,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1.449.300,00	0,00	0,00	0,00
		1.449.300,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	70.629.200,00	0,00	0,00	0,00
		62.252.610,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	462.269.427,00	0,00	0,00	0,00
		462.269.427,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	462.269.427,00	0,00	0,00	0,00
		462.269.427,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	462.269.427,00	0,00	0,00	0,00
		462.269.427,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	25.298.870,00	0,00	0,00	0,00
		25.188.320,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	4.512.262,00	0,00	0,00	0,00
		4.458.750,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.362.262,00	0,00	0,00	0,00
		1.333.750,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.125.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.786.608,00	0,00	0,00	0,00
		20.729.570,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	20.786.608,00	0,00	0,00	0,00
		20.729.570,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	134.174.055,00	0,00	0,00	0,00
		132.574.825,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	134.174.055,00	0,00	0,00	0,00
		132.574.825,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	3.323.450,00	0,00	0,00	0,00
		3.323.450,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	130.850.605,00	0,00	0,00	0,00
		129.251.375,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	178.687.270,00	0,00	0,00	0,00
		171.925.150,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	178.687.270,00	0,00	0,00	0,00
		171.925.150,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	128.687.270,00	0,00	0,00	0,00
		121.925.150,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.688.845.906,00	0,00	0,00	0,00
		3.660.359.630,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	3.688.845.906,00	0,00	0,00	0,00
		3.660.359.630,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.740.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.838.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.824.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	144.823.205,00	0,00	0,00	0,00
		141.124.929,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	696.822.701,00	0,00	0,00	0,00
		690.594.701,00	0,00	0,00	0,00
2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.637.091.741,00	7.000.000,00	0,00	0,00
		4.600.931.474,00	6.993.000,00	0,00	0,00
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.951.389.323,00	7.000.000,00	0,00	0,00
		3.917.965.249,00	6.993.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.522.060,00	0,00	0,00	0,00
		50.631.800,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.010.065,00	0,00	0,00	0,00
		40.730.400,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.511.995,00	0,00	0,00	0,00
		9.901.400,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.057.231.028,00	0,00	0,00	0,00
		3.030.890.654,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.044.091.588,00	0,00	0,00	0,00
		3.018.752.254,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.139.440,00	0,00	0,00	0,00
		12.138.400,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	318.722.300,00	0,00	0,00	0,00
		318.457.874,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.643.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.635.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.019.300,00	0,00	0,00	0,00
		29.970.350,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.025.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.024.600,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	11.244.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.050.600,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259.791.000,00	0,00	0,00	0,00
		259.777.324,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	6.993.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	6.993.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.229.935,00	0,00	0,00	0,00
		399.231.021,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.683.682,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	320.479.935,00	0,00	0,00	0,00
		318.547.339,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.684.000,00	0,00	0,00	0,00
		118.753.900,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.184.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.253.900,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	374.132.175,00	0,00	0,00	0,00
		373.298.425,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	196.073.075,00	0,00	0,00	0,00
		195.239.325,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	196.073.075,00	0,00	0,00	0,00
		195.239.325,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	178.059.100,00	0,00	0,00	0,00
		178.059.100,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	178.059.100,00	0,00	0,00	0,00
		178.059.100,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	150.002.868,00	0,00	0,00	0,00
		149.105.700,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	150.002.868,00	0,00	0,00	0,00
		149.105.700,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	150.002.868,00	0,00	0,00	0,00
		149.105.700,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	146.567.375,00	0,00	0,00	0,00
		145.562.100,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	146.567.375,00	0,00	0,00	0,00
		145.562.100,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	101.867.375,00	0,00	0,00	0,00
		100.917.800,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	44.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.644.300,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.714.707.045,00	0,00	0,00	0,00
		6.662.430.902,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.205.559.644,00	0,00	0,00	0,00
		3.214.945.526,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.602.460,00	0,00	0,00	0,00
		50.204.100,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.602.460,00	0,00	0,00	0,00
		50.204.100,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.680.207.156,00	0,00	0,00	0,00
		2.695.055.404,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.680.207.156,00	0,00	0,00	0,00
		2.695.055.404,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	216.334.763,00	0,00	0,00	0,00
		215.973.500,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.386.232,00	0,00	0,00	0,00
		9.356.650,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.831.555,00	0,00	0,00	0,00
		3.763.950,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.462.955,00	0,00	0,00	0,00
		27.424.200,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.200.921,00	0,00	0,00	0,00
		30.200.600,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	17.062.500,00	0,00	0,00	0,00
		16.955.400,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.390.600,00	0,00	0,00	0,00
		128.272.700,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		160.062.822,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.865.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.858.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.486.918,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.895.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.717.904,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.855.265,00	0,00	0,00	0,00
		93.649.700,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.381.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.605.265,00	0,00	0,00	0,00
		86.518.700,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	1.606.264.087,00	0,00	0,00	0,00
		1.591.707.634,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	1.606.264.087,00	0,00	0,00	0,00
		1.591.707.634,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	17.698.300,00	0,00	0,00	0,00
		17.681.200,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	1.588.565.787,00	0,00	0,00	0,00
		1.574.026.434,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.204.557.241,00	0,00	0,00	0,00
		1.161.443.430,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.204.557.241,00	0,00	0,00	0,00
		1.161.443.430,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	71.024.780,00	0,00	0,00	0,00
		71.022.780,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	137.290.192,00	0,00	0,00	0,00
		137.073.050,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	881.865.323,00	0,00	0,00	0,00
		839.180.100,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	43.959.666,00	0,00	0,00	0,00
		43.768.300,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	70.417.280,00	0,00	0,00	0,00
		70.399.200,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	698.326.073,00	0,00	0,00	0,00
		694.334.312,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	698.326.073,00	0,00	0,00	0,00
		694.334.312,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	241.846.804,00	0,00	0,00	0,00
		241.322.612,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	202.692.697,00	0,00	0,00	0,00
		202.557.300,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	38.434.023,00	0,00	0,00	0,00
		38.206.700,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	43.102.913,00	0,00	0,00	0,00
		42.835.900,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.667.900,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	33.225.831,00	0,00	0,00	0,00
		32.879.500,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	123.273.805,00	0,00	0,00	0,00
		120.864.400,00	0,00	0,00	0,00
2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.383.907.000,00	507.000.000,00	0,00	0,00
		3.741.531.374,00	482.253.000,00	0,00	0,00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	137.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.837.630,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	99.840.600,00	0,00	0,00	0,00
		99.302.930,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	49.840.600,00	0,00	0,00	0,00
		49.302.930,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01.11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	37.159.400,00	0,00	0,00	0,00
		36.534.700,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	37.159.400,00	0,00	0,00	0,00
		36.534.700,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.031.698.200,00	507.000.000,00	0,00	0,00
		3.391.147.764,00	482.253.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	3.019.527.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.381.312.064,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	3.019.527.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.381.312.064,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	965.362.000,00	507.000.000,00	0,00	0,00
		963.026.500,00	482.253.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	965.362.000,00	507.000.000,00	0,00	0,00
		963.026.500,00	482.253.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	46.809.200,00	0,00	0,00	0,00
		46.809.200,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	46.809.200,00	0,00	0,00	0,00
		46.809.200,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	215.208.800,00	0,00	0,00	0,00
		214.545.980,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	65.376.800,00	0,00	0,00	0,00
		64.713.980,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	65.376.800,00	0,00	0,00	0,00
		64.713.980,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	149.832.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.832.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	149.832.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.832.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15	PERHUBUNGAN	5.883.466.626,00	658.762.375,00	0,00	0,00
		5.725.458.917,00	648.194.249,00	0,00	0,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.201.684.583,00	81.564.260,00	0,00	0,00
		4.141.408.637,00	75.733.800,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	378.466.883,00	0,00	0,00	0,00
		376.707.480,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	378.466.883,00	0,00	0,00	0,00
		376.707.480,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.111.972.783,00	0,00	0,00	0,00
		3.071.932.133,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.111.972.783,00	0,00	0,00	0,00
		3.071.932.133,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.781.682,00	0,00	0,00	0,00
		66.499.850,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.949.450,00	0,00	0,00	0,00
		5.948.100,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.287.410,00	0,00	0,00	0,00
		26.232.750,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.254.822,00	0,00	0,00	0,00
		30.029.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.290.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.290.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	76.479.260,00	0,00	0,00
		0,00	75.733.800,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	76.479.260,00	0,00	0,00
		0,00	75.733.800,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.766.700,00	0,00	0,00	0,00
		261.343.565,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.036.912,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.666.700,00	0,00	0,00	0,00
		176.306.653,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.696.535,00	5.085.000,00	0,00	0,00
		364.925.609,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.838.500,00	0,00	0,00	0,00
		158.962.460,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.410.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	192.358.035,00	5.085.000,00	0,00	0,00
		191.553.149,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.431.286.869,00	577.198.115,00	0,00	0,00
		1.349.013.200,00	572.460.449,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12.500.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00
		12.500.000,00	35.495.691,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12.500.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00
		12.500.000,00	35.495.691,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	97.714.500,00	540.198.115,00	0,00	0,00
		239.624.800,00	536.964.758,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	55.443.000,00	368.800.000,00	0,00	0,00
		197.427.500,00	365.566.643,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	42.271.500,00	171.398.115,00	0,00	0,00
		42.197.300,00	171.398.115,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.321.072.369,00	0,00	0,00	0,00
		1.096.888.400,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	618.072.369,00	0,00	0,00	0,00
		398.888.400,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	703.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		698.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	250.495.174,00	0,00	0,00	0,00
		235.037.080,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	50.495.174,00	0,00	0,00	0,00
		50.125.885,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.12.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	41.257.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.887.711,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	9.238.174,00	0,00	0,00	0,00
		9.238.174,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		184.911.195,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		184.911.195,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	7.629.982.027,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		7.533.124.402,00	199.595.000,00	0,00	0,00
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.085.720.659,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		3.016.247.669,00	199.595.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.224.700,00	0,00	0,00	0,00
		23.143.169,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.224.700,00	0,00	0,00	0,00
		23.143.169,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.563.573.258,00	0,00	0,00	0,00
		2.531.538.579,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.533.392.791,00	0,00	0,00	0,00
		2.504.440.599,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.176.764,00	0,00	0,00	0,00
		3.173.374,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	27.003.703,00	0,00	0,00	0,00
		23.924.606,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	282.398.262,00	0,00	0,00	0,00
		276.315.738,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.163.220,00	0,00	0,00	0,00
		5.133.170,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.080,00	0,00	0,00	0,00
		29.719.255,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.409.962,00	0,00	0,00	0,00
		9.852.154,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.075.720,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216.675.000,00	0,00	0,00	0,00
		216.535.439,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	199.595.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	199.595.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.506.439,00	0,00	0,00	0,00
		64.799.783,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.506.439,00	0,00	0,00	0,00
		64.799.783,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.018.000,00	0,00	0,00	0,00
		120.450.400,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.028.000,00	0,00	0,00	0,00
		118.462.900,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.987.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.701.500.232,00	0,00	0,00	0,00
		1.694.999.332,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.701.500.232,00	0,00	0,00	0,00
		1.694.999.332,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.526.500.232,00	0,00	0,00	0,00
		1.519.999.332,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		175.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.842.761.136,00	0,00	0,00	0,00
		2.821.877.401,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.488.465.572,00	0,00	0,00	0,00
		1.468.823.331,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.488.465.572,00	0,00	0,00	0,00
		1.468.823.331,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.354.295.564,00	0,00	0,00	0,00
		1.353.054.070,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.354.295.564,00	0,00	0,00	0,00
		1.353.054.070,00	0,00	0,00	0,00
2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.536.398.976,00	0,00	0,00	0,00
		1.514.798.815,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	40.619.200,00	0,00	0,00	0,00
		36.119.200,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Kean;taannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.619.200,00	0,00	0,00	0,00
		36.119.200,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40.619.200,00	0,00	0,00	0,00
		36.119.200,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	302.250.125,00	0,00	0,00	0,00
		297.344.025,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	302.250.125,00	0,00	0,00	0,00
		297.344.025,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	287.150.125,00	0,00	0,00	0,00
		282.519.025,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.825.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.193.529.651,00	0,00	0,00	0,00
		1.181.335.590,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.193.529.651,00	0,00	0,00	0,00
		1.181.335.590,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.193.529.651,00	0,00	0,00	0,00
		1.181.335.590,00	0,00	0,00	0,00
2.18	PENANAMAN MODAL	4.007.675.952,00	113.600.000,00	0,00	0,00
		3.911.007.967,00	110.623.500,00	0,00	0,00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.993.003.687,00	0,00	0,00	0,00
		2.938.376.127,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.840.600,00	0,00	0,00	0,00
		35.315.100,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.840.600,00	0,00	0,00	0,00
		35.315.100,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.609.204.133,00	0,00	0,00	0,00
		2.567.830.261,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.567.789.853,00	0,00	0,00	0,00
		2.526.550.621,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41.414.280,00	0,00	0,00	0,00
		41.279.640,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.122.450,00	0,00	0,00	0,00
		115.946.805,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.784.470,00	0,00	0,00	0,00
		5.769.760,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.646.780,00	0,00	0,00	0,00
		36.646.165,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.611.200,00	0,00	0,00	0,00
		70.530.880,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		109.943.538,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.480.409,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.463.129,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.576.504,00	0,00	0,00	0,00
		109.340.423,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.148.000,00	0,00	0,00	0,00
		93.446.870,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.608.504,00	0,00	0,00	0,00
		6.533.553,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.820.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.360.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	159.410.935,00	0,00	0,00	0,00
		158.183.310,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	83.440.135,00	0,00	0,00	0,00
		83.326.610,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	35.938.090,00	0,00	0,00	0,00
		35.826.965,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	47.502.045,00	0,00	0,00	0,00
		47.499.645,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	75.970.800,00	0,00	0,00	0,00
		74.856.700,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.914.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	21.470.800,00	0,00	0,00	0,00
		20.942.200,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	33.733.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.063.300,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	33.733.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.063.300,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	10.552.200,00	0,00	0,00	0,00
		10.477.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	23.180.800,00	0,00	0,00	0,00
		22.586.300,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	385.914.310,00	113.600.000,00	0,00	0,00
		385.506.230,00	110.623.500,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	385.914.310,00	113.600.000,00	0,00	0,00
		385.506.230,00	110.623.500,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	139.674.310,00	113.600.000,00	0,00	0,00
		139.372.032,00	110.623.500,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	62.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.461.700,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	13.830.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.830.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	169.910.000,00	0,00	0,00	0,00
		169.842.498,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	435.614.020,00	0,00	0,00	0,00
		395.879.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	435.614.020,00	0,00	0,00	0,00
		395.879.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	87.670.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.205.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	246.486.082,00	0,00	0,00	0,00
		233.992.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	101.457.938,00	0,00	0,00	0,00
		99.682.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.006.470.961,00	6.085.000,00	0,00	0,00
		8.697.215.674,00	6.085.000,00	0,00	0,00
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.636.126.449,00	0,00	0,00	0,00
		4.492.259.493,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.703.420,00	0,00	0,00	0,00
		80.423.120,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.461.020,00	0,00	0,00	0,00
		6.461.020,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.242.400,00	0,00	0,00	0,00
		73.962.100,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.324.695.349,00	0,00	0,00	0,00
		3.217.640.421,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.287.495.349,00	0,00	0,00	0,00
		3.180.498.921,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	37.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.141.500,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	361.631.040,00	0,00	0,00	0,00
		360.513.603,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.999.420,00	0,00	0,00	0,00
		10.990.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.642.820,00	0,00	0,00	0,00
		32.597.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.397.550,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.955.800,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.988.800,00	0,00	0,00	0,00
		260.573.253,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	767.599.365,00	0,00	0,00	0,00
		732.780.079,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.656.440,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	673.999.365,00	0,00	0,00	0,00
		642.123.639,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.497.275,00	0,00	0,00	0,00
		100.902.270,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.755.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.161.770,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.992.275,00	0,00	0,00	0,00
		14.990.500,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.294.800.712,00	0,00	0,00	0,00
		3.136.731.051,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.389.559.137,00	0,00	0,00	0,00
		1.377.266.676,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	3.416.800,00	0,00	0,00	0,00
		3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.386.142.337,00	0,00	0,00	0,00
		1.374.166.676,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.905.241.575,00	0,00	0,00	0,00
		1.759.464.375,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1.905.241.575,00	0,00	0,00	0,00
		1.759.464.375,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.075.543.800,00	6.085.000,00	0,00	0,00
		1.068.225.130,00	6.085.000,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.044.067.700,00	6.085.000,00	0,00	0,00
		1.037.124.530,00	6.085.000,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	955.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		955.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	47.470.200,00	0,00	0,00	0,00
		47.074.530,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	41.597.500,00	6.085.000,00	0,00	0,00
		35.050.000,00	6.085.000,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	25.276.100,00	0,00	0,00	0,00
		24.900.600,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	25.276.100,00	0,00	0,00	0,00
		24.900.600,00	0,00	0,00	0,00
2.20	STATISTIK	56.595.210,00	0,00	0,00	0,00
		55.712.560,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	56.595.210,00	0,00	0,00	0,00
		55.712.560,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	56.595.210,00	0,00	0,00	0,00
		55.712.560,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	56.595.210,00	0,00	0,00	0,00
		55.712.560,00	0,00	0,00	0,00
2.21	PERSANDIAN	41.650.210,00	0,00	0,00	0,00
		36.608.150,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	41.650.210,00	0,00	0,00	0,00
		36.608.150,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	41.650.210,00	0,00	0,00	0,00
		36.608.150,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41.650.210,00	0,00	0,00	0,00
		36.608.150,00	0,00	0,00	0,00
2.22	KEBUDAYAAN	213.268.360,00	0,00	0,00	0,00
		212.585.690,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	185.682.990,00	0,00	0,00	0,00
		185.229.890,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.058.600,00	0,00	0,00	0,00
		47.038.400,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	7.058.600,00	0,00	0,00	0,00
		7.038.400,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	88.624.390,00	0,00	0,00	0,00
		88.191.490,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	74.031.390,00	0,00	0,00	0,00
		73.680.490,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	14.593.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.511.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	27.585.370,00	0,00	0,00	0,00
		27.355.800,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.585.370,00	0,00	0,00	0,00
		27.355.800,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.03.02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.585.370,00	0,00	0,00	0,00
		27.355.800,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.23	PERPUSTAKAAN	3.843.674.714,00	726.227.082,00	0,00	0,00
		3.787.244.034,00	725.524.532,00	0,00	0,00
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.549.529.345,00	507.691.000,00	0,00	0,00
		3.493.981.117,00	506.988.450,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.312.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.243.100,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.312.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.243.100,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.999.499.322,00	0,00	0,00	0,00
		2.950.847.639,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.983.110.922,00	0,00	0,00	0,00
		2.934.459.239,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16.388.400,00	0,00	0,00	0,00
		16.388.400,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.022.343,00	0,00	0,00	0,00
		219.411.362,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.364.545,00	0,00	0,00	0,00
		21.291.239,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.356.798,00	0,00	0,00	0,00
		13.234.623,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.562.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.548.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.739.000,00	0,00	0,00	0,00
		175.337.500,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	507.691.000,00	0,00	0,00
		0,00	506.988.450,00	0,00	0,00
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	378.382.000,00	0,00	0,00
		0,00	377.790.000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	129.309.000,00	0,00	0,00
		0,00	129.198.450,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.402.000,00	0,00	0,00	0,00
		162.559.936,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.052.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.917.508,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.642.428,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.293.680,00	0,00	0,00	0,00
		124.919.080,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.293.680,00	0,00	0,00	0,00
		121.314.080,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.605.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	274.509.169,00	218.536.082,00	0,00	0,00
		273.698.317,00	218.536.082,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	124.826.604,00	0,00	0,00	0,00
		124.656.122,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.910.430,00	0,00	0,00	0,00
		28.866.430,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	48.703.372,00	0,00	0,00	0,00
		48.654.090,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.332.500,00	0,00	0,00	0,00
		25.280.800,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.880.302,00	0,00	0,00	0,00
		21.854.802,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	149.682.565,00	218.536.082,00	0,00	0,00
		149.042.195,00	218.536.082,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	116.110.093,00	0,00	0,00	0,00
		116.016.023,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	218.536.082,00	0,00	0,00
		0,00	218.536.082,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	12.226.650,00	0,00	0,00	0,00
		11.680.350,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	21.345.822,00	0,00	0,00	0,00
		21.345.822,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	19.636.200,00	0,00	0,00	0,00
		19.564.600,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	19.636.200,00	0,00	0,00	0,00
		19.564.600,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	19.636.200,00	0,00	0,00	0,00
		19.564.600,00	0,00	0,00	0,00
2.24	KEARSIPAN	42.093.978,00	0,00	0,00	0,00
		41.784.096,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	13.399.678,00	0,00	0,00	0,00
		13.399.678,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	13.399.678,00	0,00	0,00	0,00
		13.399.678,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	13.399.678,00	0,00	0,00	0,00
		13.399.678,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	28.694.300,00	0,00	0,00	0,00
		28.384.418,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	10.604.645,00	0,00	0,00	0,00
		10.393.395,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	10.604.645,00	0,00	0,00	0,00
		10.393.395,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	18.089.655,00	0,00	0,00	0,00
		17.991.023,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	18.089.655,00	0,00	0,00	0,00
		17.991.023,00	0,00	0,00	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	48.987.892.027,00	6.090.262.679,00	0,00	0,00
		47.877.623.321,00	5.784.843.157,00	0,00	0,00
3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.090.223.224,00	375.258.600,00	0,00	0,00
		10.811.978.674,00	374.881.000,00	0,00	0,00
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.271.680.031,00	92.938.600,00	0,00	0,00
		4.243.394.925,00	92.697.000,00	0,00	0,00
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.060.084,00	0,00	0,00	0,00
		105.454.778,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	91.559.959,00	0,00	0,00	0,00
		90.954.778,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.500.125,00	0,00	0,00	0,00
		14.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.344.416.178,00	0,00	0,00	0,00
		3.333.321.182,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.318.966.978,00	0,00	0,00	0,00
		3.307.872.782,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.449.200,00	0,00	0,00	0,00
		25.448.400,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	416.134.897,00	0,00	0,00	0,00
		415.833.091,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.645.380,00	0,00	0,00	0,00
		3.600.800,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.961.414,00	0,00	0,00	0,00
		25.877.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.268.503,00	0,00	0,00	0,00
		25.268.450,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.690.500,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	332.459.600,00	0,00	0,00	0,00
		332.396.341,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	92.938.600,00	0,00	0,00
		0,00	92.697.000,00	0,00	0,00
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	92.938.600,00	0,00	0,00
		0,00	92.697.000,00	0,00	0,00
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.058.872,00	0,00	0,00	0,00
		214.622.164,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.938.872,00	0,00	0,00	0,00
		86.070.776,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		128.551.388,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.010.000,00	0,00	0,00	0,00
		174.163.710,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		134.381.160,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.010.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.872.550,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.910.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.778.814.000,00	238.500.000,00	0,00	0,00
		2.956.225.060,00	238.364.000,00	0,00	0,00
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.993.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.993.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.518.814.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.696.232.060,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	145.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		145.028.100,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	2.373.764.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.551.203.960,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	252.000.000,00	238.500.000,00	0,00	0,00
		252.000.000,00	238.364.000,00	0,00	0,00
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	252.000.000,00	238.500.000,00	0,00	0,00
		252.000.000,00	238.364.000,00	0,00	0,00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.967.982.008,00	0,00	0,00	0,00
		2.542.539.095,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	2.302.400.716,00	0,00	0,00	0,00
		1.895.703.101,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	14.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.359.500,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1.850.752.716,00	0,00	0,00	0,00
		1.445.459.366,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	406.898.000,00	0,00	0,00	0,00
		405.884.235,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	665.581.292,00	0,00	0,00	0,00
		646.835.994,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	665.581.292,00	0,00	0,00	0,00
		646.835.994,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.071.747.185,00	43.820.000,00	0,00	0,00
		1.069.819.594,00	43.820.000,00	0,00	0,00
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	31.025.000,00	43.820.000,00	0,00	0,00
		30.200.000,00	43.820.000,00	0,00	0,00
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.025.000,00	43.820.000,00	0,00	0,00
		30.200.000,00	43.820.000,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	638.517.188,00	0,00	0,00	0,00
		638.043.597,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	638.517.188,00	0,00	0,00	0,00
		638.043.597,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	402.204.997,00	0,00	0,00	0,00
		401.575.997,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	194.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		193.771.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	207.804.997,00	0,00	0,00	0,00
		207.804.997,00	0,00	0,00	0,00
3.26	PARIWISATA	283.525.604,00	0,00	0,00	0,00
		281.853.989,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	150.128.104,00	0,00	0,00	0,00
		149.681.354,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	150.128.104,00	0,00	0,00	0,00
		149.681.354,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	40.692.800,00	0,00	0,00	0,00
		40.541.800,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	105.977.804,00	0,00	0,00	0,00
		105.757.054,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.457.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.382.500,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	133.397.500,00	0,00	0,00	0,00
		132.172.635,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	133.397.500,00	0,00	0,00	0,00
		132.172.635,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	121.503.400,00	0,00	0,00	0,00
		120.435.635,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	11.894.100,00	0,00	0,00	0,00
		11.737.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PERTANIAN	32.022.746.019,00	5.691.213.282,00	0,00	0,00
		31.256.639.971,00	5.386.171.360,00	0,00	0,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.551.176.395,00	140.233.000,00	0,00	0,00
		15.403.759.610,00	139.850.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.495.266,00	0,00	0,00	0,00
		154.275.674,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	117.778.766,00	0,00	0,00	0,00
		117.660.400,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.716.500,00	0,00	0,00	0,00
		36.615.274,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.220.004.051,00	0,00	0,00	0,00
		14.122.888.990,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.199.167.997,00	0,00	0,00	0,00
		14.102.092.990,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.836.054,00	0,00	0,00	0,00
		20.796.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	461.643.058,00	20.987.000,00	0,00	0,00
		450.775.995,00	20.950.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.362.100,00	20.987.000,00	0,00	0,00
		8.200.000,00	20.950.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.008.280,00	0,00	0,00	0,00
		29.983.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.546.878,00	0,00	0,00	0,00
		26.242.700,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.960.330,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	366.525.800,00	0,00	0,00	0,00
		361.389.965,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	119.246.000,00	0,00	0,00
		0,00	118.900.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	6.950.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	112.246.000,00	0,00	0,00
		0,00	111.950.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.132.020,00	0,00	0,00	0,00
		292.396.804,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		173.110.803,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.732.020,00	0,00	0,00	0,00
		119.286.001,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.902.000,00	0,00	0,00	0,00
		383.422.147,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	236.902.000,00	0,00	0,00	0,00
		222.095.420,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.345.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.981.727,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.374.917.535,00	33.350.000,00	0,00	0,00
		5.337.741.417,00	33.000.000,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.956.897.975,00	0,00	0,00	0,00
		3.939.016.762,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	559.024.800,00	0,00	0,00	0,00
		558.229.180,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.397.873.175,00	0,00	0,00	0,00
		3.380.787.582,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	190.500.000,00	33.350.000,00	0,00	0,00
		188.956.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	190.500.000,00	33.350.000,00	0,00	0,00
		188.956.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	420.050.275,00	0,00	0,00	0,00
		419.351.300,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.05.04	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	420.050.275,00	0,00	0,00	0,00
		419.351.300,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	807.469.285,00	0,00	0,00	0,00
		790.417.355,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	771.469.285,00	0,00	0,00	0,00
		754.417.355,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.827.184.335,00	3.122.264.154,00	0,00	0,00
		2.823.684.741,00	2.874.014.732,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	242.031.600,00	0,00	0,00	0,00
		241.895.700,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	242.031.600,00	0,00	0,00	0,00
		241.895.700,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.369.312.185,00	3.122.264.154,00	0,00	0,00
		2.367.245.741,00	2.874.014.732,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.444.500.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		1.444.500.000,00	99.935.000,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	207.613.385,00	1.101.414.154,00	0,00	0,00
		207.563.381,00	1.099.266.507,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	0,00	1.920.850.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.674.813.225,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	717.198.800,00	0,00	0,00	0,00
		715.182.360,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	215.840.550,00	0,00	0,00	0,00
		214.543.300,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	215.840.550,00	0,00	0,00	0,00
		214.543.300,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	546.957.100,00	1.884.150.000,00	0,00	0,00
		525.538.160,00	1.828.150.500,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	317.381.800,00	1.868.900.000,00	0,00	0,00
		308.463.060,00	1.812.915.750,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	317.381.800,00	1.868.900.000,00	0,00	0,00
		308.463.060,00	1.812.915.750,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.026.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.026.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner	129.575.300,00	15.250.000,00	0,00	0,00
		127.049.100,00	15.234.750,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	115.775.300,00	0,00	0,00	0,00
		113.249.100,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04.03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	13.800.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00
		13.800.000,00	15.234.750,00	0,00	0,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	103.870.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.149.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	103.870.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.149.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	103.870.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.149.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	167.552.074,00	0,00	0,00	0,00
		165.370.857,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	167.552.074,00	0,00	0,00	0,00
		165.370.857,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	167.552.074,00	0,00	0,00	0,00
		165.370.857,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	7.451.088.580,00	511.216.128,00	0,00	0,00
		6.897.396.186,00	511.156.128,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	7.451.088.580,00	511.216.128,00	0,00	0,00
		6.897.396.186,00	511.156.128,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	501.846.350,00	0,00	0,00	0,00
		486.124.914,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	6.786.172.830,00	487.216.128,00	0,00	0,00
		6.249.089.272,00	487.216.128,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	22.695.400,00	24.000.000,00	0,00	0,00
		22.213.000,00	23.940.000,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	140.374.000,00	0,00	0,00	0,00
		139.969.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30	PERDAGANGAN	943.847.061,00	0,00	0,00	0,00
		942.257.761,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	615.615.061,00	0,00	0,00	0,00
		619.618.861,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	24.015.061,00	0,00	0,00	0,00
		29.268.861,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.715.061,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	24.015.061,00	0,00	0,00	0,00
		17.553.800,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	591.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		590.350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	591.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		590.350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	300.232.000,00	0,00	0,00	0,00
		294.638.900,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	300.232.000,00	0,00	0,00	0,00
		294.638.900,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	300.232.000,00	0,00	0,00	0,00
		294.638.900,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31	PERINDUSTRIAN	4.570.828.919,00	23.790.797,00	0,00	0,00
		4.510.202.702,00	23.790.797,00	0,00	0,00
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.544.104.415,00	0,00	0,00	0,00
		3.484.984.154,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.897.670,00	0,00	0,00	0,00
		53.849.170,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.238.570,00	0,00	0,00	0,00
		34.238.570,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.659.100,00	0,00	0,00	0,00
		13.169.100,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.441.500,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.080.100.793,00	0,00	0,00	0,00
		3.034.903.843,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.071.850.793,00	0,00	0,00	0,00
		3.026.790.743,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.113.100,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.31.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.858.002,00	0,00	0,00	0,00
		99.821.738,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.171.163,00	0,00	0,00	0,00
		6.169.962,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.920.850,00	0,00	0,00	0,00
		4.918.816,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	8.570.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.545.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.195.989,00	0,00	0,00	0,00
		80.187.960,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.397.000,00	0,00	0,00	0,00
		226.837.719,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.841.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.548.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.556.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.289.719,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.850.950,00	0,00	0,00	0,00
		69.571.684,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.555.950,00	0,00	0,00	0,00
		52.306.684,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.295.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.265.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.026.724.504,00	23.790.797,00	0,00	0,00
		1.025.218.548,00	23.790.797,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.026.724.504,00	23.790.797,00	0,00	0,00
		1.025.218.548,00	23.790.797,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	93.119.300,00	0,00	0,00	0,00
		92.754.200,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	822.214.779,00	0,00	0,00	0,00
		821.073.923,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	33.871.200,00	23.790.797,00	0,00	0,00
		33.871.200,00	23.790.797,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	77.519.225,00	0,00	0,00	0,00
		77.519.225,00	0,00	0,00	0,00
3.32	TRANSMIGRASI	76.721.200,00	0,00	0,00	0,00
		74.690.224,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	76.721.200,00	0,00	0,00	0,00
		74.690.224,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	76.721.200,00	0,00	0,00	0,00
		74.690.224,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.2.01.02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	76.721.200,00	0,00	0,00	0,00
		74.690.224,00	0,00	0,00	0,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	74.632.588.626,00	2.046.322.605,00	0,00	0,00
		73.865.609.556,00	2.021.615.500,00	0,00	0,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	38.849.789.762,00	1.983.005.605,00	0,00	0,00
		38.121.439.609,00	1.959.615.500,00	0,00	0,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	24.972.372.279,00	1.983.005.605,00	0,00	0,00
		24.541.310.357,00	1.959.615.500,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.253.800,00	0,00	0,00	0,00
		26.624.400,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.458.800,00	0,00	0,00	0,00
		26.624.400,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.795.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.687.840.567,00	0,00	0,00	0,00
		10.601.346.138,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.687.840.567,00	0,00	0,00	0,00
		10.601.346.138,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.700.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	82.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.700.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.897.841.915,00	15.400.000,00	0,00	0,00
		4.867.824.313,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.506.760,00	0,00	0,00	0,00
		74.460.215,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	15.400.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.818.105,00	0,00	0,00	0,00
		134.770.344,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.390.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.590.100,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	14.070.250,00	0,00	0,00	0,00
		10.216.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.499.882.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.497.208.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.164.174.800,00	0,00	0,00	0,00
		2.144.579.154,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	1.967.605.605,00	0,00	0,00
		0,00	1.959.615.500,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	1.404.300.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.400.700.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	433.850.000,00	0,00	0,00
		0,00	429.740.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	129.455.605,00	0,00	0,00
		0,00	129.175.500,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.109.662.150,00	0,00	0,00	0,00
		4.040.202.041,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.782.000.150,00	0,00	0,00	0,00
		2.770.187.785,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.840.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.312.662.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.257.174.256,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.382.905.074,00	0,00	0,00	0,00
		2.175.210.802,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	795.901.660,00	0,00	0,00	0,00
		659.182.274,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	649.305.013,00	0,00	0,00	0,00
		615.898.963,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	288.526.335,00	0,00	0,00	0,00
		283.820.965,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.955.880,00	0,00	0,00	0,00
		64.784.600,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	584.216.186,00	0,00	0,00	0,00
		551.524.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	733.779.362,00	0,00	0,00	0,00
		726.761.033,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	176.279.362,00	0,00	0,00	0,00
		170.472.233,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	157.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		156.300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		399.988.800,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.032.862.676,00	0,00	0,00	0,00
		1.030.723.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	516.069.786,00	0,00	0,00	0,00
		515.409.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	393.792.890,00	0,00	0,00	0,00
		392.314.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	123.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		123.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	411.229.925,00	0,00	0,00	0,00
		407.781.844,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	114.974.700,00	0,00	0,00	0,00
		114.774.418,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	87.883.825,00	0,00	0,00	0,00
		87.406.172,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	38.231.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.358.200,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	86.743.400,00	0,00	0,00	0,00
		85.200.858,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	83.397.000,00	0,00	0,00	0,00
		83.042.196,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	601.896.810,00	0,00	0,00	0,00
		583.136.286,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	232.103.000,00	0,00	0,00	0,00
		217.936.372,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	99.987.800,00	0,00	0,00	0,00
		99.987.800,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	269.806.010,00	0,00	0,00	0,00
		265.212.114,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.656.589.805,00	0,00	0,00	0,00
		10.498.435.935,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	349.336.430,00	0,00	0,00	0,00
		348.182.579,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	80.200.430,00	0,00	0,00	0,00
		80.042.670,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	269.136.000,00	0,00	0,00	0,00
		268.139.909,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	9.086.493.410,00	0,00	0,00	0,00
		8.948.448.300,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	780.788.040,00	0,00	0,00	0,00
		757.852.400,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	6.008.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.993.520.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	2.297.185.370,00	0,00	0,00	0,00
		2.197.075.900,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.067.800.965,00	0,00	0,00	0,00
		1.049.262.428,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	255.844.938,00	0,00	0,00	0,00
		243.431.535,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	764.480.678,00	0,00	0,00	0,00
		759.049.333,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	47.475.349,00	0,00	0,00	0,00
		46.781.560,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	152.959.000,00	0,00	0,00	0,00
		152.542.628,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	152.959.000,00	0,00	0,00	0,00
		152.542.628,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.220.827.678,00	0,00	0,00	0,00
		3.081.693.317,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	291.420.031,00	0,00	0,00	0,00
		245.600.740,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	79.980.747,00	0,00	0,00	0,00
		56.385.689,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	111.604.546,00	0,00	0,00	0,00
		94.191.847,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	99.834.738,00	0,00	0,00	0,00
		95.023.204,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.103.943.705,00	0,00	0,00	0,00
		1.098.206.891,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	74.967.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.576.200,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	842.974.200,00	0,00	0,00	0,00
		842.828.211,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	186.002.505,00	0,00	0,00	0,00
		180.802.480,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250.320.255,00	0,00	0,00	0,00
		246.284.315,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	126.666.405,00	0,00	0,00	0,00
		123.928.115,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	72.977.050,00	0,00	0,00	0,00
		72.329.900,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50.676.800,00	0,00	0,00	0,00
		50.026.300,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	1.575.143.687,00	0,00	0,00	0,00
		1.491.601.371,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	56.371.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.079.863,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	78.512.687,00	0,00	0,00	0,00
		74.605.508,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1.440.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.365.916.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	35.782.798.864,00	63.317.000,00	0,00	0,00
		35.744.169.947,00	62.000.000,00	0,00	0,00
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	19.921.280.825,00	63.317.000,00	0,00	0,00
		19.872.495.773,00	62.000.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	609.250.166,00	0,00	0,00	0,00
		608.873.540,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.983.575,00	0,00	0,00	0,00
		80.652.449,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	528.266.591,00	0,00	0,00	0,00
		528.221.091,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.859.579.598,00	0,00	0,00	0,00
		3.835.085.345,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.810.856.396,00	0,00	0,00	0,00
		3.786.761.343,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.907.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.907.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42.816.202,00	0,00	0,00	0,00
		42.417.002,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.693.799.324,00	0,00	0,00	0,00
		1.693.789.974,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.000.270,00	0,00	0,00	0,00
		45.999.520,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.550.560,00	0,00	0,00	0,00
		137.543.560,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.300.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.300.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.100.270.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.100.268.400,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	397.677.994,00	0,00	0,00	0,00
		397.677.994,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	63.317.000,00	0,00	0,00
		0,00	62.000.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	63.317.000,00	0,00	0,00
		0,00	62.000.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	728.348.000,00	0,00	0,00	0,00
		709.079.474,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		236.663.336,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	478.348.000,00	0,00	0,00	0,00
		472.416.138,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	969.488.428,00	0,00	0,00	0,00
		964.909.452,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.911.430,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	797.396.000,00	0,00	0,00	0,00
		796.123.309,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.135.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	108.752.428,00	0,00	0,00	0,00
		108.739.713,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.504.233.599,00	0,00	0,00	0,00
		11.504.256.368,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.416.733.599,00	0,00	0,00	0,00
		11.416.756.368,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	87.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	556.581.710,00	0,00	0,00	0,00
		556.501.620,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	66.005.460,00	0,00	0,00	0,00
		65.985.950,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	490.576.250,00	0,00	0,00	0,00
		490.515.670,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.861.518.039,00	0,00	0,00	0,00
		15.871.674.174,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	232.354.830,00	0,00	0,00	0,00
		232.256.725,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	38.090.830,00	0,00	0,00	0,00
		38.088.525,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	194.264.000,00	0,00	0,00	0,00
		194.168.200,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	84.362.000,00	0,00	0,00	0,00
		84.110.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	25.032.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.948.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	25.032.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.948.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	17.149.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.107.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	17.149.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.107.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.230.510.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.230.183.200,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	96.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	430.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		430.000.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	663.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		663.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	41.010.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.933.200,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.125.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.140.180.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.125.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.140.180.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1.066.714.960,00	0,00	0,00	0,00
		1.064.100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1.066.714.960,00	0,00	0,00	0,00
		1.064.100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	12.122.226.249,00	0,00	0,00	0,00
		12.120.844.249,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.877.999.999,00	0,00	0,00	0,00
		11.877.999.999,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	244.226.250,00	0,00	0,00	0,00
		242.844.250,00	0,00	0,00	0,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	39.544.337.231,00	139.239.300,00	2.912.043.380,00	136.417.491.949,00
		38.004.531.804,00	126.760.000,00	1.190.621.929,00	135.245.400.726,00
5.01	PERENCANAAN	4.725.807.266,00	13.617.300,00	0,00	0,00
		4.605.325.064,00	13.500.000,00	0,00	0,00
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.705.821.176,00	13.617.300,00	0,00	0,00
		3.672.183.682,00	13.500.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.636.940,00	0,00	0,00	0,00
		83.472.014,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83.636.940,00	0,00	0,00	0,00
		83.472.014,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.889.126.605,00	0,00	0,00	0,00
		2.867.298.898,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.858.274.420,00	0,00	0,00	0,00
		2.836.447.132,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.852.185,00	0,00	0,00	0,00
		30.851.766,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	366.577.744,00	0,00	0,00	0,00
		363.026.037,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.672.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.672.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.567.080,00	0,00	0,00	0,00
		25.557.080,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.250.115,00	0,00	0,00	0,00
		19.250.016,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	17.719.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.927.560,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	297.369.549,00	0,00	0,00	0,00
		295.619.381,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	13.617.300,00	0,00	0,00
		0,00	13.500.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	13.617.300,00	0,00	0,00
		0,00	13.500.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.999.407,00	0,00	0,00	0,00
		226.462.093,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.198.752,00	0,00	0,00	0,00
		120.875.347,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.800.655,00	0,00	0,00	0,00
		105.586.746,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.480.480,00	0,00	0,00	0,00
		131.924.640,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.133.490,00	0,00	0,00	0,00
		109.534.640,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.986.990,00	0,00	0,00	0,00
		10.790.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	498.889.239,00	0,00	0,00	0,00
		466.112.829,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	360.754.294,00	0,00	0,00	0,00
		352.222.634,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	12.331.620,00	0,00	0,00	0,00
		12.331.620,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	25.751.739,00	0,00	0,00	0,00
		25.614.429,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	140.679.665,00	0,00	0,00	0,00
		140.615.415,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	181.991.270,00	0,00	0,00	0,00
		173.661.170,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	67.644.200,00	0,00	0,00	0,00
		48.399.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	21.294.200,00	0,00	0,00	0,00
		2.064.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	46.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.335.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	70.490.745,00	0,00	0,00	0,00
		65.490.995,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	70.490.745,00	0,00	0,00	0,00
		65.490.995,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	521.096.851,00	0,00	0,00	0,00
		467.028.553,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	201.469.935,00	0,00	0,00	0,00
		165.954.627,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	8.225.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.225.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	37.636.780,00	0,00	0,00	0,00
		31.276.680,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	155.608.155,00	0,00	0,00	0,00
		126.452.947,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	151.902.980,00	0,00	0,00	0,00
		134.569.525,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	23.145.320,00	0,00	0,00	0,00
		22.226.978,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	128.757.660,00	0,00	0,00	0,00
		112.342.547,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	167.723.936,00	0,00	0,00	0,00
		166.504.401,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	41.986.388,00	0,00	0,00	0,00
		41.955.670,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	71.228.251,00	0,00	0,00	0,00
		71.208.451,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	23.161.687,00	0,00	0,00	0,00
		22.902.570,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	31.347.610,00	0,00	0,00	0,00
		30.437.710,00	0,00	0,00	0,00
5.02	KEUANGAN	28.774.780.452,00	99.722.000,00	2.912.043.380,00	136.417.491.949,00
		27.489.193.727,00	87.360.000,00	1.190.621.929,00	135.245.400.726,00
5.02.00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.657.232.105,00	0,00	0,00	77.884.916.368,00
5.02.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.657.232.105,00	0,00	0,00	77.884.916.368,00
5.02.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.657.232.105,00	0,00	0,00	77.884.916.368,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.556.035.536,00	12.362.000,00	0,00	0,00
		10.533.674.087,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	229.502.034,00	0,00	0,00	0,00
		224.360.355,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	183.988.534,00	0,00	0,00	0,00
		179.387.405,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.513.500,00	0,00	0,00	0,00
		44.972.950,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.825.672.954,00	0,00	0,00	0,00
		8.996.440.829,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.817.484.334,00	0,00	0,00	0,00
		8.988.541.029,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.550.920,00	0,00	0,00	0,00
		3.443.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.637.700,00	0,00	0,00	0,00
		4.456.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	683.231.818,00	0,00	0,00	0,00
		677.016.534,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.090.395,00	0,00	0,00	0,00
		17.800.160,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.725.330,00	0,00	0,00	0,00
		106.221.080,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.945.117,00	0,00	0,00	0,00
		48.763.700,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	55.055.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.970.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	449.415.976,00	0,00	0,00	0,00
		449.261.294,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	12.362.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	12.362.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	543.141.800,00	0,00	0,00	0,00
		463.358.481,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	268.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		236.157.595,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	274.941.800,00	0,00	0,00	0,00
		227.200.886,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.486.930,00	0,00	0,00	0,00
		172.497.888,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	192.545.950,00	0,00	0,00	0,00
		103.962.513,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.940.980,00	0,00	0,00	0,00
		68.535.375,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	13.810.514.447,00	69.360.000,00	2.912.043.380,00	136.417.491.949,00
		4.939.572.872,00	69.360.000,00	1.190.621.929,00	57.360.484.358,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.040.610.909,00	0,00	0,00	0,00
		2.023.007.040,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	146.277.235,00	0,00	0,00	0,00
		145.718.818,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	96.176.860,00	0,00	0,00	0,00
		95.349.277,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	153.729.900,00	0,00	0,00	0,00
		153.161.162,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	23.641.590,00	0,00	0,00	0,00
		22.121.615,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	5.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.566.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	5.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.566.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.039.919.230,00	0,00	0,00	0,00
		1.030.715.740,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	294.763.094,00	0,00	0,00	0,00
		293.938.030,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	177.244.900,00	0,00	0,00	0,00
		176.003.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	13.776.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.164.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	63.190.400,00	0,00	0,00	0,00
		62.413.598,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	20.131.700,00	0,00	0,00	0,00
		19.288.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	772.934.737,00	20.150.000,00	0,00	0,00
		771.347.873,00	20.150.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	336.255.162,00	20.150.000,00	0,00	0,00
		335.465.470,00	20.150.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.951.936,00	0,00	0,00	0,00
		5.750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	25.749.449,00	0,00	0,00	0,00
		25.664.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	9.999.935,00	0,00	0,00	0,00
		9.925.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	394.978.255,00	0,00	0,00	0,00
		394.542.003,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	977.092.575,00	23.436.000,00	0,00	0,00
		948.044.070,00	23.436.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	216.207.779,00	0,00	0,00	0,00
		215.510.940,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	30.957.144,00	0,00	0,00	0,00
		26.766.100,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	551.159.281,00	23.436.000,00	0,00	0,00
		542.902.100,00	23.436.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	73.792.565,00	0,00	0,00	0,00
		68.953.530,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	54.976.275,00	0,00	0,00	0,00
		49.455.100,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	49.999.531,00	0,00	0,00	0,00
		44.456.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.244.660.426,00	15.150.000,00	2.912.043.380,00	136.417.491.949,00
		431.496.851,00	15.150.000,00	1.190.621.929,00	57.360.484.358,00
5.02.02.2.04.03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	9.086.272.766,00	0,00	0,00	0,00
		273.117.021,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	158.387.660,00	15.150.000,00	0,00	134.111.045.500,00
		158.379.830,00	15.150.000,00	0,00	55.054.037.916,00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	2.912.043.380,00	0,00
		0,00	0,00	1.190.621.929,00	0,00
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	2.306.446.449,00
		0,00	0,00	0,00	2.306.446.442,00
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	775.215.800,00	10.624.000,00	0,00	0,00
		765.677.038,00	10.624.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	133.778.000,00	0,00	0,00	0,00
		133.638.464,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	385.463.200,00	10.624.000,00	0,00	0,00
		376.358.174,00	10.624.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	255.974.600,00	0,00	0,00	0,00
		255.680.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.798.840.318,00	18.000.000,00	0,00	0,00
		1.751.239.336,00	18.000.000,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.798.840.318,00	18.000.000,00	0,00	0,00
		1.751.239.336,00	18.000.000,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	246.144.250,00	18.000.000,00	0,00	0,00
		245.574.639,00	18.000.000,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	60.344.570,00	0,00	0,00	0,00
		58.789.290,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	543.953.695,00	0,00	0,00	0,00
		527.822.051,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	536.607.326,00	0,00	0,00	0,00
		507.608.484,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	411.790.477,00	0,00	0,00	0,00
		411.444.872,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.609.390.151,00	0,00	0,00	0,00
		1.607.475.327,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.609.390.151,00	0,00	0,00	0,00
		1.607.475.327,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	205.342.059,00	0,00	0,00	0,00
		204.060.644,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	547.283.631,00	0,00	0,00	0,00
		549.169.699,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	252.496.508,00	0,00	0,00	0,00
		252.099.200,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	604.267.953,00	0,00	0,00	0,00
		602.145.784,00	0,00	0,00	0,00
5.03	KEPEGAWAIAN	5.287.931.554,00	25.900.000,00	0,00	0,00
		5.166.429.723,00	25.900.000,00	0,00	0,00
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.095.052.764,00	25.900.000,00	0,00	0,00
		4.028.375.411,00	25.900.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.869.800,00	0,00	0,00	0,00
		41.850.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.869.800,00	0,00	0,00	0,00
		41.850.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.238.565.159,00	0,00	0,00	0,00
		3.180.378.009,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.220.365.159,00	0,00	0,00	0,00
		3.162.254.609,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.123.400,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	347.189.734,00	0,00	0,00	0,00
		346.603.962,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.062.390,00	0,00	0,00	0,00
		6.945.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.868.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.312.544,00	0,00	0,00	0,00
		28.307.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.396.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.318.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	266.418.800,00	0,00	0,00	0,00
		266.165.462,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	25.900.000,00	0,00	0,00
		0,00	25.900.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	25.900.000,00	0,00	0,00
		0,00	25.900.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.708.071,00	0,00	0,00	0,00
		303.017.090,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.217.200,00	0,00	0,00	0,00
		165.486.275,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.490.871,00	0,00	0,00	0,00
		137.530.815,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		156.525.850,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.968.350,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.280.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.277.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.192.878.790,00	0,00	0,00	0,00
		1.138.054.312,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	613.405.600,00	0,00	0,00	0,00
		606.604.661,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.246.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	17.515.600,00	0,00	0,00	0,00
		15.500.600,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		300.000.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	179.764.000,00	0,00	0,00	0,00
		178.407.978,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	56.126.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.450.083,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	353.592.000,00	0,00	0,00	0,00
		306.084.921,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	160.457.500,00	0,00	0,00	0,00
		127.763.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	47.696.500,00	0,00	0,00	0,00
		45.217.417,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	145.438.000,00	0,00	0,00	0,00
		133.104.504,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	157.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		157.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	157.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		157.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	68.381.190,00	0,00	0,00	0,00
		67.864.730,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	68.381.190,00	0,00	0,00	0,00
		67.864.730,00	0,00	0,00	0,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	491.971.605,00	0,00	0,00	0,00
		489.770.755,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	491.971.605,00	0,00	0,00	0,00
		489.770.755,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	491.971.605,00	0,00	0,00	0,00
		489.770.755,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	491.971.605,00	0,00	0,00	0,00
		489.770.755,00	0,00	0,00	0,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	263.846.354,00	0,00	0,00	0,00
		253.812.535,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	263.846.354,00	0,00	0,00	0,00
		253.812.535,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	109.612.570,00	0,00	0,00	0,00
		109.586.693,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	109.612.570,00	0,00	0,00	0,00
		109.586.693,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	154.233.784,00	0,00	0,00	0,00
		144.225.842,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	154.233.784,00	0,00	0,00	0,00
		144.225.842,00	0,00	0,00	0,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.871.712.985,00	133.431.850,00	0,00	0,00
		8.799.159.435,00	131.172.650,00	0,00	0,00
6.01	INSPEKTORAT	9.871.712.985,00	133.431.850,00	0,00	0,00
		8.799.159.435,00	131.172.650,00	0,00	0,00
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.166.861.220,00	133.431.850,00	0,00	0,00
		6.278.684.451,00	131.172.650,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.485.358,00	0,00	0,00	0,00
		68.349.595,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.485.358,00	0,00	0,00	0,00
		68.349.595,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.330.343.066,00	0,00	0,00	0,00
		5.518.575.082,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.330.343.066,00	0,00	0,00	0,00
		5.518.575.082,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	637.101.240,00	0,00	0,00	0,00
		597.121.408,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.308.640,00	0,00	0,00	0,00
		70.567.142,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.625.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.667.911,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	74.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.700.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	446.007.600,00	0,00	0,00	0,00
		438.185.855,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.592.000,00	123.499.200,00	0,00	0,00
		1.950.000,00	121.240.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	79.753.200,00	0,00	0,00
		0,00	78.100.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.592.000,00	43.746.000,00	0,00	0,00
		1.950.000,00	43.140.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.339.556,00	9.932.650,00	0,00	0,00
		92.688.366,00	9.932.650,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.985.800,00	0,00	0,00	0,00
		71.373.122,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.353.756,00	9.932.650,00	0,00	0,00
		21.315.244,00	9.932.650,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.727.674.287,00	0,00	0,00	0,00
		1.608.673.173,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.561.083.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.484.996.173,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	914.460.000,00	0,00	0,00	0,00
		853.641.699,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	146.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		144.710.300,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	122.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		120.872.900,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	202.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		198.150.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	174.523.000,00	0,00	0,00	0,00
		167.621.274,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	166.591.287,00	0,00	0,00	0,00
		123.677.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	57.591.287,00	0,00	0,00	0,00
		19.902.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	109.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.775.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	977.177.478,00	0,00	0,00	0,00
		911.801.811,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	674.112.500,00	0,00	0,00	0,00
		662.300.911,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	642.212.500,00	0,00	0,00	0,00
		635.800.911,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	31.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.500.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	303.064.978,00	0,00	0,00	0,00
		249.500.900,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.838.600,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	266.514.978,00	0,00	0,00	0,00
		219.012.300,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	24.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.650.000,00	0,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	35.991.590.966,00	817.105.000,00	0,00	0,00
		35.555.602.687,00	814.581.939,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01	KECAMATAN	35.991.590.966,00	817.105.000,00	0,00	0,00
		35.555.602.687,00	814.581.939,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.857.915.550,00	82.287.000,00	0,00	0,00
		33.597.734.588,00	81.369.750,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.749.825,00	0,00	0,00	0,00
		116.599.652,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.864.625,00	0,00	0,00	0,00
		25.163.063,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	79.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.685.200,00	0,00	0,00	0,00
		12.236.589,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.834.975.142,00	0,00	0,00	0,00
		26.670.151.429,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.818.759.307,00	0,00	0,00	0,00
		26.654.010.905,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.215.835,00	0,00	0,00	0,00
		16.140.524,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.937.898.210,00	0,00	0,00	0,00
		3.919.729.473,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	63.453.161,00	0,00	0,00	0,00
		63.248.620,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	252.036.947,00	0,00	0,00	0,00
		246.246.980,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	180.554.754,00	0,00	0,00	0,00
		180.060.222,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.476.873.608,00	0,00	0,00	0,00
		1.468.651.250,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.964.979.740,00	0,00	0,00	0,00
		1.961.522.401,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	82.117.500,00	0,00	0,00
		0,00	81.200.250,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	18.150.000,00	0,00	0,00
		0,00	18.150.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	55.397.500,00	0,00	0,00
		0,00	55.011.250,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	8.570.000,00	0,00	0,00
		0,00	8.039.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.107.364.946,00	169.500,00	0,00	0,00
		2.052.468.504,00	169.500,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	369.081.900,00	0,00	0,00	0,00
		326.215.442,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.738.283.046,00	169.500,00	0,00	0,00
		1.726.253.062,00	169.500,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	859.927.427,00	0,00	0,00	0,00
		838.785.530,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	174.641.166,00	0,00	0,00	0,00
		165.419.938,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	510.146.850,00	0,00	0,00	0,00
		499.685.680,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.594.300,00	0,00	0,00	0,00
		13.446.100,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.648.001,00	0,00	0,00	0,00
		74.591.362,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.579.950,00	0,00	0,00	0,00
		78.330.950,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.317.160,00	0,00	0,00	0,00
		7.311.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	189.845.166,00	0,00	0,00	0,00
		186.489.090,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	168.515.866,00	0,00	0,00	0,00
		167.427.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	168.515.866,00	0,00	0,00	0,00
		167.427.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	21.329.300,00	0,00	0,00	0,00
		19.061.890,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	21.329.300,00	0,00	0,00	0,00
		19.061.890,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.497.492.000,00	734.818.000,00	0,00	0,00
		1.327.207.465,00	733.212.189,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.988.400,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.988.400,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.488.392.000,00	734.818.000,00	0,00	0,00
		1.318.150.065,00	733.212.189,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.488.392.000,00	734.818.000,00	0,00	0,00
		1.318.150.065,00	733.212.189,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.069.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.069.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	314.298.125,00	0,00	0,00	0,00
		313.418.670,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	291.048.125,00	0,00	0,00	0,00
		290.196.570,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	46.185.625,00	0,00	0,00	0,00
		45.640.050,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	244.862.500,00	0,00	0,00	0,00
		244.556.520,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*****)	23.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.222.100,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****)	23.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.222.100,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	132.040.125,00	0,00	0,00	0,00
		130.752.874,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	132.040.125,00	0,00	0,00	0,00
		130.752.874,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.428.510,00	0,00	0,00	0,00
		10.192.674,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	115.511.615,00	0,00	0,00	0,00
		114.545.400,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.014.800,00	0,00	0,00	0,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.297.915.591,00	0,00	0,00	0,00
		8.261.596.157,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.297.915.591,00	0,00	0,00	0,00
		8.261.596.157,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.386.788.924,00	0,00	0,00	0,00
		3.356.245.566,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.950.936,00	0,00	0,00	0,00
		51.844.700,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.950.936,00	0,00	0,00	0,00
		51.844.700,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.956.923.347,00	0,00	0,00	0,00
		2.957.435.898,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.956.923.347,00	0,00	0,00	0,00
		2.957.435.898,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.023.111,00	0,00	0,00	0,00
		188.341.260,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.280.440,00	0,00	0,00	0,00
		4.190.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.061.700,00	0,00	0,00	0,00
		24.470.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.833.371,00	0,00	0,00	0,00
		12.012.200,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.907.600,00	0,00	0,00	0,00
		147.669.060,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.243.350,00	0,00	0,00	0,00
		96.621.348,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.293.750,00	0,00	0,00	0,00
		22.198.138,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.949.600,00	0,00	0,00	0,00
		74.423.210,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.648.180,00	0,00	0,00	0,00
		62.002.360,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.482.360,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.774.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.650.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.374.180,00	0,00	0,00	0,00
		3.370.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	897.313.244,00	0,00	0,00	0,00
		897.308.406,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	897.313.244,00	0,00	0,00	0,00
		897.308.406,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	897.313.244,00	0,00	0,00	0,00
		897.308.406,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.894.395.050,00	0,00	0,00	0,00
		1.894.200.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.894.395.050,00	0,00	0,00	0,00
		1.894.200.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.875.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.875.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	19.395.050,00	0,00	0,00	0,00
		19.200.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	58.086.600,00	0,00	0,00	0,00
		55.594.942,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	58.086.600,00	0,00	0,00	0,00
		55.594.942,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	58.086.600,00	0,00	0,00	0,00
		55.594.942,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.061.331.773,00	0,00	0,00	0,00
		2.058.247.243,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.061.331.773,00	0,00	0,00	0,00
		2.058.247.243,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	42.514.316,00	0,00	0,00	0,00
		41.417.742,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2.018.817.457,00	0,00	0,00	0,00
		2.016.829.501,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		689.481.723.970,00	200.759.754.647,00	2.912.043.380,00	136.417.491.949,00
		664.637.687.600,00	186.544.899.315,00	1.190.621.929,00	135.245.400.726,00

Marisa, 28 Juli 2023

BUPATI





PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref.	2022	2021
a	b	c	d
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	75.660.583.213,87	11.843.975.866,15
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	75.660.583.213,87	11.843.975.866,15
Sub Total		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	29.433.830.568,30	75.660.583.213,87
Sub Total		29.433.830.568,30	75.660.583.213,87
Lain-Lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.4	29.433.830.568,30	75.660.583.213,87

BUPATI POHUWATO



SAIPUL A. MBUINGA



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref.	2022	2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a	b	c	d	e = c - d	f = e / d
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN - LO	5.4.1	856.948.229.835,91	822.705.791.068,38	34.242.438.767,53	4,16
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1	75.886.834.052,22	69.590.336.140,38	6.296.497.911,84	9,05
Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	13.928.465.823,00	12.052.273.522,00	1.876.192.301,00	15,57
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	5.340.653.582,00	5.046.501.715,00	294.151.867,00	5,83
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	5.432.159.923,00	2.533.990.978,00	2.898.168.945,00	114,37
Lain-Lain PAD yang Sah - LO	5.4.1.1.4	51.185.554.724,22	49.957.569.925,38	1.227.984.798,84	2,46
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2	748.177.842.028,00	710.972.129.502,00	37.205.712.526,00	5,23
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.2.1	675.713.135.450,00	641.578.017.274,00	34.135.118.176,00	5,32
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		11.927.907.902,00	11.930.995.048,00	(3.087.146,00)	(0,03)
Transfer Pemerintah Provinsi		3.326.147.363,00	1.997.106.047,00	1.329.041.316,00	66,55
Dana Alokasi Umum - LO		481.613.630.000,00	480.667.451.199,00	946.178.801,00	0,20
Dana Alokasi Khusus - LO		178.845.450.185,00	146.982.464.980,00	31.862.985.205,00	21,68
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.4.1.2.2	43.213.353.000,00	42.082.902.000,00	1.130.451.000,00	2,69
Dana Penyesuaian - LO		43.213.353.000,00	42.082.902.000,00	1.130.451.000,00	2,69
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.4.1.2.3	29.251.353.578,00	27.311.210.228,00	1.940.143.350,00	7,10
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO		29.251.353.578,00	27.311.210.228,00	1.940.143.350,00	7,10
Bantuan Keuangan - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3	32.883.553.755,69	42.143.325.426,00	(9.259.771.670,31)	(21,97)
Pendapatan Hibah - LO		26.328.497.343,69	22.176.935.426,00	4.151.561.917,69	18,72
Dana Darurat - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LO		6.555.056.412,00	19.966.390.000,00	(13.411.333.588,00)	(67,17)
BEBAN	5.4.2	885.395.856.935,05	839.699.037.417,41	45.696.819.517,64	5,44
Beban Pegawai - LO	5.4.2.1.1	332.604.177.076,00	320.761.144.661,00	11.843.032.415,00	3,69
Beban Persediaan	5.4.2.1.2	62.064.003.404,17	63.369.781.854,85	(1.305.778.450,68)	(2,06)
Beban Jasa	5.4.2.1.3	159.800.989.999,06	156.941.816.012,68	2.859.173.986,38	1,82
Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.4	3.573.977.335,00	4.971.377.210,00	(1.397.399.875,00)	(28,11)
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.5	60.930.394.168,00	59.009.331.853,00	1.921.062.315,00	3,26
Beban Bunga	5.4.2.1.6	8.657.232.105,00	0,00	8.657.232.105,00	0,00
Beban Hibah	5.4.2.1.7	22.075.065.344,00	22.037.517.844,00	37.547.500,00	0,17
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.8	3.392.938.826,00	0,00	3.392.938.826,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.9	382.703.548,82	473.934.417,38	(91.230.868,56)	(19,25)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.10	171.206.943.981,00	155.254.404.805,80	15.952.539.175,20	10,28
Beban Transfer	5.4.2.1.11	57.360.484.358,00	54.692.631.853,00	2.667.852.505,00	4,88
Beban Lain-lain	5.4.2.1.12	3.346.946.790,00	2.187.096.905,70	1.159.849.884,30	53,03
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.3	(28.447.627.099,14)	(16.993.246.349,03)	(11.454.380.750,11)	67,41
KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		267.218.000,01	0,00	267.218.000,01	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		7.448.667,00	0,00	7.448.667,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		259.769.333,01	0,00	259.769.333,01	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(28.187.857.766,13)	(16.993.246.349,03)	(11.194.611.417,10)	65,88
Pendapatan Luar Biasa - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		2.310.621.929,00	1.004.458.800,00	1.306.163.129,00	130,04
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	5.4.5	(2.310.621.929,00)	(1.004.458.800,00)	(1.306.163.129,00)	130,04
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.6	(30.498.479.695,13)	(17.997.705.149,03)	(12.500.774.546,10)	69,46

BUPATI POHUWATO



SAIPUL A. MBUINGA



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref.	2022	2021
a	b	c	d
EKUITAS AWAL	5.6.1	1.344.619.410.796,12	1.369.665.250.075,80
Surplus/(Defisit) - LO	5.6.2	(30.498.479.695,13)	(17.997.705.149,03)
Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	5.6.3	(4.805.000.012,68)	(7.048.134.130,65)
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	5.6.3.1	(4.805.000.012,68)	(7.048.134.130,65)
EKUITAS AKHIR	5.6.4	1.309.315.931.088,31	1.344.619.410.796,12

BUPATI POHUWATO



SAIPUL A. MBUINGA



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref.	31 Desember 2022	31 Desember 2021
a	b	c	d
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	25.130.972.493,60	60.154.849.705,17
Kas di Bendahara Penemuan	5.3.1.1.2	510.000,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	32.737,00	0,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.4	3.550.452.042,70	13.844.665.091,70
Kas Di Bendahara Dana Kapitasi JKN	5.3.1.1.5	373.423.499,00	990.541.299,00
Kas Di Bendahara Dana BOS	5.3.1.1.6	465.518.070,40	718.002.118,45
Kas Lainnya	5.3.1.1.7	175.659,60	95.396.571,60
Setara Kas		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak	5.3.1.1.8.1	6.475.419.160,29	5.916.062.784,29
Piutang Retribusi	5.3.1.1.8.2	606.483.374,00	608.562.952,00
Piutang Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.3.1.1.8.3	3.244.443.830,00	0,00
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	5.3.1.1.8.4	9.901.072.100,25	2.850.943.069,09
Piutang Bagi Hasil Pajak	5.3.1.1.8.5	1.580.247.999,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.1.8.6	1.436.830.029,00	1.274.940.491,36
Piutang Lainnya	5.3.1.1.8.7	52.300.000,00	52.300.000,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.8.8	(5.741.756.484,02)	(5.568.162.202,35)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.9	0,00	0,00
Persediaan	5.3.1.1.10	12.614.843.840,22	11.748.959.016,35
JUMLAH ASET LANCAR		59.690.968.351,04	92.667.060.896,66
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.1	0,00	2.765.550.000,00
Penyisihan Investasi Non Permanen		0,00	(2.765.550.000,00)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2	82.781.150.683,00	88.750.030.964,00
Investasi Permanen Lainnya			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		82.781.150.683,00	88.750.030.964,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		82.781.150.683,00	88.750.030.964,00
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	96.901.685.497,04	96.623.208.962,04
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	471.949.896.156,70	464.346.364.976,70
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	713.508.913.475,76	683.829.452.231,76
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.330.086.231.155,47	1.130.084.331.614,78
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	56.359.676.522,30	53.923.254.243,30
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	20.959.961.529,00	65.743.827.207,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.450.552.430.344,67)	(1.282.821.210.073,67)
JUMLAH ASET TETAP		1.239.213.933.991,60	1.211.829.229.161,61
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.3.1.4		
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.1	3.675.221.112,36	3.498.955.939,19
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.2	1.105.685.791,22	1.106.707.222,22
Aset Lain-Lain	5.3.1.4.3	82.241.222.015,04	74.884.476.290,04
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	5.3.1.4.4.1	1.358.170.216,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		68.380.299.134,62	79.492.139.451,45
JUMLAH ASET		1.470.066.352.160,28	1.472.758.460.474,02
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	87.253.934,00	142.871.572,05
Utang Bunga		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		4.100.858.172,47	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	11.250.000,47	84.191.178,47
Utang Belanja	5.3.2.1.3	1.760.790.938,06	4.171.269.844,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	11.260.303.990,42	16.792.377.417,38
Utang Kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		17.220.455.035,42	21.200.710.009,90

Uraian	Ref.	31 Desember 2022	31 Desember 2021
a	b	c	d
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2.1	143.529.966.036,53	106.938.339.668,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		143.529.966.036,53	106.938.339.668,00
JUMLAH KEWAJIBAN		160.750.421.071,95	128.139.049.677,90
EKUITAS			
JUMLAH EKUITAS	5.3.3	1.309.315.931.088,31	1.344.619.410.796,12
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.470.066.352.160,26	1.472.758.460.474,02

BUPATI POHUWATO



SAIPULA MBUINGA



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref.	2022	2021
a	b	c	d
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Kas Masuk			
Pendapatan Pajak Daerah		13.369.109.447,00	11.488.765.524,00
Pendapatan Retribusi Daerah		5.342.733.160,00	4.908.487.715,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		2.187.716.093,00	2.533.990.978,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		43.877.408.212,43	53.055.823.477,19
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		674.354.965.234,00	641.578.017.274,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		121.098.269.368,00	132.407.777.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		27.671.105.579,00	30.364.317.779,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Pendapatan Hibah		7.446.360.000,00	22.065.180.301,60
Pendapatan Lainnya		6.555.056.412,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		901.902.723.605,43	898.402.360.048,79
Arus Kas Keluar			
Belanja Pegawai		335.295.778.425,00	324.149.115.918,00
Belanja Barang		295.216.672.900,00	280.276.776.302,00
Belanja Bunga		8.657.232.105,00	0,00
Belanja Hibah		22.075.065.344,00	22.037.517.844,00
Belanja Bantuan Sosial		3.392.938.826,00	0,00
Belanja Tak Terduga		1.190.621.929,00	1.146.011.500,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		2.306.446.442,00	1.772.130.471,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		132.938.954.284,00	143.245.376.382,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		801.073.710.265,00	772.626.928.417,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		100.829.013.260,43	125.775.431.631,79
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Kas Masuk			
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Asel Lainnya		0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Peralatan/Mesin		272.959.100,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		272.959.100,00	0,00
Arus Kas Keluar			
Belanja Tanah		463.206.040,00	1.794.239.480,00
Belanja Peralatan dan Mesin		16.835.630.223,00	33.956.246.346,00
Belanja Bangunan dan Gedung		15.219.635.271,00	38.810.503.312,07
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		151.716.799.542,00	92.114.814.951,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		2.309.628.239,00	2.026.571.898,00
Jumlah Arus Kas Keluar		186.544.899.315,00	168.702.375.987,07
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(186.271.940.215,00)	(168.702.375.987,07)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Pinjaman Daerah (PEN)		40.692.482.541,00	106.938.339.668,00
Jumlah Arus Kas Masuk		40.692.482.541,00	106.938.339.668,00
Arus Kas Keluar			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
Pengeluaran Pembiayaan (Pembayaran Biaya Pengelolaan)		1.476.308.222,00	282.622.755,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.476.308.222,00	282.622.755,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		39.216.174.319,00	106.655.716.913,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		62.819.393.230,01	57.107.563.872,35
Sisa Kas BOS 2011		0,00	87.900.629,00
Jumlah Arus Kas Masuk		62.819.393.230,01	57.195.464.501,35
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		62.875.010.868,06	29.342.368,00
Belanja BLUD yang Gagal Transfer 2020		0,00	12.230.000,00
Penyetoran Utang PFK 2020		0,00	57.066.187.002,30
Jumlah Arus Kas Keluar		62.875.010.868,06	57.107.759.370,30
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(55.617.638,05)	87.705.131,05
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.5.5	(46.282.370.283,62)	63.816.477.688,77
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di Bendahara Dana Kapitasi, Kas di Bendahara Dana BOS dan Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.6	75.803.454.785,92	11.986.977.097,15

Uraian a	Ref. b	2022 c	2021 d
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di Bendahara Dana Kapitasi, Kas di Bendahara Dana BOS dan Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.7	29.521.084.502,30	75.803.454.785,92
Kas di BUD		25.130.972.493,60	60.154.849.705,17
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.8	510.000,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah		3.550.452.042,70	13.844.665.091,70
Kas di Bendahara Dana Kapitasi		373.423.499,00	990.541.299,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.9	32.737,00	0,00
Kas Lainnya		175.659,60	95.396.571,60
Kas di Bendahara Dana BOS		465.518.070,40	718.002.118,45
Saldo Akhir Kas	5.5.10	29.521.084.502,30	75.803.454.785,92

BUPATI POHUWATO



SAIPUL A. MBUINGA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato diawali dengan proses perencanaan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah APBD dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Pohuwato berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kewajiban gubernur, walikota, dan bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual.

Dengan demikian, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pohuwato terdiri atas 7 (tujuh) komponen yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Dalam menyusun LKPD Pemerintah Kabupaten Pohuwato mempunyai tujuan dan maksud sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyajikan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyajikan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit LO, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua

- atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;l;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua;l pada Pemerintah Daerah diubah dengan dengan Permendagri 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah 82);
28. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Disabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang;
29. Instruksi Presiden RI melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* kegiatan Realokasi Anggaran, serta pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease*

- 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan anggaran dalam rangka penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Program pemulihan Ekonomi Nasional;
 32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022;
 33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022;
 34. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 38 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 35. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 42 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
 36. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 31.a Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

II. Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

III. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Program pembangunan prioritas daerah
- 3.3. *Mandatory Spending*
- 3.4. *Stunting*
- 3.5. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV. Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Kebijakan akuntansi pendapatan - LRA
- 4.5. Kebijakan akuntansi pendapatan - LO
- 4.6. Kebijakan akuntansi belanja
- 4.7. Kebijakan akuntansi beban
- 4.8. Kebijakan akuntansi transfer
- 4.9. Kebijakan akuntansi pembiayaan
- 4.10. Kebijakan akuntansi kas dan setara kas
- 4.11. Kebijakan akuntansi investasi jangka pendek
- 4.12. Kebijakan akuntansi investasi jangka panjang
- 4.13. Kebijakan akuntansi piutang
- 4.14. Kebijakan akuntansi persediaan
- 4.15. Kebijakan akuntansi aset tetap
- 4.16. Kebijakan akuntansi kewajiban
- 4.17. Kebijakan akuntansi ekuitas

V. Penjelasan pos -pos laporan keuangan

- 5.1. Penjelasan pos - pos laporan realisasi anggaran (LRA)
 - 5.1.4 Pendapatan - LRA
 - 5.1.5 Belanja
 - 5.1.6. Transfer
 - 5.1.7. Pembiayaan
 - 5.1.8. Sisa lebih pembiayaan anggaran
- 5.2. Penjelasan akun laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL)
 - 5.2.1. Saldo anggaran lebih awal
 - 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan
 - 5.2.3. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - 5.2.4. Saldo anggaran lebih
- 5.3. Penjelasan akun-akun neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas

- 5.4. Penjelasan akun-akun laporan operasional (LO)
 - 5.4.1. Pendapatan – LO
 - 5.4.2. Beban daerah
 - 5.4.3. Surplus defisit dari operasi
 - 5.4.4. Pos luar biasa
 - 5.4.5. Surplus/defisit LO
- 5.5. Penjelasan akun-akun laporan arus kas (LAK)
 - 5.5.1. Arus kas dari aktivitas operasi
 - 5.5.2. Arus kas dari aktivitas investasi
 - 5.5.3. Arus kas dari aktivitas pendanaan
 - 5.5.4. Arus kas dari aktivitas transitoris
 - 5.5.5. Kenaikan/penurunan bersih kas selama periode
 - 5.5.6. Saldo awal kas di BUD, kas di BLUD, kas di bendahara dana kapitasi, kas di bendahara dana BOS, dan kas di bendahara pengeluaran
 - 5.5.7. Saldo akhir kas di BUD, kas di BLUD, kas di bendahara dana kapitasi, kas di bendahara dana BOS, dan kas di bendahara pengeluaran
 - 5.5.8. Saldo akhir kas di bendahara penerimaan
 - 5.5.9. Saldo akhir kas
- 5.6. Penjelasan akun-akun laporan perubahan ekuitas
 - 5.6.1. Ekuitas awal
 - 5.6.2. Surplus/defisit LO
 - 5.6.3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar
 - 5.6.4. Ekuitas akhir

VI. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

- 6.1. Informasi tambahan
- 6.2. Pengungkapan lainnya
 - 6.2.1. Domisili
 - 6.2.2. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional
 - 6.2.3. Struktur organisasi

VII. Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET PENCAPAIAN
KINERJA KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pohuwato, yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 17,87%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,41%;
- c. Gini Ratio sebesar 0.39%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 66,53;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,08%;
- f. Tingkat Inflasi sebesar 5,15%; (Provinsi Gorontalo, Desember 2022); dan
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dalam satuan juta rupiah adalah sebesar Rp7.055.541,65.

Perekonomian Kabupaten Pohuwato tahun 2022 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Pohuwato dimana sektor ini mencapai 58,50 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pohuwato tahun 2022 adalah sebesar 3,08 persen.

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk

miskin Kabupaten Pohuwato periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. Rincian persentase penduduk miskin Kabupaten Pohuwato diuraikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 s.d. 2022

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/(Turun) (%)	
					2022-2021	2021-2020
1.	Kab/Kota (%) Pohuwato	17,87	18,08	17,62	(0,21)	2,61
2.	Kab/Kota (Ribu Orang) Pohuwato	29,32	29,22	28,92	0,10	1,04
3.	Provinsi (%) (September)	15,51	15,41	15,22	0,10	1,25
4.	Nasional (%) (September)	9,57	9,71	10,19	(0,14)	(4,71)
5.	Peringkat Provinsi	5	5	5		
6.	Peringkat Nasional	30	29	30		

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pohuwato

Persentase penduduk miskin Kabupaten Pohuwato pada Tahun 2022 sebesar 17,87% mengalami kenaikan dengan tingkat kenaikan 0,21%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pohuwato masih di atas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan. Rincian persentase penduduk miskin Kabupaten Pohuwato diuraikan pada tabel 2 dan tabel 3 berikut.

Tabel 2 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 s.d. 2022

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/(Turun) (%)	
					2022-2021	2021-2020
1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	3,16	2,64	2,64	0,52	0
2.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi (Maret)	3,04	2,88	2,67	0,16	0,21
3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi (September)	2,85	2,92	2,86	(0,07)	0,06
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Nasional (Maret)	1,59	1,71	1,61	(0,12)	0,06

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/(Turun) (%)	
					2022-2021	2021-2020
5.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Nasional (September)	1,56	1,67	1,75	(0,11)	(0,08)
6.	Peringkat Provinsi	5	5	5		
7.	Peringkat Nasional	29	29	30		

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pohuwato

Tabel 3 Indeks Keparahahan Kemiskinan Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 s.d 2022

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/(Turun) (%)	
					2022-2021	2021-2020
1.	Indeks Keparahahan Kemiskinan Kab/Kota	0,82	0,59	0,54	0,23	0,05
2.	Indeks Keparahahan Kemiskinan Provinsi (Maret)	0,85	0,72	0,65	0,13	0,07
3.	Indeks Keparahahan Kemiskinan Provinsi (September)	0,69	0,77	0,79	(0,08)	(0,02)
4.	Indeks Keparahahan Kemiskinan Nasional (Maret)	0,39	0,42	0,38	(0,03)	0,04
5.	Indeks Keparahahan Kemiskinan Nasional (September)	0,38	0,42	0,47	(0,04)	(0,05)
6.	Peringkat Provinsi	5	5	5		
7.	Peringkat Nasional	29	29	28		

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pohuwato

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Pohuwato, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 dan Tahun 2022 adalah sebesar 3,41%, sebagaimana dijelaskan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 s.d 2022

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/(Turun) (%)	
					2022-2021	2021-2020
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	3,41	2,45	3,10	0,96	(20,97)
2.	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	2,58	3,01	4,28	(0,43)	(29,67)
3.	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	6,49	7,07	(0,63)	(8,20)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pohuwato

TPT di Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,41 %, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 2,45 % atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021. TPT Kabupaten Pohuwato masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Gorontalo sebesar 2,58 % dan lebih rendah dibandingkan dengan TPT Nasional sebesar 5,86 %.

2.1.3. Gini Ratio

Gini ratio digunakan untuk melihat tingkat kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya di suatu daerah. Pada tahun 2022 gini ratio Kabupaten Pohuwato ditargetkan sebesar 0,411 persen, terealisasi sebesar 0,389 persen atau sebesar 105,3%. Dari sisi capaian persentase, realisasi ini lebih rendah dibanding tahun 2021 sebesar 107,27 persen, namun dari nilai capaian, tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021 karena kesenjangan yang kaya dan miskin semakin kecil. Hal ini menjadi indikator mulai bangkitnya ekonomi daerah pasca pandemi *Covid-19*. Selanjutnya pada tahun 2020 gini ratio pohuwato ditargetkan sebesar 0,408 dan terealisasi sebesar 0,385 atau 105,97 persen. Realisasi ini hampir sama dengan realisasi tahun 2022 dan lebih baik dibanding tahun 2021. Kenaikan tahun 2021 salah satunya disebabkan adanya pandemi *Covid-19*. Sedangkan dari sisi nilai mengalami kenaikan. Kenaikan ini tentu menjadi pertanda yang kurang baik dimana walaupun aktivitas ekonomi perlahan pulih pasca redupnya pandemi *Covid-19*, tapi belum merata hingga warga yang berpendapatan rendah, apalagi pada tahun 2022 harga komoditi jagung rendah dan berlangsung cukup lama sehingga berdampak pada penurunan pendapatan petani. Hal ini juga dibuktikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) untuk komoditi ini berada dibawah angka 100 persen pada tahun 2022.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60);
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Pohuwato, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Pohuwato tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebesar 66,53 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan pada tabel 5 berikut.

Tabel 5 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 s.d 2022

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/(Turun) (%)	
					2022-2021	2021-2020
1.	Kabupaten/Kota	66,53	65,80	65,37	0,73	0,66
2.	Provinsi	69,81	69,00	68,68	0,81	0,47
3.	Indonesia/Nasional	72,91	72,29	71,94	0,62	0,49
4.	Peringkat Provinsi	5	5	5		
5.	Peringkat Nasional	27	27	27		

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pohuwato

Realisasi pencapaian IPM tahun 2022 adalah sebesar 66,53 poin, sedangkan pencapaian IPM tahun 2021 adalah sebesar 65,80 poin. Realisasi IPM tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,73 poin atau 1,109% bila dibandingkan dengan realisasi IPM tahun 2021. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka Harapan Hidup saat Lahir mencapai 64,62 tahun pada tahun 2022, lebih lama 0,32 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, Rata-Rata Lama Sekolah selama 7,35 tahun dengan harapan lama sekolah 12,39 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita sebesar Rp10.913.000 atau meningkat Rp504.000 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Pohuwato pada saat ini berada pada urutan 5 dari 6 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Gorontalo dan berada pada urutan 27 untuk peringkat nasional.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor

produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pohuwato

No.	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022
1.	PDRB (harga konstan 2010) (juta rupiah)	4.602.328,82	4.704.125,58	4.849.001,99	30.286,45
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	(0,18)	2,21	3,08	4,04

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pohuwato

Pada periode 2020 s.d. 2021, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pohuwato adalah sebesar 2,21%, sedangkan pada periode 2021 s.d. 2022, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pohuwato sebesar 3,08%.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Pohuwato dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi dalam 4 (empat) kategori, yang meliputi:

1) Inflasi ringan (*creeping inflation*)

Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;

2) Inflasi sedang (*galloping inflation*)

Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% satu tahun;

3) Inflasi berat (*high inflation*)

Kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan

4) Hiperinflasi (*hyper inflation*)

Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Tahun 2021 tingkat inflasi yang digunakan Kabupaten Pohuwato merujuk pada tingkat inflasi Kota Gorontalo dikarenakan perhitungan tingkat inflasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Gorontalo hanya dilakukan di Kota Gorontalo.

Tabel 7 Tingkat Inflasi Kota Gorontalo Per Bulan

Bulan	2022	2021	2020
Januari	(0,22)	0,61	0.03
Februari	(0,60)	0,22	0.32
Maret	0,64	0,60	(0.13)
April	1,87	0,35	(0.08)
Mei	2,24	0,30	(0.33)
Juni	3,93	1,55	0.37
Juli	4,53	0,36	0.08
Agustus	3,98	(0,16)	0.03
September	4,49	(0,90)	(0.06)
Oktober	4,50	0,55	0.13
November	4,44	(0,36)	0.24
Desember	5,15	0,92	0.21

Sumber Dokumen: Provinsi Gorontalo Dalam Angka - BPS Provinsi Gorontalo

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Pohuwato

Struktur perekonomian Kabupaten Pohuwato dalam menunjang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Kategori	Uraian	2022	2021	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.408.709,25	4.231.241,23	4.035.026,73
B	Pertambangan dan Penggalian	58.906,60	54.498,99	52.204,54
C	Industri Pengolahan	367.171,67	326.255,30	305.914,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.421,64	3.145,55	3.037,67
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.095,37	2.050,73	2.001,49
F	Konstruksi	459.150,82	394.248,30	377.854,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	879.039,29	752.892,32	719.927,49
H	Transportasi dan Pergudangan	209.626,30	196.072,90	189.658,89
I	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	81.997,20	77.818,99	75.807,28
J	Informasi dan Komunikasi	97.051,73	94.162,72	92.263,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	182.935,10	181.836,52	156.092,65
L	Real Estate	55.199,00	52.272,94	52.94176
M, N	Jasa Perusahaan	6.367,86	5.732,45	5.595,57
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	285.350,06	271.124,95	270.704,02
P	Jasa Pendidikan	179.623,60	172.112,84	169.702,96

Kategori	Uraian	2022	2021	2020
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	189.792,98	174.378,39	163.456,50
R, S, T, U	Jasa Lainnya	69.551,38	65.696,55	63.905,92
Produk Domestik Regional Bruto		7.055.541,65	6.736.096,55	4.602.268,32

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pohuwato

2.2 Kebijakan Keuangan

APBD pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas langsung.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, di mana pada dasarnya penyusunan APBD tersebut telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi serta aspek-aspek lainnya yang diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan sosial ekonomi daerah. Hal tersebut tercermin dari komposisi APBD yang mengalokasikan belanja langsung pada bidang-bidang penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat guna penyediaan fasilitas umum dan kebutuhan dasar masyarakat yaitu bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan kesejahteraan rakyat, sosial, tenaga kerja, koperasi, pertanian, serta kelautan dan perikanan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator-indikator capaian kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Pohuwato dibagi menjadi 4 (empat) urusan, yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan pemerintahan umum.

2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar untuk pendidikan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, dimana target sebesar 102%, realisasi 96,09% dengan tingkat capaian 94,20%;
- b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B realisasi 70,68% dari target sebesar 92% atau 76,82% atas capaian target; dan
- c. Angka Partisipasi Sekolah PAUD, dengan capaian sebesar 100,56% atau terealisasi sebesar 62,79% dari target sebesar 62,44%.

2. Kesehatan

Pencapaian kinerja daerah tahun 2022 terhadap penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar untuk kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Indeks Kesehatan, sebagaimana ditargetkan terealisasi dengan angka 76,38 dari angka target sebesar 65,17 atau capaian kinerja sebesar 117%
- b. Capaian angka kematian ibu atau AKI
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 324 per 100.000 kelahiran hidup dengan target sebesar 125 per 100.000 kelahiran hidup atau capaian 117,16 %
- c. Capaian angka kematian bayi atau AKB
Angka Kematian Bayi terealisasi sebesar 2,95 per 1000 kelahiran hidup dengan target 1,87 per 1000 kelahiran hidup dengan angka capaian sebesar 63,39%.
- d. Capaian Rasio Akseptor Keluarga Berencana
Pada tahun 2022 mencapai angka 67,32% atau 90,98% tercapai dari angka yang ditargetkan pada RPJMD sebesar 74%;
- e. Angka Kematian Neonatal
Realisasi tahun 2022 untuk angka ini mencapai 6,63 per 1000 kelahiran hidup sebagaimana angka yang ditargetkan sebesar 5,29 per 1000 angka kelahiran hidup atau capaian sebesar 79,79 %.

3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022, yaitu:

- a. Capaian indeks pembangunan infrastruktur terealisasi sebesar 85,25 % dari target yang terdapat pada RPJMD sebesar 83,67 %;
- b. Proporsi panjang jaringan dan jalan dalam kondisi baik, capaian sebesar 90,53% atau realisasi sebesar 81,45% dari target 89,97%;
- c. Persentase penduduk berakses air minum. Dengan target 89% dan realisasi 65,56% atau persentase capaian 73,66%;
- d. Persentase rumah tinggal bersanitasi ditargetkan tahun 2022 sebesar 65,57% dengan realisasi sebesar 55,54% atau capaian sebesar 84,70%
- e. Indeks kinerja sistem irigasi, target 76,17% realisasi 75,29% atau capaian 98,84%; dan
- f. Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran tidak tersumbat pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 79,72% dengan realisasi sebesar 79,54% atau capaian sebesar 99,77%.
- g. Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik dan layak, ditargetkan tahun 2022 sebesar 80,8% dengan realisasi sebesar 20% atau capaian sebesar 24,75%.

4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2022, adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Rumah Layak Huni yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, ditargetkan pada tahun 2022 sejumlah 241 rumah, realisasi 191 rumah atau capaian sebesar 79,25%
- b. Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni BSPS yang bersumber dari APBN ditargetkan sebesar 1000 unit dengan realisasi sejumlah 844 unit atau capaian sebesar 84,4%.
- c. Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni yang bersumber dari APBD ditargetkan tahun 2022 sejumlah 100 unit dengan realisasi sejumlah 15 unit atau capaian sebesar 15%.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja. Capaian pada tahun 2022 tersebut sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Angka Indeks Partisipasi Politik ditargetkan sebesar 70% dengan realisasi sejumlah 74,66% atau capaian sebesar 77,44%.
- b. Angka indeks wawasan Kebangsaan ditargetkan sebesar 98% dengan realisasi sebesar 84.86% atau capaian sebesar 93%
- c. Indeks Ketertiban Umum, ditargetkan sebesar 84,72 % dengan realisasi sebesar 84,5% persentase capaian sebesar 100,27%
- d. Cakupan penegakkan Peraturan Daerah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, di mana target tahun 2022 adalah sebanyak 300 kasus, namun yang dapat diselesaikan adalah sebesar 253 kasus atau sebesar 84,21%
- e. Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, ditargetkan sebesar 100 persen, dengan realisasi sebesar 99.48 persen

6. Sosial

Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib urusan sosial ditangani oleh Dinas Sosial. Capaian pada tahun 2022 tersebut sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:

Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib urusan sosial ditangani oleh Dinas Sosial. Capaian pada tahun 2022 tersebut sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:

- Persentase PMKS yang meningkat kualitas hidupnya, dari yang ditargetkan dalam RPJM pada tahun 2022 sebesar 51,44 % persen realisasi 51,44 % capaian kinerja 100 %
- Persentase masyarakat yang rentan khusus yang memperoleh bantuan sosial. Tahun 2022 ditargetkan dalam RPJMD sebesar 100 % dan realisasi 100 mencapai target yaitu 100 persen.

2.3.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah untuk urusan tenaga kerja melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

- a. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Pohuwato berdasarkan data dari BPS Pohuwato Tahun 2022 berjumlah sebanyak 2.960 orang yang terdiri atas laki – laki 2.013 orang dan perempuan 947 orang. Jika dihitung persentase pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato sebanyak 149.297 Jiwa, maka angka pengangguran sebesar 1,98 %. Angka pengangguran di Kabupaten Pohuwato menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,45 %, yang terbukti dengan banyaknya tenaga kerja yang terdaftar dan telah ditempatkan baik pada perusahaan swasta, instansi pemerintah dan perusahaan lainnya yang ada di Kabupaten Pohuwato. Dengan lembaga pelayanan tenaga kerja yang didukung dengan penyelenggaraan Informasi Pasar Kerja (IPK).
- b. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan Penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja dicerminkan dengan berkurangnya permasalahan tenaga kerja.
- Untuk jumlah kasus di tahun 2021 sebesar 80 kasus terealisasi sebesar 80 kasus atau 100 %. Capaian tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebesar 11 kasus. Jumlah kasus yang diselesaikan di tahun 2021 sejumlah 11 kasus. Menurun dan meningkatnya penyelesaian kasus yang masuk tergantung pada pembinaan yang dilakukan oleh bidang yang menangani perlindungan ketenagakerjaan dalam hal ini adalah mediator. Di tahun 2022 ini ada 80 kasus yakni 62 (enam puluh dua) kasus HAK dari 7 perusahaan dan 18 (delapan belas) kasus PHK dari 9 Perusahaan terdiri dari:
- PHK 18 orang dari 9 Perusahaan
 - HAK terdiri dari: 62 orang dari 7 Perusahaan

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) pada tahun 2022 dapat dilihat pada indikator kinerja utama dan indikator program / kegiatan yang telah ditetapkan targetnya per tahun pada RPJMD 2021 – 2026. Capaian Indikator Utama Kinerja (IKU) DP3AP2KB Kabupaten Pohuwato Tahun 2022, bisa dilihat sebagai **berikut ini:**

- **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Jumlah IPM perempuan pada tahun 2022 sebesar 61.99. Dan Jumlah IPM Laki-laki sebesar 67.82 sehingga Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pohuwato adalah 91,40 %. Hasil perolehan 91.40% dengan capaian tersebut melebihi target capaian yaitu 91.38% dengan persentase keberhasilan 100,02% dengan predikat **Tercapai melebihi target**

- **Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Jumlah kekerasan terhadap perempuan, anak dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2022 adalah 52 kasus dan jumlah seluruh rumah tangga Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Pohuwato sejumlah 49.315 KK, sehingga dapat diketahui Indikator Rasio KDRT adalah 0.11% dengan persentase 100% sesuai dengan yang di targetkan pada RPJMD Tahun 2022 sebesar 0,11 %, dengan predikat Tercapai sesuai target.

- **Rata-rata jumlah anak per keluarga**

Jumlah anak sebanyak 50.708 orang dan jumlah kepala Keluarga (KK) tahun 2022 di kabupaten Pohuwato sebanyak 49.315 Kepala Keluarga (KK), jadi perbandingannya adalah 1.03 % dengan arti jumlah rata-rata anak yang dimiliki kepala keluarga di kabupaten Pohuwato tahun 2022 yaitu 1 sampai 2 anak, jumlah tersebut melebihi target capaian dengan persentase keberhasilan 148,50% dengan predikat **Tercapai melebihi target**

- **Rasio Akseptor KB**

Jumlah Peserta KB aktif pada tahun 2022 adalah 16.621 orang dan jumlah jumlah PUS di Kabupaten Pohuwato sejumlah 24.688, orang sehingga dapat diketahui Indikator Rasio KB Aktif adalah 67.32% dengan persentase 90,98% belum mencapai target, karena target tahun 2022 sebesar 74%. Namun secara Nasional hasil tersebut sangat tinggi.

3. Pangan

Capaian kinerja Dinas Pangan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Persentase beras yang terpenuhi dengan beras produksi lokal, ditargetkan sebesar 98.66 % dengan realisasi sebesar 95 % persentase capaian 96.29 %
- b. Tingkat Konsumsi Pangan per kapita per Tahun ditargetkan sebesar 67,50 % dengan realisasi sebesar 69.2 % persentase capaian 102.51%

- c. Cakupan Desa Rawan Pangan yang tertangani dengan tuntas ditargetkan tahun 2022 sebesar 52,38 % dengan realisasi 100 %.
- d. Persentase Peredaran Pangan Segar yang memiliki Rekomendasi dan sesuai persyaratan yang dianjurkan. Tahun 2022 ditargetkan sebesar 50 % dengan realisasi sebesar 23.53 % atau persentase capaian sebesar 47.06 %.

4. Pertanahan

Urusan Pertanahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pohuwato dikoordinasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Bidang Pertanahan yang mempunyai tugas pokok, yakni perencanaan, pengadaan, perizinan, inventarisasi, pemanfaatan, penyelesaian sengketa, pembinaan dan pengendalian di bidang pertanahan.

Capaian kinerja utama di urusan ini, yakni jumlah tanah pemerintah daerah yang sudah memiliki sertifikat. Tahun 2022, urusan ini menargetkan sejumlah 50 bidang dengan capaian 100 persen. Dari total luas lahan milik Pemerintah 7.502.048 m², yang tersertifikasi seluas 485.842 m² atau 6 persen dari luas lahan dan yang belum seluas 7.016.206 m².

5. Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Capaian kinerja urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilihat dari kinerja utama antaranya adalah:

- a. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk. Tahun 2022 ditargetkan sebesar 0.027 dengan realisasi sebesar 0.028 atau persentase capaian sebesar 103.70 %.
- b. Persentase pasangan yang bermasalah akta nikah yang diselesaikan dengan lembaga terkait lainnya, tahun 2022 ditargetkan sebesar 060 dengan realisasi sebesar 0.65% atau persentase capaian sebesar 108.33%
- c. Persentase lembaga yang telah bekerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan, ditargetkan tahun 2022 sebesar 0.80 dengan realisasi sebesar 0.85 % atau persentase capaian sebesar 108.33 %
- d. Persentase SKPD yang memanfaatkan data profil kependudukan. Tahun 2022 ditargetkan sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 97% atau persentase capaian sebesar 97 %

6. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

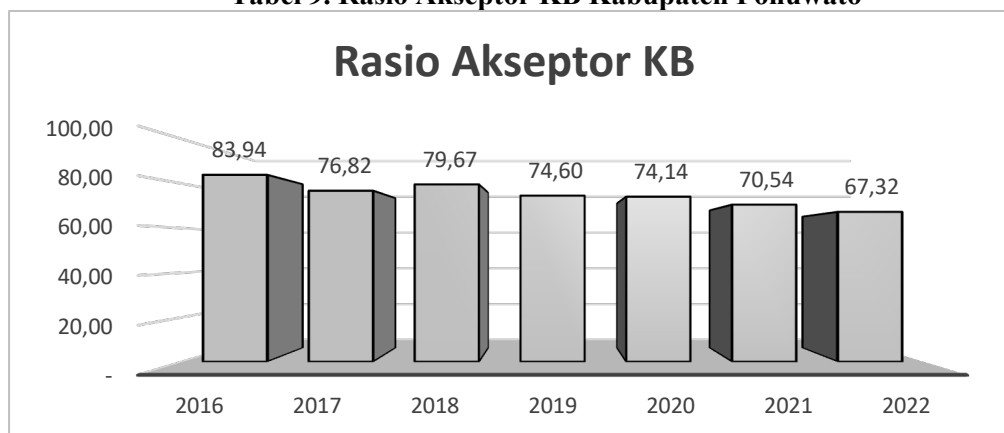
- a. Indikator Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa yang ditargetkan sebesar 75 % dengan realisasi sebesar 83 % atau persentase capaian sebesar 100 %
- b. Persentase Desa/ Kelurahan yang menjadi Juara Lomba Desa, ditargetkan sebesar 100 % dengan persentase capaian sebesar 100%

Dengan adanya percepatan pengembangan ekonomi perdesaan khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kegiatan ini bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat, dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengurus BUMDes serta memberikan Permodalan Usaha bagi BUMDes dan ada sekitar 34 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah bergerak di bidang pertanian/perkebunan dalam rangka membantu masyarakat dan kelompok masyarakat di Kabupaten Pohuwato dengan target petani berkembang dan sejahtera

7. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Untuk pengendalian penduduk dan keluarga Berencana, pemerintah daerah mengukur keberhasilannya melalui indikator Rasio Akseptor KB sebagaimana grafik berikut.

Tabel 9. Rasio Akseptor KB Kabupaten Pohuwato



Sumber: Lakip 2022 dan Laporan Tahunan DP3AP2KB Tahun 2022

Tabel 10. Perbandingan target kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dan 2022

Indikator kinerja	2021		%	2022		%
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Rasio akseptor KB	74	70.54	95.32	74	66.59	89.99
	3,582,614,800	2,760,959,400	77.07	3,418,545,000	2,778,504,874	81.28

Sumber : Lakip Tahun 2022 dan Laporan Tahunan DP3AP2KB Tahun 2022

Pada data tersebut diatas bisa diketahui untuk indikator Rasio Akseptor KB pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 74 % dengan realisasi sebesar 66 % atau persentase capaian sebesar 89.99 %.

8. Perhubungan

Capaian kinerja untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato yaitu:

1) Indeks Pengelolaan Lalu Lintas

- *Kepemilikan KIR.*

Pengelolaan lalu Lintas melalui Pengujian Kendaraan bermotor di Kabupaten Pohuwato dari 2975 unit kendaraan yang wajib uji kelayakan, terdapat 1721 unit kendaraan telah melakukan uji kelayakan atau mencapai 57,85% persen dari total kendaraan yang wajib uji.

- *Penyediaan Fasilitas Keselamatan*

Panjang Jalan yang tersedia saat ini mencapai 915,15 km terebra di 13 (tiga belas) Kecamatan dan 101 (seratus satu) desa 3 (tiga) kelurahan dengan status kewenangan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Dari total Panjang Jalan tersebut tersebar 278 set perlengkapan keselamatan Jalan terdiri atas Guadrial, Delineator, Rambu-Rambu Lalu Lintas, Traffic Light, Warning Light, LPJU, RPPD dan Marka Jalan. Tolok ukur atas pemasangan fasilitas keselamatan Jalan tersebut baru mencapai 30,38%.

- *Penyediaan Trayek*

Saat ini kebutuhan akan Trip atas trayek kendaraan roda empat yang melayani masyarakat sebanyak 5 (lima) trip dengan tingkat kebutuhan penambahan trip atas trayek sebanyak 2 (dua) trip. Sehingga saat ini baru dicapai jumlah trip trayek sebesar 40%.

2) Indeks Kinerja Infrastruktur lalu Lintas

Kabupaten Pohuwato melalui Dinas Perhubungan saat ini melaksanakan pengelolaan Terminal type sebanyak 4 (empat) unit tersebar di 4 (empat)

kecamatan, dengan indeks capaian sebesar 100% dimana kondisi semuanya berfungsi dengan baik melayani arus kendaraan dan penumpang.

3) Indeks retribusi perpajakan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato saat ini mengelola lokasi parkir yang tersebar di 1 (satu) tempat terdiri atas 3 (tiga) pintu masuk keluar lokasi wisata Pohon Cinta. Pengenaan retribusi tersebut meski masih terbatas pada tahap sosialisasi cenderung memberikan hasil yang positif dengan peningkatan capaian sebesar 43% dan mendapat tanggapan yang sangat baik dari masyarakat baik pengunjung maupun pengelola UMKM lokasi dimaksud.

4) Indeks Desa yang terakses dengan kendaraan roda empat

Kabupaten Pohuwato memiliki 104 Desa dengan 3 Kelurahan serta memiliki Panjang Jalan 915,15 km, baru sebanyak 65 Desa yang bisa diakses oleh kendaraan roda empat atau sebesar 62,50%

9. Komunikasi Dan Informatika

Capaian kinerja Komunikasi Dan Informatika dapat dilihat melalui indeks Pembangunan Kominfo dan Indeks ketersediaan data dan informasi.

- a. Indeks Pembangunan Kominfo yang ditargetkan tahun 2022 sebesar 98,5 atau persentase capaian sebesar 100%
- b. Indeks ketersediaan data dan informasi, tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 100%

10. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM, yang ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dicapai melalui:

1. Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB

Capaian indikator persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dengan kontribusi PDRB atas dasar konstan dan harga berlaku pada tahun 2022, untuk nilai konstan ditargetkan sebesar 4,70% dengan realisasi sebesar 6,86% dan harga berlaku ditargetkan sebesar 4,62% dengan capaian 4,87% (sumber data Pohuwato dalam angka 2022). Dengan demikian Indikator Kinerja Utama mencapai target dengan capaian kinerja masing – masing 145,95% dan 105,41%.

2. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Capaian indikator persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan kontribusi PDRB atas dasar konstan dan harga berlaku pada tahun 2022, untuk nilai konstan ditargetkan sebesar 6,76% dengan realisasi 9,14% dan harga berlaku 10,67% realisasi dengan capaian 11,66% (sumber data Pohuwato dalam angka 2022). Dengan demikian Indikator Kinerja Utama mencapai target dengan capaian kinerja masing – masing 135,20 % dan 109,27 %.

11. Penanaman Modal

Untuk kinerja Pemerintah Daerah urusan Penanaman Modal diukur dari Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Nilai Investasi. Untuk capaian Nilai Investasi target tahun 2022 berdasarkan RPJMD sebesar 100 % dan realisasinya sebesar Rp249.955.532,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, tahun 2022 mengalami kenaikan hal ini disebabkan banyaknya tenaga kesehatan yang mengurus izin praktek

- **Capaian Nilai investasi**

Capaian Indikator Nilai Investasi dikabupaten Pohuwato Tahun 2022 terus mengalami peningkatan dimana nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp 494.288.973.184,00 pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp 585.923.145.640,00. Peningkatan ini terjadi karena pemerintah berkomitmen untuk menarik minat investasi ke daerah dan terus menjaga stabilitas keamanan berinvestasi sehingga investasi di kabupaten Pohuwato setiap tahun mengalami peningkatan.

- **Persentase Nilai Realisasi investasi**

Nilai investasi PMA dan PMDN yang ada di Kabupaten Pohuwato dari tahun 2022 sejumlah 21 investor dengan total nilai investasi sebesar PMA 305.155 M & PMDN 5.731 T, di tahun 2021 menjadi 22 investor dengan total nilai investasi PMA 305.155 M & PMDN 6.196 T Kenaikan tersebut terjadi karena masuknya Perusahaan baru di kabupaten Pohuwato.

12. Kepemudaan Dan Olahraga

Untuk capaian kinerja urusan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yaitu:

1) Indeks Kepemudaan

Sasaran Indeks Kepemudaan tahun 2022 adalah 100 %. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 naik 15 %, namun dari segi realisasi penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan meningkat dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 60 orang dan di tahun 2022 meningkat sebanyak 100 orang.

2) Indek Pengelolaan Olahraga

Sasaran Indeks Pengelolaan Olahraga tahun 2022 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 naik 1%, dari segi realisasi Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / kota. Meningkat di bandingkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 50 orang dan di tahun 2022 meningkat sebanyak 100 orang.

13. Statistik

Dilihat dari pencapaian kinerja untuk urusan ini, maka secara umum semua rencana kerja yang ditetapkan dapat dicapai dan berkategori baik, dari segi serapan anggaran dan realisasi program.

Urusan Statistik merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Pohuwato.

Pelaksanaan urusan statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebatas pada pengumpulan data sektoral yang kemudian dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pohuwato.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan yakni berupa rapat koordinasi dan sinkronisasi, yakni: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Kabupaten dengan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

14. Persandian

Di tahun 2022 urusan Persandian ditangani oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Pohuwato bekerja sama dengan Bagian Sekretariat Daerah. Walaupun dalam pelaksanaannya kegiatan persandian melekat pada program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Capaian Informasi yang disampaikan melalui persandian yang tercapai 100%.

15. Kebudayaan

Untuk kinerja urusan Kebudayaan, ditangani oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dapat dilihat pada realisasi indeks kebudayaan yang dicapai antara Tahun 2021 dan 2022. Indikator sasaran Indeks Kebudayaan Daerah pada tahun 2022 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 naik 34%, dari segi realisasi Pelestarian Kesenian Tradisional Masyarakat Meningkat di bandingkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 76 orang dan di tahun 2022 meningkat sebanyak 100 orang.

16. Perpustakaan Dan Kearsipan

Capaian kinerja untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dapat diuraikan sebagaimana di bawah ini:

- a. Persentase Pengunjung Perpustakaan daerah pada tahun 2022 target 25.5 % dengan realisasi 21 % atau persentase capaian sebesar 82.6%
- b. Persentase Cakupan Instansi yang memiliki pengelolaan arsip yang baik dengan target 100% realisasi 95% atau persentase capaian sebesar 95%.

2.3.3. Urusan Pilihan

1. Kelautan Perikanan

Capaian kinerja Dinas Perikanan dapat diuraikan seperti di bawah ini yakni:

1. Persentase Produksi perikanan Kelompok Nelayan

Jumlah produksi Kelompok Nelayan sebesar 6.927 Ton dari total produksi daerah Sebesar 27.551 Ton atau sekitar 25% kontribusi produksi dari kelompok. Dimana target yang di tetapkan sebagai kontribusi produksi kelompok dari usaha perikanan tangkap sebesar 25%.

2. Persentase kelompok pengelola hasil perikanan yang telah memenuhi standar persyaratan

Meningkatnya produk Olahan dan pemasaran hasil perikanan dengan Indikator Kinerja Persentase Kelompok Pengelola Hasil Perikanan yang telah memenuhi standar persyaratan pada tahun 2022 hanya mencapai 10 % dari target 24 %, sehingga capaian kinerja tahun 2022 untuk indikator tersebut yakni 41,67% dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 76,47%.

2. Pariwisata

Capaian kinerja Urusan Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dapat dilihat pada kunjungan wisata nusantara dan mancanegara tahun 2022 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kunjungan Wisata Nusantara ditargetkan pada Tahun 2022 sejumlah 30.000 kunjungan dengan realisasi 44.559 kunjungan atau sebesar 148.53 %.
- b. Kunjungan Wisatawan Mancanegara ditargetkan pada Tahun 2022 sejumlah 200 kunjungan dengan realisasi tanpa kunjungan atau tidak tercapai.

3. Pertanian

Untuk capaian kinerja sektor Pertanian dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yakni:

- a. Untuk capaian Produksi Padi ditargetkan sebesar 36.844 Ton, dengan realisasi 27.038,16 atau 73,39%. Capaian Produksi Padi pada Tahun 2022 menurun dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 37.249 Ton.
- b. Untuk capaian Produksi Jagung ditargetkan sebesar 413.633 Ton dengan realisasi 346.872 atau 83,86%. Capaian Produksi Jagung pada Tahun 2022 menurun jika dibandingkan pada Tahun 2021 sebesar 436.873 Ton.
- c. Untuk Produksi Populasi Ternak Sapi ditargetkan sebesar 35.097 ekor, dengan realisasi 34.735 ekor atau 99,87%. Capaian Produksi Populasi Ternak meningkat dibandingkan pada Tahun 2021 sebesar 33.380 ekor.

4. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan, Kelautan serta Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Olehnya Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan baik usaha pertambangan maupun pertambangan skala kecil.

Namun demikian Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan pertambangan melalui usulan penetapan Wilayah Pertambangan dimana didalamnya terdapat wilayah usaha pertambangan (WUP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR).

Sebelum berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah telah berupaya melaksanakan perencanaan terhadap penyediaan wilayah pertambangan melalui penelitian data potensi lokasi yang dimungkinkan adanya cadangan mineral. Penyediaan lokasi berdasarkan persyaratan sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2012 tentang wilayah Pertambangan. Pelaksanaan penelitian tersebut diantaranya

- a. Penyelidikan I berlokasi di Kecamatan Buntulia seluas 49,77 Ha.
- b. Penyelidikan II berlokasi di Kecamatan Buntulia seluas 48,06 Ha
- c. Penyelidikan III berlokasi di Kecamatan Buntulia seluas 299 Ha.
- d. Penyelidikan IV berlokasi di Kecamatan Patilanggia seluas 14,76 Ha dan Kecamatan Popayato Barat seluas 24,20 Ha.

Selanjutnya dalam pengusulan Wilayah Pertambangan dimana telah dilaksanakan langkah-langkah konkrit diantaranya pembentukan Tim Kerja Percepatan Pengusulan Wilayah Pertambangan melalui Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari Asisten Ekonomi Pembangunan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Pohuwato, Tokoh Masyarakat dan Tim Penasihat Hukum Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

5. Perdagangan dan Perindustrian

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan dan Perindustrian, yang ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yakni:

- Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dengan kontribusi PDRB atas dasar konstan dan harga berlaku pada tahun 2022, untuk nilai konstan ditargetkan sebesar 4,70 % dengan realisasi sebesar 6,86 % dan harga berlaku ditargetkan sebesar 4,62 % dengan capaian 4,87 % (sumber data Pohuwato dalam angka 2022). Dengan demikian Indikator Kinerja Utama mencapai target dengan capaian kinerja masing – masing 145,95 % dan 105,41%.

- **Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB**

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan kontribusi PDRB atas dasar konstan dan harga berlaku pada tahun 2022, untuk nilai konstan ditargetkan sebesar 6,76 % dengan realisasi 9,14 dan harga berlaku 10,67% realisasi dengan capaian 11,66 % (sumber data Pohuwato dalam angka 2022). Dengan demikian Indikator Kinerja Utama mencapai target dengan capaian kinerja masing – masing 135,20 % dan 109,27 %.

6. Transmigrasi

Capaian untuk urusan Transmigrasi adalah ketersediaan Infrastruktur ekonomi dan sosial menuju transmigrasi mandiri.

Di tahun 2022 Kabupaten Pohuwato tidak mendapatkan penempatan namun saat ini UPT Sandalan masih dalam status “Binaan”. Meningkatkan ekonomi masyarakat transmigran yang terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing. Dengan terdapatnya penempatan sejumlah 165 KK dengan target rensta 200 KK di UPT Sandalan yang menjadi salah satu fokus utama pengembangan wilayah transmigrasi di Kabupaten Pohuwato serta dengan adanya program unggulan daerah Kabupaten Pohuwato dapat diintegrasikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Transmigran. Untuk memenuhinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato mengupayakan tekad dan kemauan kuat dari masyarakat tersebut. Sesuai IKU Bupati Indeks Pembangunan Transmigrasi yakni:

- Ketersediaan air bersih capaian ketersediaan air bersih sekitar 85 % yaitu Jumlah KK yang memperoleh akses air bersih 140 kk dari seluruh jumlah warga berjumlah 165 KK.
- Persentase Akses jalan dalam kondisi mantap Kondisi jalan menuju UPT sandalan hingga akhir tahun 2022 masih sekitar 75 %. Panjang Jalan menuju sandalan sekitar 4,2 km dan kondisi jalan yang bisa dilalui oleh warga dengan nyaman sekitar 1 km sehingga persentase jalan menuju sandalan yang nyaman dilalui warga baru sekitar 25 %
- Persentase ketersediaan tenaga Guru dan Sarana dan Prasarana pendidikan bahwa Jumlah guru kelas yang ada saat ini berjumlah 4 orang sedangkan kebutuhan guru sejumlah 6 orang sesuai dengan jumlah rombongan belajar. Jumlah ruang kelas yang tersedia ada 3 ruang kelas, sedangkan yang

dibutuhkan 6 ruang kelas maka persentase Jumlah Guru yang ada 67 % sedangkan kebutuhan ruang belajar 50 % jadi capaiannya sekitar 58,5 %

- Persentase ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis dan obat-obatan. Belum tersedia jika masyarakat membutuhkan Tim medis terdiri dari 1 orang dokter dan 2 orang paramedis dari Puskesmas pancakarsa 1 yang memberikan pelayanan secara berkala ke Lokasi UPT Sandalan.

2.3.4. Pemerintahan Umum

1. Sekretariat Daerah

Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya adalah jumlah serapan anggaran dan pencapaian target kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan yaitu:

a. Nilai SAKIP Kabupaten

Sesuai hasil Evaluasi Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendapat nilai B.

b. Nilai LPPD Kabupaten

LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) merupakan kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan. Dimana setiap tahunnya Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan wajib melaporkan jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Untuk Kabupaten Pohuwato nilai LPPD tahun 2022 mendapat skor 3.528 dengan status kinerja Sangat Tinggi.

c. Persentase Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan.

Pada tahun 2022 Bagian Hukum Sekretariat Daerah menargetkan 650 produk hukum yang dihasilkan dengan realisasi sejumlah 726 dokumen produk hukum atau 111,67% dari target yang ditetapkan. Dari angka tersebut terlihat adanya peningkatan jumlah produk hukum yang dihasilkan.

d. Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan

Pada tahun 2022 Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato menargetkan lelang sebanyak 83 paket pekerjaan dengan realisasi 42 paket pekerjaan atau dengan capaian kinerja sebesar 50,60%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terdapat penurunan 36 paket pekerjaan.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Capaian kinerja untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat dari kesiapsiagaan untuk menanggulangi Bencana serta penyelamatan evakuasi bencana.

Persentase jumlah warga/penduduk memperoleh layanan informasi bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta layanan penyelamatan evakuasi bencana dengan target 100% realisasi 98,63%. hal ini menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pohuwato mampu dalam penanganan bencana melalui pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

3 Sekretariat DPRD

Capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2022 di ukur melalui 2 indikator kinerja utama yakni:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD dengan capaian 102,13
- b. Nilai evaluasi SAKIP dengan capaian kinerja 103,88
- c. Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dengan capain kinerja 100

4 Keuangan Daerah

Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Tahun 2022 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut :

- a. Indikator Persentase SKPD yang menyusun Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat waktu sebagaimana target untuk tahun 2022 sebesar capaian realisasi atas target sebesar 100%.
- b. Indikator Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana target untuk tahun 2022 sebesar Rp70.965.018.697,00, terealisasi Rp65.040.941.408,43 atau sebesar 91,65%.

5 Kepegawaian Dan Diklat

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pohuwato memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis dalam pelaksanaan tugasnya, sasaran strategis tersebut didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja Utama seperti berikut:

- a. Persentase ASN berpendidikan S1, S2, Dokter Spesialis, S3 dibanding total ASN. Tahun 2022 Target 65,07%, realisasi 69,18% atau 105,62%.

- b. Persentase ASN yang disiplin dan berkinerja baik. Tahun 2022 ditargetkan 85% realisasi 92,08% atau 108,33%.

6 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Cakupan Tahapan Perencanaan yang tepat waktu. Ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 100% dengan capaian 100%.
- b. Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah pada Tahun 2022 adalah 79,16% mengalami kenaikan sebesar 52,9% dibandingkan pada Tahun 2021 sebesar 24%.

7 Inspektorat Daerah

Pencapaian sasaran ini diukur melalui Nilai Kapabilitas APIP pada Pemerintahan Kabupaten Pohuwato Mencapai Nilai 3,00 dari hasil assessment Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Dengan Demikian, Tingkat Penyelenggaraan atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Pemerintahan kabupaten Pohuwato Tahun 2022 telah mencapai Level 3 (Terdefinisi), hasil akhir ekspos kepala DEPUTI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Menyatakan Bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pohuwato telah Berada pada level 3 (Terdefinisi) dengan Skor 3,00

- a. Hasil QA Menunjukkan Bahwa Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintahan Kabupaten Pohuwato Mencapai 2,911 atau turun sebesar 0,1 dari hasil assessment Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Dengan Demikian, Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintahan kabupaten Pohuwato dalam Tahun 2022 telah mencapai Level 2 (Berkembang), hasil akhir ekspos kepala DEPUTI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Menyatakan Bahwa Maturitas SPIP Inspektorat Kabupaten Pohuwato telah Berada pada level 2 (Berkembang)
- b. Persentase Penyelesaian tindak lanjut TLHP aparat pengawas Eksternal. Untuk realisasi capaian penyelesaian temuan TLHP oleh Aparat pengawas eksternal pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 956 Rekomendasi yang ditindaklanjuti 812 Rekomendasi atau 84,94 %, capaian penyelesaian temuan pada tahun 2021 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti 806 dari 887 rekomendasi atau 90,86 %,

- c. Persentase Penyelesaian tindak lanjut TLHP aparat pengawas Internal. Untuk realisasi capaian penyelesaian temuan TLHP oleh Aparat pengawas Internal pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 3104 Rekomendasi yang ditindaklanjuti 2490 Rekomendasi atau 80,21 %, capaian penyelesaian temuan pada tahun 2022 ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti 470 dari 560 rekomendasi atau 83,93 %

8 Kecamatan

Dengan luas wilayah seluas 4.244,31 km² atau 36,77% dari luas Provinsi Gorontalo, Pohuwato memiliki wilayah administrasi pemerintah mencakup 13 kecamatan yaitu Paguat, Dengilo, Marisa, Patilanggio, Buntulia, Duhiadaa, Randangan, Wanggarasi, Lemito, Popayato Timur, Popayato Barat, Popayato dan Kecamatan Taluditi dengan wilayah desa mencakup 101 desa, dan 3 kelurahan. Untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, kantor camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan.
- 2) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa.
- 3) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
- 4) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- 5) Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, keagamaan dan kependudukan.
- 6) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintah desa.
- 7) Pembinaan kelurahan.
- 8) Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- 9) Pelaksanaan koordinasi operasional unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota.
- 10) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
- 11) Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan partisipasi masyarakat.

Secara umum Capaian Indikator Kinerja kecamatan dapat dikategorikan baik dengan angka capaian realisasi diatas 95% dengan indikator yakni:

- Indeks Kepuasan Masyarakat

- Penurunan Kasus Kriminal

Disamping indikator kinerja diatas, juga ditampilkan indikator kinerja program / kegiatan lingkup Kecamatan.

- Persentase Administrasi, Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu dan Akuntabel
- Persentase Desa /kelurahan yang Menindak Lanjuti Rekomendasi dan Hasil Pembinaan dari Pemerintah Kecamatan
- Persentase desa yang memasukan dan menginput hasil musrenbang pada aplikasi Perencanaan
- persentase jumlah Kasus Kriminal Per Jumlah Desa /Kelurahan
- Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu

Berdasarkan uraian capaian kinerja utama dari masing – masing SKPD diatas, maka capaian Indikator Kinerja Utama Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022, rata – rata mencapai target bahkan ada beberapa indikator yang melampaui target.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

APBD Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 berdasarkan urusan, program, dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato dilaksanakan oleh 42 SKPD. SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) selain sebagai SKPD juga sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga terdapat 43 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pohuwato.

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang mengelola pendapatan adalah sejumlah 12 dari 43 SKPD. Pendapatan - LRA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pohuwato terealisasi dengan nilai total sebesar Rp902.175.682.605,43 atau 98,68% dari anggaran sebesar Rp914.253.556.941,00. Selain itu, Kabupaten Pohuwato menganggarkan Belanja Daerah dengan nilai total sebesar Rp897.851.056.985,00 dan terealisasi sebesar Rp852.373.208.844,00 atau 94,93%.

3.2. Program Pembangunan Prioritas Daerah

Adapun Program Pembangunan Daerah yang menjadi prioritas pada tahun 2022 disajikan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan Kabupaten Pohuwato, sebagai berikut:

3.2.1. Terciptanya Masyarakat Sehat, Bebas *Stunting* Dan Terjamin Dari Bahaya Penyakit Menular

1. Kesehatan

Capaian kinerja pemerintah daerah di bidang kesehatan diukur melalui indeks kesehatan yang merupakan indikator kinerja utama Dinas Kesehatan. Adapun capaian indeks kesehatan tahun 2022, dimana target RPJMD sebesar 65,17% dengan realisasi 76,38% dengan capaian kinerja sebesar 117% dengan predikat sangat baik untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
Indeks Kesehatan	65,17%	76,34 %	117,13%	Sangat baik

Pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022 dari segi angka memang sudah berhasil namun pada Indikator Indeks Kesehatan bila dirinci dari 5 (lima) indikator yang menentukan keberhasilannya ternyata ada 3 (tiga) indikator yang sangat rendah capaiannya yaitu Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, serta Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12. Rincian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	(125/100.000 KH)	324/100.000 KH	38,58%
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	(1,87/1.000 KH)	2,95/1.000 KH	63,38%
3	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%
4	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	(5,29/1.000 KH)	6,63/1.000 KH	79,78%
5	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%
Jumlah				381,74%
Rata-Rata Capaian Kinerja				76,34%

Berdasarkan tabel diatas, nampak bahwa pada tahun 2022 untuk sasaran Indikator Indeks Kesehatan berjumlah 381,74% dengan rata-rata capaiannya sebesar 76,34%.

- **Hambatan Kinerja yang belum mencapai target**

Ada beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan dalam mencapai target kinerja Angka Kematian Ibu dan Bayi, antara lain adalah:

- (1) Faktor Ibu
 - a) Umur ibu yg >20 thn
 - b) Pekerjaan ibu
 - c) Status gizi ibu yg buruk/rendah
 - d) Anemia

- e) Kunjungan ANC yg tdk dilakukan secara teratur dengan ANC 10 T
 - f) Jenis persalinan karena komplikasi kehamilan
 - g) Jarak kehamilan dekat
 - h) Paritas lebih tinggi (>4)
 - i) Umur kehamilan yg lahir sebelum 37 minggu
- (2) Faktor risiko bayi
- a) Ikterus (akumulasi bilirubin dalam darah)
 - b) Kelainan *congenital* (cacat bawaan)
 - c) Sepsis
 - d) BBLR
 - e) Asfiksia

3.2.2. Mewujudkan daya saing Ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, industri, dan investasi serta infrastruktur penunjangnya.

1. Pertanian

Untuk kinerja sektor pertanian diukur atas Indeks Pertanian dan Indeks Peternakan dapat dilihat dari beberapa Indikator Kinerja yakni:

- Indeks Pertanian capaiannya sebesar **79,28 %**
- Indeks Peternakan capaiannya sebesar **84,10 %**

Tabel 13. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Pertanian	79,28			
Persentase produksi padi	ton	36.844	27.038,16	73,39
Persentase produksi jagung	ton	413.633	346.872	83,86
Persentase produksi cabe rawit	ton	3.487	4.740	135,92
Persentase produksi kakao	ton	3.391	1.061	31,28
Persentase produksi kelapa	ton	30.036	21.610	71,95
Indeks Peternakan				84,10
Persentase populasi ternak	ekor	35.097	34.735	99,87
Persentase wilayah yang terkontrol dari penyakit hewan		13	9	69,23

- **Hambatan Kinerja yang belum mencapai target**

Ada beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Pertanian dalam mencapai target kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

➤ Menurunnya produksi padi disebabkan karena berkurangnya luas tanam padi Tahun 2022 seluas 1.390,67 Ha yang berdampak pada penurunan produksi padi. Selain itu Menurunnya produksi padi juga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Terjadinya penurunan luas fungsi lahan sawah akibat adanya alih fungsi komoditi dari padi ke tanaman palawija dan sayur-sayuran ataupun dibiarkan bero terutama pada daerah sawah tadah hujan dan akibat rusaknya pintu klep dimana pada tahun sebelumnya luas fungsi sawah 3.901 Ha menjadi 3.181,25 Ha;
2. Adanya bantuan benih padi ladang pada tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat menambah luas tanam dan produksi padi;
3. Minimnya alokasi anggaran bantuan benih padi unggul dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya;
4. Terjadinya peningkatan serangan hama dan penyakit akibat perilaku petani yang tidak melakukan tanam serentak yang mengakibatkan terjadinya penurunan produktivitas padi.
5. Terjadinya banjir yang juga berdampak pada kerusakan tanaman padi meskipun tidak mengakibatkan puso, namun mengalami penurunan produksi.

➤ Berkurangnya luas tanam jagung pada tahun 2022 berdampak pada menurunnya produksi jagung. Jika dibandingkan Luas tanam jagung tahun 2022 sebesar 79.129 Ha sedangkan luas tanam jagung tahun 2021 seluas 98.130 Ha, terjadi penurunan sebesar 19.001 Ha (-19,36%). Menurunnya produksi jagung disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. petani sulit mendapatkan benih jagung hibrida pada penjual seperti pada tahun-tahun sebelumnya akibat kelangkaan sehingga banyak petani yang tertunda penanamannya;
2. turunnya harga jual jagung terutama ditingkat lapangan;
3. harga sarana produksi seperti benih, pupuk dan pestisida yang semakin mahal mengakibatkan daya beli petani menurun.

4. berkurangnya alokasi bantuan benih jagung yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian target luas tanam dan luas panen.
- Penurunan Produksi Kakao dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: penebangan pohon kakao secara besar-besaran oleh petani karena umur tanaman sudah tua dan kurang produktif lagi sejak tahun 2020, pemeliharaan kakao yang kurang maksimal, hama dan penyakit kakao yang sering menyerang tanaman dan buah kakao serta harga kakao yang relatif menurun pada tiga tahun terakhir membuat petani banyak beralih ke komoditi tanaman pangan.
 - Penurunan Produksi Kelapa dipengaruhi oleh berkurangnya luas panen sebanyak 120 pohon (-0,55%), karena terjadi penebangan pohon kelapa yang sudah kurang produktif/tua sehingga kayu dari pohon kelapa tersebut dapat dijadikan sebagai material untuk membuat rumah. Selain itu juga disebabkan oleh produktivitas yang masih rendah.
 - Persentase Populasi Ternak Sapi pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 35.097 Ekor dan terealisasi 34.375 Ekor (97,94%). Meskipun belum mencapai target yang telah ditentukan namun terjadi peningkatan populasi dari tahun 2021 yakni sebanyak 995 ekor yaitu sebanyak 33.380 ekor dan tahun 2022 sebanyak 34.735 ekor

Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu daerah di Provinsi Gorontalo dengan Jumlah Kasus gigitan anjing gila cukup tinggi. Pada Tahun 2021 terjadi 8 (delapan) kasus yang terjadi di 3 kecamatan dan pada tahun 2022 terjadi penurunan 1 (satu) kasus namun menambah wilayah yang terkena yaitu di 4 kecamatan. Angka ini merupakan rekapitulasi dari laporan hasil penanganan kasus gigitan anjing gila yang dilakukan oleh petugas Kesehatan hewan. Faktor utama pencapaian ini ditentukan oleh kekebalan efektif yang dihasilkan dari kegiatan vaksinasi. Vaksin yang digunakan pada tahun 2021 dan 2022 adalah Rabisin, yang menurut keterangan dari produsen (brosur) mampu menimbulkan kekebalan selama 3 tahun. Disamping itu terdapat kemungkinan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan gigitan HPR dan memeriksakan spesimen otak setiap HPR yang menggigit, sehingga tidak terdata.

2. Perikanan

Capaian kinerja Dinas Perikanan diukur melalui indeks perikanan dengan realisasi yang mencapai target, di mana ditargetkan 70% dan realisasi 74,62%,

untuk indeks pengelolaan hasil perikanan ditargetkan 50% capaiannya 41,67%, belum mencapai target RPJMD dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi	
Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap	Persentase produksi perikanan kelompok nelayan	%	25	25	100
Jumlah Anggaran			3.017.314.000	2.702.264.060	100

a. Persentase Produksi Perikanan Budi Daya

Jumlah Produksi dibagi hasil produksi dikali 100% di mana dari target 23.859 ton hanya tercapai 11.748 ton atau sekitar 24,23%, sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian Kinerja Persentase Produksi Perikanan Budi Daya

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi	
Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha perikanan budi daya	Persentase produksi perikanan budi daya	%	100	49,24	49,24
Jumlah Anggaran			2.967.982.008	2.534.549.966	49,24

b. Persentase kelompok pengelolaan hasil perikanan yang telah memenuhi standar persyaratan

Berdasarkan tabel di bawah ini diketahui bahwa sasaran meningkatnya produk Olahan dan pemasaran hasil perikanan dengan Indikator Kinerja Persentase Kelompok Pengelola Hasil Perikanan yang telah memenuhi standar persyaratan pada tahun 2022 hanya mencapai 10 % dari target 24 %, sehingga capaian kinerja tahun 2022 untuk indikator tersebut yakni 41,67% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 76,47%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Persentase Kelompok Pengelola Hasil Perikanan yang Telah Memenuhi Standar Persyaratan

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi	
Meningkatnya produk olahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase kelompok pengelola hasil perikanan yang telah memenuhi standar persyaratan	%	24%	10%	41,67%
Jumlah Anggaran			1.115.567.185	1.109.139.594	99%

- **Hambatan Kinerja yang belum mencapai target**

Belum tercapainya target Pengolahan hasil perikanan antara lain disebabkan oleh:

1. Rendahnya Kesadaran Pelaku Usaha unit pengolahan ikan (UPI) memiliki perizinan usaha perikanan berupa Tanda daftar unit usaha perikanan bidang pengolahan hasil perikanan/ NIB terdaftar di OSS (*online single submission system*) oleh BKPM/ PTSP
2. UPI yang ada belum memenuhi syarat untuk mengajukan sertifikat kelayakan pengolahan Pengolahan (SKP) antara lain disebabkan rumah produksi yang belum layak sesuai ketentuan permen KP No 5 tahun 2021 dan belum memiliki sertifikat pengolah ikan bagi pelaku usaha tsb.
3. Pelaku usaha UPI belum memiliki sertifikat pelatihan pengolahan ikan (SPI) Sertifikat pengolah ikan
4. Sarana prasarana pelaku usaha pengolahan ikan belum memenuhi standar baik rumah produksi dan peralatan pengolahan yang dimiliki karena kurangnya ketersediaan anggaran dan permodalan pelaku usaha
5. Standar kelayakan pengolahan (SKP) sesuai peraturan Permen KP no.5 tahun 2021 tentang usaha pengolahan ikan
6. Ketersediaan anggaran APBD kabupaten Pohuwato untuk kegiatan pelatihan dan pengembangan usaha pengolahan ikan masih sangat terbatas.

3. Pariwisata

Capaian kinerja Urusan Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yakni persentase kunjungan wisata yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 17. Realisasi Indikator Persentase Kunjungan Wisata

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
		Target	Realisasi	
Persentase Kunjungan Wisata	Persen	30.000	44.559	148,53
Wisata Nusantara Wisata Mancanegara		200	0	0,00
Rata-Rata Capaian Kinerja				148,53
Jumlah Anggaran		283.283.525.894	283.283.424.819	99,96

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa pada indikator sasaran Persentase Kunjungan Wisata Nusantara dan Mancanegara tahun 2022 adalah sebesar 148,53%.

- **Hambatan Kinerja yang belum mencapai target**

Belum tercapainya target Wisatawan Mancanegara antara lain disebabkan oleh:

1. Destinasi wisata Kabupaten Pohuwato belum menjadi sasaran utama wisatawan mancanegara melainkan masih sebagai daerah transit saja
2. Standarisasi Pengelolaan Destinasi wisata belum terpenuhi secara optimal
3. Aksesibilitas pariwisata ke dan dari Pohuwato belum memadai secara internasional
4. Atraksi wisata belum secara konsisten, berkala dan berkelanjutan dilaksanakan didestinasai wisata sebagai daya Tarik
5. Amenitas pariwisata di Kabupaten Pohuwato belum terstandarisasi secara internasional
6. Dampak pandemic *Covid-19* masih mempengaruhi rencana kunjungan wisata mancanegara di seluruh dunia
7. Konflik politik internasional (perang Rusia – Ukraina) mempengaruhi kunjungan wisata secara global termasuk Indonesia

4. Perdagangan dan Perindustrian

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan dan Perindustrian, yang ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat dicapai melalui beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:

- **Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB**

Capaian indikator persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kontribusi PDRB atas dasar

konstan dan harga berlaku pada tahun 2022, untuk nilai konstan ditargetkan sebesar 4,70% dengan realisasi sebesar 6,86% dan harga berlaku ditargetkan sebesar 4,62% dengan capaian 4,87% (*sumber data: Kabupaten Pohuwato dalam angka 2022*). Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama mencapai target dengan capaian kinerja masing – masing adalah sebesar 145,95% dan 105,41%.

- Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Capaian indikator persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan kontribusi PDRB atas dasar konstan dan harga berlaku pada tahun 2022, untuk nilai konstan ditargetkan sebesar 6,76% dengan realisasi 9,14% dan harga berlaku 10,67% realisasi dengan capaian 11,66% (*sumber data: Kabupaten Pohuwato dalam angka 2022*). Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama mencapai target dengan capaian kinerja masing – masing 135,20 % dan 109,27 %.

5. Investasi

Capaian Indikator Nilai Investasi dikabupaten Pohuwato Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 18. Capaian Nilai Investasi Tahun 2021 s.d. 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021 (dalam jutaan Rupiah)		Capaian (%)	Tahun 2022 (dalam jutaan Rupiah)		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Realisasi Investasi	Rp	209.673	494.288	235,74	293.542	585.923	199,60

Capaian nilai investasi juga terus mengalami peningkatan di mana nilai investasi tahun 2021 adalah sebesar Rp.494.288.973.184,00 mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp.585.923.145.640,00. Peningkatan ini dikarenakan pemerintah berkomitmen untuk menarik minat investasi ke daerah dan terus menjaga stabilitas keamanan berinvestasi sehingga investasi di Kabupaten Pohuwato setiap tahun mengalami peningkatan

3.2.3. Menghadirkan Pola Pendidikan yang murah, terjangkau, berkualitas dan berkarakter

1. Pendidikan

Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Pendidikan, dimana capaian indeks pendidikan tahun 2022 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 92,89% dengan predikat baik dan dinyatakan berhasil. Adapun pencapaian indeks pendidikan sebagai berikut:

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kriteria Penilaian
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	Meningkatnya penduduk usia 7 s.d. 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,85	96,09	94,20	Sangat Baik
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	70,83	70,68	76,82	Baik
2	Meningkatnya Jumlah penduduk usia 2 s.d. 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	APS Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	62,44	62,79	100,56	Sangat Baik
3	Meningkatnya Jumlah penduduk usia 7 s.d. 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Angka melek huruf penduduk usia 7 - 18 tahun, perempuan dan laki-laki	100	100	100	Sangat Baik

Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BPS 2022

Dari 4 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato pada tahun 2022, Pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato dengan rincian sebanyak 3 Indikator Kinerja (92,89%) capaian kinerjanya sangat Baik.

Untuk indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lainnya adalah jumlah persentase kualitas dan rasio guru, dimana indikator ini dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor, yakni: (i) usia pensiun pegawai; (ii) perpindahan pegawai; dan (iii) kematian pegawai dan (iv) Kuota sertifikasi Guru dari kemdikbud. Adapun capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Daftar Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Terpenuhinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diseluruh wilayah	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Orang	1.863	1.825	97,96

Dalam pelaksanaan kinerja, beberapa masalah dan penyelesaian di antaranya, yakni:

- Belum meratanya akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Pohuwato
- Fasilitas pendidikan (Sarana dan prasarana) yang belum memadai (Jumlah, daya tampung kondisi)
- Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah (Rata-rata lama sekolah masih 6 – 7 tahun)
- Jumlah, kualitas dan kualifikasi guru serta sistem penempatan belum memadai (merata)

Dengan langkah penyelesaian yang dapat ditempuh yakni:

- Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan untuk peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan seperti pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, pembangunan Sekolah satu atap atau Sekolah terpadu untuk mengatasi kendala geografis yang menghambat masyarakat terhadap pendidikan.
- Dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana telah dilakukan berbagai langkah yakni pengajuan usulan pembangunan dan pengadaan sarana lainnya kepusat dan daerah
- Mendorong masyarakat melalui program pendidikan berupa pengadaan perlengkapan dan bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu.
- Penempatan dan pemetaan guru sudah berdsarkan analisis kebutuhan guru di masing – masing Sekolah.

2. Kepemudaan dan Olahraga

Untuk kinerja urusan pemuda dan olahraga, ditangani oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dapat diukur melalui indikator, yaitu:

1. Indeks Kepemudaan

Capaian indikator untuk Indeks kepemudaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 21. Capaian Indikator Indeks Kepemudaan Tahun 2021 s.d. 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi
Indeks Kepemudaan	%	70	60	85,71	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja				85,71		
Jumlah Anggaran		4.339.854.039	4.221.451.963	97,72	3.298.800.712	3.294.147.451

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa pada indikator sasaran Indeks Kepemudaan tahun 2022 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 naik 15%, namun dari segi realisasi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan meningkat dibandingkan pada tahun 2021, yaitu sejumlah 60 orang dan di tahun 2022 meningkat sejumlah 100 orang.

2. Indek Pengelolaan Olahraga

Realisasi Indek Pengelolaan Olah Raga Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Capaian Indeks Pengelolaan Olah Raga

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Pengelolaan Olahraga	Persen Siswa	55	50	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					
Jumlah Anggaran		856.529.325	855.067.044	1.081.628.600	1.080.722.750

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa pada indikator sasaran Indeks Pengelolaan Olahraga tahun 2022 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 naik 1%, dari segi realisasi Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / kota. Meningkat dibandingkan pada tahun

2021 yaitu sebanyak 50 orang dan di tahun 2022 meningkat sebanyak 100 orang.

3. Perpustakaan Dan Kearsipan

Capaian kinerja untuk kedua urusan ini yakni Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dapat dilihat pada indikator sebagaimana dibawah ini:

1. Persentase Pengunjung Perpustakaan

Tabel 23. Persentase Pengunjung Perpustakaan

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Persentase pengunjung perpustakaan	%	21.009	15.276	72,72	25.482	21.059	82,65%
Rata-rata Kinerja				72,72			82,65%
JUMLAH ANGGARAN		217.190.000	215.614.300	100	368.218.647	367.578.277	100%

Berdasarkan tabel diatas, nampak bahwa untuk sasaran pertama indikator ini rata-rata 2021 sebesar 72,72% Dengan dukungan anggaran sebesar Rp.145.018.067,00 terealisasi Rp.143.500.153,00 atau 100%. Capaian ini sama dengan capaian rata-rata tahun 2022 sebesar 2,65 %. Dengan persentase dengan input anggaran sebesar Rp.368.218.647,00 realisasi sebesar Rp.367.578.277 atau 100%.

Adapun tabel di bawah ini yang menjelaskan tentang literasi di setiap sekolah di 13 kecamatan yang mendukung jumlah pengunjung perpustakaan. dalam 1 Tahun ada 183 sekolah yang dikunjungi terdiri dari SD dan SMP. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan yang tersebar di beberapa sekolah sekabupaten pohuwato.

2. Persentase Cakupan Instansi yang memiliki Pengelolaan Arsip dengan Baik

Tabel 24. Cakupan Instansi yang memiliki pengelolaan arsip baik

INDIKATOR KINERJA	SA TU AN	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Persentase Cakupan Instansi yang Memiliki pengelolaan arsip yang baik	%	100	90	90,00	100	95	95%
Jumlah Anggaran		27.436.000	27.424.200	99,96 %	42.093.978	41.784.096	99,27%

Berdasarkan tabel diatas, nampak bahwa untuk sasaran kedua indikator ini rata-rata 2021 sebesar 100%. Dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 27.436.000.00 terealisasi Rp. 27.424.200,00 atau 99,96%. Capaian ini tidak sama dengan capaian rata-rata tahun 2022 sebesar 99,96% dengan inputan anggaran sebesar Rp. 42.093.978,00 realisasi sebesar Rp. 41.784.096,00

3.2.4. Tata Kelola lingkungan hidup yang semakin baik

1. Lingkungan Hidup

Capaian kinerja Pemerintah Daerah untuk urusan Lingkungan Hidup. Untuk lingkungan diukur melalui indeks Kualitas lingkungan hidup pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 72,80 Persen dan realisasi sebesar 83,27 persen sesuai target. Untuk capaian indikator kinerja program / kegiatan yang telah ditetapkan targetnya per tahun pada RPJMD 2021-2026 dapat ditampilkan sebagaimana berikut:

- Persentase Penanganan Sampah
- Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan Penduduk

Untuk capaian indikator program ini dapat dilihat pada tabel 3.30 sebagai berikut:

Tabel 25. Indikator Kinerja Utama Sasaran Pertama Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Target	Realisasi
Persentase Penanganan Sampah	Persen	71,49	98,5	134

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Target	Realisasi
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan Penduduk	Persen	15,89	76,9	295,76
Rata-rata Capaian kinerja		111,50	87,7	214,88
Jumlah Anggaran		3.619.000.000	3.515.494.701	97,13

Dari Tabel 3.30 tersebut diatas rata – rata capaian kinerja untuk indikator persentase penanganan sampah dan tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk melampaui target.

- Cakupan Pengawasan Terhadap AMDAL, UKL/UPL, SPPL

Tabel 26. Indikator Kinerja Utama Sasaran Kedua

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian kinerja tahun 2022
		Target	Target	
Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (UKL/UPL, SPPL)		42,48	43,55	117
Rata-Rata Capaian Kinerja		117	43,55	117
Jumlah Anggaran		680.794.500	679.099.480	99.75

3.2.5. Memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat serta pemberdayaan sosial

1. Sosial

Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib urusan sosial ditangani oleh Dinas Sosial. Capaian pada tahun 2022 tersebut sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:

- Persentase PMKS yang meningkat kualitas hidupnya, dari yang ditargetkan dalam RPJM pada tahun 2022 sebesar 51,44 % persen realisasi 51,44 % capaian kinerja 100 %

- Persentase masyarakat yang rentan khusus yang memperoleh bantuan sosial. Tahun 2022 ditargetkan dalam RPJMD sebesar 100 % dan relisasi 100 mencapai target yaitu 100 persen.

Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Sasaran Strategi	Indikator	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
		Target	Realisasi	
Meningkatnya Kualitas Hidup PPKS	Persentase PPKS Yang Meningkatkan Kualitas Hidupnya	51.44 %	51.44	100 %
Jumlah Anggaran		1.493.100.700.-	1.487.924.357.-	99.65%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Yang Rentan Khusus	Persentase Masyarakat Yang Rentan Khusus yang Memperoleh Bantuan Sosial	100%	100%	100%
Jumlah Anggaran		2.447.051.330.-	2.411.230.922.-	98.53%
Total Anggaran		3.940.152.030.-	3.899.155.279.-	98.95%

Program pemberdayaan sosial ini didukung oleh dua kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil, dan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten /kota.

Program rehabilitasi sosial didukung oleh 2 kegiatan, yakni Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Program perlindungan dan jaminan sosial yang mempunyai 2 kegiatan, yaitu Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota.

Keberhasilan program dan kegiatan ini didukung pula oleh program dan kegiatan dari Kementerian Sosial RI maupun Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terutama dalam program penanggulangan kemiskinan

Dari kegiatan-kegiatan tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato berupaya agar jumlah bantuan pemerintah pusat maupun

provinsi yang diluncurkan di Kabupaten Pohuwato benar-benar tepat sasaran dan berdasarkan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tahun 2022. Untuk bantuan PPKS 2022 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 28. Bantuan PPKS tahun 2022

NO	Jenis Bantuan	Jumlah PPKS yang diberikan bantuan	Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan
1	2	3	4
1	Pemberian alat bantu	27 orang	27 orang
2	Bantuan dana motivasi bagi penyandang disabilitas	2 orang	2 orang
3	Bantuan dana motivasi eks penyandang penyakit sosial	2 orang	2 orang
Jumlah		31	31
Persentase		100 %	

Untuk bantuan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada Tabel masing - masing sebagai berikut:

Tabel 29. Bantuan Sosial Produk

NO.	Jenis Bantuan	Jumlah Masyarakat rentan khusus yang tertangani	Jumlah Masyarakat rentan khusus yang ada
1	Produk	550 orang	550 orang
Jumlah		550	550
Persentase		100%	

Sumber: Dinsos,2022

Data pendukung untuk program penanganan bencana antara lain:

Tabel 30. Data korban bencana sosial (kebakaran) Kabupaten Pohuwato Tahun 2022

KECAMATAN	DATA KORBAN (JIWA)	JUMLAH YANG DIBANTU(JIWA)	Persentase (%)
PATILANGGIO	5	1	
MARISA	18	5	
RANDANGAN	14	3	
PAGUAT	5	2	

KECAMATAN	DATA KORBAN (JIWA)	JUMLAH YANG DIBANTU(JIWA)	Persentase (%)
LEMITO	3	1	
TALUDITI	5	1	
BUNTULIA	2	1	
JUMLAH	52	14	26.92

Sumber: Dinsos,2022

**Tabel 31. Data Korban Bencana Alam (Banjir)
Kabupaten Pohuwato Tahun 2022**

No.	KECAMATAN	DATA KORBAN (JIWA)	JUMLAH YANG DIBANTU (JIWA)	Persentase (%)
1.	BUNTULIA	1610	426	
2.	MARISA	1835	599	
3.	PATILANGGIO	564	236	
4.	PAGUAT	545	182	
5.	LEMITO	123	30	
6.	RANDANGAN	57	19	
7.	POPAYATO	53	14	
8.	DUHIADAA	1335	377	
9.	DENGILO	5	1	
10.	TALUDITI	1434	453	
	JUMLAH	7561	2337	30.91

Sumber: Dinsos,2022

Tabel 32. Data korban bencana sosial (tertimpa pohon)

No	Kecamatan	Data korban (jiwa)	Jumlah yang dibantu(jiwa)	Persentase (%)
1	POPAYATO TIMUR	4	1	
2	PATILANGGIO	4	1	
	Jumlah	8	2	25

Sumber: Dinsos,2022

Tabel 33. Data korban bencana yang menerima paket permakanan

No	Kecamatan	Data Korban (Jiwa)	Jumlah korban menerima paket permakanan	Persentase (%)
	Jumlah	7561	2337	30,91

Sumber: Dinsos, 2022

Hambatan dan kendala:

1. Korban bencana kebakaran, jumlah korban kebakaran tidak dapat dipastikan, di prediksi maupun diproyeksi sehingga dalam penetapan target penanganan dan realisasi selalu tidak sesuai target, sehingga diasumsikan tidak memenuhi target
2. Bantuan permakanan bagi korban bencana alam, terutama cadangan beras pemerintah (selalu terkendala dalam proses penetapan status darurat),
3. Kurangnya tenaga armada dan tenaga distribusi yang hanya mengandalkan tenaga relawan TAGANA

2. Tenaga Kerja

Capaian kinerja pemerintah daerah untuk urusan tenaga kerja melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah angka pengangguran. Adapun angka pengangguran terbuka di Kabupaten Pohuwato berdasarkan data dari BPS Pohuwato Tahun 2022 berjumlah sebanyak 2.960 orang yang terdiri atas laki – laki 2.013 orang dan perempuan 947 orang. Jika dihitung persentase pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato sebanyak 149.297 Jiwa, maka angka pengangguran sebesar 1,98 %. Angka pengangguran di kabupaten pohuwato menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,45 % dengan demikian capaian kinerja indikator ini 143,39 %.

Sementara capaian indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2022 dapat dilihat pada indikator kinerja utama serta program / kegiatan yang telah ditetapkan targetnya per tahun pada RPJMD 2021-2026. Capaian kinerja tersebut yakni:

1) Pelatihan Kerja

Indikator sasaran Terselenggaranya Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja pada tahun 2022 adalah 93%. dari segi realisasi penyelenggaraan pelatihan jumlah peserta yang dilatih meningkat di tahun 2022 sebanyak 192

orang untuk lebih jelasnya realisasi pelatihan kerja yang dilaksanakan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 34. Target dan Realisasi Sasaran Pertama tahun 2022

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)
	TARGET	REALISASI	
Terselenggaranya Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	85 %	79 %	92,94 %
Jumlah Anggaran	161.658.000	161.658.000	100

2) *Besaran Tenaga Kerja Yang di Tempatkan*

Keberhasilan indikator ini didukung oleh adanya meningkatnya jumlah tenaga kerja terdaftar dan telah ditempatkan baik pada perusahaan swasta, instansi pemerintah dan perusahaan lainnya yang ada di Kabupaten Pohuwato dan tersebar di perusahaan, perbankan dan instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Pohuwato. Dengan lembaga pelayanan tenaga kerja yang didukung dengan penyelenggaraan Informasi Pasar Kerja (IPK). Adapun capaian penempatan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 35. Capaian Penempatan Kerja Tahun 2021 - 2022

No.	Jenis Kegiatan Utama	Tahun	
		2021	2022
I.	Data Pencari Kerja	184	2.179
	Pencari kerja yang ditempatkan	54	232
	Capaiannya	29,35 %	10,65
II.	Angkatan Kerja	84.100 Orang	84.369
	Penganggur	2.603 Orang	2.070
	Tingkat Pengangguran	3,10 %	2,45 %
III.	Bukan Angkatan Kerja	34.558 Orang	34.558
	- Sekolah	7.028 Orang	6.588
	- Mengurus Rumah Tangga	24.529 Orang	26.721
	- Lainnya	3.001 Orang	2.699

3) *Persentase Jumlah Peraturan Perusahaan*

Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan Penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja dicerminkan dengan berkurangnya permasalahan tenaga kerja.

Adapun data ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel 36. Capaian Penyelesaian Kasus tenaga kerja

No	Tahun	Kasus Perselisihan	Terselesaikan
1	2021	11 Kasus	11 Sepakat
2	2022	80 Kasus	80 Kasus

Untuk jumlah kasus di tahun 2021 sebesar 80 kasus terealisasi sebesar 80 kasus atau 100 %. Capaian tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebesar 11 kasus. Jumlah kasus yang diselesaikan di tahun 2021 sejumlah 11 kasus. Menurun dan meningkatnya penyelesaian kasus yang masuk tergantung pada pembinaan yang dilakukan oleh bidang yang menangani perlindungan ketenagakerjaan dalam hal ini adalah mediator. Di tahun 2022 ini ada 80 kasus yakni 62 (enam puluh dua) kasus HAK dari 7 perusahaan dan 18 (delapan belas) kasus PHK dari 9 Perusahaan terdiri dari:

- PHK 18 orang dari 9 Perusahaan
- HAK terdiri dari: 62 orang dari 7 Perusahaan

3. Transmigrasi

Di tahun 2022 Kabupaten Pohuwato tidak mendapatkan penempatan namun saat ini UPT Sandalan masih dalam status “Binaan”. Meningkatkan ekonomi masyarakat transmigran yang terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing. Dengan terdapatnya penempatan sejumlah 165 KK dengan target rensta 200 KK di UPT Sandalan yang menjadi salah satu fokus utama pengembangan wilayah transmigrasi di Kabupaten Pohuwato serta dengan adanya program unggulan daerah Kabupaten Pohuwato dapat diintegrasikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Transmigran untuk mensukseskannya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato dalam hal ini mengupayakan dengan adanya tekad dan kemauan kuat dari masyarakat tersebut. Sesuai IKU Bupati Indeks Pembangunan Transmigrasi yakni:

- Ketersediaan air bersih capaian ketersediaan air bersih sekitar 85 % yaitu Jumlah KK yang memperoleh akses air bersih 140 kk dari seluruh jumlah warga berjumlah 165 KK.
- Persentase Akses jalan dalam kondisi mantap Kondisi jalan menuju UPT sandalan hingga akhir tahun 2022 masih sekitar 75 %. Panjang Jalan menuju

sandalan sekitar 4,2 km dan kondisi jalan yang bisa dilalui oleh warga dengan nyaman sekitar 1 km sehingga persentase jalan menuju sandalan yang nyaman dilalui warga baru sekitar 25 %

- Persentase ketersediaan tenaga Guru dan Sarana dan Prasarana pendidikan. Bahwa Jumlah guru kelas yang ada saat ini berjumlah 4 orang sedangkan kebutuhan guru sejumlah 6 orang sesuai dengan jumlah rombongan belajar. Jumlah ruang kelas yang tersedia ada 3 ruang kelas, sedangkan yang dibutuhkan 6 ruang kelas maka persentase Jumlah Guru yang ada 67 % sedangkan kebutuhan ruang belajar 50 % jadi capaiannya sekitar 58,5 %
- Persentase ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis dan obat-obatan. Belum tersedia jika masyarakat membutuhkan Tim medis terdiri dari 1 orang dokter dan 2 orang paramedis dari Puskesmas pancakarsa 1 yang memberikan pelayanan secara berkala ke Lokasi UPT Sandalan.

4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja untuk urusan ini terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Dimana tahun 2022 dapat dilihat pada indikator kinerja utama dan indikator program / kegiatan yang telah ditetapkan targetnya per tahun pada RPJMD 2021 – 2026. capaian Indikator Utama Kinerja (IKU) DP3AP2KB Kabupaten Pohuwato Tahun 2022, bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 37. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3AP2KB Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja	Satuan	2022					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Persen	91,38	1.277.944.672	91,40	1.230.664.772	100,02	96.30
2	Ratio KDRT	Persen	0.11	155.500.000	0.11	144.129.867	100	92.69
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
3	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	Angka	2	1.609.362.000	1.03	1.569.910.330	148.5	97.55
4	Rasio Akseptor KB	Persen	74	3.418.545.000	67.32	2.778.504.874	90.98	81.28
TOTAL ANGGARAN				6.461.351.672		5.723.209.843	54.94	88.58

Sumber : Laporan Tahunan tahun 2022

Indikator kinerja akan tetapi secara umum kinerja DP3AP2KB Kabupaten Pohuwato dapat diukur melalui 4 Indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan pada masing-masing sasaran, yaitu:

- **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Jumlah IPM perempuan pada tahun 2022 sebesar 61.99. Dan Jumlah IPM Laki-laki sebesar 67.82 sehingga Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pohuwato adalah 91,40 %. Hasil perolehan 91.40% dengan capaian tersebut melebihi target capaian yaitu 91.38% dengan persentase keberhasilan 100,02% dengan predikat **Tercapai melebihi target**

- **Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Jumlah kekerasan terhadap perempuan, anak dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2022 adalah 52 kasus dan jumlah seluruh rumah tangga Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Pohuwato sejumlah 49.315 KK, sehingga dapat diketahui Indikator Rasio KDRT adalah 0.11% dengan persentase 100% sesuai dengan yang ditargetkan pada RPJMD Tahun 2022 sebesar 0,11 %, dengan predikat **Tercapai sesuai target.**

- **Rata-rata jumlah anak per keluarga**

Jumlah anak sebanyak 50.708 orang dan jumlah kepala Keluarga (KK) tahun 2022 di kabupaten Pohuwato sebanyak 49.315 Kepala Keluarga (KK), jadi perbandingannya adalah 1.03 % dengan arti jumlah rata-rata anak yang dimiliki kepala keluarga di kabupaten Pohuwato tahun 2022 yaitu 1 sampai 2 anak, jumlah tersebut melebihi target capaian dengan persentase keberhasilan 148,50% dengan predikat **Tercapai melebihi target**

- **Rasio Akseptor KB**

Jumlah Peserta KB aktif pada tahun 2022 adalah 16.621 orang dan jumlah jumlah PUS di Kabupaten Pohuwato sejumlah 24.688, orang sehingga dapat diketahui Indikator Rasio KB Aktif adalah 67.32% dengan persentase 90,98% belum mencapai target, karena target tahun 2022 sebesar 74%. Namun secara Nasional hasil tersebut sangat tinggi.

5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato dapat diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Pencapaian tujuan ini diukur melalui empat indikator kinerja utama sebagaimana disajikan pada tabel 38.

Tabel 38. Indikator Kinerja Utama Dukcapil Tahun 2022

Indikator Sasaran	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
	Target	Realisasi	
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,027	0.028	103,70
Persentase pasangan yang bermasalah akta nikah yang diselesaikan dengan lembaga terkait lainnya	0,60	0,65 %	108,33
Persentase lembaga yang telah bekerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan	0,80	0,85 %	106,25
Persentase SKPD yang memanfaatkan data profil kependudukan	100	97 %	97
Rata-rata Capaian Kinerja			128,07
Jumlah Anggaran	2.053.484.000.00.	2.018.788.590.00	98,31%

Berdasarkan tabel 38 tersebut nampak bahwa untuk sasaran kedua indikator ini rata-rata untuk tahun 2022 sebesar 104,34 % bahkan melebihi target yang ditentukan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.2.053.484.000.00,00 terealisasi Rp. 2.018.788.590.00,00 atau 98,31%. Capaian ini sama dengan capaian rata-rata tahun sebelumnya Persentase adminduk yang dilaksanakan secara online, tercapai sesuai target yakni 95 persen.

3.2.6. Terus mendorong seluruh desa di Pohuwato menuju desa maju dan mandiri

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator utama pemberdayaan masyarakat desa tahun 2022 adalah persentase desa yang memiliki BUMDes dengan target 75% dan Realisasi realisasi capaian 97,88% serta indikator persentase desa/kelurahan yang menjadi Juara Lomba Desa. Untuk lebih jelasnya capaian indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Sasaran Strategi	Indikator	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
		Target	Realisasi	
Meningkatnya Kelembagaan Ekonomi Pedesaan yang berkualitas	Desa yang memiliki BUMDes	75 %	83.16 %	100 %
Jumlah Anggaran		698.326.073.-	694.934.312.-	99.51%
Meningkatnya dukungan dan keterlibatan para pemangku kepentingan untuk peningkatan keberdayaan dan kualitas masyarakat.	Persentase Desa/kelurahan yang menjadi Juara Lomba Desa	100	100	100%
Jumlah Anggaran		2.810.821.328	2.754.151.064	97.98%
Total Anggaran		3.509.147.401	3.449.085.376	98.29%

Dengan adanya percepatan pengembangan ekonomi pedesaan khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kegiatan ini bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat, dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengurus BUMDes serta memberikan Permodalan Usaha bagi BUMDes dan ada sekitar 34 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah bergerak dibidang pertanian/perkebunan dalam rangka membantu masyarakat dan kelompok masyarakat di Kabupaten Pohuwato dengan target petani berkembang dan sejahtera

3.2.7. Membangun dan meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah

1. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Pencapaian kinerja Pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan urusan infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur melalui capaian Indeks Kepuasan Infrastruktur.

Indeks Kepuasan Infrastruktur.

Nilai indeks ini diukur dari pemanfaatan beberapa infrastruktur strategis yakni jalan, air bersih, akses telekomunikasi, drainase, pariwisata dan pasar. Nilai

kepuasan yang ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 65,77 persen, berdasarkan survei kepuasan yang dilaksanakan oleh Tim Universitas Negeri Gorontalo, realisasi indeks ini sebesar 87,23 persen. Dengan capaian kinerja Indeks Infrastruktur sebesar 132,62 % atau melampaui target RPJMD.

Untuk capain indikator kenerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur melalui:

1) Indeks pembangunan Infrastruktur

Capaian indeks pembangunan infrastruktur tahun 2022 sebesar 85,25 %. Pembangunan infrastruktur jalan yang dilaksanakan pada akhir tahun 2021 dan 2022 dengan anggaran PEN yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang cukup berkontribusi dalam menaikkan nilai tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 40. Data Kondisi Jalan Kabupaten Pohuwato Tahun 2022

Kriteria	Panjang (Km)		%		Ket
	2021	2022	2021	2022	
Jalan Kondisi Baik	327,755	368,031	35,91%	40,33%	Naik
Jalan Kondisi Sedang	415,577	375,32	45,54%	41,33%	Turun
Jalan Kondisi Rusak Ringan	111,378	111,378	12,20%	12,20%	Tetap
Jalan Kondisi Rusak Berat	57,92	57,92	6,35%	6,35%	Tetap
Panjang jalan kondisi mantap	743,351	743,351	81,45%	81,45%	Tetap
Total	1.655,98	1.656			Tetap

Sumber data Dinas PUPR

Berdasarkan data tersebut kondisi sistem jaringan jalan di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2022 dengan total panjang jalan 1.655,98 Km dengan prosentase kondisi jalan mantap mencapai 743,351 km atau 81,45%. Apabila dibandingkan dengan kondisi sistem jaringan jalan di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2021 prosentase panjang jalan kondisi baik mengalami kenaikan 40,26 km atau sebesar 4,41%. Untuk pembangunan ifrastruktur jembatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 41. Kondisi Jembatan di Kabupaten Pohuwato Tahun 2022

No	Indikator	Tahun (Unit)		Ket
		2021	2022	
1	Jumlah Jembatan	201	201	Tetap
2	Jembatan dalam kondisi baik	178	179	Naik
3	Jembatan dalam kondisi sedang / rusak	23	22	Turun

Peningkatan kualitas dan kuantitas jembatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas jalan agar dapat melayani lalu lintas secara teratur, serta mengganti sejumlah jembatan yang dalam keadaan rusak yang merupakan penyebab kurang berfungsinya ruas jalan dan membuka daerah-daerah terpencil, mengembangkan wilayah pedesaan dan sentra-sentra produksi, maupun usaha menunjang pembangunan lokasi sektor strategis. Berdasarkan data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah jembatan kondisi baik tahun 2022 sebesar 89,05% atau sebanyak 179 unit dari jumlah jembatan yang ada sebanyak 201 unit pada tahun 2022.

2) Indeks Kinerja Sistem Irigasi

Pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi untuk memenuhi kebutuhan air persawahan dan prosentase peningkatan jaringan irigasi. Target persentase irigasi dalam kondisi baik sebesar 76,17 persen realisasi 75,29% dengan capaian kinerja sebesar 98,84 persen dengan kata lain bahwa capaian sasaran dapat dicapai dengan baik. Capaian kondisi jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 42. Data Kondisi Jaringan irigasi Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022	Keterangan
1	Panjang Total Jaringan Irigasi Primer	m	4.433,28	
	- Dalam kondisi baik	m	4.049,52	
	- Dalam kondisi rusak	m	383,76	
2	Panjang Total Jaringan Irigasi Sekunder (m)	m	32.788	

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022	Keterangan
-	Dalam kondisi baik	m	20.709	
-	Dalam kondisi rusak	m	12.079	

Sumber: Disputra, 2022

2. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Perumahan Dan Kawasan Permukiman tahun 2022, diukur melalui indeks infrastruktur permukiman, dimana capaian pada tahun 2022 sebesar **59,55%** dimana target dalam RPJMD tahun 2022 sebesar **60,62%**, dengan demikian Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman **97,87%**. Untuk indikator Indeks Infrastruktur Permukiman diukur melalui beberapa indikator program yaitu:

- Persentase Capaian Pembangunan Pemukiman sebagaimana tabel berikut:

Tabel 43. Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
		Target	Realisasi	
- Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni BSPTS (APBN)	Unit	1000	844	84,40%
- Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni (DAK)	Unit	241	191	79,25%
- Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni (APBD)	Unit	100	15	15%
Rata-rata capaian kinerja	Unit	1.341	1.050	78,30 %

Berdasarkan tabel tersebut diatas nampak bahwa beberapa indikator belum mencapai target, hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 sebagian besar anggaran APBD Kabupaten Pohuwato lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19*. Sementara pembangunan fisik termasuk pembangunan rumah layak huni lebih didorong melalui anggaran pusat baik APBN dan DAK.

- Persentase Peningkatan Kualitas Perumahan sebesar **61,90%**
- Persentase Capaian PSU Kawasan Perumahan sebesar **53%**
- Persentase Sanitasi Kawasan Perumahan **45%**

- **Hambatan Kinerja yang belum mencapai target**

Tidak tercapainya pembangunan Rumah Layak Huni disebabkan oleh berkurangnya dukungan anggaran serta terdapat rumah tangga yang tidak memiliki lahan sendiri sebagai lokasi pembangunan Rumah Layak Huni.

3. Perhubungan

Untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato telah ditetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yakni:

1. Indeks Pengelolaan Lalu Lintas
2. Indeks Infrastruktur Lalu Lintas

1) Indeks Pengelolaan Lalu Lintas

- **Kepemilikan KIR**

Pengujian Kendaraan bermotor di Kabupaten Pohuwato dari 2.975 unit kendaraan yang wajib uji kelayakan, terdapat 1.721 unit kendaraan telah melakukan uji kelayakan atau mencapai 57,85% persen dari total kendaraan yang wajib uji. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pengujian kendaraan bermotor menurun yang diakibatkan kekosongan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor (KIR) sejak tanggal 20 Juli sampai 1 November 2022. Dengan adanya kekosongan stok Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor (KIR) tersebut, pemilik kendaraan bermotor tidak mau melaksanakan pengujian kendaraan bermotornya dan lebih memilih menunggu sampai diterbitkannya Bukti Lulus Kendaraan Bermotor (KIR) yang baru.

- ***Penyediaan Fasilitas Keselamatan***

Panjang Jalan yang tersedia saat ini mencapai 915,15 km tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan dan 101 (seratus satu) desa 3 (tiga) kelurahan dengan status kewenangan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Dari total Panjang Jalan tersebut tersebar 278 set perlengkapan keselamatan Jalan terdiri atas Guadrial, Delineator, Rambu-Rambu Lalu Lintas, Traffic Light, Warning Light, LPJU, RPPD dan Marka Jalan. Tolok ukur atas pemasangan fasilitas keselamatan Jalan tersebut baru mencapai 30,38%.

- ***Penyediaan Trayek***

Saat ini kebutuhan akan Trip atas trayek kendaraan roda empat yang melayani masyarakat sebanyak 5 (lima) trip dengan tingkat kebutuhan

penambahan trip atas trayek sebanyak 2 (dua) trip. Sehingga saat ini baru dicapai jumlah trip trayek sebesar 40%.

2) Indeks Kinerja Infrastruktur lalu Lintas

Kabupaten Pohuwato melalui Dinas Perhubungan saat ini melaksanakan pengelolaan Terminal tipe sebanyak 4 (empat) unit tersebar di 4 (empat) kecamatan, dengan indeks capaian sebesar 100% dimana kondisi semuanya berfungsi dengan baik melayani arus kendaraan dan penumpang.

- Indeks retribusi perpajakan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato saat ini mengelola lokasi perpajakan tersebar di 1 (satu) tempat terdiri atas 3 (tiga) pintu masuk keluar lokasi wisata Pohon Cinta. Pengenaan retribusi tersebut meski masih terbatas pada tahap sosialisasi cenderung memberikan hasil yang positif dengan peningkatan capaian sebesar 43% dan mendapat tanggapan yang sangat baik dari masyarakat baik pengunjung maupun pengelola UMKM lokasi dimaksud.

- Indeks Desa yang terakses dengan kendaraan roda empat

Kabupaten Pohuwato memiliki 104 Desa dengan 3 Kelurahan serta memiliki Panjang Jalan 915,15 km, baru sebanyak 65 Desa yang bisa diakses oleh kendaraan roda empat atau sebesar 62,50%.

Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 825.000.000,00 dan realisasi Rp 756.420.500,00 atau 91,69% dengan rincian berikut ini.

1. Retribusi Jasa Umum

1. Target Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum Tahun 2022 adalah senilai 150.000.000,00 dan terealisasi Rp. 85.250.000,00 atau capaian hanya mencapai 56,83%.
2. Target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 250.000.000,00 dan terealisasi Rp. 240.962.000,00 atau mencapai 96,38%

2. Retribusi Jasa Usaha

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi Rp. 172.500.000,00

2. Retribusi Terminal ditargetkan sebesar Rp. 75.000.000,00 dan terealisasi Rp. 161.425.000,00

1) Hambatan Kinerja yang belum mencapai target

Ada beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Perhubungan dalam mencapai target kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Belum tercapainya indikator kinerja pengujian kendaraan bermotor (kir)

- Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pengujian Kendaraan Bermotor menurun yang di akibatkan kekosongan stok Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor (KIR) sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 1 November 2022.
- Dengan adanya kekosongan stok Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor (KIR) tersebut Pemilik Kendaraan bermotor tidak mau melaksanakan pengujian kendaraan bermotornya dan lebih memilih menunggu sampai diterbitkannya Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor (KIR) yang baru.

2. Belum tercapainya indikator kinerja retribusi parkir di tepi jalan umum

- Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Retribusi atau Pungutan daerah yang dipungut atas penggunaan pelayanan sarana parkir dengan mempergunakan sebagian badan jalan (bahu jalan) yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Yang melaksanakan pemungutan retribusi ini adalah terminal marisa, terminal randangan, terminal popayato dan terminal molosipat, namun sejak Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, terminal malosipat tidak melaksanakan pemungutan yang disebabkan oleh tidak adanya sarana parkir ditepi jalan umum sehingga Sumber Pendapatan Asli Daerah dari retribusi ini mengalami penurunan.

4. Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja Komunikasi Dan Informatika dapat diukur melalui indikator kinerja utama yakni indeks Pembangunan Kominfo dan Indeks ketersediaan data dan informasi. Adapun pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

1. Indeks Pembangunan Kominfo

Tabel 44 Indeks Pembangunan Kominfo Tahun 2022:

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TARGET AKHIR RENSTR A
			TARGET	REALISASI		
1.	Indeks Pembangunan Kominfo	%	98	98	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100	100
Jumlah Anggaran			3.189.965.804	3.085.299.504	96,72	

Berdasarkan tersebut di atas, Nampak bahwa untuk sasaran indikator ini rata-rata untuk tahun 2022 sebesar 96,72% dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.189.965.804,00 terealisasi Rp.3.085.299.504,00 atau sebesar 96 %.

2. Indeks ketersediaan data dan Informasi

Tabel 45. Capaian Indeks Ketersediaan Data dan Informasi Tahun 2022

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TARGET AKHIR RENSTR A
			TARGET	REALISASI		
1.	Indeks ketersediaan data dan informasi	%	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100	
Jumlah Anggaran			1.452.540.984	1.445.394.780	99,51	

Berdasarkan tersebut di atas, terlihat bahwa untuk sasaran indikator ini rata-rata untuk tahun 2022 sebesar 100% dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.452.540.984,00 terealisasi Rp.1.445.394.780,00 atau sebesar 99%.

3.2.8. Menghadirkan pelayanan pemerintahan yang bersih, profesional dan ramah

1. Sekretariat Daerah

Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya adalah jumlah serapan anggaran dan pencapaian target kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan.

1. Nilai SAKIP Kabupaten

Tabel 46. Capaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2022

Indikator Kinerja	Sat	2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	B	B	100	B	B	
Rata-Rata Capaian Kinerja				100			-
Jumlah Anggaran		186.315.772	185.185.185	99,39	83.397.000	79.412.196	95.22%

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Pohuwato

2. Nilai LPPD Kabupaten

Tabel 47. Analisis Capaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Nilai LPPD Kabupaten	Nilai	3,5258	100	100	3,5258	3,5258**	100
Rata-Rata Capaian Kinerja				100			-
Jumlah Anggaran		186.315.772	185.185.185	99,39	269.136.000	268.139.909	99.63

Ket: ** Data sementara

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Pohuwato

3. Persentase jumlah produk hukum yang dihasilkan

Tabel 48. Capaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase jumlah produk hukum yang dihasilkan	%	390	495	126,92	650	726	111.69
Perda	dok	10	13	130	6	6	100
Perbup	dok	25	60	240	43	44	102,33
SK	dok	355	422	118,87	650	726	111.69
Rata-Rata Capaian Kinerja							
Jumlah Anggaran					255.844.938	243.431.535	95.15

4. Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan

Tabel 49. Capaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan	Paket	78	78	100	83	42	50.60
Rata-Rata Capaian Kinerja				100			50,60
Jumlah Anggaran		784.355.615	783.887.000	99,94	250.320.246	246.284.315	98.39

2. Sekretariat DPRD

Capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2022 di ukur melalui 2 indikator kinerja utama yakni:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD dengan capaian 102,13 %
2. Nilai evaluasi SAKIP dengan capaian kinerja 103,88 % atau predikat BB
3. Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dengan capaian kinerja 100 %

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 50. Capaian IKU Sekretariat DPRD Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Target 2022	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD	Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD	angka	69,35	59,00	60,57*	102,13
		Nilai evaluasi SAKIP	angka	67,00	58,40	60,57*	103,72
	Meningkatnya Dukungan Layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	%	100	100	100	100

Dari tabel 3.56 tersebut diatas bahwa capaian indikator kinerja utama Sekretariat DPRD rata – rata melampaui target RPJMD.

Dalam rangka pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp.71.692.620.728,00 Adapun realisasi/ penyerapan anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp 71.552.789.106,00 atau sebesar 99,82%.

3. Kepegawaian dan Diklat

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pohuwato memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis dalam pelaksanaan tugasnya, sasaran strategis tersebut didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja Utama seperti berikut:

Tabel 51. Capaian Kinerja Sasaran Strategi Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya ASN yang profesional, kompeten dan kompetitif	Persentase ASN berpendidikan S1, S2, Dokter Spesialis, S3 dibanding Total ASN	65,50%	69,18%	105,62%
Terwujudnya ASN yang profesional, kompeten dan kompetitif	Persentase ASN yang disiplin dan berkinerja baik	85%	92,08%	108,33%

4. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja Utama Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah**

Tabel 52. Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Daerah Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi		Target Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
			2021	2022		
1	Terselenggaranya tahapan perencanaan tepat waktu	Indeks Perencanaan Daerah	100%	100%	100 %	100 %

Sumber: Data pengumpulan LKIP

Dari tabel di atas rata-rata sasaran Terselenggaranya tahapan perencanaan tepat waktu dengan indikator Indeks Perencanaan Daerah adalah tercapai 100% dari tahun 2021 dan 2022 hal ini sesuai dengan target Renstra hingga akhir periode Renstra.

- **Indikator Indeks Inovasi Daerah**

Tabel 53. Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi		Target Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
			2021	2022		
1	Terlaksananya penelitian dan pengembangan serta inovasi	Indeks Inovasi Daerah	24%	76,19%	100%	52,19%

Bila dilihat pada tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi inovasi daerah dari tahun 2021 hanya 24 persen pada tahun 2022 meningkat menjadi 76,19 persen dengan tingkat kemajuan sebesar 52,9 persen

5. Keuangan Daerah

Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 54. Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022
Terwujudnya Laporan Keuangan Daerah yang Berkualitas Pendapatan Pajak Daerah meningkat	Predikat Laporan Keuangan	WTP	WTP
	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	8,28%	7,21%
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	75.662.553.685,00	65.049.926.012,43

Pengukuran capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato pada tahun 2022 belum tercapai. Hal ini ditunjukkan dari nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp65.049.926.012,43 masih berada di bawah nilai target sebesar Rp75.662.553.685,00 dengan nilai capaian sebesar 85,97%. Nilai target didasarkan pada nilai anggaran setelah perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 42 Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022. Adapun rincian capaian realisasi PAD Kabupaten Pohuwato tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 55. Capaian Realisasi PAD Kabupaten Pohuwato Tahun 2022

No.	Pendapatan Asli Daerah	Target	Realisasi	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	14.596.737.492,00	13.369.109.447,00	91,59
2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.701.719.400,00	5.342.733.160,00	61,40
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.800.000.000,00	2.187.716.093,00	57,57
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.564.096.793,00	44.150.367.312,43	90,91
Jumlah		75.662.553.685,00	65.049.926.012,43	85,97

Sumber: Laporan Tahunan BPKPD 2022

6. Inspektorat Daerah

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja utama sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 56. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah							
- Nilai Kapabilitas APIP	Level	3	3	100	3	3	100
- Nilai Maturitas SPIP	Level	3	3	100	2,9	2,9	100
- Nilai MCP KPK							
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	54,15	23,77	43,90	59,80	40,00	66,89
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	29,68	35,00	64,68	52,03	26,25	

Berdasarkan tabel di atas, Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Tahun 2022 akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hasil QA Menunjukkan Bahwa Nilai Kapabilitas APIP pada Pemerintahan Kabupaten Pohuwato Mencapai Nilai 3,00 dari hasil assessment Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Dengan Demikian, Tingkat Penyelenggaraan atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Pemerintahan kabupaten Pohuwato Tahun 2022 telah mencapai Level 3 (Terdefinisi), hasil akhir ekspos kepala DEPUTI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Menyatakan Bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pohuwato telah Berada pada level 3 (Terdefinisi) dengan Skor 3,00
- b. Hasil QA Menunjukkan Bahwa Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintahan Kabupaten Pohuwato Mencapai 2,911 atau turun sebesar 0,1 dari hasil assessment Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Dengan Demikian, Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintahan kabupaten Pohuwato dalam Tahun 2022 telah mencapai Level 2 (Berkembang), hasil akhir ekspos kepala DEPUTI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Menyatakan Bahwa Maturitas SPIP Inspektorat Kabupaten Pohuwato telah Berada pada level 2 (Berkembang)

- c. Persentase Penyelesaian tindak lanjut TLHP aparat pengawas Eksternal
Untuk realisasi capaian penyelesaian temuan TLHP oleh Aparat pengawas eksternal pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 956 Rekomendasi yang ditindaklanjuti 812 Rekomendasi atau 84,94 %, capaian penyelesaian temuan pada tahun 2021 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti 806 dari 887 rekomendasi atau 90,86 %,
- d. Persentase Penyelesaian tindak lanjut TLHP aparat pengawas Internal
Untuk realisasi capaian penyelesaian temuan TLHP oleh Aparat pengawas Internal pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 3104 Rekomendasi yang ditindaklanjuti 2490 Rekomendasi atau 80,21 %, capaian penyelesaian temuan pada tahun 2022 ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti 470 dari 560 rekomendasi atau 83,93 %

7. Kecamatan

Secara umum Capaian Indikator Kinerja kecamatan dapat dikategorikan baik dengan angka capaian realisasi diatas 95 persen dengan indikator yakni:

- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Penurunan Kasus Kriminal

Disamping indikator kinerja diatas, juga ditampilkan indikator kinerja program / kegiatan lingkup Kecamatan.

- Persentase Administrasi, Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu dan Akuntabel
- Persentase Desa /kelurahan yang Menindak Lanjuti Rekomendasi dan Hasil Pembinaan dari Pemerintah Kecamatan
- Persentase desa yang memasukan dan menginput hasil musrenbang pada aplikasi Perencanaan
- persentase jumlah Kasus Kriminal Per Jumlah Desa /Kelurahan

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu

3.2.9. Mewujudkan masyarakat yang aman, religious, tertib dan harmonis

1. Kesatuan bangsa dan politik

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diukur melalui 2 indikator utama yaitu:

- *Indeks partisipasi Politik*

Capaian indeks Partisipasi Politik Tahun 2022 adalah 74,66 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.16 sebagai berikut:

Tabel 57. Capaian Indeks Partisipasi Politik Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
		Target	Realisasi	
Indeks Partisipasi Politik				
a. Persentase partisipasi warga yang memilih pada Pileg dan Pilpres	%	70	86,06	122,94
b. Persentase partisipasi warga yang memilih pada Pilkada	%	70	87,94	125,63
c. Persentase Organisasi Politik yang mendapatkan dana	%	70	50	71,43
Rata-rata capaian kinerja			74,66	77,44
Jumlah Anggaran		897.313.244	897.308.406	100

- *Indeks Wawasan Kebangsaan*

Capaian indeks Wawasan Kebangsaan Tahun 2022 adalah 74,66 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.17 sebagai berikut:

Tabel 58. Target dan Realisasi Sasaran Kedua Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
	Target %	Realisasi %	
Indeks Wawasan kebangsaan			
a. Persentase Ormas yang mendapatkan pembinaan		89,8	124,72
b. Persentase Ormas keagamaan yang mendapatkan pembinaan	72	80	100
c. Persentase paguyuban Etnis yang mendapatkan pembinaan	80	66,7	83,38
d. Persentase isu-isu strategis yang dibahas oleh FORKOPIMDA	80	13,15	16,44
Rata-Rata Capaian Kinerja		84,86%	93%
Jumlah Anggaran (Rp)		3.893.817.457	3.891.829.501
			99,95%

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Kinerja Polisi Pamong Praja

- Indeks Ketertiban Umum. Ditargetkan 84,27%, dengan capaian realisasi 84.5% dengan persentase capaian 100,27% persen.
- Cakupan penegakkan Peraturan Daerah Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, dimana target tahun 2022 sebanyak 300 kasus namun yang dapat diselesaikan 253 kasus atau sebesar 84,21 Persen
- Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, ditargetkan sebesar 100 persen, dengan realisasi sebesar 99.48 persen

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022, diuraikan di bawah ini:

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Penanggulangan Bencana Tahun 2022.

Tabel 59. Capaian Indeks Penanggulangan Bencana Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Indeks Penanggulangan Bencana	%	100	92,16	92,16	100	98,63	98,63
Rata – Rata Capaian Kinerja				92,16			98,63
Jumlah Anggaran (Rp)		1.722.986.970	1.587.831.200	92,16	230.682.650	227.514.600	98,63

Berdasarkan pada tabel diatas dengan Indikator Kinerja Utama (Indeks Penanggulangan Bencana), Nampak bahwa sasaran indikator diatas pada tahun 2021 mencapai 92,16% dan tahun 2022 mencapai 98,63%. dimana capaian kinerja tahun 2022 meningkat 6,47% atau sebesar 98,63 % di bandingkan tahun 2021 sebesar 92,16%.

3.3. Mandatory Spending

Mandatory Spending merupakan pengeluaran negara yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagai amanat undang-undang. Sesuai peraturan perundang-undangan, diatur pengelolaan keuangan daerah berupa Mandatory Spending yang wajib dialokasikan dengan besaran persentase tertentu. Adapun belanja yang wajib dialokasikan dengan proporsi tertentu antara lain:

1. Alokasi Fungsi Pendidikan

Alokasi fungsi pendidikan dalam APBD Kabupaten Pohuwato TA 2022 dialokasikan sebesar Rp.207.531.414.744,00 atau 20,15 % sebagaimana amanat UUD 1945 dan Undang – Undang No. 20 Tahun 2003.

Adapun alokasi Fungsi Pendidikan tersebut terdiri atas sumber dana sebagai berikut:

- DAU sebesar Rp.123.870.413.744,00;
- DAK Fisik sebesar Rp.13.685.454.000,00;
- DAK Non Fisik Sebesar Rp.67.456.547.000,00; dan
- DID Sebesar Rp. 2.519.000.000,00.

Alokasi Fungsi Pendidikan tersebar dalam beberapa Program sebagai berikut yakni program Pengelolaan Pendidikan serta program pendidik dan tenaga kependidikan, Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Pendidikan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, dimana target sebesar 102%, realisasi 96.09% dengan tingkat capaian 94.20%;
- b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B realiasi 70.68% dari target sebesar 92% atau 76.82% atas capaian target; dan
- c. Angka Partisipasi Sekolah PAUD dengan capaian sebesar 100.56% atau terealisasi sebesar 62.79% dari target sebesar 62.44%.

2. Alokasi Fungsi Kesehatan

Alokasi fungsi kesehatan dalam APBD Kab. Pohuwato T.A 2022 dialokasikan sebesar Rp157.425.622.093,00 Pada Perubahan APBD T.A 2022 atau 19,59% dari total belanja diluar Gaji dan tunjangan ASN pada Perubahan APBD T.A 2022 sebesar Rp803.467.323.448,00 sebagaimana amanat Undang – undang No. 36 Tahun 2009.

Alokasi Fungsi Kesehatan tersebut terdiri atas sumber dana sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 37.509.620.405,00;
- DAU sebesar Rp. 74.166.583.719,00;
- DAK Fisik sebesar Rp. 8.845.399.000,00;
- DAK Non Fisik Sebesar Rp. 17.902.429.000,00;
- Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 8.857.812.756,00; dan
- DID Sebesar Rp. 130.000.000,00.

Alokasi Fungsi Kesehatan tersebar pada beberapa SKPD dalam beberapa Program / Kegiatan / Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

b. RSUD Bumi Panua

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan program peningkatan kualitas keluarga program pemenuhan hak anak (pha) program pengendalian penduduk, program pembinaan keluarga berencana (kb) program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)

Pencapaian kinerja daerah tahun 2022 terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Indeks Kesehatan, sebagaimana ditargetkan terealisasi dengan angka 76.38 dari angka target sebesar 65.17 atau capaian kinerja sebesar 117%;
- b. Capaian angka kematian ibu atau AKI
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 324 per 100.000 kelahiran hidup dengan target sebesar 125 per 100.000 kelahiran hidup atau capaian 117.16 %;

c. Capaian angka kematian bayi atau AKB

Angka Kematian Bayi terealisasi sebesar 2.95 per 1000 kelahiran hidup dengan target 1.87 per 1000 kelahiran hidup dengan angka capaian sebesar 63.39 %;

d. Capaian Rasio Akseptor Keluarga Berencana

Pada tahun 2022 mencapai angka 67.32 % atau 90.98 % tercapai dari angka yang ditargetkan pada RPJMD sebesar 74%; dan

e. Angka Kematian Neonatal

Realisasi tahun 2022 untuk angka ini mencapai 6.63 per 1000 kelahiran hidup sebagaimana angka yang ditargetkan sebesar 5,29 per 1000 angka kelahiran hidup atau capaian sebesar 79.79 %.

3. Alokasi Belanja Infrastruktur

Alokasi Belanja Infrastruktur dalam APBD Kabupaten Pohuwato TA 2022 dialokasikan sebesar Rp.283.658.339.606,00 Pada Perubahan APBD T.A 2022 atau 64,04% dari total Pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Umum pada Perubahan APBD T.A 2022 sebesar Rp.442.907.358.000,00. Dana Transfer Umum dimaksud sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 60. Dana Transfer Umum

Uraian	Jumlah (Rp)
Penerimaan:	
a. DAU	481.613.630.000,00
b. DBH	11.293.728.000,00
Jumlah penerimaan (1)	492.907.358.000,00
Pengurang:	
a. DAU tambahan	0,00
b. DBH yang bersifat <i>earmarked</i>	0,00
c. ADD	50.000.000.000,00
Jumlah pengurang (2)	50.000.000.000,00
Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan (1-2)	442.907.358.000,00

Adapun alokasi belanja infrastruktur dimaksud terdiri dari komponen belanja pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 61. Komponen Belanja

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	a. Belanja Modal	
	1) Tanah	515.000.000,00

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	2) Peralatan dan Mesin	19.565.988.288,00
	3) Gedung dan Bangunan	16.183.370.982,00
	4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	161.416.565.581,00
	5) Aset Tetap Lainnya	2.527.194.476,00
	Jumlah Belanja Modal (1)	200.208.119.327,00
2	a. Belanja Hibah (2)	23.826.101.779,00
	b. Belanja Bantuan Sosial (3)	3.526.516.000,00
	c. Bantuan Keuangan (4)	56.097.602.500,00
3	Jumlah belanja infrastruktur daerah (1+2+3+4)	283.658.339.606,00

Adapun capaian realisasi kinerja infrastruktur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022, yakni:

- a. Capaian indeks pembangunan Infrastruktur terealisasi sebesar 85.25 %. Dari target RPJMD sebesar 83.67%;
- b. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, capaian sebesar 90.53% atau realisasi sebesar 81.45% dari target 89,97%;
- c. Persentase penduduk berakses air minum. Dengan target 89% dan realisasi 65.56% atau persentase capaian 73,66%;
- d. Persentase rumah tinggal bersanitasi ditargetkan tahun 2022 sebesar 65.57 % dengan realisasi sebesar 55.54 % atau capaian sebesar 84.70 %
- e. Indeks kinerja sistem irigasi, target 76.17% realisasi 75.29% atau capaian 98.84%;
- f. Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran tidak tersumbat pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 79.72 % dengan realisasi sebesar 79.54 % atau capaian sebesar 99.77 %; dan
- g. Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik dan layak, ditargetkan tahun 2022 sebesar 80.8 % dengan realisasi sebesar 20 % atau capaian sebesar 24.75 %.

2. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tahun 2022, adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Rumah Layak Huni yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, ditargetkan pada tahun 2022 sejumlah 241 rumah, realisasi 191 rumah atau capaian sebesar 79,25%;
- b. Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni BSPS yang bersumber dari APBN ditargetkan sebesar 1.000 unit dengan realisasi sejumlah 844 unit atau capaian sebesar 84,4 %; dan
- c. Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni yang bersumber dari APBD ditargetkan tahun 2022 sejumlah 100 unit dengan realisasi sejumlah 15 unit atau capaian sebesar 15%

4. Alokasi Pengawasan

Alokasi anggaran pengawasan dalam APBD Kab. Pohuwato T.A 2022 sebesar Rp. 8.935.144.835,00 atau 0,87% dari total belanja daerah sebesar Rp. 1.029.571.013.946,00.

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kab. Pohuwato T.A 2022 sebesar Rp. 50.000.000.000,00 atau 10,14% dari alokasi Dana Transfer Umum (DTU).

3.4. Angka *Stunting*

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 mengatur bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 terkait *stunting* bahwa angka *stunting* ditargetkan pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 8,10% dan 7,99%. Pada tahun 2021, angka *stunting* Kabupaten Pohuwato berada di angka 34,6%. Capaian angka *stunting* pada tahun 2021 ini belum memenuhi IKU di mana masih melampaui target sebesar 8,10%. Namun demikian, berkat kolaborasi program kegiatan dari berbagai pemangku kepentingan, baik tenaga kesehatan, BAPPEDA, DP3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pangan, Dinas Perpustakaan, PKK, Kecamatan, Desa, dll, maka angka *stunting* Kabupaten Pohuwato mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 6,4% pada tahun 2022. Capaian tersebut

lebih rendah dari target provinsi sebesar 23,8% dan target nasional sebesar 21,6% berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia Kementerian Kesehatan Tahun 2022.

Tabel 62. Program dan Kegiatan Anggaran Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2022

No.	SKPD Penanggungjawab <i>Stunting</i>	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Intervensi <i>Stunting</i>	Anggaran 2022		Realisasi Anggaran	Persentase (%)
			DPA	DPA (Perubahan)		
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp96.498.800	Rp141.241.800	Rp141.073.300	99,88
		KEGIATAN: Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp96.498.800	Rp141.241.800	Rp141.073.300	99,88
		SUB KEGIATAN: Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp96.498.800	Rp141.241.800	Rp141.073.300	99,88
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp78.080.800	Rp80.780.800	Rp80.710.200	99,91
		Kegiatan Pelayanan pencatatan sipil	Rp78.080.800	Rp80.780.800	Rp80.710.200	99,91
		Sub Kegiatan: Peningkatan pelayanan Pencatatan sipil	Rp78.080.800	Rp80.780.800	Rp80.710.200	99,91
JUMLAH			Rp174.579.600	Rp222.022.600	Rp221.783.500	99,89
2	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp29.150.000	Rp29.150.000	Rp 24.690.000	84,70
		Jumlah Pelayanan Persalinan Gratis	Rp29.150.000	Rp29.150.000	Rp -	-
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp234.000.000	Rp234.000.000	Rp 232.764.685	99,47
		Jumlah kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp 10.000.000	100,00
JUMLAH			Rp302.300.000	Rp302.300.000	Rp267.454.685	71,04
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp40.870.180	Rp58.774.180	Rp58.695.980	99,86

No.	SKPD Penanggungjawab Stunting	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Intervensi Stunting	Anggaran 2022		Realisasi Anggaran	Persentase (%)
			DPA	DPA (Perubahan)		
		Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp40.870.180	Rp58.774.180	Rp58.695.980	99,86
		Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Rp40.870.180	Rp58.774.180	Rp58.695.980	99,87
		Bimtek Peningkatan Kapasitas Satuan PAUD pada Implementasi PAUD - HI	Rp40.870.180	Rp40.870.180	Rp40.799.980	99,83
		Pemberian Makanan Tambahan Bagi Peserta Didik Pencegahan Stunting	Rp-	Rp17.904.000	Rp17.896.000	99,96
JUMLAH			Rp40.870.180	Rp58.774.180	Rp58.695.980	99,87
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp7.447.307.908	Rp7.447.307.908	Rp6.279.596.792	84,32
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.447.307.908	Rp7.447.307.908	Rp6.279.596.792	84,32
		Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp6.381.307.908	Rp6.381.307.908	Rp5.463.033.508	85,61
		Aktivitas Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan	Rp6.381.307.908	Rp6.381.307.908	Rp5.463.033.508	85,61
		Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp1.066.000.000	Rp1.066.000.000	Rp816.563.284	76,60
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp6.672.185.000	Rp6.672.185.000	Rp6.482.780.000	97,16
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.672.185.000	Rp6.672.185.000	Rp6.482.780.000	97,16		

No.	SKPD Penanggungjawab Stunting	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Intervensi Stunting	Anggaran 2022		Realisasi Anggaran	Persentase (%)
			DPA	DPA (Perubahan)		
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.672.185.000	Rp6.672.185.000	Rp6.482.780.000	97,16
		Aktivitas Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.672.185.000	Rp6.672.185.000	Rp6.482.780.000	97,16
JUMLAH			Rp 14.119.492.908	Rp 14.119.492.908	Rp12.762.376.792	90,39
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp1.070.820.000			
		Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Lokal	Rp1.070.820.000			
		Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Rp1.070.820.000			
		- Operasional Pendampingan Calon Pengantin di desa	Rp21.540.000	Rp21.540.000	Rp2.060.000	9,56
		- Operasional Pendampingan Ibu hamil di desa	Rp289.360.000	Rp289.360.000	Rp57.980.000	20,04
		- Operasional Pendampingan Pasca Salin di desa	Rp72.340.000	Rp72.340.000	Rp12.450.000	17,21
		- Operasional <i>Surveillance</i> Stunting Tingkat Desa	Rp442.800.000	Rp442.800.000	Rp188.859.998	42,65
		- Mini Lokakarya Kecamatan	Rp202.800.000	Rp202.800.000	Rp197.281.500	97,28

No.	SKPD Penanggungjawab Stunting	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Intervensi Stunting	Anggaran 2022		Realisasi Anggaran	Persentase (%)
			DPA	DPA (Perubahan)		
		- Audit Kasus Stunting	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp38.675.050	96,69
		Biaya Cetak Data Keluarga (Beresiko Stunting)	Rp1.980.000	Rp1.980.000	-	0,00
JUMLAH			Rp 1.070.820.000	Rp 1.070.820.000	Rp497.306.548	46,44
6	Dinas Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp195.043.215	Rp197.543.215	Rp197.448.215	99,95
		Kegiatan: Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Sesuai Dengan angka Kecukupan Gizi	Rp195.043.215	Rp197.543.215	Rp197.448.215	99,95
		Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp195.043.215	Rp197.543.215	Rp197.448.215	99,95
JUMLAH			Rp195.043.215	Rp197.543.215	Rp197.448.215	99,95
7	Dinas Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp125.000.000	Rp124.113.000	Rp124.113.000	100
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp125.000.000	Rp124.113.000	Rp124.113.000	100
		Pelaksanaan Fasilitasi bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Rp125.000.000	Rp124.113.000	Rp124.113.000	100
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp120.000.000	Rp119.400.000	Rp119.400.000	100
		Penyediaan dan Penyaluran bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Rp120.000.000	Rp119.400.000	Rp119.400.000	100
		Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Rp120.000.000	Rp119.400.000	Rp119.400.000	100

No.	SKPD Penanggungjawab <i>Stunting</i>	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Intervensi <i>Stunting</i>	Anggaran 2022		Realisasi Anggaran	Persentase (%)
			DPA	DPA (Perubahan)		
JUMLAH			Rp245.000.000	Rp243.513.000	Rp243.513.000	100
8	Dinas Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp198.750.000	Rp198.750.000	Rp198.009.000	99,63
		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp112.500.000	Rp112.500.194	Rp112.149.000	99,69
		Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp112.500.000	Rp112.500.194	Rp112.149.000	99,69
		Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam Satu daerah Kabupaten/Kota Lain	Rp86.250.000	Rp86.250.000	Rp85.860.000	99,55
		Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	Rp86.250.000	Rp86.250.000	Rp85.860.000	99,55
JUMLAH			Rp198.750.000	Rp198.750.000	Rp198.009.000	99,63
JUMLAH KESELURUHAN			Rp 17.004.259.538	Rp 17.070.619.538	Rp14.839.465.626	86,93

3.5. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain:

1. Adanya kebijakan nasional terhadap pemanfaatan aplikasi SIPD yang belum tuntas hingga ke tata kelola keuangan dan pelaporan sehingga Pemerintah Daerah harus menggunakan lebih dari satu aplikasi;
2. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan dengan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal;
3. Belum cermatnya pengelolaan keuangan di SKPD berdasarkan regulasi yang berlaku sehingga menimbulkan implementasi yang belum tepat;
4. Masih kurangnya pemahaman penerima bantuan sosial dan hibah dalam memenuhi kewajibannya sebagai penerima hibah yaitu menyampaikan Laporan Penggunaan

Dana Hibah kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan

5. Belum cermatnya bank mitra Pemerintah Daerah dalam penyetoran pajak sehingga menyulitkan pelaporan keuangan di akhir tahun.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan laporan dan penyajian laporan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato menyusun kebijakan akuntansi bertujuan untuk menjamin adanya keseragaman pengakuan, pengukuran, maupun pelaporan dalam setiap transaksi yang terjadi di SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Selain itu, dengan adanya kebijakan akuntansi juga bertujuan untuk memudahkan pengguna laporan keuangan untuk mengerti dan memahami laporan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 31.a Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

- a. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Laporan keuangan dimaksud terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); dan
- b. Entitas Akuntansi adalah Kepala SKPD seluruh Kabupaten Pohuwato yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan pada masing-masing SKPD

sebagai tanggung jawabnya. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022, terdapat 43 SKPD sebagai Entitas Akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato per dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan asumsi bahwa:

- a) Pemerintah Kabupaten Pohuwato merupakan organisasi yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai entitas pelaporan;
- b) Pemerintah Kabupaten Pohuwato akan berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan; dan
- c) Setiap kejadian atau transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dinilai dengan satuan uang, berdasarkan asumsi keterukuran dalam satuan mata uang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2022 adalah basis akrual, di mana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menyajikan saldo akun-akun tahun 2022 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK yang bertujuan untuk memberikan informasi atas keterbandingan pada laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

4.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima pada RKUD. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan dan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan – LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai pada saat kas diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.5. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Pohuwato yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

- a. Pendapatan – LO yang diakui bersamaan dengan penerimaan kas, dan disebutkan jenis pendapatannya. Contoh:
 - PAD dengan mekanisme *self assessment* (retribusi, pajak hotel);

- PAD dengan mekanisme *official assessment* yang karena ketetapannya dibuat bersamaan dengan dilakukannya penerimaan kas (Pajak Kendaraan Bermotor); dan
 - Dana Perimbangan.
- b. Pendapatan – LO yang diakui tidak bersamaan dengan penerimaan kas, dan disebutkan jenis pendapatannya. Contoh:
- PAD dengan mekanisme *official assessment* diakui sebelum penerimaan kas (pajak air bawah tanah); dan
 - PAD dengan mekanisme *official assessment* yang diakui setelah penerimaan kas (pajak reklame).

4.6. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Belanja diakui pada saat :

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- e. Pengakuan belanja yang bersumber dari penggunaan dana yang diterima dan digunakan langsung oleh SKPD atau Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penerimaan dan penggunaan dana tersebut sepanjang anggaran pendapatan dan belanjanya tercantum dalam APBD diakui pada saat terbitnya pengesahan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana tersebut sebagai contoh dana kapitasi JKN. Sedangkan penerimaan yang langsung ditransfer ke unit kerja dan digunakan langsung oleh unit kerja namun anggaran dan belanjanya tidak tercantum dalam APBD

- diwajibkan menyampaikan laporan kepada BUD;
- f. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
 - g. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah;
 - h. Belanja disajikan dalam LRA. Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam CaLK;
 - i. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
 - j. Pengukuran belanja modal dilakukan berdasarkan jumlah nominal yang tercantum dalam dokumen SP2D telah disahkan oleh BUD yang digunakan dalam pengukuran Aset Tetap.

4.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada:

a. Saat timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

b. Saat terjadinya konsumsi aset

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan masa manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK.

4.8. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD.

Pengakuan transfer sama dengan belanja, namun secara klasifikasi dan tujuan dari transfer berbeda dengan belanja. Transfer hanya dikeluarkan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.

Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Transfer disajikan dalam LRA dengan klasifikasi transfer dan disajikan setelah klasifikasi belanja. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.9. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaranyang perlu dibayar dan/atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.

Penerimaan pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan - LRA dalam pos lain-lain PAD yang sah.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana pinjaman.

Transaksi Pengeluaran pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD. Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:

- a. Surplus/Defisit-LRA;
- b. Pembiayaan Neto;
- c. SiLPA/SiKPA (tahun berjalan); dan
- d. Perubahan SAL.

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL.

Akun Saldo Anggaran Lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.

4.10. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

a. Definisi

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

b. Klasifikasi

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, meliputi:

- 1) Seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan atau yang lebih dikenal dengan sebagai uang persediaan;
- 2) Saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran;
- 3) Uang tunai atau simpanan di Bank yang belum disetorkan ke kas daerah; dan
- 4) Uang tunai atau simpanan di Bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kas terdiri dari:

a. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau RKUD. RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

d. Kas di Badan Layanan Umum (BLUD)

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank pada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

e. Kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

f. Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Setara Kas meliputi investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu paling lama tiga bulan dari tanggal perolehannya. Setara kas terdiri dari:

- a. Simpanan di Bank dalam bentuk deposito kurang dari tiga bulan; dan
- b. Investasi Jangka Pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari tiga bulan.

Pengakuan Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

c. Pengukuran

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam LKPD berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- a. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan, seperti PPN/PPH yang dipungut, tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/ Taperum yang belum disetorkan dan lain-lain.

4.11. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri atas:

- a. Deposito lebih dari tiga bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan, dan deposito lebih dari tiga bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposit*) sampai 12 (dua belas) bulan;
- b. Surat Utang Negara (SUN); dan
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup; dan
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan Kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

SUN dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

SBI dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

4.12. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan (PSAP No.6 Paragraf 6). Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen berupa:

- a. Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara; dan
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Jenis penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atau suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Hasil investasi jangka panjang dapat berupa:

- a. Dividen tunai;
- b. Dividen saham; dan
- c. Bagian laba

Pengakuan hasil investasi untuk dividen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah); dan
- b. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal berbasis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).

Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

Pengakuan hasil investasi untuk bagian laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan; dan
- b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah dengan biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:

- a. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
- b. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan dan penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan;
- c. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk

perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

- d. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; dan
- e. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Investasi jangka panjang non permanen:

- a. Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
- b. Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
- c. Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
- d. Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%, dengan menggunakan metode biaya ini investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebagai laba sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Yaitu suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset Tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat termasuk dana bergulir.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan jika satker pengelola melakukan penatausahaan dengan mempertimbangkan periode jatuh temponya (*aging schedule*), sebagai contoh penatausahaan dana bergulir. Berdasarkan penatausahaan tersebut akan diketahui jumlah dana bergulir Kualitas Lancar, Kualitas Kurang Lancar, Kualitas Diragukan, dan Kualitas Macet.

Pengelompokan berdasarkan jatuh tempo dilaksanakan berdasarkan lamanya menunggak sejak dana tersebut jatuh tempo, dengan ketentuan:

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi
1.	Jatuh tempo pada periode s.d 1 tahun tergolong kualitas lancar. Besaran penyisihan adalah sebesar 0,5% dari kualitas lancar
2.	Jatuh tempo pada periode di atas 1 tahun s.d 3 tahun tergolong kualitas kurang lancar. Besaran penyisihan adalah sebesar 10% dari kualitas kurang lancar
3.	Jatuh tempo pada periode di atas 3 tahun s.d 5 tahun tergolong kualitas diragukan. Besaran penyisihan adalah sebesar 50% dari kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi
4.	Jatuh tempo pada periode di atas 5 tahun tergolong kualitas macet. Besaran penyisihan adalah sebesar 100% dari kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

Pengelompokan berdasarkan jatuh tempo dana bergulir (*aging schedule*) dilaksanakan berdasarkan lama menunggak sejak dana bergulir tersebut jatuh tempo, dengan rincian:

- a. Kualitas Lancar apabila menunggak s.d. 1 Tahun sejak tanggal jatuh tempo dan/atau sesuai kondisi usaha yang masih dapat mengembalikan;
- b. Kualitas Kurang Lancar apabila menunggak diatas 1 s.d 3 Tahun sejak tanggal jatuh tempo;
- c. Kualitas Diragukan apabila menunggak diatas 3 s.d 5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo; dan
- d. Kualitas Macet apabila menunggak diatas 5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo.

Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen; dan
- c. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut.

4.13. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Pendapatan berdasarkan peristiwa yang mendasari, dapat dibedakan menjadi:

- a. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah
Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain berdasarkan Undang-undang pajak dan retribusi daerah meliputi Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di pemerintah daerah yang meliputi Piutang Lain-lain PAD yang Sah.
- b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian
Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak

lain, atau adanya beban dibayar dimuka.

c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah.

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Bantuan Keuangan, Piutang Hibah, dan Piutang Pendapatan Lainnya.

Piutang Lainnya berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang, yang dibedakan menjadi:

a. Piutang berdasarkan Tuntutan Ganti Rugi

Piutang berdasarkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku karena adanya kerugian daerah seperti Piutang TGR.

b. Piutang berdasarkan Peristiwa lainnya

Piutang berdasarkan peristiwa lainnya adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa diatas. Piutang ini meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka, dan Panjar Kegiatan.

Piutang Pendapatan berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari pendapatan, harus memenuhi kriteria:

a. Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau dokumen lainnya yang disamakan; dan

b. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pendapatan berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria:

a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;

b. Jumlah piutang dapat diukur; dan

c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pendapatan berdasarkan transfer antar Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:

a. Piutang Bagi Hasil, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten/Kota telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Gubernur, tetapi masih ada

hak Pemerintah Daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah; dan

- b. Piutang Transfer antar Pemerintah Daerah, apabila jumlah/nilai definitif yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan belum dibayarkan maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang Pemerintah Daerah.

Piutang lainnya berdasarkan Peristiwa tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:

- a. Telah ditandatanganinya Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
- b. Adanya Surat Pembebanan.

Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya seperti:

- a. Pengakuan uang muka beban belanja/panjar kegiatan/uang muka yang harus dipertanggungjawabkan dan beban dibayar dimuka, maka transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas bendahara pengeluaran dan/atau bendahara umum daerah untuk pembayaran uang muka beban belanja/panjar kegiatan /uang muka yang harus dipertanggungjawabkan dan beban dibayar dimuka.
- b. Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal Neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan/atau surat ketetapan.

Piutang secara umum dicatat nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Piutang Pendapatan berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam nilai tagihan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk metode *official assessment* dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan:
- b. Dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang ditetapkan;

- c. Dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk wajib pajak yang mengajukan banding;
- d. Dari setiap tagihan yang proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- e. Untuk metode *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala; dan
- f. Dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang.

Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah, dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, dan/atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;
- b. Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila didalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c. Piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;
- d. Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas/jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima; dan
- e. Piutang transaksi dibayar dimuka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar Pemerintah Daerah.

Pengukuran piutang lainnya berdasarkan peristiwa tuntutan ganti rugi dilakukan dengan:

- a. Mencatatnya sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan

- b. Mencatat sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran piutang lainnya berdasarkan peristiwa lainnya dicatat sesuai dengan nilai nominal piutang yang belum dibayar atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/dipertanggungjawabkan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan.

Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penyesuaian nilai piutang dapat dilakukan dengan cara:

- a. Metode Penghapusan Langsung

Metode Penghapusan Langsung adalah penghapusan sejumlah piutang yang sudah dipastikan tidak akan tertagih, digunakan ketika tidak memungkinkan mengestimasi piutang tidak tertagih, atau ketika jumlah piutang relatif kecil dibandingkan dengan total aset lancar.

- b. Metode Penyisihan.

Metode Penyisihan adalah penyisihan sejumlah piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih, digunakan ketika jumlah piutang relatif besar dibandingkan dengan total aset lancar.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan

kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur. Debitur adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian, atau sebab apapun.

Pelaksanaan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu:

- a. Penilaian Kualitas Piutang; dan
- b. Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian Kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

- a. Jatuh tempo Piutang; dan
- b. Upaya Penagihan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan satu tahun sejak tanggal jatuh tempo.

- b. Kualitas kurang lancar

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang belum dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo.

- c. Kualitas diragukan

Kualitas diragukan adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu lebih dari tiga tahun sampai dengan lima tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo.

- d. Kualitas macet

Kualitas macet adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu lebih dari lima tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0,5% dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada) agunan atau barang sitaan yang mempunyai nilai di atas piutangnya diperhitungkan sama dengan sisa piutang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dibentuk berdasarkan Piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan persentase Penyisihan Piutang tidak tertagih

pada kualitas piutang sebelumnya.

Apabila kualitas piutang pada tanggal pelaporan masih sama kondisinya dengan periode pelaporan sebelumnya, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi dan/atau pelunasan sebagian maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal.

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap debitur dalam hal:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran; dan/atau
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi.

Kualitas Piutang setelah persetujuan restrukturisasi dapat diubah:

- a. Setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; dan
- b. tidak berubah, apabila piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar.

Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam restrukturisasi tidak dipenuhi oleh debitur, kualitas piutang telah diubah dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat restrukturisasi. Penyisihan Piutang tidak tertagih jenis piutang berikut ini diperlakukan dengan kebijakan persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang yaitu:

No.	Jenis Piutang	Umur Piutang			
		<1 Tahun	>1 s.d 3 Tahun	> 3 s.d 5 Tahun	> 5 Tahun
1	Piutang Pendapatan	0,5%	10%	50%	100%

Pencatatan perubahan jumlah piutang harus disajikan dan diungkapkan jika terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Penghapusan piutang oleh BUD dapat dilakukan terhadap seluruh sisa piutang per debitur yang memiliki kualitas macet. Penghapusan piutang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Perlakuan akuntansi penghapusan dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan.

Dalam hal terdapat penambahan jumlah piutang, pencatatan perubahan jumlah piutang dilakukan dengan cara menambah akun piutang sebesar selisihnya. Pencatatan penambahan jumlah piutang dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/persetujuan/keputusan.

Dalam hal terdapat pengurangan jumlah piutang, pencatatan perubahan jumlah piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang sebesar selisihnya. Pencatatan pengurangan jumlah piutang dilakukan apabila:

- a. Surat Tagihan/Persetujuan/Keputusan telah terbit; atau
- b. Restrukturisasi telah selesai dilaksanakan.

Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

Beban Dibayar Dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam Aset Lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

4.14. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- b. Bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepadamasyarakat; dan
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan atau

digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor.

Untuk barang yang diproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan meliputi:

Klasifikasi persediaan sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2016 adalah:

- a. Barang Habis Pakai
 1. Bahan;
 2. Suku Cadang;
 3. Alat/bahan untuk kegiatan kantor;
 4. Obat-obatan;
 5. Persediaan untuk dijual/diserahkan;
 6. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 7. Natura dan Pakan;
 8. Persediaan Penelitian; dan
 9. Persediaan Dalam Proses Barang Pakai Habis.
- b. Barang Tak Habis Pakai
 1. Komponen; dan
 2. Pipa.
- c. Barang Bekas Dipakai

Persediaan diakui pada saat:

- a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan diakui sebagai :

- a. Aset untuk jenis persediaan yang sifatnya kontinu dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan; dan
- b. Beban untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil

inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Selain persediaan yang nilainya cukup material seperti obat-obatan, peralatan kesehatan atau Barang Habis pakai (BHP) kesehatan menggunakan metode perpetual FIFO (*First In First Out*).

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika berdasarkan hasil inventarisasi.

Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.

Metode sistematis FIFO adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan. Metode ini memungkinkan harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Laporan Keuangan adalah Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun Aset Tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan pengerjaan apabila sampai dengan batas tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD. Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD. Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi. Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada

Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

4.15. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Untuk LKPD TA 2022 dilakukan reklasifikasi dan penyesuaian struktur Aset Tetap, Beban Penyusutan, dan Akumulasi Penyusutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah Kas atau Setara Kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut :

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut;

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

Pengakuan Aset Tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk keperluan penyusunan Neraca awal suatu entitas, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat Neraca awal. Atas perolehan Aset Tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Komponen biaya perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap Komponen Biaya Perolehan

1. Tanah

Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.

2. Peralatan dan Mesin

Pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Instalasi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang

dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap pakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan biaya konsultan.

Biaya perolehan, diluar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan (*capitalization threshold*).

Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- a. Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;
- b. Jika penyelesaian pengerjaan suatu Aset Tetap melebihi dan atau melewati suatu periode tahun anggaran, maka Aset Tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap pakai;
- c. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan;
- d. Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK;
- e. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap Lainnya;
- f. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari

Neraca dan diungkapkan dalam CaLK;

- g. Suatu Aset Tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi Aset Tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung;
- h. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*); dan
- i. Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka Aset Tetap disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

1. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. (PSAP 07 Paragraf 4)
2. Akumulasi Penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut di peroleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
3. Masa Manfaat adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
4. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Pengakuan Penyusutan Aset Tetap

1. Penyusutan Aset Tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam LO;
2. Aset Tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati; dan

3. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*whichever period is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pengukuran Penyusutan Aset Tetap

1. Pengukuran Penyusutan Aset Tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyesuaian nilai Aset Tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang mengalir ke pemerintah;
 - b. Masa manfaat Aset Tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat Aset Tetap dihitung sejak perolehan Aset Tetap dimaksud;
 - c. Masa manfaat Aset Tetap ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran kebijakan ini;
 - d. Untuk perhitungan penyusutan, dihitung secara bulanan dan pencatatannya semesteran;
 - e. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama;
 - f. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari Aset Tetap bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana; dan
 - g. Aset Tetap yang disusutkan adalah Aset Tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
2. Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi.

4.16. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban muncul antara lain karena:

- a. Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lainnya, atau lembaga internasional;
- b. Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
- c. Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak, dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- d. Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

Yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah:

- a. Utang kepada Pihak Ketiga;
- b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- c. Utang Bunga (*Accrued Interest*);
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- e. Pendapatan diterima dimuka;
- f. Utang Beban; dan
- g. Utang Jangka pendek lainnya.

Kewajiban Jangka Pendek di PPKD terdiri atas :

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga;
- b. Utang Bunga (*Accrued Interest*);
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- d. Utang Beban; dan
- e. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Pendek di SKPD terdiri atas :

- a. Utang Kepada Pihak Ketiga;
- b. Pendapatan diterima Di muka;
- c. Utang Beban; dan
- d. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang Kepada Pihak ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang dan jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Utang diakui pada saat barang sudah diserahkan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai dengan perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar.

Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian fasilitas/seluruh peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas terhadap barang dan jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian. Dalam hal pihak ketiga membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dan sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahkan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar.

Utang Kepada Pihak Ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan dalam CaLK.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Jaminan Kesehatan, Taspen, dan Taperum. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum dan BPJS) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk belanja modal atau pada saat terbitnya SP2D. Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya.

Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya

hubungan timbal balik antara SKPKD yang dikelola oleh PPKD dan SKPD. Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang di pimpin oleh PPKD. Akun ini menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan. Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor.

Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan. Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD. Pengukuran Kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi. Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi. Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya di SKPD. Pada laporan konsolidasi, akun ini tereliminasi.

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal Neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah. Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal Neraca.

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam CaLK.

Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi Utang Beban ini termasuk didalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

- a. Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran;

- b. Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan dibelakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telepon untuk satu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya;
- c. Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar; dan
- d. Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Beban diakui pada saat:

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
- b. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. Barang yang sudah dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca. Utang Beban disajikan dalam Neraca klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menutup defisit anggarannya.

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah:

- a. Utang Dalam Negeri;
- b. Utang Luar Negeri; dan
- c. Utang Jangka Panjang Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang hanya terdapat di PPKD. Sepanjang tidak diatur secara

khusus dalam perjanjian, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah atau saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut atau sejak tanggal pembayaran bunga berakhir sampai saat terjadinya transaksi.

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

Terkait dengan utang obligasi dicatat sebesar nilai nominal, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal utang obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan dalam CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

4.17. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Daerah hanya menyajikan dua jenis pos Ekuitas, yaitu Ekuitas dan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.

Saldo akhir Ekuitas diperoleh dari perhitungan pada LPE. Sedangkan saldo pos Ekuitas untuk Dikonsolidasikan didapat dari transaksi timbal balik antara Entitas Pelaporan (PPKD) dengan Entitas Akuntansi (SKPD) yang berupa akun Rekening Koran (R/K) pada masing-masing entitas.

Pada penyajian LKPD, pos Ekuitas untuk dikonsolidasikan tidak muncul karena telah dilakukan eliminasi antara akun R/K PPKD dan akun R/K masing-masing SKPD pada saat proses konsolidasi antara entitas pelaporan dengan entitas akuntansi. Ekuitas disajikan pada Neraca, LPE dan CaLK.

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu

periode pelaporan.

SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan LPSAL. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan SAL. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SiKPA dan koreksi kesalahan pembukuan tahun-tahun sebelumnya. LPSAL hanya dilaporkan oleh Entitas Pelaporan (PPKD).

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain:

- a. Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat *non-recurring*;
- b. Selisih kurs terealisasi atas Kas Di BUD; dan
- c. Koreksi pengembalian penerimaan pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SAL antara lain adalah koreksi kesalahan saldo Kas di BUD, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara Pengeluaran atau kas di Bendahara Penerimaan.

Sistem akuntansi Ekuitas/SiLPA-SiKPA terdapat pada jurnal penutup LO dan LRA pada akhir tahun untuk menambah/mengurangi ekuitas/SiLPA-SiKPA pada tahun berjalan. Selain itu, Ekuitas/SiLPA-SiKPA juga akan dijurnal ketika terdapat koreksi kesalahan atas periode yang telah lalu yang laporan keuangannya sudah diterbitkan, yang mengakibatkan kas keluar/masuk atas kesalahan Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA atau kas keluar atas kesalahan Beban/Belanja.

Sistem dan prosedur akuntansi ekuitas biasanya terkait dengan jurnal penutup pada akhir tahun, baik untuk menutup akun-akun Pendapatan-LO dan Beban, maupun untuk menutup akun-akun Pendapatan-LRA dan Belanja. Selain itu, nilai ekuitas juga bisa berubah apabila terdapat koreksi kesalahan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang laporan keuangannya sudah diterbitkan.

Dokumen yang dipakai untuk membuat jurnal penutup maupun untuk melakukan koreksi adalah Bukti Memorial.

Jurnal Penutup merupakan jurnal pada akhir tahun untuk menihilkan saldo buku besar akun-akun nominal (akun LRA dan akun LO, termasuk akun Perubahan SAL) agar diawal tahun berikutnya mempunyai saldo awal nol. Setelah akun-akun nominal tersebut ditutup, kita bisa mendapatkan saldo/nilai ekuitas akhir yang akan terbawa ke LPE dan Neraca, serta saldo/nilai SiLPA/SiKPA pada LRA dan SAL akhir pada LP SAL.

BAB V
PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Penjelasan masing-masing Akun LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan - LRA

Pendapatan - LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pada Tahun Anggaran (TA) 2022, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menganggarkan Pendapatan Daerah sebesar Rp914.253.556.941,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Anggaran Pendapatan tersebut merupakan perubahan dan Penjabaran dari Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022, dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Realisasi Pendapatan yang dicapai pada TA 2022 sebesar Rp902.175.682.605,43 atau 98,68% dari target yang ditetapkan. Rincian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

**Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan
Tahun Anggaran 2022**

No.	Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	75.662.553.685,00	65.049.926.012,43	(10.612.627.672,57)	85,97	71.987.067.694,19
2	Pendapatan Transfer	821.560.420.000,00	823.124.340.181,00	1.563.920.181,00	100,19	804.350.112.053,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.030.583.256,00	14.001.416.412,00	(3.029.166.844,00)	82,21	22.153.080.930,60
	Jumlah	914.253.556.941,00	902.175.682.605,43	(12.077.874.335,57)	98,68	898.490.260.677,79

Realisasi Pendapatan - LRA mengalami peningkatan sebesar Rp3.685.421.927,64 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2021 sebesar Rp898.490.260.677,79 Hal ini disebabkan antara lain karena adanya penurunan dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.6.937.141.681,76, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp.8.151.664.518,60, sedangkan Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp18.774.228.128,00.

Dampak pandemi Covid-19 terasa pada seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali pada perekonomian. Adanya potensi penurunan penerimaan/pendapatan Daerah karena menurunnya tingkat produksi dan konsumsi masyarakat.

5.1.4.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Pemungutan dan pengelolaan PAD pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato diatur berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 54/24/1/2021 tentang Penetapan Rencana Penerimaan Pendapatan Daerah Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato, yang mengatur di antaranya tentang mekanisme pemungutan dan pengelolaan PAD pada 12 (dua belas) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Realisasi PAD - LRA untuk periode TA 2022 sebagai berikut :

No.	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	14.596.737.492,00	13.369.109.447,00	(1.227.628.045,00)	91,59	11.488.765.524,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.701.719.400,00	5.342.733.160,00	(3.358.986.240,00)	61,40	4.908.487.715,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.800.000.000,00	2.187.716.093,00	(1.612.283.907,00)	57,57	2.533.990.978,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	48.564.096.793,00	44.150.367.312,43	(4.413.729.480,57)	90,91	53.055.823.477,19
	Jumlah	75.662.553.685,00	65.049.926.012,43	(10.612.627.672,57)	85,97	71.987.067.694,19

Penjelasan dari masing-masing pos sub kelompok PAD sebagai berikut:

5.1.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat sepuluh jenis pajak yang pemungutan, penerimaan, dan pengelolannya dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) selaku SKPD. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA TA 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Pajak Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel	275.000.000,00	189.109.125,00	(85.890.875,00)	68,77	141.033.060,00
2	Pajak Restoran	2.405.000.000,00	2.466.057.571,00	61.057.571,00	102,54	2.308.728.583,00
3	Pajak Hiburan	20.000.000,00	10.392.000,00	(9.608.000,00)	51,96	0,00
4	Pajak Reklame	315.000.000,00	373.800.346,00	58.800.346,00	118,67	337.191.526,00
5	Pajak Penerangan Jalan	6.684.913.531,00	6.532.335.839,00	(152.577.692,00)	97,72	4.684.913.531,00
6	Pajak Air Tanah	25.000.000,00	17.778.284,00	(7.221.716,00)	71,11	26.327.718,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	150.000.000,00	7.556.292,00	(142.443.708,00)	5,04	0,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	2.525.000.000,00	1.830.222.046,00	(694.777.954,00)	72,48	1.775.885.095,00
9	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.000.000.000,00	1.020.823.838,00	20.823.838,00	102,08	1.017.862.050,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	1.196.823.961,00	921.034.106,00	(275.789.855,00)	76,96	1.196.823.961,00
	Jumlah	14.596.737.492,00	13.369.109.447,00	(1.227.628.045,00)	91,59	11.488.765.524,00

Pada TA 2022, realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp13.369.109.447,00 atau 91,59% dari anggaran sebesar Rp14.596.737.492,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.880.343.923,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp11.488.765.524,00. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan penerimaan Pajak Daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak Hotel sebesar Rp48.076.065,00, Pajak Restoran Rp157.328.988,00, Pajak Hiburan sebesar Rp10.392.000,00, Pajak Reklame Rp36.608.820,00, Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp1.847.422.308,00, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp54.336.951,00, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp2.961.788,00, dan terdapat penambahan Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp7.556.292,00. Sedangkan untuk Penerimaan Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami penurunan sebesar Rp8.549.434,00 dan Rp275.789.855

Pada TA 2014 terdapat pelimpahan kewenangan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka pengadministrasian PBB-P2, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Pada saat pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menerima Saldo Piutang PBB-P2 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Piutang PBB-P2 Nomor BA 10/WPJ.16/KP.02/2014 tanggal 03 Januari 2014 yang ditandatangani Kepala KPP Pratama Gorontalo selaku pihak pertama dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato atas nama Pemerintah Kabupaten Pohuwato selaku pihak kedua. Besarnya nilai piutang PBB-P2 sesuai data serah terima tersebut sebesar Rp817.438.931,00.

Pemungutan Pajak Daerah menggunakan sistem *Self Assesment* dan *Official Assesment*. *Self Assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terhutangnya. Pajak daerah yang menggunakan sistem *Self Assesment* terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. *Official Assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh pemerintah. Pajak daerah yang menggunakan sistem *Official Assesment* terdiri dari PBB-P2, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

5.1.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi daerah dilakukan oleh beberapa SKPD sebagai berikut :

No.	Retribusi Daerah	SKPD
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan
4	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Dinas Perhubungan
		Dinas Perikanan
8	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
9	Retribusi Tempat Pelelangan	Dinas Perikanan
10	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Pertanian
14	Retribusi Izin mendirikan Bangunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	Retribusi Izin Perikanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pemungutan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato didasarkan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diatur secara teknis melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 sebagai berikut:

No.	Retribusi Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.500.000.000,00	1.899.274.700,00	399.274.700,00	126,62	1.561.862.700,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	50.000.000,00	52.500.000,00	2.500.000,00	105,00	48.615.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00	86.150.000,00	(63.850.000,00)	57,43	95.316.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	277.246.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	250.000.000,00	250.390.500,00	390.500,00	100,16	0,00
6	Retribusi Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	82.000.000,00	79.902.783,00	(2.097.217,00)	97,44	77.426.500,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.100.000.000,00	814.000.000,00	(286.000.000,00)	74,00	467.600.000,00
8	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	741.760.000,00	726.049.215,00	(15.710.785,00)	97,88	103.515.000,00
9	Retribusi Tempat Pelelangan	2.000.000.000,00	702.271.500,00	(1.297.728.500,00)	35,11	572.388.500,00
10	Retribusi Terminal	275.000.000,00	246.380.000,00	(28.620.000,00)	89,59	146.320.000,00
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	13.910.000,00	(36.090.000,00)	27,82	18.100.000,00
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	150.000.000,00	132.197.000,00	(17.803.000,00)	88,13	41.150.000,00
13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.202.959.400,00	204.080.000,00	(998.879.400,00)	16,96	537.760.000,00
14	Retribusi Izin mendirikan Bangunan	600.000.000,00	128.192.462,00	(471.807.538,00)	21,37	670.231.615,00
15	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	232.637.600,00
16	Retribusi Izin Perikanan	550.000.000,00	7.435.000,00	(542.565.000,00)	1,35	58.318.800,00
	Jumlah	8.701.719.400,00	5.342.733.160,00	(3.358.986.240,00)	61,40	4.908.487.715,00

Realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp433.245.445,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp4.908.487.715,00. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.337.412.000, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp3.885.000,00, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp250.390.500,00, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp.2.476.283,00, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp346.400.000,00, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp.622.534.215,00, Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp.129.883.000,00, Retribusi Terminal sebesar Rp100.060.000,00, Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp3.191.845,00, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebesar Rp91.047.000,00. Sedangkan untuk Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mengalami penurunan sebesar Rp.9.166.000,00, Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp.4.190.000,00, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp.333.680.000,00. Atas kondisi tersebut, Pemerintah Daerah akan melakukan optimalisasi penerimaan pendapatan retribusi daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah pada tahun berikutnya.

5.1.4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD berupa pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pohuwato pada PT. Bank SulutGo. PT. Bank SulutGo merupakan suatu Badan Usaha Milik Daerah dimana Pemerintah Kabupaten Pohuwato memiliki saham sebanyak 1,68%.

Pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menerima dividen tunai yang telah dibayarkan oleh PT. Bank SulutGo ke rekening Kas Daerah sebesar Rp2.187.716.093,00.

No.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	3.800.000.000,00	2.187.716.093,00	(1.612.283.907,00)	57,57	2.533.990.978,00
	Jumlah	3.800.000.000,00	2.187.716.093,00	(1.612.283.907,00)	57,57	2.533.990.978,00

Pada TA 2022, realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.187.716.093,00 atau 57,57% dari anggaran sebesar Rp3.800.000.000,00. Realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp346.274.885,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.533.990.978,00

5.1.4.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LRA

Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-Lain PAD yang Sah - LRA untuk TA 2022 dirinci sebagai berikut:

No.	Lain-lain PAD Yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	264.960.000,00	278.110.100,00	13.150.100,00	104,96	189.116.000,00
2	Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan	0,00	272.959.100,00	(272.959.100,00)	0,00	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro	2.500.000.000,00	929.177.559,80	(1.570.822.440,20)	37,17	764.324.393,26
4	Pendapatan Bunga	3.991.981.400,00	180.634.377,23	(3.811.347.022,77)	4,52	411.537.677,43
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	600.000.000,00	2.896.604.048,40	2.296.604.048,40	482,77	1.879.716.414,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	32.764.255,00
7	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00	383.563.344,00	(116.436.656,00)	76,71	238.120.808,00
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	9.349.102,50
9	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00	58.765.469,00
11	Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pendapatan BLUD	40.707.155.393,00	39.209.318.783,00	(1.497.836.610,00)	96,32	43.944.284.248,00
13	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	523.910,00
14	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527.318.500,00
	Jumlah	48.564.096.793,00	44.150.367.312,43	(4.959.647.680,57)	90,91	53.055.823.477,19

Pada TA 2022 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp44.150.334.575,43 atau 90,91% dari anggaran sebesar Rp48.564.096.793,00. Realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.905.456.164,76 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp53.055.823.477,19. Pos-pos Lain-lain PAD yang sah yang mengalami penurunan adalah Pendapatan Bunga sebesar Rp.230.903.300,20, dan Pendapatan BLUD sebesar Rp.1.497.836.610,00. Pos-pos Lain-lain PAD yang Sah yang mengalami kenaikan adalah Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp88.994.100,00, Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp.272.959.100,00, Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp164.820.429,54, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp1.016.887.634,40, dan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp145.442.536,00.

5.1.4.2 Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan Transfer - LRA merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Rincian Pendapatan Transfer - LRA TA 2022 disajikan pada tabel berikut:

No.	Pendapatan Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	688.189.961.000,00	674.354.965.234,00	(13.834.995.766,00)	97,99	641.578.017.274,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya	98.370.459.000,00	121.098.269.368,00	22.727.810.368,00	123,10	132.407.777.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	35.000.000.000,00	27.671.105.579,00	(7.328.894.421,00)	79,06	30.364.317.779,00
4	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	821.560.420.000,00	823.124.340.181,00	1.563.920.181,00	100,19	804.350.112.053,00

Pada TA 2022, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp815.825.278.292,00 atau 100,19% dari anggaran sebesar Rp821.560.420,00. Realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp11.475.166.239,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp804.350.112.053,00.

5.1.4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	8.797.309.000,00	10.839.676.800,00	2.042.367.800,00	123,22	11.930.995.048,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	2.496.419.000,00	3.056.208.249,00	559.789.249,00	122,42	1.997.106.047,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	481.613.630.000,00	481.613.630.000,00	0,00	100,00	480.667.451.199,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	195.282.603.000,00	178.845.450.185,00	(16.437.152.815,00)	91,58	146.982.464.980,00
	Jumlah	688.189.961.000,00	674.354.965.234,00	(13.834.995.766,00)	97,99	641.578.017.274,00

Pada TA 2022, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA adalah sebesar Rp674.354.965.234,00 atau 97,99% dari anggaran sebesar Rp688.189.961,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp32.776.947.960,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp641.578.017.274,00. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA sebesar Rp.1.059.102.202,00, Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA sebesar Rp946.178.801,00, Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA sebesar Rp31.862.985.205,00. Sedangkan penerimaan yang mengalami penurunan adalah Dana Bagi Hasil Pajak - LRA sebesar Rp1.091.318.248,00 atau 10,07% dari Dana Bagi Hasil Pajak - LRA TA 2021.

5.1.4.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak - LRA

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA berupa dana yang bersumber dari Pendapatan Pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan	6.089.584.000,00	8.131.951.800,00	2.042.367.800,00	133,54	8.740.973.653,00
2	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri Dan PPh Pasal 21	2.707.725.000,00	2.707.725.000,00	0,00	100,00	3.173.666.500,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00	16.354.895,00
	Jumlah	8.797.309.000,00	10.839.676.800,00	2.042.367.800,00	123,22	11.930.995.048,00

Pada TA 2022, realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp10.839.676.800,00 atau 123,22% dari anggaran sebesar Rp8.797.309.000,00. Realisasi TA 2022 mengalami Penurunan sebesar Rp1.091.318.248,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Penerimaan yang mengalami penurunan adalah Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebesar Rp.465.941.500,00 dan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.609.021.853,00.

5.1.4.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam merupakan bagian dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan berupa dana yang bersumber dari Pendapatan Sumber Daya Alam yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (<i>Land-Rent</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	84.373.773,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (<i>Royalti</i>)	475.295.000,00	1.035.081.378,00	559.786.378,00	217,78	15.109.511,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	62.813.000,00	62.815.871,00	2.871,00	100,00	0,00
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	0,00	100,00	1.357.619.150,00
5	Iuran Kuasa Usaha Pertambangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bagi Hasil dari Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	540.003.613,00
	Jumlah	2.496.419.000,00	3.056.208.249,00	559.789.249,00	122,42	1.997.106.047,00

5.1.4.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Realisasi DAU TA 2022 sebagai berikut:

No.	Dana Alokasi Umum (DAU)	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	481.613.630.000,00	481.613.630.000,00	-	100,00	480.667.451.199,00
	Jumlah	481.613.630.000,00	481.613.630.000,00	-	100,00	480.667.451.199,00

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menyatakan bahwa penyaluran Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato ditransfer dan ditampung dalam rekening giro Bank SulutGo Nomor 010.01.12.02.0003.5 atas nama Pemda Pohuwato/DAU. Dana Alokasi Umum TA 2022 dianggarkan sebesar Rp481.613.630.000,00 dengan realisasi sebesar Rp481.613.630.000,00 atau 100,00%. Realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp946.178.801,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp480.667.451.199,00.

5.1.4.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Realisasi DAK TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	52.843.624.000,00	52.461.355.403,00	(382.268.597,00)	99,28	7.820.554.776,00
2	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	5.824.262.000,00	5.158.837.800,00	(665.424.200,00)	88,57	4.205.507.580,00
3	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	6.747.020.000,00	6.107.534.145,00	(639.485.855,00)	90,52	7.918.762.198,00
4	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	4.822.185.000,00	4.642.185.000,00	(180.000.000,00)	96,27	8.071.896.000,00
5	DAK Bidang Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DAK Bidang Kesehatan	8.845.399.000,00	5.885.976.845,00	(2.959.422.155,00)	66,54	46.917.789.402,00
7	DAK Bidang Kelautan Dan Perikanan	4.500.750.000,00	3.987.866.079,00	(512.883.921,00)	88,60	2.174.632.400,00
8	DAK Bidang Pertanian	6.921.807.000,00	6.616.918.661,00	(304.888.339,00)	95,60	0,00
9	DAK Bidang sentra industri kecil dan menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.487.046,00
10	DAK Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DAK Bidang Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DAK Bidang Pendidikan	13.685.454.000,00	12.971.928.265,00	(713.525.735,00)	94,79	12.438.936.561,00
13	DAK Bidang Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578.264.901,00
14	DAK Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	5.054.255.000,00	5.053.918.000,00	(337.000,00)	99,99	1.220.711.250,00
15	DAK Bidang Sarana Prasarana Perdesaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DAK Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	17.902.429.000,00	16.987.889.636,00	(914.539.364,00)	94,89	2.988.183.400,00
17	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	6.247.200.000,00	5.540.400.000,00	(706.800.000,00)	88,69	5.570.023.036,00
18	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	1.169.500.000,00	0,00	(1.169.500.000,00)	0,00	1.518.564.900,00
19	DAK Bantuan Operasional Sekolah	22.292.940.000,00	19.888.523.866,00	(2.404.416.134,00)	89,21	0,00
20	DAK Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.443.530,00
21	DAK Dana Pelayanan Kepariwisataaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	DAK Tambahan Penghasilan Guru	1.935.000.000,00	1.064.250.000,00	(870.750.000,00)	55,00	984.000.000,00
23	DAK Tunjangan Khusus Guru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DAK Tunjangan Profesi Guru	35.811.907.000,00	31.893.204.120,00	(3.918.702.880,00)	89,06	36.397.421.000,00
25	DAK PK2UKM	426.571.000,00	346.158.730,00	(80.412.270,00)	81,15	161.287.000,00
26	DAK Dana Bantuan BLPS	252.300.000,00	112.353.635,00	(139.946.365,00)	44,53	0,00
27	DAK Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	126.150.000,00	126.150.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	195.282.603.000,00	178.845.450.185,00	(16.437.152.815,00)	91,58	146.982.464.980,00

Pada TA 2022, realisasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp178.845.450.185,00 atau 91,58% dari anggaran sebesar Rp195.282.603.000,00. Realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp31.862.985.205,00 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp146.982.464.980,00.

Dari Realisasi Dana DAK sebesar Rp.195.282.603.000,00 terdapat Realisasi Dana Bos pada Satuan Pendidikan. Dana BOS adalah program bantuan pemerintah yang digunakan untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota menjalankan kewenangan pengelolaan dan pembinaan terhadap satuan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Realisasi DAK Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima pada 165 SD dan SMP yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato mencapai Rp19.888.523.866,00 atau 89,21% dari anggaran sebesar Rp22.292.940.000,00.

Rincian DAK Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dilihat pada **Lampiran 1**

5.1.4.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Penyesuaian	98.370.459.000,00	121.098.269.368,00	22.727.810.368,00	123,10	132.407.777.000,00
	Jumlah	98.370.459.000,00	121.098.269.368,00	22.727.810.368,00	123,10	132.407.777.000,00

Pada TA 2022 realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp121.098.269.368,00 atau 123,10% dari anggaran sebesar Rp98.370.459.000,00. Realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp11.309.507.632,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp132.407.777.000,00.

5.1.4.2.2.1 Dana Penyesuaian - LRA

Atas penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian TA 2022 sebesar Rp.98.370.459.000,00 tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut :

No.	Dana Penyesuaian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah	20.357.016.000,00	43.213.353.000,00	22.856.337.000,00	212,28	42.082.902.000,00
2	Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	78.013.443.000,00	77.884.916.368,00	(128.526.632,00)	99,84	90.324.875.000,00
	Jumlah	98.370.459.000,00	121.098.269.368,00	22.727.810.368,00	123,10	132.407.777.000,00

5.1.4.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA merupakan penerimaan yang diperoleh dari Provinsi Gorontalo atas Bagi Hasil Pajak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 02/29/I/2019 Tentang Perhitungan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	35.000.000.000,00	27.671.105.579,00	(7.328.894.421,00)	79,06	30.364.317.779,00
	Jumlah	35.000.000.000,00	27.671.105.579,00	(7.328.894.421,00)	79,06	30.364.317.779,00

Pada TA 2022, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp27.671.105.579,00 atau 79,06% dari anggaran sebesar Rp35.000.000.000,00. Realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.693.212.200,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp30.364.317.779,00.

5.1.4.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA merupakan penerimaan Bagi Hasil Pajak yang diterima dari Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	5.859.003.273,00	4.357.120.283,00	(1.501.882.990,00)	74,37	4.859.003.273,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.021.250.635,00	3.738.550.120,00	(2.282.700.515,00)	62,09	5.021.250.635,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.835.641.452,00	10.197.025.537,00	(2.638.615.915,00)	79,44	11.240.959.231,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	50.450.475,00	6.671.244,00	(43.779.231,00)	13,22	9.450.475,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	10.233.654.165,00	9.371.738.395,00	(861.915.770,00)	91,58	9.233.654.165,00
	Jumlah	35.000.000.000,00	27.671.105.579,00	(7.328.894.421,00)	79,06	30.364.317.779,00

Pada TA 2022, realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp27.671.105.579,00 atau 79,06% dari anggaran sebesar Rp35.000.000.000. Realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.693.212.200,00 dibandingkan TA 2021 sebesar Rp30.364.317.779,00. Penurunan realisasi Bagi Hasil Pajak ini terdiri dari penerimaan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp501.882.990,00, Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.282.700.515,00, Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.043.933.694,00, dan Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebesar Rp2.779.231,00. Bagi Hasil yang mengalami kenaikan adalah Bagi Hasil dari Pajak Rokok sebesar Rp138.084.230,00.

5.1.4.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA merupakan penerimaan Pendapatan Hibah dari pemerintah dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 Rp14.001.416.412,00 atau 82,21% dari anggaran sebesar Rp17.030.583.256,00. Realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.151.664.518 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp22.153.080.930,60 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai berikut:

No.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	8.172.770.500,00	7.446.360.000,00	(726.410.500,00)	91,11	2.091.294.359,00
2	Pendapatan Lainnya	8.857.812.756,00	6.555.056.412,00	(2.302.756.344,00)	74,00	0,00
3	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.061.786.571,60
	Jumlah	17.030.583.256,00	14.001.416.412,00	(3.029.166.844,00)	82,21	22.153.080.930,60

5.1.4.3.1 Pendapatan Hibah - LRA

Pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menerima Pendapatan Hibah sebagai berikut:

No.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Hibah Program READSI dan Hibah Sanitasi	8.172.770.500,00	7.446.360.000,00	(726.410.500,00)	91,11	2.091.294.359,00
	Jumlah	8.172.770.500,00	7.446.360.000,00	(726.410.500,00)	91,11	2.091.294.359,00

Realisasi Penerimaan Hibah *Rural Empowerment And Agricultural Development Scaling-Up Initiative* (READSI) dan Hibah Sanitasi TA 2022 sebesar Rp7.446.410.500,00 dari anggaran sebesar Rp8.172.770.500,00 diperoleh dari Pemerintah Pusat berdasarkan Surat Perjanjian Hibah dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PHD-30/MK.7/2018 Tanggal 12 Desember 2018.

5.1.4.3.2 Pendapatan Lainnya - LRA

Pada TA 2022, Pendapatan Lainnya Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah sebagai berikut:

No.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.857.812.756,00	6.555.056.412,00	(2.302.756.344,00)	74,00	0,00
	Jumlah	8.857.812.756,00	6.555.056.412,00	(2.302.756.344,00)	74,00	-

Realisasi Pendapatan Lainnya Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah sebesar Rp.6.555.056.412,00 atau 74,00 % dari anggaran sebesar Rp.8.857.812.756,00

5.1.5 Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Pohuwato menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp1.034.268.548.934,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Anggaran Pendapatan tersebut merupakan perubahan dan Penjabaran dari Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022, dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pada TA 2022, realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat mencapai sebesar Rp852.373.208.844,00 atau 94,93% dari anggaran sebesar Rp897.851.056.985,00.

Belanja Daerah berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Anggaran dan Realisasi TA 2022 diuraikan pada tabel berikut ini :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Operasi	695.643.369.308,00	664.637.687.600,00	(31.005.681.708,00)	95,54	626.463.475.903,00
2	Belanja Modal	199.945.644.297,00	186.544.899.315,00	(13.400.744.982,00)	93,30	168.702.375.987,07
3	Belanja Tak Terduga	2.262.043.380,00	1.190.621.929,00	(1.071.421.451,00)	52,63	1.146.011.500,00
	Jumlah	897.851.056.985,00	852.373.208.844,00	(45.477.848.141,00)	94,93	796.311.863.390,07

Realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp47.404.113.348,93 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp796.311.863.390,07

5.1.5.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	342.680.688.283,00	335.295.778.425,00	(7.384.909.858,00)	97,84	324.149.115.918,00
2	Belanja Barang dan Jasa	316.506.413.235,00	295.216.672.900,00	(21.289.740.335,00)	93,27	280.276.842.141,00
3	Belanja Bunga	8.803.650.011,00	8.657.232.105,00	(146.417.906,00)	98,34	0,00
4	Belanja Hibah	24.126.101.779,00	22.075.065.344,00	(2.051.036.435)	91,50	22.037.517.844,00

5	Belanja Bantuan Sosial	3.526.516.000,00	3.392.938.826,00	(133.577.174)	96,21	0,00
	Jumlah	695.643.369.308,00	664.637.687.600,00	(31.005.681.708,00)	95,54	626.463.475.903,00

Pada TA 2022, realisasi Belanja Operasi sebesar Rp664.637.687.600,00 atau 95,54% dari anggaran sebesar Rp695.643.369.308,00. Realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp38.174.211.697,00 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp626.463.475.903,00.

5.1.5.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Belanja Honorarium non PNS, Belanja Honorarium Pengelola dan BOK, Belanja Pegawai Dana BOS dan Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji Dan Tunjangan	225.999.657.912,00	223.372.702.487,00	(2.626.955.425,00)	98,84	214.663.236.657,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	102.568.237.120,00	98.534.899.018,00	(4.033.338.102,00)	96,07	97.086.354.726,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	12.118.612.961,00	12.110.817.401,00	(7.795.560,00)	99,94	10.084.200.950,00
4	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	39.604.317,00
5	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	880.574.390,00	418.722.019,00	(461.852.371,00)	47,55	367.781.268,00
6	Belanja Honorarium Non PNS	281.230.000,00	251.300.000,00	(29.930.000,00)	89,36	205.498.000,00
7	Belanja Pegawai Dana BOS	782.375.900,00	557.337.500,00	(225.038.400,00)	71,24	1.702.440.000,00
8	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	342.680.688.283,00	335.295.778.425,00	(7.384.909.858,00)	97,84	324.149.115.918,00

Pada TA 2022, realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp335.295.778.425,00 atau 97,84% dari anggaran sebesar Rp342.680.688.283,00. Realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp11.146.662.507,00 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp324.149.115.918,00.

5.1.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, Belanja Jasa Konsultasi, Belanja Jasa Konsultasi, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang Dana BOS, Belanja yang Bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Belanja Iuran, Belanja Jasa Kesehatan, Belanja Transportasi Dan Akomodasi, Belanja Barang dan Jasa BLUD dan Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.

Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut ini:

No	Jenis Belanja Barang dan Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	66.248.222.219,00	59.658.811.885,00	(6.589.410.334,00)	90,05	65.000.509.702,00
2	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Jasa Kantor	84.619.711.635,00	79.632.582.089,00	(4.987.129.546,00)	94,11	77.344.333.760,00
4	Belanja Premi Asuransi	12.877.811.313,00	9.694.203.753,00	(3.183.607.560,00)	75,28	9.505.522.351,00
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.982.477.000,00	1.772.672.992,00	(209.804.008,00)	89,42	1.344.993.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	500.145.500,00	414.359.000,00	(85.786.500,00)	82,85	877.788.500,00
7	Belanja Perjalanan Dinas	63.557.547.384,00	60.930.069.168,00	(2.627.478.216,00)	95,87	59.009.331.853,00
8	Belanja Pemeliharaan	6.517.616.200,00	6.221.671.756,00	(295.944.444,00)	95,46	6.222.637.780,00
9	Belanja Jasa Konsultasi	2.191.514.611,00	2.125.807.815,00	(65.706.796,00)	97,00	3.246.596.125,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	100,00	158.000.000,00
11	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	150.875.000,00	150.875.000,00	0,00	100,00	292.880.000,00
12	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.095.821.150,00	10.656.093.380,00	(439.727.770,00)	96,04	11.253.872.000,00
13	Belanja Barang Dana BOS	16.347.657.827,00	15.161.107.711,00	(1.186.550.116,00)	92,74	14.347.197.632,00
14	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Iuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.109.513.396,00	48.492.168.351,00	(1.617.345.045,00)	96,77	31.319.179.438,00
19	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	150.000.000,00	148.750.000,00	(1.250.000,00)	99,17	354.000.000,00
	Jumlah	316.506.413.235,00	295.216.672.900,00	(21.289.740.335,00)	93,27	280.276.842.141,00

Pada TA 2022, realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp295.216.672.900,00 atau 93,27% dari anggaran sebesar Rp316.506.413.235,00. Realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp14.939.830.759,00 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp280.276.842.141,00.

5.1.5.1.3 Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang. Belanja Bunga untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.657.232.105,00 yang merupakan pembayaran bunga pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Anggaran dan realisasi Belanja Bunga TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut ini:

No	Jenis Belanja Bunga	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bunga	8.803.650.011,00	8.657.232.105,00	(146.417.906,00)	98,34	0,00
	Jumlah	8.803.650.011,00	8.657.232.105,00	(146.417.906,00)	98,34	0,00

Pada TA 2022, realisasi Belanja Bunga sebesar Rp8.657.232.105,00 atau 98,34% dari anggaran sebesar Rp8.803.650.011,00.

5.1.5.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan transfer uang/barang kepada pihak lain yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Realisasi TA 2022 sebesar Rp22.075.065.344,00 atau 91,50% dari anggaran sebesar Rp24.126.101.779,00. Realisasi TA. 2022 mengalami Kenaikan sebesar Rp37.547.500,00 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp22.037.517.844,00

Rincian realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hibah Kepada Pemerintah	1.814.699.535,00	1.800.000.000,00	(14.699.535,00)	99,19	1.353.865.600,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	21.519.220.000,00	19.482.883.100,00	(2.036.336.900,00)	90,54	19.891.470.000,00
3	Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	792.182.244,00	792.182.244,00	0,00	100,00	792.182.244,00
	Jumlah	24.126.101.779,00	22.075.065.344,00	(2.051.036.435,00)	91,50	22.037.517.844,00

5.1.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada Masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Realisasi TA 2022 untuk Belanja Bantuan Sosial adalah sebesar Rp3.526.516.000,00 atau 96,21% dari anggaran sebesar Rp3.392.938.826,00.

Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.496.516.000,00	3.362.938.826,00	(133.577.174,00)	96,18	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	0,00
	Jumlah	3.526.516.000,00	3.392.938.826,00	(133.577.174,00)	96,21	0,00

5.1.5.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Aset Tetap lainnya. Anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	515.000.000,00	463.206.040,00	(51.793.960,00)	89,94	1.794.239.480,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.082.821.438,00	16.835.630.223,00	(2.247.191.215,00)	88,22	33.956.246.346,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.183.370.982,00	15.219.635.271,00	(963.735.711,00)	94,04	38.810.503.312,07
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	161.637.257.401,00	151.716.799.542,00	(9.920.457.859,00)	93,86	92.114.814.951,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.462.194.476,00	2.244.915.239,00	(217.279.237,00)	91,18	2.026.571.898,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	65.000.000,00	64.713.000,00	(287.000,00)	99,56	0,00
	Jumlah	199.945.644.297,00	186.544.899.315,00	(13.400.744.982,00)	93,30	168.702.375.987,07

Pada TA 2022, realisasi Belanja Modal sebesar Rp186.544.899.315,00 atau 93,30% dari anggaran sebesar Rp199.945.644.297,00. Realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp17.842.523.327,93 dibandingkan TA 2021 sebesar Rp168.702.375.987,07.

5.1.5.2.1 Belanja Modal Tanah

Pada TA 2022, realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp463.206.040,00 atau 89,94% dari anggaran sebesar Rp515.000.000,00. Realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.331.033.440,00 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.794.239.480,00. Rincian realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Persil	515.000.000,00	463.206.040,00	(51.793.960,00)	89,94	1.794.239.480,00
	Jumlah	515.000.000,00	463.206.040,00	(51.793.960,00)	89,94	1.794.239.480,00

5.1.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pada TA 2022, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.835.630.223,00 atau 83,77% dari anggaran sebesar Rp19.082.821.438,00. Realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp17.120.616.123,00 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp33.956.246.346,00. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Alat-alat Besar Darat	800.000.000,00	769.307.000,00	(30.693.000,00)	96,16	446.907.450,00
2	Alat-alat Bantu	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.393.793.000,00	2.366.064.423,00	(27.728.577,00)	98,84	4.548.435.125,00
4	Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00	229.723.450,00
6	Alat Pengolahan	151.100.000,00	150.804.750,00	(295.250,00)	99,80	70.700.000,00
7	Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alat Kantor	3.669.045.000,00	3.501.185.000,00	(167.860.000,00)	95,42	610.531.000,00
9	Alat Rumah Tangga	2.302.384.483,00	2.235.873.777,00	(66.510.706,00)	97,11	3.730.075.114,00
10	Komputer	1.948.636.610,00	1.748.297.025,00	(200.339.585,00)	89,72	4.754.256.186,00
11	Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	609.805.300,00
12	Alat Studio	474.843.600,00	471.679.300,00	(3.164.300,00)	99,33	684.410.286,00
13	Alat Komunikasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	34.450.000,00
14	Alat kedokteran	2.598.623.830,00	1.642.663.481,00	(955.960.349,00)	63,21	1.262.756.278,00
15	Alat Kesehatan	205.450.000,00	205.034.000,00	(416.000,00)	99,80	16.234.822.031,00
16	Unit-unit Alat Laboratorium	434.796.000,00	433.950.000,00	(846.000,00)	99,81	109.800.000,00
17	Alat Peraga/ Praktek Sekolah	3.990.023.915,00	3.208.928.776,00	(781.095.139,00)	80,42	267.288.000,00
18	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810.000,00
20	Alat Eksplorasi Geofisika	112.625.000,00	100.342.691,00	(12.282.309,00)	89,09	325.021.126,00
21	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770.000,00
22	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000,00
23	Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	17.950.000,00
	Jumlah	19.082.821.438,00	16.835.630.223,00	(2.247.191.215,00)	88,22	33.956.246.346,00

5.1.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pada TA 2022, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.219.635.271,00 atau 94,04% dari anggaran sebesar Rp16.183.370.982,00. Realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp23.590.868.041,07 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp38.810.503.312,07,00. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.869.159.082,00	14.930.590.856,00	(938.568.226,00)	94,09	38.319.729.022,07
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	14.211.900,00	6.717.100,00	(7.494.800,00)	47,26	369.074.290,00
3	Modal Tugu/Tanda Batas	300.000.000,00	282.327.315,00	(17.672.685,00)	94,11	121.700.000,00
	Jumlah	16.183.370.982,00	15.219.635.271,00	(963.735.711,00)	94,04	38.810.503.312,07

5.1.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pada TA 2022, realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp151.716.799.542,00 atau 93,86% dari anggaran sebesar Rp161.637.257.401,00. Realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp59.601.984.591,00 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp92.114.814.951,00. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Jalan	124.684.927.109,00	121.568.833.063,00	(3.116.094.046,00)	97,50	66.064.802.823,00
2	Jembatan	18.540.200.229,00	14.102.467.094,00	(4.437.733.135,00)	76,06	8.272.454.272,00
3	Bangunan Air Irigasi	5.954.902.111,00	4.956.717.335,00	(998.184.776,00)	83,24	5.049.795.613,00
4	Bangunan Air Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bangunan Air Rawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bangunan Pengaman Sungai Dan Penanggulangan BA	756.269.093,00	747.953.193,00	(8.315.900,00)	98,90	1.491.245.018,00
7	Bangunan Air Bersih/ Baku	6.795.352.243,00	5.645.393.447,00	(1.149.958.796,00)	83,08	2.087.188.315,00
8	Bangunan Air Kotor	4.436.872.300,00	4.267.506.214,00	(169.366.086,00)	96,18	2.856.806.226,00
9	Instalasi Air Minum/ Air Bersih	51.252.520,00	30.560.700,00	(20.691.820,00)	59,63	584.153.300,00
10	Instalasi Air Kotor	46.894.496,00	46.894.496,00	0,00	100,00	5.106.192.537,00
11	Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
12	Jaringan Listrik	370.587.300,00	350.474.000,00	(20.113.300,00)	94,57	523.850.850,00
13	Jaringan Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	63.325.997,00
	Jumlah	161.637.257.401,00	151.716.799.542,00	(9.920.457.859,00)	93,86	92.114.814.951,00

5.1.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Pada TA 2022, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.244.915.239,00 atau 91,18% dari anggaran sebesar Rp2.244.915.239,00. Realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp299.399.891,00 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.026.571.898,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	2.462.194.476,00	2.244.915.239,00	(217.279.237,00)	91,18	1.947.796.898,00
2	Barang-barang Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	78.775.000,00
3	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.462.194.476,00	2.244.915.239,00	(217.279.237,00)	91,18	2.026.571.898,00

5.1.5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Pada TA 2022, realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp64.713.000,00 atau 99,56% dari anggaran sebesar Rp65.000.000,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	65.000.000,00	64.713.000,00	(287.000,00)	99,56	0,00
	Jumlah	65.000.000,00	64.713.000,00	(287.000,00)	99,56	0,00

5.1.5.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Anggaran dan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tak Terduga	2.262.043.380,00	1.190.621.929,00	(1.071.421.451,00)	52,63	1.146.011.500,00
	Jumlah	2.262.043.380,00	1.190.621.929,00	(1.071.421.451,00)	52,63	1.146.011.500,00

Pada TA 2022, realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.190.621.929,00 atau 52,63% dari anggaran sebesar Rp2.262.043.380,00. Realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp44.610.429,00 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.146.011.500,00.

5.1.6 Transfer

Transfer adalah pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain. Anggaran dan realisasi Transfer TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.306.446.449,00	2.306.446.442,00	(7,00)	100,00	1.772.130.471,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	134.111.045.500,00	132.938.954.284,00	(1.172.091.216,00)	99,13	143.245.376.382,00
	Jumlah	136.417.491.949,00	135.245.400.726,00	(1.172.091.223,00)	99,14	145.017.506.853,00

5.1.6.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp2.306.446.442,00 terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp1.459.673.742,00 dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp846.772.700,00 yang diberikan ke Pemerintah Desa yang pengalokasiannya berdasarkan realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pohuwato yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Anggaran dan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	1.459.673.749,00	1.459.673.742,00	(7,00)	100,00	1.058.629.825,00
2	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	846.772.700,00	846.772.700,00	0,00	100,00	713.500.646,00
	Jumlah	2.306.446.449,00	2.306.446.442,00	(7,00)	100,00	1.772.130.471,00

5.1.6.2 Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2022 sebesar Rp132.938.954.284,00 merupakan bantuan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pohuwato yang terdiri dari Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp127.884.917.364,00 dan Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp5.054.036.920,00. Anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	128.013.443.000,00	127.884.917.364,00	(128.525.636,00)	99,90	139.411.833.182,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	6.097.602.500,00	5.054.036.920,00	(1.043.565.580,00)	82,89	3.833.543.200,00
	Jumlah	134.111.045.500,00	132.938.954.284,00	(1.172.091.216,00)	99,13	143.245.376.382,00

5.1.7 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pohuwato meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Anggaran dan realisasi Pembiayaan TA 2022 dapat dirinci pada tabel berikut ini :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	121.491.300.215,00	116.353.065.754,87	(5.138.234.460,13)	95,77	118.782.315.534,15
2	Pengeluaran Pembiayaan	1.476.308.222,00	1.476.308.222,00	0,00	100,00	282.622.755,00
	Jumlah	120.014.991.993,00	114.876.757.532,87	(5.138.234.460,13)	95,72	118.499.692.779,15

Pada TA 2022, realisasi Pembiayaan netto sebesar Rp114.876.757.532,87 atau 95,72% dari anggaran Pembiayaan netto sebesar Rp120.014.991.993,00. Realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.622.935.246,28 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp118.499.692.779,15

5.1.7.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) tahun lalu dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya, dengan anggaran dan realisasi TA 2022 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penggunaan SiLPA	75.660.583.213,00	75.660.583.213,87	0,87	100,00	11.843.975.866,15
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	45.830.717.002,00	40.692.482.541,00	(5.138.234.461,00)	88,79	106.938.339.668,00
	Jumlah	121.491.300.215,00	116.353.065.754,87	(5.138.234.460,13)	95,77	118.782.315.534,15

Pada TA 2022, realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp116.353.065.754,87 atau 95,77% dari anggaran sebesar Rp121.491.300.215,00. Realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.429.249.779,28 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp118.782.315.534,15. Penerimaan Pinjaman Daerah tahap terakhir (tahap ketiga) diterima pada tahun 2022 sebesar Rp40.692.482.541,00, sehingga jumlah kumulatif penerimaan pinjaman daerah PEN pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato dari pencairan tahap pertama hingga pencairan tahap terakhir adalah sebesar Rp147.630.822.209,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tangga Penerimaan	Nilai Penerimaan (Rp)
Pencairan Tahap I	19 Oktober 2021	38.192.264.167,00
Pencairan Tahap II	14 Desember 2021	68.746.075.501,00
Pencairan Tahap III	31 Maret 2022	40.692.482.541,00
Jumlah		147.630.822.209,00

Ketentuan pinjaman daerah PEN dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman nomor : PERJ-118/SMI/0821 tanggal 13 Agustus 2021, antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dengan PT SMI.

5.1.7.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diantaranya menjelaskan bahwa pengeluaran pembiayaan tersebut hanya dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pohuwato TA 2022 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	1.476.308.222,00	1.476.308.222,00	0,00	100,00	282.622.755,00
	Jumlah	1.476.308.222,00	1.476.308.222,00	0,00	100,00	282.622.755,00

Pengeluaran pembiayaan TA 2022 menunjukkan bahwa terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.476.308.222,00 (1% x Rp147.630.822.209,00) yang digunakan untuk pembayaran biaya provisi atas pinjaman PEN. Biaya tersebut merupakan salah satu syarat dalam rangka pengajuan pinjaman PEN kepada PT SMI sesuai dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-118/SMI/0821 tanggal 13 Agustus 2021. Nilai Rp147.630.822.209,00 merupakan jumlah kumulatif pinjaman PEN yang dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

5.1.8 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 sebesar Rp29.433.830.568,30 Nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp46.226.752.645,57 jika dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp75.660.583.213,87. SiLPA TA 2022 sebesar Rp29.433.830.568,30 tersebut termasuk saldo Kas BLUD RSUD Bumi Panua per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.550.452.042,70, saldo Kas Dana Kapitasi BPJS (JKN) pada FKTP yang tersebar di 16 Puskesmas se-Kabupaten Pohuwato sebesar Rp373.423.499,00, saldo Kas Dana BOS sebesar Rp465.518.070,40, dan Kas Lainnya sebesar Rp175.659,60.

5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2022 sebesar Rp75.660.583.213,87

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA TA 2021 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp75.660.583.213,87

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022 sebesar Rp29.433.830.568,30 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Saldo Anggaran Lebih Awal	75.660.583.213,87
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	75.660.583.213,87
3	Sisa Lebih Anggaran (Silpa)	29.433.830.568,30
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 29.433.830.568,30

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada TA 2022 sebesar Rp29.433.830.568,30.

Saldo Anggaran lebih akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.433.830.568,30 sedangkan saldo kas Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp29.521.084.502,30. Selisih sebesar Rp87.253.934,00 merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp87.253.934,00

5.3 PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Penjelasan pos-pos Neraca Pemerintah Kabupaten Pohuwato per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Pohuwato per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.473.980.202.177,01

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
1	Aset Lancar	58.204.801.997,56	94.295.814.971,54	(36.091.012.973,98)
2	Investasi Jangka Panjang	82.781.150.683,00	88.750.030.964,00	(5.968.880.281,00)
3	Aset Tetap	1.239.213.933.991,60	1.211.829.229.161,91	27.384.704.829,69
4	Aset Lainnya	88.380.299.134,62	79.492.139.451,45	8.888.159.683,17
	Jumlah	1.468.580.185.806,78	1.474.367.214.548,90	(5.787.028.742,12)

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, dan Aset Selain Kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp59.690.968.351,04 disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
1	Kas di Kas Daerah	25.130.972.493,60	60.154.849.705,17	(35.023.877.211,57)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	510.000,00	0,00	510.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	32.737,00	0,00	32.737,00
4	Kas di Bendahara BLUD	3.550.452.042,70	13.844.665.091,70	(10.294.213.049,00)
5	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	373.423.499,00	990.541.299,00	(617.117.800,00)
6	Kas di Bendahara BOS	465.518.070,40	718.002.118,45	(252.484.048,05)
7	Setara Kas	0,00	0,00	0,00
8	Kas Lainnya	175.659,60	95.396.571,60	(95.220.912,00)
9	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
10	Piutang Pajak	6.475.419.160,29	5.916.062.784,29	559.356.376,00
11	Penyisihan Piutang Pajak	(3.166.307.740,99)	(3.086.614.274,49)	(79.693.466,50)
12	Piutang Retribusi	606.483.374,00	608.562.952,00	(2.079.578,00)
13	Penyisihan Piutang Retribusi	(101.310.864,11)	(99.093.822,00)	(2.217.042,11)
14	Piutang Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.244.443.830,00	0,00	3.244.443.830,00
15	Penyisihan Piutang Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	(16.222.219,15)	0,00	(16.222.219,15)
16	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	7.865.851.074,99	910.191.126,00	6.955.659.948,99
17	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(384.413.351,93)	(530.582.190,10)	146.168.838,17
18	Piutang Bagi Hasil Pajak	1.580.247.999,00	0,00	1.580.247.999,00
19	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak	(7.901.240,00)	0,00	(7.901.240,00)
20	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.436.830.029,00	1.274.940.491,36	161.889.537,64
21	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(228.198.816,22)	(190.817.840,88)	(37.380.975,34)
22	Piutang Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
23	Penyisihan Piutang Lainnya	(45.000.000,00)	(45.000.000,00)	0,00
24	Denda Pajak	2.035.221.025,26	1.940.751.943,09	94.469.082,17
25	Penyisihan Denda Pajak	(3.650.000,00)	(3.650.000,00)	0,00
26	Denda Piutang Lainnya	(3.166.307.740,99)	7.300.000,00	(3.173.607.740,99)
27	Penyisihan Denda Piutang Lainnya	(101.310.864,11)	(3.650.000,00)	(97.660.864,11)
28	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00
29	Persediaan	12.614.843.840,22	11.748.959.016,35	865.884.823,87
	Jumlah	58.204.801.997,56	94.295.814.971,54	(36.091.012.973,98)

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato per 31 Desember 2022 pada rekening giro bank PT Bank SulutGo, Bank Mandiri Marisa, Bank BRI Marisa, dan Bank BNI Marisa yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebesar Rp25.130.972.493,60 Saldo Kas di Kas Daerah mengalami penurunan sebesar Rp35.023.877.211,57 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp60.154.849.705,17

Rincian saldo rekening Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

No.	No. Rekening	Nama Bank	Tujuan Pembukaan Rekening	Saldo
1	010.01.12.020003.5	BANK SULUTGO CAB. MARISA (DAU)	Penerimaan Dana Transfer	12.604.623.208,62
2	010.01.12.020018.7	BANK SULUTGO (PAD)	Penerimaan Daerah	5.617.195.655,23
3	010.01.12.000107.5	BANK SULUTGO (GIRO)	Layanan SP2D	2.252.630.433,56
4	150-00-0410927.6	BANK MANDIRI (GIRO)	Penampung Bunga Deposito	0,19
5	0648.01.00008530.9	BANK BRI MARISA (GIRO)	Penampung Bunga Deposito	(666,00)
7	0648.01.000514.30.8	BANK BRI MARISA (PENGELUARAN)	Layanan SP2D	4.656.523.862,00
8	040.03.01000141.0	BANK SULUTGO CAPEM RANDANGAN (DEPO)	Meningkatkan penerimaan daerah dari bunga Deposito	0,00
	JUMLAH			25.130.972.493,60

Rekening 0648.01.00008530.9 yang merupakan penerimaan Kas Umum Daerah BRI bersaldo minus sebesar Rp666,00 dikarenakan terdapat kelebihan pemindahbukuan dan sudah disetor kembali ke Kas Daerah.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan Kas yang terdapat pada Rekening Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah (UKM) yang sampai dengan akhir 31 Desember 2022 masih mengendap di rekening atas nama DINAS PERINDAGKOP dengan nomor rekening 514801000092301 sebesar Rp510.000,00 dan belum dilakukan penyeteroran ke Kas Daerah.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Kas Jasa Giro yang terdapat pada Rekening Bendahara Pengeluaran Puskesmas Pancakarsa 1 yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dipindahbukukan sebesar Rp32.737,00.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan kas yang terdapat pada BLUD RSUD Bumi Panua per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.550.452.042,70 Saldo Kas di BLUD mengalami penurunan sebesar Rp10.294.213.049,00 dari saldo Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.844.665.091,70 Saldo Kas di BLUD terdiri dari:

No.	Rekening	Tujuan Rekening	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Kas Bendahara Penerimaan		4.543.133,00	0,00
2	Kas Bendahara Pengeluaran		11.898.077,70	28.747.936,70
3	Kas Rekening Bank SULUT No. Rek. 010-01-23-000002-7	Rekening Pengeluaran	3.448.717.582,00	13.792.089.821,00
4	Kas Rekening Bank SULUT No. Rek. 010-01-14-000010-6	Rekening Penerimaan BLUD	85.293.250,00	23.827.334,00
	Jumlah		3.550.452.042,70	13.844.665.091,70

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN

Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan saldo Dana Kapitasi JKN pada 16 Puskesmas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per 31 Desember 2022 sebesar Rp373.423.499,00. Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN mengalami Penurunan sebesar Rp617.117.800,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp990.541.299,00 Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 2**. Rincian Saldo di Bendahara Dana Kapitasi JKN sebagai berikut:

No.	Nama Unit Kerja	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
1	Bendahara Dana Kapitasi JKN Kecamatan Dengilo	21.516.627,00	92.048.261,00	(70.531.634,00)
2	Bendahara Dana Kapitasi JKN Kecamatan Buntulia	132.904.147,00	270.507.171,00	(137.603.024,00)
3	Bendahara Dana Kapitasi JKN Kecamatan Duhiaada	0,00	18.860.233,00	(18.860.233,00)
4	Bendahara Dana Kapitasi JKN Kecamatan Patilanggio	39.923.157,00	40.272.702,00	(349.545,00)
5	Bendahara Dana Kapitasi JKN Kecamatan Lemito	20.087.370,00	7.691.880,00	12.395.490,00
6	Bendahara Dana Kapitasi JKN Motolohu	42.338,00	2.158.481,00	(2.116.143,00)
7	Bendahara Dana Kapitasi JKN Kecamatan Popayato Barat	237.074,00	853.940,00	(616.866,00)
8	Bendahara Dana Kapitasi JKN Wonggarasi II	5.348.746,00	87.943,00	5.260.803,00
9	Bendahara Dana Kapitasi JKN Kecamatan Marisa	22.715.457,00	37.137.334,00	(14.421.877,00)
10	Bendahara Dana Kapitasi JKN Kecamatan Popayato	14.470.253,00	47.793.465,00	(33.323.212,00)
11	Bendahara Dana Kapitasi JKN Panca Karsa I	716.216,00	23.403.224,00	(22.687.008,00)
12	Bendahara Dana Kapitasi JKN Panca Karsa II	464.240,00	18.453.745,00	(17.989.505,00)
13	Bendahara Dana Kapitasi JKN Wonggarasi I	192.010,00	16.943.733,00	(16.751.723,00)
14	Bendahara Dana Kapitasi JKN Kecamatan Paguat	114.309.102,00	390.684.268,00	(276.375.166,00)
15	Bendahara Dana Kapitasi JKN Kecamatan Popayato Timur	494.662,00	460.161,00	34.501,00
16	Bendahara Dana Kapitasi JKN Wonggarasi	2.100,00	23.184.758,00	(23.182.658,00)
	Jumlah	373.423.499,00	990.541.299,00	(617.117.800,00)

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara Dana BOS

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS merupakan saldo Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat yang ditransfer langsung ke rekening sekolah dalam bentuk hibah. Posisi Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp Saldo 465.518.070,40 Kas di Bendahara Dana BOS ini mengalami penurunan sebesar Rp252.484.048,05 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp718.002.118,45.

Rincian Kas di Bendaharan Dana BOS untuk tiap-tiap satuan pendidikan dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

Rincian Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

No.	Sekolah	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)
1	SD	284.182.305,80	517.032.717,25	(232.850.411,45)
2	SMP	181.335.764,60	200.969.401,20	(19.633.636,60)
	Jumlah	465.518.070,40	718.002.118,45	(252.484.048,05)

5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya sebesar Rp175.659,60 merupakan Kas pada Rekening Kas di Bendahara Dana BOS.

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 4**

5.3.1.1.8 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan Piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi kualitas piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang dapat disajikan secara *Net Realizable Value (NRV)*.

Rincian Piutang dapat dilihat pada **Lampiran 5**

5.3.1.1.8.1 Piutang Pajak

Piutang Pajak tahun 2022 disajikan sebesar Rp6.475.419.160,29 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2021, yaitu sebesar Rp5.916.062.784,29, sehingga Piutang Pajak per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp559.356.376,00 dari Piutang Pajak per 31 Desember 2021.

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
1	Piutang Pajak	6.475.419.160,29	5.916.062.784,29	559.356.376,00
	Jumlah	6.475.419.160,29	5.916.062.784,29	559.356.376,00

Piutang Pajak terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak Daerah sampai dengan batas waktu tertentu. Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
1	Piutang Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Pajak Restoran	237.996.386,00	117.346.190,00	120.650.196,00
3	Piutang Pajak Reklame	63.769.415,00	58.116.915,00	5.652.500,00
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan	651.224.339,00	440.865.087,00	210.359.252,00
5	Piutang Pajak Air Tanah	1.119.780,00	1.119.780,00	0,00
6	Piutang Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.672.614.804,29	1.623.510.059,29	49.104.745,00
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.828.669.436,00	3.655.079.753,00	173.589.683,00
9	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	0,00	0,00
10	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
11	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	0,00	0,00
12	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20.025.000,00	20.025.000,00	0,00
	Jumlah	6.475.419.160,29	5.916.062.784,29	559.356.376,00

Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato untuk penagihan Piutang Pajak yang macet adalah dengan melakukan tindakan persuasif antara lain dengan penagihan langsung kepada wajib pajak dan menerbitkan Surat Teguran Pajak Daerah (STPD).

5.3.1.1.8.2 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi tahun 2022 disajikan sebesar Rp606.483.374,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2021, yaitu sebesar Rp608.562.952,00, sehingga Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.079.578,00 dari Piutang Retribusi per 31 Desember 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
1	Piutang Retribusi	606.483.374,00	608.562.952,00	(2.079.578,00)
	Jumlah	606.483.374,00	608.562.952,00	(2.079.578,00)

Piutang Retribusi terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak pemerintah daerah melalui SKPD pengelola terkait yang sampai dengan tanggal Neraca tertentu belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah.

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 Rp606.483.374,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	42.110.800,00	43.660.800,00	(1.550.000,00)
2	Piutang Retribusi Izin Gangguan (SIGU)	7.157.350,00	7.157.350,00	0,00
3	Piutang Retribusi SIUPI SIPI	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
4	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.196.802,00	2.195.802,00	1.000,00
5	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00
6	Piutang Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan -DIKES Non Kapitasi	435.995.000,00	443.939.000,00	(7.944.000,00)
7	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	92.659.000,00	92.659.000,00	0,00
8	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00
9	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	501.000,00	501.000,00	0,00
10	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	7.413.422,00	0,00	7.413.422,00
	Jumlah	606.483.374,00	608.562.952,00	(2.079.578,00)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp606.483.374,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.079.578,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp608.562.952,00.

Piutang Retribusi per SKPD dapat dilihat dalam tabel berikut :

No.	SKPD	Jumlah
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3.610.800,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.000.000,00
3	Dinas Pertanian	16.500.000,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.054.152,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	15.750.000,00
6	Dinas Kesehatan	435.995.000,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	93.160.000,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7.413.422,00
	Jumlah	606.483.374,00

5.3.1.1.8.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2022 disajikan sebesar Rp3.244.443.830,00

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
1	Piutang Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.244.443.830,00	0,00	3.244.443.830,00
	Jumlah	3.244.443.830,00	0,00	3.244.443.830,00

5.3.1.1.8.4 Piutang Lain - Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2022 disajikan sebesar Rp9.901.072.100,25 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2021 sebesar Rp2.850.943.069,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.955.659.948,99.

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
1	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	7.865.851.074,99	910.191.126,00	6.955.659.948,99
3	Piutang Denda Pajak	2.035.221.025,26	1.940.751.943,09	94.469.082,17
	Jumlah	9.901.072.100,25	2.850.943.069,09	6.955.659.948,99

Piutang Lain - Lain PAD yang Sah (bruto) per 31 Desember 2022, terdiri atas:

Piutang pendapatan BLUD RSUD Bumi Panua				
Piutang JKN/BPJS	5.647.776.800,00	(a)		
Piutang Dana Talangan (menggunakan anggaran Dinas Kesehatan Kab. Pohuwato)	1.690.308.628,00	(b)		
Piutang Layanan Umum	440.326.016,00	(c)		
Koreksi piutang pendapatan pelayanan kesehatan pada tahun 2022 yang belum diakui oleh RSUD Bumi Panua per 31 Desember 2022	75.523.388,00	(d)		
Jumlah piutang piutang pendapatan BLUD RSUD Bumi Panua			7.853.934.832,00	(e = a+b+c+d)
Piutang pendapatan bunga			11.904.742,99	
Piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan			11.500,00	
Jumlah Piutang Lain - Lain PAD yang Sah (bruto) per 31 Desember 2022			<u>7.865.851.074,99</u>	

5.3.1.1.8.5 Piutang Bagi Hasil Pajak

Piutang Bagi Hasil Pajak disajikan tahun 2022 telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.580.247.999,00

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
1	Piutang Bagi Hasil Pajak	1.580.247.999,00	0,00	1.580.247.999,00
	Jumlah	1.580.247.999,00	0,00	1.580.247.999,00

Piutang Bagi Hasil Pajak merupakan hak Pemerintah Kabupaten Pohuwato dari Provinsi Gorontalo atas Bagi Hasil Pajak yang dihitung berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.580.247.999,00. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
1	Piutang Bagi Hasil Provinsi Pajak Air Permukaan	9.039.617,00	0,00	9.039.617,00
2	Piutang Bagi Hasil Provinsi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	461.756.212,00	0,00	461.756.212,00
3	Piutang Bagi Hasil Provinsi Pajak Kendaraan Bermotor	578.318.124,00	0,00	578.318.124,00
4	Piutang Bagi Hasil Provinsi Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Bagi Hasil Provinsi BBN-KB	531.134.046,00	0,00	531.134.046,00
	Jumlah	1.580.247.999,00	0,00	1.580.247.999,00

5.3.1.1.8.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2022 disajikan sebesar Rp1.436.830.029,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2021 sebesar Rp1.274.940.491,36 mengalami kenaikan sebesar Rp161.889.537,64.

Rincian Bagian Lancar TGR dapat dilihat pada Lampiran 6

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.436.830.029,00	1.274.940.491,36	161.889.537,64
	Jumlah	1.436.830.029,00	1.274.940.491,36	161.889.537,64

5.3.1.1.8.7 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan Piutang Dana LUEP tahun 2022 disajikan sebesar Rp52.300.000,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2021 sebesar Rp52.300.000,00.

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
1	Piutang Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2	Denda Piutang Lainnya	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00
	Jumlah	52.300.000,00	52.300.000,00	0,00

5.3.1.1.8.8 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang disajikan tahun 2022 disajikan sebesar Rp5.741.756.484,52 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2021 sebesar Rp5.568.162.202,35. mengalami peningkatan sebesar Rp81.910.508,61,00.

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(3.166.307.740,99)	(3.086.614.274,49)	(79.693.466,50)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(101.310.864,11)	(99.093.822,00)	(2.217.042,11)
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(16.222.219,15)	0,00	(16.222.219,15)
4	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(384.413.351,93)	(530.582.190,10)	146.168.838,17
5	Penyisihan Piutang Denda Pajak	(1.788.752.251,62)	(1.612.404.074,88)	(176.348.176,74)
6	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak	(7.901.240,00)	0,00	(7.901.240,00)
7	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(228.198.816,22)	(190.817.840,88)	(37.380.975,34)
8	Penyisihan Piutang Lainnya	(45.000.000,00)	(45.000.000,00)	0,00
9	Penyisihan Denda Piutang Lainnya	(3.650.000,00)	(3.650.000,00)	0,00
	Jumlah	(5.741.756.484,02)	(5.568.162.202,35)	(81.910.508,61)

5.3.1.1.9 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. merupakan pengeluaran biaya tahun 2022 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2022 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

5.3.1.1.10 Persediaan

Persediaan merupakan aset yang memenuhi kriteria habis pakai kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang berada di satuan kerja. Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.614.843.840,22 mengalami kenaikan persediaan sebesar Rp865.884.823,87 dari TA 2021 sebesar Rp11.602.538.386,35 dengan rincian berikut:

Khusus untuk kebijakan akuntansi yang terkait dengan akuntansi Persediaan telah dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi. Dalam penjelasan pos ini disajikan saldo Persediaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah. Rincian Persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 7**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.614.843.840,22 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	28.477.800,00	8.400.000,00	20.077.800,00
2	Persediaan Obat	7.736.082.979,43	6.645.213.890,24	1.090.869.089,19
3	Persediaan Bahan Lainnya	2.386.551.715,69	2.448.390.430,48	(61.838.714,79)
4	Persediaan Natura	237.236.470,10	88.369.275,63	148.867.194,47
5	Persediaan Bahan Cetak	520.526.985,00	342.105.350,00	178.421.635,00
6	Persediaan Alat Listrik	0,00	0,00	0,00
7	Persediaan Isi Tabung Gas	7.459.200,00	8.800.000,00	(1.340.800,00)
8	Persediaan Alat Bahan untuk Kegiatan Lainnya	95.650.750,00	282.124.000,00	(186.473.250,00)
9	Persediaan Bahan Kimia	1.184.857.940,00	1.779.135.440,00	(594.277.500,00)
10	Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
11	Persediaan berjaga-jaga	418.000.000,00	0,00	418.000.000,00
12	Benda Pos	0,00	146.420.630,00	(146.420.630,00)
	Jumlah	12.614.843.840,22	11.748.959.016,35	865.884.823,87

Metode Pencatatan Persediaan yang digunakan adalah metode periodik. Pengukuran Persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar, kecuali untuk Persediaan yang nilainya cukup material seperti obat-obatan, peralatan kesehatan atau Barang Medis Habis Pakai (BMHP) kesehatan yang menggunakan metode perpetual-FIFO (*First in First out*).

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pohuwato per 31 Desember 2022 sebesar Rp82.781.150.683,00 terdiri dari Investasi Non Permanen dengan nilai buku sebesar Rp0,00 dan Investasi Permanen dengan nilai buku sebesar Rp82.781.150.683,00.

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato berupa dana bergulir, yaitu dana yang digulirkan/dipinjamkan kepada kelompok masyarakat dan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dana bergulir tersebut terdapat di 2 (dua) SKPD, yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Investasi Non Permanen yang disajikan sebesar Rp0,00 terdapat pada 2 (dua) SKPD, yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Atas saldo Investasi Non Permanen tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato telah menyajikan nilai investasi berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) sampai dengan tahun 2018.

Investasi Non Permanen pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan merupakan dana bergulir. Berdasarkan hasil inventarisasi, dana bergulir yang dapat direalisasikan sebesar Rp0,00

No.	SKPD	31 Desember 2021	Diragukan Tertagih	31 Desember 2022 (NRV)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	250.000.000,00	(250.000.000,00)	0,00
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	2.515.550.000,00	(2.515.550.000,00)	0,00
	Jumlah	2.765.550.000,00	(2.765.550.000,00)	0,00

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Saldo Investasi Permanen Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato per 31 Desember 2022 sebesar Rp82.781.150.683,00 terdiri dari:

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Mutasi		Saldo 31 Desember 2022
			Bertambah	Berkurang	
1	PT Bank Sulutgo	19.119.609.739,00	0,00	0,00	19.119.609.739,00
2	PUDAM Tirta Moolango	69.630.421.225,00	0,00	5.968.880.281,00	63.661.540.944,00
	Jumlah	88.750.030.964,00	0,00	5.968.880.281,00	82.781.150.683,00

a. PT Bank SulutGo

Investasi Permanen pada PT Bank SulutGo menggunakan metode biaya karena proporsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pohuwato di bawah 30%. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak memengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Pohuwato per 31 Desember 2022 pada PT Bank SulutGo adalah sebesar Rp19.119.609.739,00. Tidak terdapat tambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato pada PT Bank SulutGo selama TA 2022.

b. PUDAM Tirta Moolango

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Tirta Moolango per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.661.540.944,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp69.630.421.225,00. Saldo ini mengalami penurunan sebesar Rp5.968.880.281,00 atau sebesar 6% dari total penyertaan modal Tahun 2021.

Penilaian investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato pada PUDAM Tirta Moolango menggunakan metode ekuitas, dimana metode ini mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi ini kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Dengan menggunakan metode ekuitas, Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah.

-	Saldo Awal Penyertaan Modal	69.630.421.225,00
-	Penyertaan Modal	0,00
-	Koreksi saldo penyertaan modal Pemerintah berdasarkan metode ekuitas	5.968.880.281,00
	Saldo Penyertaan Modal Per 31 Desember 2022	63.661.540.944,00

5.3.1.3 Aset Tetap

Khusus untuk kebijakan akuntansi yang terkait dengan Akuntansi Aset Tetap telah dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 59 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Kebijakan Akuntansi. Dalam penjelasan pos ini disajikan perbandingan antara saldo Aset Tetap menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pohuwato per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.246.595.059.716,60 mengalami kenaikan sebesar Rp34.785.791.374,69 dari TA 2021 sebesar Rp1.211.809.263.341,91. Rincian Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal Tahun 2022	Realisasi Belanja Modal 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
				Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 - 6
1	Tanah	96.623.208.962,04	463.206.040,00	139.899.750,00	324.629.255,00	96.901.685.497,04
2	Peralatan dan Mesin	464.346.364.976,70	16.835.630.223,00	2.066.185.360,00	11.298.284.403,00	471.949.896.156,70
3	Gedung dan Bangunan	683.929.452.231,76	15.219.635.271,00	17.403.060.111,00	3.043.234.138,00	713.508.913.475,76
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.130.084.331.614,78	151.716.799.542,00	65.218.240.797,69	16.933.140.799,00	1.330.086.231.155,47
5	Aset Tetap Lainnya	53.923.254.243,30	2.244.915.239,00	191.507.040,00	0,00	56.359.676.522,30
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	65.743.827.207,00	0,00	16.380.829.830,00	61.164.695.508,00	20.959.961.529,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.282.821.210.073,67)	0,00	(170.373.145.615,00)	(2.641.925.344,00)	(1.450.552.430.344,67)
	Jumlah	1.211.829.229.161,91	186.480.186.315,00	(68.973.422.726,31)	90.122.058.759,00	1.239.213.933.991,60

5.3.1.3.1 Tanah

Saldo Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp96.601.685.497,04 mengalami kenaikan sebesar Rp278.476.535,00 dari TA 2021 sebesar Rp96.623.208.962,04 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal Tahun 2022	Realisasi Belanja Modal 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
				Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 - 6
1	Tanah	96.623.208.962,04	463.206.040,00	139.899.750,00	324.629.255,00	96.901.685.497,04

Penambahan Aset Tetap Tanah selama Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Reklas Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Tanah (Pekerjaan Pematangan Lahan SMPN Wanggarasi) - Dinas PUPR	37.973.400,00
Pengakuan Retensi 5% Pekerjaan Pematang Lahan SMPN Wanggarasi - Dinas PUPR	1.998.600,00
Reklas atas Beban Jasa Konsultasi ke Aset Tanah (Pembayaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandar Udara - Dinas Perhubungan	99.927.750,00
	139.899.750,00

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Reklas Aset Tanah ke Aset Tetap Lainnya (Pembayaran Biaya Sertifikat Tanah - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	706.040,00
Penghapusan BMD sesuai SK Bupati Nomor: 620/24/XII/2022 - Kec. Wanggarasi	323.923.215,00
	324.629.255,00

Rincian Tanah dapat dilihat pada **Lampiran 8.a**

Pemerintah Kabupaten Pohuwato memiliki Aset Tetap Tanah yang memenuhi definisi pengakuan sebagai Properti Investasi sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 17 tahun 2021 tentang Properti Investasi yang menyatakan bahwa Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun Aset Tetap Tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Dokumen Perjanjian	Masa Perjanjian	Pendapatan yang Diperoleh (Rp)	Pihak Penyewa	Tujuan
Tanah	449.a/HKM/VI/2014	5 tahun	37.500.000,00	Bank SulutGo	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan fasilitas <i>Automatic Teller Machine (ATM)</i>

Namun demikian, dikarenakan belum terdapatnya Bagan Akun Standar (BAS) per 31 Desember 2022 untuk akun Properti Investasi dan belum disusunnya kebijakan akuntansi terkait Properti Investasi oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato hingga akhir 31 Desember 2022, sehingga Pemerintah Kabupaten Pohuwato belum dapat melakukan reklasifikasi Aset Tetap Tanah tersebut ke akun yang sesuai, yaitu Properti Investasi, dan masih menyajikannya sebagai Aset Tetap Tanah.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp479.306.641.881,70 mengalami kenaikan sebesar Rp14.960.276.905,00 dari TA 2021 sebesar Rp464.346.364.976,70 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal Tahun 2022	Realisasi Belanja Modal 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
				Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 - 6
1	Peralatan dan Mesin	464.346.364.976,70	16.835.630.223,00	2.066.185.360,00	11.298.284.403,00	471.949.896.156,70

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Hibah dari Pemerintah Pusat Sebesar	1.200.540.000,00
- Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Reklas ke Beban Barang dan Jasa Sebesar	839.063.360,00
- Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Reklas dari Beban Barang dan Jasa Sebesar	26.582.000,00
Jumlah	2.066.185.360,00

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Aset yang Ekstrakomtabel Sebesar	863.502.770,00
- Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Reklas ke Beban Barang dan Jasa Sebesar	229.005.423,00
- Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Penghapusan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 197/24/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 Sebesar	526.795.000,00
- Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Penghapusan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 620/24/XII/2022 tanggal 6 Juni 2022 Sebesar	2.277.335.485,00
- Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Sebesar	44.900.000,00
- Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Koreksi Audited atas Reklas ke Aset Lain-lain Sebesar	7.356.745.725,00
Jumlah	11.298.284.403,00

Rincian Aset Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran 8.b**

Per 31 Desember 2022, terdapat Aset Tetap - Peralatan dan Mesin yang dipinjam pakai kepada instansi vertikal, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Aset	Nilai Perolehan (Rp)	Tahun Perolehan	Peminjam	Dokumen Perjanjian	Jangka Waktu Peminjaman
Mobil DM 1750 DC	323.621.580,00	2019	Polres Pohuwato	Surat Perjanjian Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda Empat Nomor: 900/BKD/295.a/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019	5 (lima) tahun terhitung sejak 1 Juli 2019 s.d. 1 Juli 2024 dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali
Mobil DM 1751 DC	323.621.580,00	2019	Kejaksaaan Negeri Marisa	Surat Perjanjian Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda Empat Nomor: 900/BKD/277.a/IV/2019 tanggal 22 April 2019	5 (lima) tahun terhitung sejak 22 April 2019 s.d. 22 April 2024 dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali
Mobil DM 1753 DC	323.621.580,00	2019	Kodim 1313 Pohuwato	Surat Perjanjian Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda Empat Nomor: 900/BKD/296.a/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019	5 (lima) tahun terhitung sejak 1 Juli 2019 s.d. 1 Juli 2024 dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali
Mobil DM 1767 D	122.500.000,00	2004	PUDAM Tirta Moolango Kabupaten Pohuwato	Surat Perjanjian Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda Empat Nomor: 900/BKD/46.a/1/2020 tanggal 22 Januari 2020	5 (lima) tahun terhitung sejak 22 Januari 2020 s.d. 22 Januari 2025 dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali
Mobil DM 8002 D	94.500.000,00	2006	PUDAM Tirta Moolango Kabupaten Pohuwato	Surat Perjanjian Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda Empat Nomor: 900/BKD/46.c/1/2020 tanggal 22 Januari 2020	5 (lima) tahun terhitung sejak 22 Januari 2020 s.d. 22 Januari 2025 dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali
Mobil DM 79 D	176.316.000,00	2005	PUDAM Tirta Moolango Kabupaten Pohuwato	Surat Perjanjian Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda Empat Nomor: 900/BKD/47.a/1/2020 tanggal 23 Januari 2020	5 (lima) tahun terhitung sejak 23 Januari 2020 s.d. 23 Januari 2025 dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali

5.3.1.3.3 Gedung Dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp713.533.293.475,76 Aset Tetap Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp29.603.841.244 dari TA 2021 sebesar Rp683.929.452.231,76 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal Tahun 2022	Realisasi Belanja Modal 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
				Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 - 6
1	Gedung dan Bangunan	683.929.452.231,76	15.219.635.271,00	17.403.060.111,00	3.043.234.138,00	713.508.913.475,76

Penambahan Aset Gedung dan Bangunan selama Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penambahan Aset Tetap Gedung Bangunan atas Reklas dari Beban Barang dan Jasa Sebesar	2.648.569.051,00
- Penambahan Aset Tetap Gedung Bangunan atas Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah menjadi Aset Tetap Sebesar	303.922.650,00
- Penambahan Aset Tetap Gedung Bangunan atas Hibah dari Pemerintah Pusat Sebesar	14.326.353.210,00
- Penambahan Aset Tetap Gedung Bangunan atas Pengakuan Retensi Sebesar	79.315.200,00
- Penambahan Aset Tetap Gedung Bangunan atas Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin Sebesar	44.900.000,00
Jumlah	17.403.060.111,00

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Penghapusan Barang Milik Daerah Sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 620/24/XII/2022 Sebesar	534.014.109,00
- Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Tanah Sebesar	37.973.400,00
- Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya Sebesar	83.325.000,00
- Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Barang dan Jasa Sebesar	25.025.000,00
- Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin Sebesar	839.063.360,00
- Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Retensi Gedung dan Bangunan sebesar	1.499.453.269,00
- Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Koreksi Audited atas Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Beban Pemeliharaan Gedung Sebesar	24.380.000,00
Jumlah	3.043.234.138,00

Rincian Aset Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 8.c**

Pemerintah Kabupaten Pohuwato memiliki Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang memenuhi definisi pengakuan sebagai Aset Konsesi Jasa sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 16 tahun 2021 tentang Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi yang menyatakan bahwa Aset Konsesi Jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

(a) disediakan oleh mitra, yang:

- dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
- merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau

(b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:

- merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
- merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebagai pemberi konsesi menyewakan aset kepada CV. Anugrah Ipratama sebagai mitra untuk memberikan layanan ke masyarakat, yaitu Objek Wisata Libu melalui Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 100/PEM-PHWT/12/III/2021. Pemerintah Kabupaten Pohuwato memiliki pengendalian setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi dalam bentuk kepemilikan aset yang telah dibangun atas aset tersebut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pohuwato dapat mengendalikan jenis jasa dan tarif yang harus diberikan, yaitu pelayanan kegiatan masyarakat sebagai dasar pembagian hasil pendapatan pengelolaan gedung dan bangunan dengan mitra.

Namun demikian, dikarenakan belum terdapatnya Bagan Akun Standar (BAS) per 31 Desember 2022 untuk akun Aset Konsesi Jasa dan belum disusunnya kebijakan akuntansi terkait Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato hingga akhir 31 Desember 2022, sehingga Pemerintah Kabupaten Pohuwato belum dapat melakukan reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan tersebut ke akun yang sesuai, yaitu Aset Konsesi Jasa, dan masih menyajikannya sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pohuwato memiliki Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang memenuhi definisi pengakuan sebagai Properti Investasi sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 17 tahun 2021 tentang Properti Investasi yang menyatakan bahwa Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Dokumen Perjanjian	Masa Perjanjian	Pendapatan yang Diperoleh (Rp)	Pihak Penyewa	Tujuan
Gedung dan Bangunan	518/DPPK&UKM/PHWT/74.a/III/2020	3 tahun	120.000.000,00 selama 3 tahun atau 40.000.000,00 per tahun	Bank SulutGo	Pemanfaatan gedung petak yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah milik Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang digunakan sebagai Kantor Operasional Bank SulutGo KCP Paguat
Gedung dan Bangunan	800/RSUD.Phwt/7/II/2015	5 tahun dan dapat diperpanjang otomatis	10.000.000,00 per tahun	Bank SulutGo	Sewa ruangan sebagian dari gedung kantor RSUD Kabupaten Pohuwato sebagai kantor kas kecil oleh Bank SulutGo Cabang Marisa
Gedung dan Bangunan	800/BPKAD-PHWT/23/I/2015	1 tahun dan dapat diperpanjang dengan <i>addendum</i>	10.000.000,00 per tahun	Bank SulutGo	Sewa ruangan sebagian dari gedung kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato sebagai kantor kas kecil oleh Bank SulutGo Cabang Marisa

Namun demikian, dikarenakan belum terdapatnya Bagan Akun Standar (BAS) per 31 Desember 2022 untuk akun Properti Investasi dan belum disusunnya kebijakan akuntansi terkait Properti Investasi oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato hingga akhir 31 Desember 2022, sehingga Pemerintah Kabupaten Pohuwato belum dapat melakukan reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan tersebut ke akun yang sesuai, yaitu Properti Investasi, dan masih menyajikannya sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.130.086.231.155,47 mengalami kenaikan sebesar Rp200.001.899.540,69 dari tahun 2021 sebesar Rp1.130.084.331.614,78 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal Tahun 2022	Realisasi Belanja Modal 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
				Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 - 6
1	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	1.130.084.331.614,78	151.716.799.542,00	65.218.240.797,69	16.933.140.799,00	1.330.086.231.155,47

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan selama Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan atas Hibah dari Pemerintah Pusat Sebesar	3.355.244.133,69
- Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan atas Retensi Sebesar	365.334.806,00
- Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan atas Reklas dari Barang dan Jasa Sebesar	636.889.000,00
- Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan atas Konstruksi Dalam Pekerjaan yang telah menjadi Aset Tetap Sebesar	60.860.772.858,00
Jumlah	65.218.240.797,69

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan selama Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan atas Reklas ke Barang dan Jasa Sebesar	99.935.000,00
- Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan atas Reklas ke Aset Lainnya Sebesar	49.950.000,00
- Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan atas Retensi yang sudah diakui Tahun lalu Sebagai Aset Tetap Sebesar	601.600.969,00
- Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan yang menjadi Konstruksi Dalam Pekerjaan Sebesar	16.181.654.830,00
Jumlah	16.933.140.799,00

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 8.d**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap berupa Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp56.359.676.522,30 mengalami kenaikan sebesar Rp2.436.422.279,00 dari tahun 2021 sebesar Rp53.923.254.243,30 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal Tahun 2022	Realisasi Belanja Modal 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
				Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 - 6
1	Aset Tetap Lainnya	53.923.254.243,30	2.244.915.239,00	191.507.040,00	0,00	56.359.676.522,30

Penambahan Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penambahan Aset Tetap Lainnya atas Reklas dari Barang dan Jasa Sebesar	190.801.000,00
- Penambahan Aset Tetap Lainnya atas Reklas dari Aset Tetap Tanah Sebesar	706.040,00
Jumlah	191.507.040,00

Rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 8.e**

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.959.961.529,00 mengalami penurunan sebesar Rp44.763.904.858,00 dari tahun 2021 sebesar Rp65.743.827.207,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal Tahun 2022	Realisasi Belanja Modal 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
				Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 - 6
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	65.743.827.207,00	0,00	16.380.829.830,00	61.164.695.508,00	20.959.961.529,00

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penambahan Konstruksi Dalam Pekerjaan dari aset Jalan, Jaringan dan Irigasi	16.380.829.830,00
Jumlah	16.380.829.830,00

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pengurangan Konstruksi Dalam Pekerjaan atas Gedung dan Bangunan
- Pengurangan Konstruksi Dalam Pekerjaan atas Jalan, Jaringan Irigasi

303.922.650,00

60.860.772.858,00

Jumlah

61.164.695.508,00

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 9**

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.450.552.430.344,67 mengalami kenaikan sebesar Rp167.731.220.271,00 dari TA 2021 sebesar Rp1.282.821.210.073,67 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal Tahun 2022	Realisasi Belanja Modal 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
				Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 - 6
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	335.084.897.522,95	0,00	48.477.233.149,00	2.491.331.318,00	381.070.799.353,95
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	227.689.421.185,43	0,00	29.939.118.517,00	150.594.026,00	257.477.945.676,43
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	718.807.407.192,29	0,00	91.720.106.989,00	0,00	810.527.514.181,29
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.239.484.173,00	0,00	236.686.960,00	0,00	1.476.171.133,00
Jumlah		1.282.821.210.073,67	0,00	170.373.145.615,00	2.641.925.344,00	1.450.552.430.344,67

5.3.1.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Pohuwato per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp79.673.988.826,45 mengalami penurunan sebesar Rp261.597.347,50 dari TA 2021 sebesar Rp79.492.139451,45. Rincian Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal Tahun 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Tuntutan Ganti Rugi	3.498.955.939,19	499.298.382,00	323.033.208,83	3.675.221.112,36
2	Aset Tidak Berwujud	6.161.588.207,00	830.776.935,00	0,00	6.992.365.142,00
3	Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud	(5.052.880.984,78)	(833.798.366,00)	0,00	(5.886.679.350,78)
4	Aset Lain-lain	119.046.067.036,04	7.356.745.725,00	866.062.285,00	125.536.750.476,04
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(44.161.590.746,00)	0,00	(866.062.285,00)	(43.295.528.461,00)
6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	1.358.170.216,00	0,00	1.358.170.216,00
Jumlah		79.492.139.451,45	9.211.192.892,00	323.033.208,83	88.380.299.134,62

5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Rugi

5.3.1.4.1.1 Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.675.221.112,36 merupakan nilai Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan SKTJM dan surat keputusan pembebanan kerugian daerah yang Berdasarkan hasil rekonsiliasi data antara Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato atas saldo per 31 Desember 2022 terdapat pengurangan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp184.870.806,00 dan Rincian Aset Lainnya pada TA 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal Tahun 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Tuntutan Ganti Rugi	3.498.955.939,19	499.298.382,00	323.033.208,83	3.675.221.112,36

Rincian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada **Lampiran 10**

5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud

5.3.1.4.2.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud (bruto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.992.365.142,00 mengalami kenaikan sebesar Rp830.776.935,00 dari tahun 2021 sebesar Rp6.161.588.207,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal Tahun 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Aset Tidak Berwujud (bruto)	6.161.588.207,00	830.776.935,00	0,00	6.992.365.142,00
2	Akumulasi Aset Tidak Berwujud	(5.052.880.984,78)	(833.798.366,00)	0,00	(5.886.679.350,78)
3	Aset Tidak Berwujud (netto)	1.108.707.222,22			1.105.685.791,22

Penambahan/Pengurangan TA 2022

Penambahan Aset Lainnya selama Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penambahan Aset Lain-lain atas Reklas Beban Barang dan Jasa ke Aset Lainnya (Pekerjaan E - PAKSI) - Dinas PU Sebesar 89.887.800,00
- Penambahan Aset Lain-lain atas Reklas atas Beban Jasa Konsultasi ke Aset Lainnya (Pekerjaan Penyusunan Dokumen Study Kelayakan untuk 99.972.150,00
- Penambahan Aset Lain-lain atas Reklas Beban Barang dan Jasa ke Aset Lainnya (Review RISPAM Kab. Pohuwato) - Dinas PU Sebesar 143.093.985,00
- Penambahan Aset Lain-lain atas Reklas Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Lainnya (Penyusunan Database Jalan Paket I dan II - Dinas PU Sebesar 149.850.000,00
- Penambahan Aset Lain-lain atas Reklas Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Bangunan Air (Pemeliharaan Saluran Lainnya (Perbaikan Dokumen Revisi 149.985.000,00
- Penambahan Aset Lain-lain atas Reklas Aset Tetap Bangunan Air Bersih ke Aset Lainnya (Review Dokumen SSK) - Dinas PU Sebesar 49.950.000,00
- Penambahan Aset Lain-lain atas Reklas Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya (Perencanaan Kawasan Pesisir Pantai Pohuwato) - Dinas PU 83.325.000,00
- Belanja Barang dan Jasa Pada Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud, Pengadaan Host To Host / Pembuatan Website Pada Dinas 64.713.000,00

Jumlah

830.776.935,00

5.3.1.4.3 Aset Lain-Lain

5.3.1.4.3.1 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp82.241.222.015,04 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal Tahun 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Aset Lain-Lain (bruto)	119.046.067.036,04	7.356.745.725,00	866.062.285,00	125.536.750.476,04
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(44.161.590.746,00)	0,00	(866.062.285,00)	(43.295.528.461,00)
3	Aset Lain-Lain (netto)	74.884.476.290,04			82.241.222.015,04

Penambahan Aset Lain-Lain selama Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penambahan Aset Lain-Lain Koreksi Audited atas Reklas dari Peralatan dan mesin ke Aset Lain-lain Sebesar 7.356.745.725,00

Jumlah

7.356.745.725,00

Pengurangan Aset Lain-Lain Berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2013 selama Tahun 2022 sebesar Rp866.062.285,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penghapusan BMD berdasarkan SK Bupati Nomor: 197/24/VI/2022 Tanggal 6 Juni 2022 866.062.285,00

Jumlah

866.062.285,00

Pengurangan Akumulasi Aset Lain-lain Berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2013 selama Tahun 2022 sebesar Rp866.062.285,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penghapusan BMD berdasarkan SK Bupati Nomor: 197/24/VI/2022 Tanggal 6 Juni 2022 866.062.285,00

Jumlah

866.062.285,00

5.3.1.4.4.1 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan saldo pada Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) dengan Nomor rekening 519000660980 a.n. Rek Lain BI TDF TKD Kab Pohuwato sesuai surat dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor S-292/WPB.29/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022. Adapun rincian saldo Dana Transfer TDF per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal Tahun 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	1.358.170.216,00	0,00	1.358.170.216,00

Penambahan Dana Transfer Treasury Deposit Facility selama Tahun 2022 sebesar Rp1.358.170.216,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penambahan Dana Transfer Treasury Deposit Facility Koreksi Audited atas Pengakuan Saldo Remunerasi ke Daerah Sebesar 1.358.170.216,00

Jumlah

1.358.170.216,00

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp160.830.421.071,95

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 terdiri dari:

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022	Saldo per 31 Desember 2021
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	87.253.934,00	142.871.572,05
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	4.100.856.172,47	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	11.250.000,47	94.191.176,47
5	Utang Belanja	1.760.790.938,06	4.171.269.844,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	11.260.303.990,42	16.792.377.417,38
7	Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
	Jumlah	17.220.455.035,42	21.200.710.009,90

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 sebesar Rp87.253.934,00 terdiri dari:

-	Utang PPh Pusat	30.858.648,00
-	Utang PPN Pusat	29.325.460,00
-	Utang Iuran Wajib Pegawai	3.795.595,00
-	Utang Iuran Jaminan Kematian	63.314,00
-	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.865,00
-	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	19.632.606,00
-	Utang BPJS PNS / Desa	3.571.446,00
		87.253.934,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana Bantuan Operasional Sekolah per 31 Desember 2022 sebesar Rp49.909.066 terdiri dari:

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	PPh 21	8.345.200,00	7.910.200,00	435.000,00
2	PPh 22	0,00	0,00	0,00
3	PPh 23	4.589.460,00	4.309.460,00	516.000,00
4	PPN	280.598.381,00	253.825.530,00	29.325.460,00
5	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	164.098.842,00	144.466.236,00	19.632.606,00
	Jumlah	457.631.883,00	410.511.426,00	49.909.066,00

Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) JKN per 31 Desember 2022 sebesar Rp810.078,00 terdiri dari:

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	PPh 21	171.274.208,00	170.464.130,00	810.078,00
2	PPh 22	12.284.550,11	12.284.550,11	0,00
3	PPh 23	1.100.054,00	1.100.054,00	0,00
4	PPN	83.689.438,00	83.689.438,00	0,00
5	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	268.348.250,11	267.538.172,11	810.078,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp36.534.790,00 terdiri dari:

No	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Iuran Wajib Pegawai	0,00	14.384.691.165,00	14.380.895.570,00	3.795.595,00
2	Iuran Wajib Pegawai 3,25%	0,00	77.863.121,00	77.863.121,00	0,00
3	Taperum	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Askes	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BPJS Kesehatan PNS	0,00	6.957.687.240,00	6.957.414.314,00	272.926,00
6	PPh 21 Honor	0,00	10.036.229.397,00	10.036.229.397,00	0,00
7	PPh Pasal 21 Pembayaran Sekaligus JHT/Pensiun/Pesangon	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
8	PPh Pasal 21 Perorangan Pribadi	0,00	29.049.020,00	0,00	29.049.020,00
9	PPh 22	0,00	635.870.418,00	635.829.168,00	41.250,00
10	PPh 23	0,00	173.797.928,00	173.797.928,00	0,00
11	PPh 4 ayat (2)	0,00	545.440,00	545.440,00	0,00
12	PPh 4 ayat (2) Jasa Konstruksi	0,00	3.745.955.577,00	3.745.955.577,00	0,00
13	PPh 4 ayat (2) Sewa Tanah dan atau Bangunan	0,00	1.503.375.458,00	1.503.375.458,00	0,00
14	PPN	0,00	21.208.710.103,00	21.208.710.103,00	0,00
15	Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

16	JKK	0,00	343.753.615,01	343.746.750,01	6.865,00
17	JKM	0,00	1.028.935.436,00	1.028.872.122,00	63.314,00
18	BPJS Desa	97.286.656,00	0,00	93.988.136,00	3.298.520,00
	Jumlah	97.286.656,00	60.126.471.218,01	60.187.223.084,01	36.534.790,00

Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BLUD per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 terdiri dari :

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	PPh 21	1.177.128.935,00	1.177.128.935,00	0,00
2	PPh 22	177.639.759,00	177.639.759,00	0,00
3	PPh 23	14.616.900,00	14.616.900,00	0,00
4	PPh Final	2.550.396,00	2.550.396,00	0,00
5	PPN	1.234.530.892,00	1.234.530.892,00	0,00
	Jumlah	2.606.466.882,00	2.606.466.882,00	0,00

Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 11**

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.250.000,47 Rincian saldo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2021	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	62.941.176,47	0,00	62.941.176,00	0,47
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00
3	RSUD Bumi Panua	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sekretariat Daerah	18.750.000,00	0,00	7.500.000,00	11.250.000,00
	Jumlah	94.191.176,47	0,00	82.941.176,00	11.250.000,47

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.760.790.938,06 terdiri atas Utang Belanja Pegawai dan Utang Belanja Barang dan Jasa. Rincian saldo Utang Belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Utang Belanja Pegawai	1.319.874.495,00	4.011.475.844,00	(2.691.601.349,00)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	440.916.443,06	159.794.000,00	281.122.443,06
	Jumlah	1.760.790.938,06	4.171.269.844,00	(2.410.478.905,94)

Rincian Utang Belanja dapat dilihat pada **Lampiran 12**

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.260.303.990,42. Adapun Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dijelaskan dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Pengadaan Aset Tetap	1.194.080.697,40
2	Utang Jangka Pendek Lainnya	10.066.223.293,02
	Jumlah	11.260.303.990,42

Di dalam nilai saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.066.223.293,02 terdapat kewajiban Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk melakukan pembayaran atas ganti rugi tanah SMPN 3 Duhiadaa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato atas sengketa sebidang tanah yang dimenangkan oleh pihak penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 206 PK/Pdt/2022 tanggal 18 April 2022, di mana dalam sidang putusan Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menyetujui akan melakukan pembayaran kepada pihak penggugat sebesar Rp1.120.000.000,00 dengan skema pembayaran akan dicicil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 13**

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Utang Kewajiban Jangka Panjang pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp143.529.966.036,53.

5.3.2.2.1 Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Jangka Panjang Lainnya merupakan Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank berupa pinjaman daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp143.529.966.036,53. Saldo tersebut merupakan jumlah kumulatif penerimaan pinjaman daerah PEN pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato dari pencairan tahap pertama hingga pencairan tahap terakhir adalah sebesar Rp147.630.822.209,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tangga Penerimaan	Nilai Penerimaan (Rp)
Pencairan Tahap I	19 Oktober 2021	38.192.264.167,00
Pencairan Tahap II	14 Desember 2021	68.746.075.501,00
Pencairan Tahap III	31 Maret 2022	40.692.482.541,00
Jumlah		147.630.822.209,00

Ketentuan pinjaman daerah PEN dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman nomor : PERJ-118/SMI/0821 tanggal 13 Agustus 2021, antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dengan PT SMI, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Keterangan
Perjanjian	Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-118/SMI/0821 tanggal 13 Agustus 2021
Pemberi pinjaman	Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Jangka waktu pinjaman	96 (sembilan puluh enam) bulan, yaitu dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kali, termasuk masa tenggang/ <i>grace period</i> pembayaran pokok pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan. Masa tenggang dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kali
Tujuan pinjaman	Membiayai kegiatan di sektor jalan dan sektor drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pohuwato
Bunga	6,19%

Namun demikian, saldo Utang Jangka Panjang Lainnya yang merupakan Kewajiban Jangka Panjang yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 merupakan saldo jumlah kumulatif penerimaan pinjaman daerah PEN pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato setelah dikurangkan dengan reklasifikasi sebagian Utang Jangka Panjang Lainnya ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp4.100.856.172,47 yang merupakan bagian pokok Utang Jangka Panjang Lainnya yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan yang tergolong Kewajiban Jangka Pendek.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Total saldo pos Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.309.506.450.885,49. Sedangkan saldo Pos Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.344.619.410.796,12 atau mengalami Penurunan sebesar Rp35.112.959.910,71

Penjelasan lebih rinci tentang akun Ekuitas diungkapkan pada Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Penjelasan masing-masing akun LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO. Saldo Pendapatan-LO TA 2022 sebesar Rp856.948.229.835,91 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pendapatan – LO	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	75.886.834.052,22	69.590.336.140,38
2	Transfer– LO	748.177.842.028,00	710.972.129.502,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	32.883.553.755,69	42.143.325.426,00
	Jumlah	856.948.229.835,91	822.705.791.068,38

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah–LO

Saldo PAD-LO Pemerintah Kabupaten Pohuwato TA 2022 sebesar Rp75.886.834.052,22 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Pajak Daerah–LO	13.928.465.823,00	12.052.273.522,00
2	Retribusi Daerah–LO	5.340.653.582,00	5.046.501.715,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO	5.432.159.923,00	2.533.990.978,00
4	Lain Lain PAD yang Sah–LO	51.185.554.724,22	49.957.569.925,38
	Jumlah	75.886.834.052,22	69.590.336.140,38

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual. Pengakuan pendapatan akrual terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada TA 2022. Nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan pada TA 2022. Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2022 sebesar Rp13.928.465.823,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	0,00	0,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	0,00	0,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	0,00	0,00
4	Pajak Air Permukaan - LO	0,00	0,00
5	Pajak Hotel–LO	189.109.125,00	128.440.060,00
6	Pajak Restoran–LO	2.586.707.767,00	2.424.629.773,00
7	Pajak Hiburan–LO	10.392.000,00	0,00
8	Pajak Reklame–LO	379.452.846,00	321.934.776,00
9	Pajak Penerangan Jalan–LO	6.742.695.091,00	4.749.721.411,00
10	Pajak Air Tanah–LO	17.778.284,00	26.327.718,00
11	Pajak Sarang Burung Walet–LO	7.556.292,00	0,00
12	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan–LO	1.879.326.791,00	2.101.667.457,00
13	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	1.194.413.521,00	1.102.728.366,00
14	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	921.034.106,00	1.196.823.961,00
	Jumlah	13.928.465.823,00	12.052.273.522,00

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.891.330.700,00	1.700.091.700,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan /kebersihan	52.500.000,00	48.540.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	86.150.000,00	95.316.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	250.390.500,00	0,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	276.605.000,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	87.316.205,00	77.426.500,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	812.450.000,00	467.600.000,00
8	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	726.049.215,00	104.016.000,00
9	Retribusi Tempat Pelelangan	702.271.500,00	572.388.500,00
10	Retribusi Terminal	246.380.000,00	146.320.000,00
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	13.910.000,00	18.100.000,00
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	132.197.000,00	41.150.000,00
13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	204.080.000,00	537.760.000,00
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	128.193.462,00	670.231.615,00
15	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan	0,00	232.637.600,00
16	Retribusi Izin Perikanan	7.435.000,00	58.318.800,00
	Jumlah	5.340.653.582,00	5.046.501.715,00

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan pendapatan dividen tunai atas penyertaan modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pohuwato pada Bank SulutGo yang diterima di Kas Daerah TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	5.432.159.923,00	2.533.990.978,00
	Jumlah	5.432.159.923,00	2.533.990.978,00

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah-LO merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Saldo Lain-Lain PAD yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp51.185.554.724,22 yang terdiri dari :

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO	13.189.766,99	0,00
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	361.051.276,00	214.341.490,53
2	Jasa Giro -LO	929.144.822,80	764.324.393,26
3	Jasa Giro - pada kas di bendahara	32.737,00	
4	Pendapatan Bunga - LO	192.539.120,22	329.612.983,60
4	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	3.058.493.586,04	1.712.429.682,50
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	0,00	32.764.255,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	383.563.344,00	238.120.808,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	94.466.082,17	33.538.385,49
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO	0,00	2.700,00
9	Pendapatan dari Pengembalian - LO	0,00	58.765.469,00
10	Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	0,00	0,00
11	Pendapatan Dari BLUD - LO	46.153.073.989,00	41.045.827.348,00
12	Pendapatan Lain-lain PAD yang sah Lainnya - LO	0,00	523.910,00
13	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan	0,00	5.527.318.500,00
	Jumlah	51.185.554.724,22	49.957.569.925,38

5.4.1.2 Pendapatan Transfer- LO

Pendapatan Transfer-LO merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato.

Komposisi Pendapatan Transfer-LO yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terdiri dari yang sudah ditentukan peruntukannya dan yang bebas digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Saldo Pendapatan Transfer-LO TA 2022 sebesar Rp748.177.842.028,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan– LO	675.713.135.450,00	641.578.017.274,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	43.213.353.000,00	42.082.902.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi -LO	29.251.353.578,00	27.311.210.228,00
	Jumlah	748.177.842.028,00	710.972.129.502,00

Penjelasan pos Pendapatan Transfer -LO dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO merupakan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil Pajak-LO, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak /Sumber Daya Alam-LO, Dana Alokasi Umum (DAU)-LO, Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO. Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO TA 2022 sebesar Rp675.713.135.450,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	11.927.907.902,00	11.930.995.048,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	3.326.147.363,00	1.997.106.047,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	481.613.630.000,00	480.667.451.199,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	178.845.450.185,00	146.982.464.980,00
	Jumlah	675.713.135.450,00	641.578.017.274,00

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO merupakan Pendapatan Transfer Pusat berupa Insentif Daerah sebesar

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Dana Insentif Daerah (DID) - LO	43.213.353.000,00	42.082.902.000,00
	Jumlah	43.213.353.000,00	42.082.902.000,00

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp29.251.353.578,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	29.251.353.578,00	27.311.210.228,00
	Jumlah	29.251.353.578,00	27.311.210.228,00

5.4.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Pemerintah Kabupaten Pohuwato TA 2022 sebesar Rp32.883.553.755,69 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Pendapatan Hibah – LO	26.328.497.343,69	22.176.935.426,00
2	Lain-lain Pendapatan – LO	6.555.056.412,00	19.966.390.000,00
	Jumlah	32.883.553.755,69	42.143.325.426,00

5.4.2 Beban-LO

Beban-LO merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Saldo Beban-LO TA 2022 sebesar Rp885.395.856.935,05 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Beban Pegawai - LO	332.604.177.076,00	320.761.144.661,00
2	Beban Persediaan	62.064.003.404,17	63.369.781.854,85
3	Beban Jasa	159.800.989.999,06	156.941.816.012,68
4	Beban Pemeliharaan	3.573.977.335,00	4.971.377.210,00
5	Beban Perjalanan Dinas	60.930.394.168,00	59.009.331.853,00
6	Beban Bunga	8.657.232.105,00	0,00
7	Beban Hibah	22.075.065.344,00	22.037.517.844,00
8	Beban Bantuan Sosial	3.392.938.826,00	0,00
9	Beban Penyisihan Piutang	382.703.548,82	473.934.417,38
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	171.206.943.981,00	155.254.404.805,80
11	Beban Transfer	57.360.484.358,00	54.692.631.853,00
12	Beban Lain-lain	3.346.946.790,00	2.187.096.905,70
	Jumlah	885.395.856.935,05	839.699.037.417,41

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai TA 2022 sebesar Rp332.604.177.076,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Beban Pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO	223.372.702.487,00	214.658.518.057,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	61.158.816.949,00	94.315.985.654,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Objektif Lainnya ASN - LO	35.404.502.739,00	0,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD - LO	11.416.756.368,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH - LO	170.472.233,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	523.588.800,00	10.084.200.950,00
7	Beban Belanja Pegawai Dana BOS - LO	557.337.500,00	1.702.440.000,00
	Jumlah	332.604.177.076,00	320.761.144.661,00

5.4.2.1.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Saldo Beban Persediaan TA 2022 sebesar Rp62.064.003.404,17 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Beban Bahan Habis Pakai	62.064.003.404,17	63.369.781.854,85
	Jumlah	62.064.003.404,17	63.369.781.854,85

5.4.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa adalah merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan jasa. Saldo Beban Jasa TA 2022 sebesar Rp159.800.989.999,06 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Beban Jasa Kantor	72.817.774.095,06	77.222.780.358,00
2	Beban Premi Asuransi	9.694.203.753,00	8.327.120.251,00
3	Beban Sewa Tanah	6.000.000,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	414.359.000,00	755.740.000,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.766.672.992,00	1.355.409.667,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	391.527.500,00	2.559.185.250,00
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	30.000.000,00	253.843.500,00

8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	157.500.000,00	158.000.000,00
9	Beban Kursus/pelatihan/sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	150.875.000,00	292.880.000,00
10	Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non PNS atas Pemungutan Retribusi	148.750.000,00	354.000.000,00
11	Beban Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	10.320.093.380,00	11.214.822.000,00
12	Beban Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	336.000.000,00	14.140.563,00
13	Beban Barang Dan Jasa BOS	15.122.207.428,00	14.347.197.632,00
14	Beban Barang Dan Jasa BLUD	48.445.026.851,00	40.086.696.791,68
	Jumlah	159.800.989.999,06	156.941.816.012,68

5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah sejumlah anggaran dana yang ditujukan untuk menjaga aset usaha agar tetap dalam kondisi optimal selama pemakaian. Saldo Beban Pemeliharaan TA 2022 sebesar Rp3.573.977.335,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Beban Pemeliharaan Tanah	145.200.000,00	146.005.123,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	1.877.239.141,00	1.255.852.417,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	717.883.885,00	1.196.344.580,00
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	833.654.309,00	2.373.175.090,00
	Jumlah	3.573.977.335,00	4.971.377.210,00

5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang diberikan kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas. Saldo Beban Perjalanan Dinas TA 2022 sebesar Rp60.930.394.168,00. dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Beban Perjalanan Dinas	60.930.394.168,00	59.009.331.853,00
	Jumlah	60.930.394.168,00	59.009.331.853,00

5.4.2.1.6 Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah. Saldo Beban Bunga TA 2022 sebesar Rp8.657.232.105,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat	8.657.232.105,00	0,00
	Jumlah	8.657.232.105,00	0,00

5.4.2.1.7 Beban Hibah-LO

Beban Hibah-LO merupakan transfer uang/barang kepada pihak lain yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Saldo Beban Hibah-LO TA 2022 sebesar Rp22.075.065.344,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.800.000.000,00	1.353.865.600,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi	19.482.883.100,00	19.891.470.000,00
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	792.182.244,00	792.182.244,00
	Jumlah	22.075.065.344,00	22.037.517.844,00

5.4.2.1.8 Beban Bantuan Sosial-LO

Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Saldo Beban Bantuan Sosial - LO TA 2022 sebesar Rp3.392.938.826,00. Rincian Beban Bantuan Sosial-LO adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada	891.246.000,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan	2.471.692.826,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	30.000.000,00	0,00
	Jumlah	3.392.938.826,00	0,00

5.4.2.1.9 Beban Penyisihan Piutang-LO

Beban Penyisihan Piutang-LO adalah beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada suatu periode tertentu. Saldo Beban Penyisihan Piutang-LO TA 2022 sebesar Rp382.703.548,82 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	328.310.737,33	473.934.417,38
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	54.392.811,49	0,00
	Jumlah	382.703.548,82	473.934.417,38

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	79.693.466,51	120.405.338,30
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	2.217.042,11	34.631.721,00
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.222.219,15	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	222.276.769,56	318.897.358,08
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	7.901.240,00	0,00
	Jumlah	328.310.737,33	473.934.417,38

5.4.2.1.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO

Beban Penyusutan digunakan untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat Aset Tetap yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat amortisasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tidak Berwujud. Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO TA 2022 sebesar Rp170.373.145.615,00. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	48.477.233.149,00	49.831.715.756,55
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.939.118.517,00	57.381.880.618,43
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	91.720.106.989,00	46.798.539.261,04
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	236.686.960,00	226.656.460,00
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	833.798.366,00	1.015.612.709,78
	Jumlah	171.206.943.981,00	155.254.404.805,80

5.4.2.1.11 Beban Transfer-LO

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan lain kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Saldo Beban Transfer TA 2022 sebesar Rp57.360.484.358,00 terdiri dari:

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.459.673.742,00	1.058.629.825,00
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	846.772.700,00	713.500.646,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	55.054.037.916,00	52.920.501.382,00
	Jumlah	57.360.484.358,00	54.692.631.853,00

5.4.2.1.12 Beban Lain-Lain-LO

Beban lain-lain adalah disebut juga pengorbanan tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan pokok usaha. Saldo Beban Lain-Lain-LO TA 2022 sebesar Rp3.346.946.790,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Beban Lain-lain	3.346.946.790,00	2.187.096.905,70
2	Beban Aset Ekstrakomtabel	0,00	0,00
3	Beban Penyisihan dana Bergulir	0,00	0,00
	Jumlah	3.346.946.790,00	2.187.096.905,70

5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Defisit dari Operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp28.447.627.099,14.

5.4.4 Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan non Operasional Tahun 2022 adalah sebesar Rp.259.769.333,01. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	267.218.000,01	0,00
2	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	7.448.667,00	0,00
	Jumlah	259.769.333,01	0,00

5.4.5 Surplus/Defisit Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa memuat kejadian yang mempunyai karakteristik :

- Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Pos Luar Biasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan Belanja Tak Terduga yang direalisasikan sebesar Rp2.310.621.929,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Beban Luar Biasa	2.310.621.929,00	1.004.458.800,00
	Jumlah	2.310.621.929,00	1.004.458.800,00

5.4.6 Surplus/Defisit LO

Defisit LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp30.498.479.695,13.

5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris. Pemerintah Kabupaten Pohuwato menyusun Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 dengan menggunakan metode langsung, dengan rincian sebagai berikut:

5.5.1 Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp100.829.013.250,43. Arus Kas Masuk berasal dari Aktivitas Operasi sebesar Rp901.902.723.505,43 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Hibah. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp801.073.710.255,00 digunakan untuk Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer.

5.5.2 Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi berupa Aset Tetap yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. Saldo arus kas bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2022 defisit sebesar Rp186.271.940.215,00 Arus Kas Masuk berasal dari Aktivitas Investasi sebesar Rp272.959.100,00 Sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp186.544.899.315,00 merupakan realisasi Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

5.5.3 Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan pengeluaran bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 surplus sebesar Rp39.216.174.319,00. Pada Tahun 2022 terdapat Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp40.692.482.541,00. Arus Kas keluar untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp1.476.308.222,00 merupakan Biaya Pengelolaan Pinjaman PEN.

5.5.4 Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah yaitu Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. Arus Kas Masuk berasal dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp62.819.393.230,01 Sedangkan Arus Kas Keluar berasal dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp62.875.010.932,66 Saldo arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp55.617.702,65

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Tahun 2022

Pada TA 2022, Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi, arus kas bersih dari Aktivitas Investasi, Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan dan arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris, menghasilkan penurunan bersih kas sebesar Rp46.282.370.283,62

5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di Bendahara Dana Kapitasi, Kas di Bendahara Dana BOS, dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Awal Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di Bendahara Dana Kapitasi, Kas di Bendahara Dana BOS, dan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 sebesar Rp75.803.454.785,92

5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di Bendahara Dana Kapitasi, Kas di Bendahara Dana BOS, dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di Bendahara Dana Kapitasi, Kas di Bendahara Dana BOS, dan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 sebesar Rp29.521.084.502,30

5.5.8 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan TA 2022 sebesar Rp510.000,00

5.5.9 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 sebesar Rp32.737,00

5.5.10 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas TA 2022 sebesar Rp29.521.084.502,30

5.6 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal sebesar Rp1.344.619.410.796,12 merupakan Ekuitas akhir TA 2021 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

5.6.2 Surplus/Defisit LO

Saldo Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah defisit sebesar Rp30.498.479.695,13.

5.6.3 Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 terdiri dari Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp4.805.000.012,68

5.6.3.1 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya terdiri dari koreksi atas saldo awal akun-akun akibat adanya perubahan kebijakan dan kesalahan pencatatan sebesar Rp4.805.000.012,68 yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Penyesuaian yang menambah Ekuitas sebesar Rp1.541.743.760,15 diuraikan sebagai berikut :

Penyisihan piutang BLUD	Rp	192.097.431,00
Utang BLUD	Rp	799.829.778,00
Denda pajak air	Rp	3.000,00
Penghapusan BMD	Rp	33.503.333,00
Piutang TGR	Rp	17.011.836,15
Aset lain TGR	Rp	499.298.382,00
Total	Rp	1.541.743.760,15 (a)

b. Penyesuaian yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp6.346.743.837,43 diuraikan sebagai berikut :

Dana BOS	Rp	8.320.283,00
Koreksi Pengakuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM	Rp	5.968.880.281,00
Penghapusan BMD	Rp	46.510.000,00
Jurnal Koreksi atas penyetoran aset lain TGR	Rp	323.033.208,83
Total	Rp	6.346.743.772,83 (b)

Koreksi Ekuitas **Rp** **(4.805.000.012,68)** (c = a - b)

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.309.315.931.088,31

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Informasi Tambahan

Menyajikan informasi tambahan yang dipandang perlu diketahui oleh *stakeholders* terutama untuk mencegah kesalahan interpretasi atas laporan keuangan.

6.2 Pengungkapan Lainnya

6.2.1. Domisili

Kabupaten Pohuwato beribukota di Marisa, terletak di Provinsi Gorontalo dan merupakan kabupaten yang baru dibentuk pada Tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 26, Tambahan Lembaran Negara No. 4269).

Kabupaten Pohuwato merupakan kabupaten pemekaran yang sebelumnya menginduk pada Kabupaten Boalemo. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 undang-undang tersebut Kabupaten Pohuwato memiliki batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.

Dari batas-batas tersebut diperkirakan Kabupaten Pohuwato memiliki luas lebih kurang 4.244,31km².

6.2.2. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022;
- d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022.
- e. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 38 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
- f. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 42 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

6.2.3. Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mencapai visi dan tujuan strategis dipimpin oleh:

- a. Bupati : Saipul A. Mbuinga
- b. Wakil Bupati : Hj. Suharsi Igrisa, S.IP, M.Si.
- c. Sekretaris Daerah : Iskandar Datau, S.Sos, Msi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan daerah dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Pohuwato menindaklanjuti ketentuan tersebut melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang mengatur bahwa Kabupaten Pohuwato memiliki 45 perangkat daerah, terdiri atas dua sekretariat, lima badan, satu inspektorat, 20 dinas, 13 kantor kecamatan, 3 kelurahan dan satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
4. Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia;

5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
6. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Inspektorat Daerah;
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Dinas Kesehatan;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
13. Dinas Sosial;
14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
16. Dinas Pangan;
17. Dinas Lingkungan Hidup;
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
20. Dinas Perhubungan;
21. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Dinas Perikanan;
26. Dinas Pertanian;
27. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
28. Satuan Polisi Pamong Praja;
29. Kecamatan Paguat;
30. Kecamatan Dengilo;
31. Kecamatan Marisa;
32. Kecamatan Duhiadaa;
33. Kecamatan Buntulia;
34. Kecamatan Patilanggio;
35. Kecamatan Randangan;
36. Kecamatan Taluditi;
37. Kecamatan Wanggarasi;
38. Kecamatan Lemito;

39. Kecamatan Popayato;
40. Kecamatan Popayato Timur;
41. Kecamatan Popayato Barat; dan
42. Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua.

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran (TA) 2022 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari LKPD Kabupaten Pohuwato TA 2022 secara keseluruhan.



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
DAFTAR PIUTANG PAJAK DAERAH DAN PIUTANG LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	Jenis Piutang	Saldo Per31 Desember'2021	Mutasi Tahun 2022		Saldo Per 31 Desember'2022	Penyisihan Piutang	Nilai Yang dapat Direalisasikan
			Penambahan	Pengurangan			
1	PAJAK DAERAH						
	- Pajak Reklame	58.116.915,00	17.124.750,00	11.472.250,00	63.769.415,00	34.066.876,25	29.702.538,75
	- Pajak Galian C	1.623.510.059,29	247.350.995,00	198.246.250,00	1.672.614.804,29	802.605.111,65	870.009.692,65
	- Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-
	- Pajak Restoran	117.346.190,00	120.650.196,00	-	237.996.386,00	12.226.440,73	225.769.945,27
	- Pajak Penerangan Jalan	440.865.087,00	651.224.339,00	440.865.087,00	651.224.339,00	3.256.121,70	647.968.217,31
	- Pajak BPHTB	20.025.000,00	-	-	20.025.000,00	10.512.500,00	9.512.500,00
	- Pajak Air Bawah Tanah	1.119.780,00	-	-	1.119.780,00	111.978,00	1.007.802,00
	- Pajak Bumi & Bangunan P2 2013	743.049.456,00	-	-	743.049.456,00	743.049.456,00	-
	- Pajak Bumi & Bangunan P2 2014	483.528.760,00	-	-	483.528.760,00	483.528.760,00	-
	- Pajak Bumi & Bangunan P2 2015	609.582.707,00	-	-	609.582.707,00	304.791.353,50	304.791.353,50
	- Pajak Bumi & Bangunan P2 2016	1.195.798.355,00	-	-	1.195.798.355,00	597.899.177,50	597.899.177,50
	- Pajak Bumi & Bangunan P2 2017	279.723.337,00	-	-	279.723.337,00	139.861.668,50	139.861.668,50
	- Pajak Bumi & Bangunan P2 2018	209.280.349,00	-	-	209.280.349,00	20.928.034,90	188.352.314,10
	- Pajak Bumi & Bangunan P2 2019	48.826.923,00	-	-	48.826.923,00	4.882.692,30	43.944.230,70
	- Pajak Bumi & Bangunan P2 2021	85.289.866,00	-	8.519.632,00	76.770.234,00	7.677.023,40	69.093.210,60
- Pajak Bumi & Bangunan P2 2022	-	182.109.315,00	-	182.109.315,00	910.546,58	181.198.768,43	
	JUMLAH PAJAK	5.916.062.784,29	1.218.459.595,00	659.103.219,00	6.475.419.160,29	3.166.307.741,00	3.309.111.419,30
2	RETRIBUSI DAERAH						
	- Jasa Ketatausahaan	3.610.800,00	-	-	3.610.800,00	3.610.800,00	-
	- Penjualan Bibit Pohon ke Pihak Ketiga	15.750.000,00	-	-	15.750.000,00	15.750.000,00	-
	-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	7.413.422,00	-	7.413.422,00	37.067,11	7.376.354,89
	-Pemakaian Kekayaan Daerah-Sewa Alat Berat	23.550.000,00	-	1.550.000,00	22.000.000,00	23.550.000,00	(1.550.000,00)
	-Pemakaian Kekayaan Daerah-Sewa Mesin	16.500.000,00	-	-	16.500.000,00	16.500.000,00	-
	-Retribusi Izin Gangguan (SIGU)	7.157.350,00	-	-	7.157.350,00	7.157.350,00	-
	-Retribusi SIUPI-SIPI	2.700.000,00	-	-	2.700.000,00	2.700.000,00	-

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
DAFTAR PIUTANG PAJAK DAERAH DAN PIUTANG LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	Jenis Piutang	Saldo Per31 Desember'2021	Mutasi Tahun 2022		Saldo Per 31 Desember'2022	Penyisihan Piutang	Nilai Yang dapat Direalisasikan
			Penambahan	Pengurangan			
	-Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.195.802,00	128.193.462,00	128.192.462,00	2.196.802,00	2.195.802,00	1.000,00
	-Retribusi Persampahan/Kebersihan	-	-	-	-	-	-
	-Retribusi Pelayanan Pasar	93.160.000,00	-	-	93.160.000,00	9.330.000,00	83.830.000,00
	-Jasa pelayanan kesehatan (JKN Non Kapitasi)	443.939.000,00	435.995.000,00	443.939.000,00	435.995.000,00	20.479.845,00	415.515.155,00
	JUMLAH RETRIBUSI	608.562.952,00	571.601.884,00	573.681.462,00	606.483.374,00	101.310.864,11	505.172.509,89
3	PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN						
	-Piutang Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	3.244.443.830,00	-	3.244.443.830,00	16.222.219,15	3.228.221.610,85
	JUMLAH PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	3.244.443.830,00	-	3.244.443.830,00	16.222.219,15	3.228.221.610,85
4	PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH						
	-Jasa Pelayanan Kesehatan	910.179.626,00	7.436.308.816,00	492.553.610,00	7.853.934.832,00	384.035.734,99	7.469.899.097,01
	-Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	11.500,00	-	-	11.500,00	-	11.500,00
	-Pendapatan Bunga	-	11.904.742,99	-	11.904.742,99	377.616,94	11.527.126,05
	JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN YG SAH	910.191.126,00	7.448.213.558,99	492.553.610,00	7.865.851.074,99	384.413.351,93	7.481.437.723,06
5	BAGI HASIL PROPINSI						
	- Bagi Hasil Propinsi	-	4.354.239.756,00	2.773.991.757,00	1.580.247.999,00	7.901.240,00	1.572.346.759,01
	JUMLAH BAGI HASIL PROPINSI	-	4.354.239.756,00	2.773.991.757,00	1.580.247.999,00	7.901.240,00	1.572.346.759,01

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
DAFTAR PIUTANG PAJAK DAERAH DAN PIUTANG LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	Jenis Piutang	Saldo Per31 Desember'2021	Mutasi Tahun 2022		Saldo Per 31 Desember'2022	Penyisihan Piutang	Nilai Yang dapat Direalisasikan
			Penambahan	Pengurangan			
6	DENDA PAJAK						
	- Denda Pajak Reklame	13.721.417,00	4.877.485,00	-	18.598.902,00	11.913.799,63	6.685.102,37
	- Denda Pajak Hotel	3.545.400,00	-	-	3.545.400,00	3.545.400,00	-
	- Denda Pajak Restoran	8.804.603,80	28.163.085,66	-	36.967.689,46	3.240.574,62	33.727.114,84
	- Denda Pajak Air Bawah Tanah	234.666,50	-	-	234.666,50	23.466,60	211.199,90
	- Denda Pajak Galian C	905.296.248,39	39.849.831,67	-	945.146.080,06	852.663.694,21	92.482.385,85
	- Denda Pajak BPHTB	6.007.500,00	-	-	6.007.500,00	3.153.750,00	2.853.750,00
	- Denda PBB-P2 Tahun 2013	222.995.908,20	-	-	222.995.908,20	222.995.908,20	-
	- Denda PBB-P2 Tahun 2014	145.058.628,00	-	-	145.058.628,00	145.058.628,00	-
	- Denda PBB-P2 Tahun 2015	182.289.880,10	-	-	182.289.880,10	182.289.880,10	-
	- Denda PBB-P2 Tahun 2016	287.070.706,40	-	-	287.070.706,40	287.070.706,40	-
	- Denda PBB-P2 Tahun 2017	83.930.961,54	-	-	83.930.961,54	41.965.480,74	41.965.480,80
	- Denda PBB-P2 Tahun 2018	62.098.751,30	-	-	62.098.751,30	31.049.375,65	31.049.375,65
	- Denda PBB-P2 Tahun 2019	14.582.879,90	-	-	14.582.879,90	1.458.287,99	13.124.591,91
	- Denda PBB-P2 Tahun 2021	5.117.391,96	17.933.493,54	-	23.050.885,50	2.305.088,55	20.745.796,95
	- Denda PBB-P2 Tahun 2022	-	3.642.186,30	-	3.642.186,30	18.210,93	3.623.975,37
	JUMLAH DENDA PAJAK	1.940.754.943,09	94.466.082,17	-	2.035.221.025,26	1.788.752.251,62	246.468.773,64
	GRAND TOTAL PIUTANG	9.375.571.805,38	16.931.424.706,16	4.499.330.048,00	21.807.666.463,54	5.464.907.667,80	16.342.758.795,74

Marisa, 28 Juli 2023
BUPATI

SAIPUL A. MBUINGA

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
DAFTAR PIUTANG LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Saldo Per31 Desember'2021	MUTASI 2022		SALDO PER 31 DES 2022	PENYISIHAN PIUTANG	NILAI YANG DAPAT DIREALISASIKAN
		BERTAMBAH	BERKURANG			
DANA LUEP						
- Dana LUEP (Pertanian)	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	45.000.000,00	-
JUMLAH	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	45.000.000,00	-
DENDA DANA LUEP						
- Denda Dana LUEP	7.300.000,00	-	-	7.300.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
JUMLAH	7.300.000,00	-	-	7.300.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
GRAND TOTAL	52.300.000,00	-	-	52.300.000,00	48.650.000,00	3.650.000,00



Marisa, 28 Juli 2023

BUPATI

SAIPUL A. MBUINGA

KABUPATEN POHUWATO
DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	SALDO AKHIR PENYISIHAN PIUTANG
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	6.475.419.160,29	(3.166.307.741,00)	3.309.111.419,30
2	Penyisihan Piutang Retribusi	606.483.374,00	(101.310.864,11)	505.172.509,89
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.865.851.074,99	(384.413.351,93)	7.481.437.723,06
4	Penyisihan Piutang dari Bagi Hasil Provinsi	1.580.247.999,00	(7.901.240,00)	1.572.346.759,01
6	Penyisihan Piutang TGR	-	-	-
7	Penyisihan Piutang Lainnya	45.000.000,00	(45.000.000,00)	-
8	Penyisihan Piutang Denda Pajak	2.035.221.025,26	(1.788.752.251,62)	246.468.773,64
9	Penyisihan Denda Piutang Lainnya	7.300.000,00	(3.650.000,00)	3.650.000,00
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG		(5.497.335.448,65)	13.118.187.184,89

Marisa, 28 Juli 2023

BUPATI

SAIPUL A. MBUINGA

KABUPATEN POHUWATO
DAFTAR INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR)
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Diterima Kembali Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12
1	2005	Dinas Nakertrans	SK Bupati	Bantuan Penguatan Modal	250.000.000	250.000.000	-	250.000.000	-	-	-
2	2005	Dinas Perindagkop	SK Bupati	Bantuan Penguatan Modal	215.000.000	215.000.000	-	215.000.000	-	-	-
3	2006	Dinas Perindagkop	SK Bupati	Dana Bergulir Masyarakat	760.000.000	760.000.000	-	760.000.000	-	-	-
4	2007	Dinas Perindagkop	SK Bupati	Bantuan Penguatan Modal	992.500.000	992.500.000	-	992.500.000	-	-	-
5	2008	Dinas Perindagkop	SK Bupati	Dana Bergulir Masyarakat	550.000.000	550.000.000	-	550.000.000	-	-	-
6	2017	Dinas Perindagkop		Koreksi Penyetoran Dana Bergulir Koreksi Saldo Awal			(51.196.265)	(51.196.265)			
7	2017	Dinas Perindagkop		Investasi Non			(1.450.000)	(1.450.000)			
8	2014	Penyisihan Dana Bergulir						(2.083.887.900,00)			
9	2014	Penyisihan Dana Bergulir						(198.394.000,00)			
10	2015	Penyisihan Dana Bergulir						(173.962.072,00)			
11	2015	Penyisihan Dana Bergulir						10.476.680,00			
12	2016	Penyisihan Dana Bergulir						(182.343.950)			
13	2016	Penyisihan Dana Bergulir						(20.953.360)			
14	2016	Penyisihan Dana Bergulir						75.915.470			
15	2016	Penyisihan Dana Bergulir						347.924.144			
16	2017	Penyisihan Dana Bergulir						(20.787.215)			
17	2017	Penyisihan Dana Bergulir						3.326.750			
18	2017	Penyisihan Dana Bergulir						11.832.761			
19	2018	Dinas Perindagkop						55.897.265			
20	2018	Dinas Perindagkop						(5.201.000)			

KABUPATEN POHUWATO
 DAFTAR INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR)
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tahun Penyeretaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyeretaan Modal	Bentuk Penyeretaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyeretaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyeretaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyeretaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Diterima Kembali Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12
21	2018	Dinas Perindagkop						(275.603.468)			
22	2018	Dinas Perindagkop						(96.257.575)			
23	2018	Dinas Perindagkop						(162.836.265)			
								-			

Marisa, 28 Juli 2023

BUPATI



SAIPUL A. MBUINGA

(Handwritten signature in blue ink)

KABUPATEN POHUWATO
DAFTAR INVESTASI PERMANEN (PENYERTAAN MODAL)
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tahun Penyerahan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyerahan Modal	Bentuk Penyerahan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyerahan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyerahan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyerahan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Diterima Kembali Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12
1	2006	BUMD	Akta Notaris & SK Bupati	Saham	249.900.000	249.900.000	.	249.900.000	.	.	.
2	2007	BANK SULUT	Akta Notaris & SK Bupati	Saham	500.000.000	500.000.000	.	500.000.000	.	.	.
3	2008	BANK SULUT	PERDA	Saham	3.000.000.000	3.000.000.000	.	3.000.000.000	.	.	.
4	2008	BANK SULUT	Akta Notaris	Saham	1.000.000	1.000.000	.	1.000.000	.	.	.
5	2009	BANK SULUT	PERDA	Saham	1.000.000.000	1.000.000.000	.	1.000.000.000	.	.	.
6	2010	BANK SULUT (DSM)	Akta Notaris	Saham	251.600.000	251.600.000	.	251.600.000	.	.	.
7	2011	BANK SULUT (DSM)			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	.	1.000.000.000,00	.	.	.
8	2011	PDAM			509.055.227,00	509.055.227,00	.	509.055.227,00	.	.	.
9	2011	BANK SULUT (DSM)			200.000.000,00	200.000.000,00	.	200.000.000,00	.	.	.
10	2012	BANK SULUT (DSM)			2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	.	2.000.000.000,00	.	.	.
11	2012	PDAM			349.690.744,00	349.690.744,00	.	349.690.744,00	.	.	.
12	2012	PDAM			500.000.000,00	500.000.000,00	.	500.000.000,00	.	.	.
13	2012	PDAM			650.176.575,00	650.176.575,00	.	650.176.575,00	.	.	.
14	2012	Kekurangan pemb rek listrik			2.130.357.068,99	2.130.357.068,99	.	2.130.357.068,99	.	.	.
15	2012	Peny. Penyerahan Modal					.	(10.513.868,00)	.	.	.
16	2012	PDAM					.	(344.071.906,00)	.	.	.
17	2013	PDAM				2.000.000.000,00	.	2.000.000.000,00	.	.	.
18	2013	Penyesuaian PDAM					.	(2.369.398.167,24)	.	.	.
19	2013	BANK SULUT				2.000.000.000,00	.	2.000.000.000,00	.	.	.
20	2013	BANK SULUT				606.657.768,00	.	606.657.768,00	.	.	.
21	2013	BANK SULUT				846.400.000,00	.	846.400.000,00	.	.	.
22	2014	Penyesuaian PDAM					.	(650.251.402,29)	.	.	.
23	2014	BANK SULUT				1.468.206.000,00	.	1.468.206.000,00	.	.	.
24	2015	BANK SULUT					.	1.732.300.000,00	.	.	.
25	2015	PDAM					.	2.633.874.981,51	.	.	.
26	2016	BANK SULUT					3.354.700.000	3.354.700.000,00	.	.	.
27	2016	PDAM					4.580.263.586,31	4.580.263.586,31	.	.	.
28	2016	PDAM					(822.591.227,35)	(822.591.227,35)	.	.	.
29	2016	PDAM					14.767.436.456	14.767.436.456,45	.	.	.
30	2016	BUMD					(469.293.102)	(469.293.102,00)	.	.	.
31	2017	PDAM					3.000.000.000	3.000.000.000,00	.	.	.
32	2017	PDAM					(9.790.219.752)	(9.790.219.752,45)	.	.	.
33	2017	BUMD					469.293.102	469.293.102,00	.	.	.
34	2017	BUMD					(405.828.094)	(405.828.094,00)	.	.	.
35	2018	PDAM					6.000.000.000	6.000.000.000,00	.	.	.

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Diterima Kembali Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12
36	2018	PDAM					(8.287.767.330)	(8.287.767.329,51)			
37	2018	PDAM					(1.035.601.524)	(1.035.601.523,69)			
38	2018	PDAM					(1.855.798.775)	(1.855.798.775,36)			
39	2019	BANK SULUT					1.000.000.000	1.000.000.000,00			
40	2019	PDAM					6.000.000.000	6.000.000.000,00			
41	2019	PDAM					94.772.822.014,00	94.772.822.014,00			
42	2019	PDAM					(43.688.887.832)	(43.688.887.832,37)			
43	2020	PDAM					5.411.548.814,00	5.411.548.814,00			
44	2021	PDAM					4.505.028.393,00	(4.505.028.393,00)			
45	2022	PDAM					5.968.880.281,00	(5.968.880.281,00)			
								82.781.150.683,00			

Marisa, 28 Juli 2023

BUPATI

SAIFUL A. MBUINGA



KABUPATEN POHUWATO
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Dinas Pendidikan	196.191.202.199,19	39.093.327.709,00	34.601.950.092,00	200.682.579.816,19
2	Dinas Kesehatan	155.643.234.624,94	3.763.327.101,00	17.051.291.453,00	142.355.270.272,94
3	Rumah Sakit Umum Daerah	79.362.823.769,03	2.344.452.058,00	27.405.375.243,00	54.301.900.584,03
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	458.630.745.402,60	342.635.858.611,00	276.237.992.823,00	525.028.611.190,60
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	45.410.948.353,03	100.812.080,00	2.452.336.176,00	43.059.424.257,03
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.170.822.487,00	0,00	152.794.138,00	1.018.028.349,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	650.928.755,00	0,00	108.935.165,00	541.993.590,00
8	Dinas Sosial	2.095.237.116,42	14.970.000,00	255.502.254,00	1.854.704.862,42
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.519.485.489,08	3.452.314.000,00	1.915.602.162,00	3.056.197.327,08
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.033.898.893,14	1.781.233.593,00	1.448.869.688,00	8.366.262.798,14
11	Dinas Pangan	1.665.460.704,00	0,00	138.024.012,00	1.527.436.692,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	26.739.742.760,26	0,00	1.679.299.035,00	25.060.443.725,26
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.467.595.509,30	6.993.000,00	294.833.653,00	1.179.754.856,30
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.486.383.549,92	0,00	156.939.682,00	1.329.443.867,92
15	Dinas Perhubungan	23.972.548.203,94	2.379.967.618,00	4.132.867.823,00	22.219.647.998,94

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4+5
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.308.134.211,60	199.595.000,00	473.460.127,00	1.034.269.084,60
17	Dinas Penanaman Modal	1.216.060.522,00	45.910.500,00	169.055.579,00	1.092.915.443,00
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	11.415.082.649,33	6.085.000,00	734.569.847,00	10.686.597.802,33
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.826.801.380,00	725.524.532,00	694.660.570,00	7.857.665.342,00
20	Dinas Perikanan	13.666.431.981,22	449.879.000,00	1.063.517.266,00	13.052.793.715,22
21	Dinas Pertanian	42.830.311.728,77	8.737.168.490,00	7.921.641.781,00	43.645.838.437,77
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	47.148.216.395,06	9.100.372.134,00	3.566.117.158,00	52.682.471.371,06
23	Sekretariat Daerah	29.147.401.888,13	3.258.093.133,69	4.026.712.066,00	28.378.782.955,82
24	Inspektorat Daerah	1.540.027.947,00	141.105.300,00	234.377.469,00	1.446.755.778,00
25	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	3.928.129.246,80	13.500.000,00	286.102.191,00	3.655.527.055,80
26	Badan Keuangan Daerah	10.100.084.021,83	1.615.338.843,00	2.532.902.080,00	9.182.520.784,83
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.233.776.807,09	74.180.000,00	309.948.302,00	3.998.008.505,09
28	Sekretariat DPRD	10.526.808.353,80	466.295.000,00	1.705.362.371,00	9.287.740.982,80
29	Kecamatan Paguat	4.079.429.810,69	733.381.689,00	405.306.099,00	4.407.505.400,69
30	Kecamatan Dengilo	1.834.537.418,26	8.039.000,00	151.145.704,00	1.691.430.714,26
31	Kecamatan Marisa	2.671.127.092,65	7.050.000,00	208.509.092,00	2.469.668.000,65
32	Kecamatan Duhiaadaa	1.439.956.372,84	0,00	123.010.257,00	1.316.946.115,84
33	Kecamatan Buntulia	1.417.420.636,60	0,00	124.348.156,00	1.293.072.480,60
34	Kecamatan Patilanggio	964.750.765,42	0,00	79.995.137,00	884.755.628,42

NO 1	SKPD 2	SALDO AWAL 3	PENAMBAHAN 4	PENGURANGAN 5	SALDO AKHIR 6=3+4+5
35	Kecamatan Randangan	1.978.002.718,23	104.364.500,00	191.862.280,00	1.890.504.938,23
36	Kecamatan Taluditi	819.907.190,07	0,00	102.308.344,00	717.598.846,07
37	Kecamatan Wanggarasi	1.338.436.845,71	0,00	126.236.684,00	1.212.200.161,71
38	Kecamatan Lemito	1.457.784.732,44	0,00	143.698.694,00	1.314.086.038,44
39	Kecamatan Popayato	1.560.250.020,45	12.126.750,00	142.185.586,00	1.430.191.184,45
40	Kecamatan Popayato Timur	1.292.867.477,96	0,00	121.101.171,00	1.171.766.306,96
41	Kecamatan Popayato Barat	1.473.888.186,68	0,00	122.462.538,00	1.351.425.648,68
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	572.544.944,43	0,00	93.349.864,00	479.195.080,43
	JUMLAH	1.211.829.229.161,91	421.271.264.641,69	393.886.559.812,00	1.239.213.933.991,60




KABUPATEN POHUWATO
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2021	Mutasi		Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	96.623.208.962,04	603.105.790,00	324.629.255,00	96.901.685.497,04
2	Peralatan dan Mesin	464.346.364.976,70	25.504.615.531,00	17.901.084.351,00	471.949.896.156,70
3	Gedung dan Bangunan	683.929.452.231,76	32.622.695.382,00	3.043.234.138,00	713.508.913.475,76
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.130.084.331.614,78	201.271.275.719,69	1.269.376.179,00	1.330.086.231.155,47
5	Aset Tetap Lainnya	53.923.254.243,30	4.681.337.518,00	2.244.915.239,00	56.359.676.522,30
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	65.743.827.207,00	153.946.309.357,00	198.730.175.035,00	20.959.961.529,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.282.821.210.073,67)	(170.373.145.615)	(2.641.925.344,00)	(1.450.552.430.344,67)
JUMLAH		1.211.829.229.161,91	248.256.193.682,69	220.871.488.853,00	1.239.213.933.991,60

Marisa, 28 Juli 2023

BUPATI

SAIPULA MBUINGA

KABUPATEN POHUWATO
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2022

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
			BERTAMBAH				BERKURANG						
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN MESIN			
1	DINAS PEKERJAAN UMUM	65.442.986.208,00			16.380.829.830,00					61.164.695.508,00			20.659.120.530,00
3	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	39.930.000,00											39.930.000,00
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	147.580.000,00											147.580.000,00
6	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK	49.800.000,00											49.800.000,00
9	DINAS PERTANIAN	33.891.000,00											33.891.000,00
10	DINAS KESEHATAN	29.639.999,00											29.639.999,00
	JUMLAH	65.743.827.207,00	0,00	0,00	16.380.829.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.164.695.508,00	0,00	0,00	20.959.961.529,00

BUPATI POHUWATO
SAIPUD A. MBUINGA



KABUPATEN POHUWATO
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2022

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	Dinas Pendidikan	11.842.262.808,04	61162285,00	69442285,00	11.833.982.808,04
2	Dinas Kesehatan	13.872.935.113,00	0,00	0,00	13.872.935.113,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	558.763.839,00	5010862725,00	0,00	5.569.626.564,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.783.582.319,22	2977876785,00	557914044,00	21.203.545.060,22
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	94.486.167,00	0,00	86.694.500,00	7.791.667,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	106.327.500,00	0,00	0,00	106.327.500,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	63.931.290,00	0,00	0,00	63.931.290,00
8	Dinas Sosial	82.777.914,00	0,00	9.900.000,00	72.877.914,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	359.943.000,00	0,00	0,00	359.943.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21.650.457,00	0,00	0,00	21.650.457,00
11	Dinas Pangan	36.577.500,00	0,00	0,00	36.577.500,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.111.624.545,09	0,00	0,00	1.111.624.545,09
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	456.712.401,00	0,00	16.000.000,00	440.712.401,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.491.666,00	0,00	0,00	7.491.666,00
15	Dinas Perhubungan	1.683.822.107,00	99.972.150,00	43.833.522,00	1.739.960.735,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.216.133,00	0,00	0,00	3.216.133,00
17	Dinas Penanaman Modal	31.546.758,00	64.713.000,00	9.047.133,00	87.212.625,00
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.167.816,00	0,00	0,00	1.167.816,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	39.305.501,00	0,00	28.960.000,00	10.345.501,00
20	Dinas Perikanan	1.976.647.852,00	0,00	-	1.976.647.852,00
21	Dinas Pertanian	12.108.447.174,00	0,00	24.096.000,00	12.084.351.174,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.878.238.885,00	0,00	0,00	1.878.238.885,00
23	Sekretariat Daerah	3.355.216.254,00	0,00	5.825.000,00	3.349.391.254,00
24	Inspektorat Daerah	163.040.000,00	0,00	0,00	163.040.000,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
25	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	1.043.676.400,00	0,00	0,00	1.043.676.400,00
26	Badan Keuangan Daerah	3.859.110.382,10	1.946.138.598,00	420.853.375,83	5.384.395.604,27
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	576.243.999,00	0,00	0,00	576.243.999,00
28	Sekretariat DPRD	1.428.962.030,00	0,00	0,00	1.428.962.030,00
29	Kecamatan Paguat	1.010.688.077,00	0,00	0,00	1.010.688.077,00
30	Kecamatan Dengilo	93.376.250,00	0,00	0,00	93.376.250,00
31	Kecamatan Marisa	20.173.000,00	0,00	0,00	20.173.000,00
32	Kecamatan Duhiadaa	145.335.813,00	0,00	0,00	145.335.813,00
33	Kecamatan Buntulia	154.847.500,00	0,00	0,00	154.847.500,00
34	Kecamatan Patilanggio	528.630.333,00	0,00	0,00	528.630.333,00
35	Kecamatan Randangan	1.123.332,00	0,00	0,00	1.123.332,00
36	Kecamatan Taluditi	911.212.500,00	0,00	0,00	911.212.500,00
37	Kecamatan Wanggarasi	180.523.746,00	0,00	0,00	180.523.746,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
38	Kecamatan Lemito	242.531.458,00	0,00	0,00	242.531.458,00
39	Kecamatan Popayato	159.450.000,00	0,00	0,00	159.450.000,00
40	Kecamatan Popayato Timur	166.698.600,00	0,00	0,00	166.698.600,00
41	Kecamatan Popayato Barat	216.659.991,00	0,00	0,00	216.659.991,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	113.181.041,00	0,00	0,00	113.181.041,00
	JUMLAH	79.492.139.451,45	10.160.725.543,00	1.272.565.859,83	88.380.299.134,62

Marisa, 28 Juli 2023

BUPATI



SAIPUL A. MBUINGA

KABUPATEN POHUWATO
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH PER 31
DESEMBER 2022

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Marisa, 28 Juli 2023

BUPATI



SAIPUL A. MBUNGA

KABUPATEN POHUWATO
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK PER 31
DESEMBER 2022

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Perhitungan Pihak Ketiga	142.871.572,05	62.819.393.230,01	62.875.010.868,06	87.253.934,00
2	Utang Pengadaan Aset Tetap	2.848.486.325,95	182.398.837.908,00	180.744.432.276,00	2.848.486.325,95
3	Utang Beban	4.171.269.844,00	1.760.790.938,06	4.171.269.844,00	1.760.790.938,06

Marisa, 28 Juli 2023

BUPATI

SAIPUL A. MBUINGA

KABUPATEN POHUWATO
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Utang jangka panjang lainnya	143.529.966.036,53
2		
3		
	JUMLAH	143.529.966.036,53

Marisa, 28 Juli 2023

BUPATI

SAIPUL A. MBUINGA



KABUPATEN POHUWATO

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 DAN DIANGGARKAN KEMBALI
DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KONTRAK	REALISASI	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI
1	DINAS PEKERJAAN UMUM	Penggantian jembatan Huyula 4 (DAK Reguler)	7.096.403.000,00	6.741.582.850	354.820.150
		Pemeliharaan Jembatan Desa Panca karsa 1	174.760.000,00	166.022.000	8.738.000
		Pemeliharaan Jembatan Panca Karsa 2	99.720.000,00	94.734.000	4.986.000
		Pemeliharaan Plat Duiker Desa Bunto Dusun Tayomo	99.800.000,00	94.810.000	4.990.000
		Rehabilitasi Jembatan Desa Malango	99.700.000,00	94.715.000	4.985.000
		Pemeliharaan Jalan Desa Malango	99.751.000,00	94.763.450	4.987.550
		Pemeliharaan Jalan Panca Karsa I - Panca karsa II	74.860.000,00	71.117.000	3.743.000
		Pemeliharaan Jalan Sp3 Trans - Desa Tuweya Bohusami	160.150.000,00	152.142.500	8.007.500
		Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Hulawa	199.790.000,00	189.800.500	9.989.500
		Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai Bulangita Kec. Marisa	149.838.000,00	142.346.100	7.491.900
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Taluditi (DAK Penugasan)	1.786.184.648,00	1.696.875.416	89.309.232
		Pembuatan Drainase Dusun III Desa Popayato	49.923.000,00	47.426.850	2.496.150
		Pembuatan Lanjutan Drainase Dusun III Desa Soginti Kec. Paguat	99.860.000,00	94.867.000	4.993.000
		Pemeliharaan Rudis Wakil Bupati	149.896.000,00	142.401.200	7.494.800
		Pengadaan/Pemasangan Jaringan Listrik Tenaga Rendah (TR) Kantor Camat Buntulia	74.930.000,00	71.183.500	3.746.500
		Penimbunan Halaman Kantor KUA	99.000.000,00	94.050.000	4.950.000

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KONTRAK	REALISASI	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI
		Pengadaan/Pemasangan jaringan Listrik Tenaga Rendah (TR) Desa Hutino	123.588.000,00	111.229.200	12.358.800
		Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik TR SP 4 Kantor Camat Marisa SLB	69.900.000,00	66.405.000	3.495.000
		Pembangunan plat duker Ruas Jalan Botubilotahu	199.464.386,00	189.491.167	9.973.219
		Pekerjaan Pematang Lahan SMPN Wanggarasi	39.972.000,00	37.973.400	1.998.600
		Pekerjaan Pemeliharaan Gedung CAT BKPPD	49.885.000,00	47.390.750	2.494.250
		Pekerjaan Pemeliharaan Mesjid Agung Pohuwato	49.833.000,00	47.341.350	2.491.650
		Pekerjaan Pemeliharaan Parkir Polres Pohuwato	97.648.000,00	92.765.600	4.882.400
		Pekerjaan Penggantian Jembatan Taluduyunu - Hulawa	2.372.344.000,00	2.253.726.800	118.617.200
		Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Marisa IV	4.868.973.112,00	4.625.524.456	243.448.656
		Pekerjaan Penambahan Jaringan Pipa Transmisi SPAM Dusun Sandalan	65.379.000,00	62.110.050	3.268.950
		JUMLAH	18.451.552.146,00	17.522.795.139,00	928.757.007,00
2	DINAS PENDIDIKAN	Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta Perabotnya SMPN Islam Nurul Quran (DAK Reguler)	455.809.000	433.018.550	22.790.450
		Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta Perabotnya SMPN Negeri 2 Wanggarasi (DAK Regular)	470.607.000	447.076.650	23.530.350
		Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SMPN 3 Lemito Satu Atap (DAK Regular)	462.522.000	439.395.900	23.126.100
		JUMLAH	1.388.938.000	1.319.491.100	69.446.900
4	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Poskesdes Yipilo (DAK)	229.272.727	217.809.091	11.463.636
		Pembangunan Poskesdes Yipilo (Pendamping DAK)	22.927.273	21.780.915	1.146.358
		Pembangunan Kantor PPLKB/UPT-KB Kecamatan Randangan (DAK)	120.862.727	114.819.587	6.043.140
		Pembangunan Kantor PPLKB/UPT-KB Kecamatan Randangan (Pendamping DAK)	12.086.273	11.481.959	604.314

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KONTRAK	REALISASI	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI
		JUMLAH	385.149.000	365.891.552	19.257.448
5	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	Pembuatan Septik Skala Individual desa Tuweya (220 jiwa-55 Unit) (DAK Aff Sanitasi)	272.897.440	259.252.568	13.644.872
		Pembuatan Septik Skala Individual desa Bukit Harapan (232 jiwa) (DAK Aff Sanitasi)	272.897.440	259.252.568	13.644.872
		JUMLAH	545.794.880	518.505.136	27.289.744
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Pembangunan Tempat Parkir	74.751.845	71.014.253	3.737.592
		JUMLAH	74.751.845	71.014.253	3.737.592
		JUMLAH	20.846.185.871	19.797.697.180	1.048.488.692

Marisa, 28 Juli 2023

BUPATI

SAIPUL A. MBUINGA



KABUPATEN POHUWATO
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17x18
1	PDAM TIRTA MALEO			11.729.614.300,00	58.341.989.128,00	0,00	70.071.603.428,00	441.182.202,00	0,00	441.182.202,00	120.622.998.589,00							

Marisa, 28 Juli 2023

BUPATI



SAIPUL A. MBUINGA

KABUPATEN POHUWATO

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No	BUMD / Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PDAM TIRTA MOOLANGO			11.854.747.061,00	17.434.797.298,00	(5.580.050.237,00)		(272.361.297,00)	(5.852.411.534,00)

Marisa, 28 Juli 2023

BUPATI

SAIPUL A. MBUINGA

